

KOTA DAN KABUPATEN DALAM LINTASAN

BANTEN
LEBAK
SUBANG
KUNINGAN

SEJARAH

Editor

Drs. Heru Erwantoro
Drs. Sindu Galba

Rektorat
Pelayanan



DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BANDUNG

NO. 173.

Hadiah

Plak milik bit.tra

300-0000

1001

**KOTA DAN
KABUPATEN
DALAM
LINTASAN**

**BANTEN
LEBAK
SUBANG
KUNINGAN**



Kota dan Kabupaten dalam Lintasan Sejarah
(Banten, Lebak, Subang, dan Kuningan) / editor,
Heru Erwantoro ... [et al.]. -- Bandung : Balai
Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2006.

xii + 286 hlm.; 21 cm. (termasuk Bibliografi)

ISBN 979-1142-00-9

I. Banten -- Sejarah.

I. Heru Erwantoro.

II. Sindu Galba.

306

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KOTA DAN KABUPATEN DALAM LINTASAN

BANTEN
LEBAK
SUBANG
KUNINGAN



Editor

**Drs. Heru Erwantoro
Drs. Sindu Galba**



**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BANDUNG**



*Kota dan Kabupaten dalam Lintasan Sejarah
(Banten, Lebak, Subang, dan Kuningan)*

© Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Editor Drs. Heru Erwantoro & Drs. Sindu Galba

Diterbitkan oleh

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Jl. Cinambo 136
Telp. /Faks. (022) 780 4942
Ujungberung - Bandung 40294

Cetakan Pertama, Sya'ban 1427 H./ Agustus 2006


Desain

Abdul Ajiez Muslim, Taufik Hidayat

Dicetak oleh

ALQAPRINTJATINANGOR
Jalan Raya Cibeusi Kawasan Pendidikan Jatinangor
Telp./Faks. (022) 778 16 45 - 081 82 042 63
Sumedang 45363 / Bandung 40600
Isi di luar tanggung jawab percetakan

SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM

 alai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Bandung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film yang mempunyai wilayah kerja, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Lampung. Tugas dan fungsi BKSNT Bandung adalah meliputi pengamatan, penginventarisasian, penelitian, pendokumentasian dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian serta perekaman di bidang sejarah dan nilai tradisional.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka lembaga ini mempunyai berbagai kegiatan yang berkenaan dengan kesejarahan dan kenilai tradisional di wilayah kerjanya. Salah satu di antaranya adalah penyebarluasan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para tenaga fungsional (penelitinya). Ini penting agar hasil-hasil penelitian yang masih berupa naskah tidak disimpan di rak-rak buku sebagai “pajangan” tetapi hasilnya harus disebarluaskan ke masyarakat luas. Salah satu cara adalah dengan menerbitkan, kemudian menyebarkan, sehingga masyarakat yang diteliti dan masyarakat luas

mengetahui apa yang menjadi permasalahannya, baik yang berkenaan dengan kesejarahan ataupun kenilaitradisional.

Sehubungan dengan itu, kami dapat menyambut baik terbitnya buku ini.



Jakarta, Agustus 2006

Direktur Tradisi Direktorat Jenderal
Nilai Budaya, Seni dan Film,

I G. N. Widja, S.H.

NIP. 130 606 820

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Daftar Isi	ii

SEJARAH KOTA BANTEN LAMA DI PROPINSI BANTEN

<i>Oleh : Dra. Lasmiyati, dkk.</i>	1
--	---

Bab I Pendahuluan

3

a. Latar Belakang Masalah	3
b. Permasalahan	5
c. Tujuan Penelitian	6
d. Ruang Lingkup	6
e. Metode Penelitian	6
f. Sistematika Penulisan	7

Bab II Terbentuknya Kota Banten Lama

8

a. Banten sebagai Kota Pelabuhan	8
b. Datangnya Islam ke Banten	13
c. Terbentuknya Kota Banten Lama tanggal 8 Oktober 1526	19

Bab III Kejayaan Kota Banten Lama

31

a. Kedatangan Belanda di Banten	31
b. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap Belanda	39
c. Perlawanan Syeh Yusuf	51

Bab IV Runtuhnya Kota Banten Lama dan Perubahan Administrasi Wilayah	53
a. Hancurnya Kota Banten Lama.	53
b. Perubahan Wilayah Administrasi	62
Bab V Penutup	69
Daftar Pustaka	71

SEJARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK

Oleh : Drs. M. Halwi Dahlan, dkk. 73

Bab I Pendahuluan	75
a. Latar Belakang	75
b. Masalah dan Batasan Masalah	77
c. Tujuan	78
d. Metodologi	79
e. Sistematika Pelaporan	80
Bab II Profil Kabupaten Lebak	81
a. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Lebak	81
b. Identifikasi Kabupaten Lebak	82
c. Gambaran Umum Pelita	87
Bab III Pembangunan Lima Tahun Kelima	90
a. Permasalahan	91
b. Arah dan Kebijakan Pembangunan	99
c. Hasil yang Dicapai	105
Bab IV Pembangunan Lima Tahun Keenam	110
Bab V Pembangunan dalam Masa Reformasi	116
Bab VI Penutup	122
Daftar Pustaka	124

SEJARAH KABUPATEN SUBANG

Oleh : Drs. H. Iwan Roswandi, dkk. 125

Bab I	Pendahuluan	127
a.	Latar Belakang Masalah	127
b.	Permasalahan	128
c.	Tujuan Penelitian	129
d.	Ruang Lingkup	129
e.	Metode Penelitian	130
f.	Sistematika Penulisan	131
Bab II	Profil Sosial Ekonomi Kabupaten Subang	132
a.	Profil Ekonomi Kabupaten Subang	133
b.	Profil Sosial Kabupaten Subang	141
Bab III	Peninggalan Sejarah di Kabupaten Subang	157
a.	Tinggalan Arkeologis	157
b.	Makam-makam Bersejarah	163
c.	Tinggalan Berupa Mata Uang	167
d.	Peninggalan Berupa Bangunan/Monumen	169
e.	Peristiwa Sejarah	173
f.	Tokoh Kabupaten Subang	213
Bab IV	Penutup	230
	Daftar Pustaka	232

SEJARAH KABUPATEN KUNINGAN

Oleh : Dra. Euis Thresnawati, dkk. 233

Bab I	Pendahuluan	235
a.	Latar Belakang Masalah	235
b.	Perumusan Masalah	236
c.	Tujuan Penelitian	237
d.	Ruang Lingkup	237

e.	Metode Penelitian	237
f.	Sistematika Penulisan	238
Bab II	Profil Kabupaten Kuningan	239
a.	Gambaran Umum	239
b.	Kependudukan	241
c.	Arti dan Lambang daerah Kabupaten Kuningan	243
d.	Potensi Pariwisata	245
e.	Potensi Ekonomi, Sosial dan Budaya	251
Bab III	Terbentuknya Kabupaten Kuningan	255
a.	Kuningan dari Masa Kemasa	255
b.	Proses Terbentuknya Kabupaten Kuningan	269
c.	Kuningan Setelah Menjadi Kabupaten	276
d.	Nama Kepala Pemerintahan Kuningan	279
Bab IV	Penutup	281
Daftar Pustaka	283

Sejarah Kota Banten Lama di Propinsi Banten

Ketua

Dra. Lasmiyati

Anggota

Drs. Adeng

Dra. Euis Thresnawati

Dra. Lina Herlinawati

Drs. Yudi Putu Satriadi

Drs. Sindu Galba

File [D : AlqaPrint\ pmd]

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KOTA, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dapat diartikan sebagai daerah perkampungan yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat (Tim Penyusun Kamus, 1990:463). Adapun “kota”, menurut Haryoto Kunto adalah gundukan masal dari pada penduduk yang tidak agraris, dengan penghidupan ekonomis yang diatur secara rasionil dan kurang menunjukkan ikatan kelompok seperti di desa-desa. Karena lingkungan hidupnya (ekologis itu), maka penduduk kota berjiwa sangat mobil, yang membuat kebudayaan kota pada umumnya menjadi sangat minim. (Dr. P.J Bouman, “*Sosiologi, begrippen en problemen*”, N.V Dekker dan Van de Vegt, Nijmegen, 1950, yang dikutip Haryoto Kunto)

Penulisan masalah “kota” masih jarang dilakukan, kalau pun ada, itu hanya tulisan mengenai kota-kota daerah setempat yang diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Jakarta.

Menurut pendapat Haryoto Kunto, penulisan “sejarah kota” sebenarnya masih tergolong langka dan jarang dilakukan orang. Kalaupun ada garapan penelitian dan penulisan sejarah kota umumnya dilakukan oleh kaum Kolonial Belanda hal senada juga diungkapkan oleh Daldjoeni, bahwa studi tentang kota-kota di Jawa, jumlahnya hanya sedikit. Seperti Van Mook (1926) yang menulis mengenai “Kota Gede” (di Tenggara Kota Yogyakarta), kemudian Willmoottt (1960), menstudi Bagian Kota Semarang yang dihuni Kaum Cina, serta

Geertz yang menulis mengenai kota-kota di Jawa. Padahal apabila menyoroti sejarah kota, sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji, seperti yang diungkapkan Kuntowidjojo, bahwa pada abad ke-20, sebuah kota Indonesia yang ideal akan mempunyai ciri-ciri tersendiri yang sekaligus menunjukkan sejarah kota itu.

1. Sektor kota tradisional yang ditandai dengan pembagian spatial yang jelas berdasarkan status sosial dan dekatnya kedudukan pemukim dengan keraton.
2. Sektor pedagang asing, terutama pedagang Cina, yang mewarnai kehidupan kota dengan gaya bangunan, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosialbudaya tersendiri.
3. Sektor kolonial dengan benteng dan barak, perkantoran, rumah-rumah, gedung *societeit*, rumah ibadah *vrijmetselarij*.
4. Sektor kelas menengah pribumi yang kadang-kadang mengelompok dalam kampung-kampung tertentu seperti kauman di Kota Yogyakarta dan Surakarta, atau di bagian lain.
5. Sektor imigran yang menampung pendatang-pendatang baru di kota dan berasal dari pedesaan di sekitar. Di sela-sela tempat ini terdapat gedung-gedung sekolah, pasar, stasiun, dan tempat-tempat umum lainnya (Kuntowidjojo, 2003:62).

Berbeda dengan Kota Banten Lama, kota ini pernah mengalami masa kejayaan pada abad XVI. Kejayaan tersebut didukung oleh berbagai sektor di antaranya, bahwa dahulu Banten dahulunya tumbuh sebagai Kota Pelabuhan, di tempat ini pernah berlabuh beberapa kapal dagang dari berbagai negara dari Cina, Eropa (seperti Portugis, Inggris, dan Belanda), maupun pedagang-pedagang dalam negeri. Di Pelabuhan Banten inilah diperdagangkan jenis barang-barang dagangan yang dihasilkan oleh masyarakat Banten dan sekitarnya, atau pun barang-barang dari negara-negara Eropa yang dibawa oleh kapal-kapal dagang tersebut. Selain itu Banten juga merupakan penghasil lada dan rempah-rempah, yang merupakan barang yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Eropa.

Kedatangan kapal-kapal dagang bangsa Eropa yang semula bertujuan untuk berdagang, tetapi ternyata mereka juga sambil mencari rempah-rempah dan lada yang sangat dibutuhkan di negaranya. Untuk itulah antara negara-negara Eropa tersebut saling bersaing di bidang perdagangan. Agar tidak kalah dalam persaingan tersebut, Belanda mendirikan kantor dagang VOC (*Verenigde Ost Compagni*). Dengan didirikannya VOC tersebut maka secara perlahan Banten, khususnya Istana Surosowan dikuasai oleh Belanda. Meskipun telah dilakukan berbagai perlawanan, Surosowan dan sekitarnya yang dikenal dengan sebutan Banten Lama tetap mengalami kehancuran. Kini Kota Banten Lama hanya tinggal puing-puing saja.

Meskipun Kota Banten Lama tinggal puing-puing, tetapi tidak semestinya kita sebagai orang awam berdiam diri. Dari beberapa faktor tersebut di atas membuat kita ingin mengetahui lebih jauh kapan Kota Banten Lama didirikan dan apa yang menjadi penyebab kehancurannya? Untuk itulah Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung, dalam tahun anggaran 2005 ini akan melaksanakan salah satu penelitian yang berjudul "*Sejarah Kota Banten Lama*" di Provinsi Banten.

B. Permasalahan

Banten Lama sebuah wilayah di Kabupaten Serang memiliki banyak bukti sejarah yang menarik untuk dibahas. Salah satu di antaranya adalah pelabuhannya. Pelabuhan Banten selain banyak dikunjungi kapal-kapal dagang, juga merupakan persinggahan Sunan Gunung Jati ketika menyebarkan agama Islam. Dari pelabuhan itulah Banten menjadi ramai hingga kemudian terbentuk sebuah kota.

Secara geografis Banten Lama terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian barat, dan berperan sebagai jalur pelayaran internasional. Diperkirakan pada abad pertama telah banyak bangsa-bangsa seperti dari India, Cina, dan Eropa telah mengunjungi daerah Banten. Sekitar tahun 1400-an bangsa-bangsa Eropa juga telah melakukan pelayaran dalam rangka usaha dagang. Bahan-bahan perdagangan yang mereka cari adalah rempah-rempah. Bagi negara-negara Eropa, rempah-

rempah tersebut sangat dibutuhkan, baik untuk obat-obatan, bumbu ataupun campuran minuman.

Kemudian, pada abad VII, Pelabuhan Banten telah ramai dan banyak dikunjungi para pedagang dan mubaligh, baik dari Arab, India, maupun Cina. Dengan demikian maka para pedagang dan mubaligh yang berdatangan dari berbagai negara tersebut telah banyak yang tinggal dan menetap di Banten.

Dengan ramainya pelabuhan Banten, baik sebagai sarana perdagangan maupun tempat persinggahan para mubaligh dalam menyebarkan agama Islam, maka daerah Banten berkembang menjadi sebuah kota, selanjutnya berdiri menjadi sebuah Kerajaan Banten. Yang menjadi permasalahan adalah apa yang menjadi latar belakang Kota Banten Lama menjadi sebuah kota, bagaimana perkembangannya, dan apa penyebab keruntuhannya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas, yaitu:

- (1) ingin mengetahui bagaimana sejarah pertumbuhan Kota Banten Lama; dan
- (2) ingin mengetahui bagaimana perkembangan Kota Banten Lama tersebut hingga mengalami keruntuhan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbagi dalam ruang dan waktu. Arti ruang dalam penelitian ini adalah mengambil lokasi di Provinsi Banten. Adapun waktu dalam penelitian ini antara abad XVI-XIX. Abad XVI merupakan masa kejayaan Kota Banten Lama, sedangkan abad XIX merupakan masa keuntuhannya.

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini kami gunakan metode penelitian sejarah, dengan tahap-tahap meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik merupakan tahap pengumpulan data.

Tahap ini kami lakukan sebagai studi pendahuluan yaitu berupa studi pustaka. Studi pustaka kami lakukan di beberapa perpustakaan, seperti Perpustakaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro Bandung, Perpustakaan Daerah di Jalan Soekarno Hatta Bandung, maupun koleksi pribadi.

Setelah data hasil studi pustaka terkumpul, baru kemudian kami lakukan studi lapangan. Dalam studi lapangan ini, kami terjun langsung ke lokasi penelitian dengan melihat perkembangan kota tersebut pada masa kini, sebab Kota Banten Lama kini tinggal reruntuhan. Selain itu kami juga mengunjungi Museum Suaka dan Purbakala, yang banyak menyimpan benda-benda bersejarah semasa Kerajaan Banten berdiri.

Setelah data dari lapangan terkumpul kemudian kami lakukan kritik data, baik ekstern maupun intern. Kritik data ini dilakukan untuk mengetahui apakah dari data tersebut ada yang sama atau berlainan. Langkah berikutnya adalah interpretasi, dan baru kemudian kami lakukan penulisan atau historiografi.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian mengenai Sejarah Kota Banten Lama, akan kami bagi dalam 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut.

- BAB I. Merupakan “Pendahuluan” berisi tentang: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, runag lingkup, metode penelirian, sistematika penulisan.
- BAB II Berjudul “Terbentuknya Kota Banten Lama” berisi uraian mengenai: Banten sebagai kota pelabuhan, masuknya pengaruh Islam, dan berdirinya kota Banten Lama.
- BAB III berjudul “Kejayaan Kota Banten Lama” berisi uraian tentang datangnya Belanda ke Banten, dan perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa, serta perlawanan Syekh Yusuf.
- BAB IV berjudul “Keruntuhan Kota Banten Lama” berisi uraian mengenai runtuhnya kota banten Lama dan perubahan administrasi wilayahnya.
- BAB V Merupakan “Penutup” berisi kesimpulan dan saran. ♦

BAB II

TERBENTUKNYA KOTA BANTEN LAMA

A. Banten sebagai Kota Pelabuhan

SECARA geografis Banten terletak di tepi pantai utara Pulau Jawa bagian barat. Diperkirakan pada abad pertama Banten telah berperan sebagai jalur pelayaran internasional, hal itu ditandai dengan datangnya bangsa-bangsa seperti India, Cina, dan Eropa yang mengunjungi daerah Banten. Pada abad VII, Pelabuhan Banten menjadi semakin ramai dengan berdatangannya para pedagang dan mubaligh, baik dari Arab, India, maupun Cina, dan mereka pun mulai tinggal serta menetap disana.

Dengan ramainya Pelabuhan Banten, maka Banten pun berkembang menjadi kota pelabuhan. Sebagai salah satu kota pelabuhan yang megah, Banten mempunyai dua buah pelabuhan besar. Pelabuhan pertama adalah pelabuhan yang menghubungkan Banten dengan para pedagang asing yang lokasinya terdapat di sebelah barat Sungai Ciban ten. Sedangkan pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan perdagangan regional terdapat di sebelah timur sungai. Sedangkan pusat kota sekaligus pusat pemerintahan terdapat di tengah-tengah dua pelabuhan tersebut. Menurut Edi S. Ekadjati, saat itu Banten dikenal sebagai pelabuhan perniagaan yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda sendiri memiliki kota-kota pelabuhan yang terletak di sepanjang pesisir utara yaitu Banten, Pontang, Cikande, Tangerang, Kalapa, Cimanuk, dan Cirebon. Di kota-kota pelabuhan tersebut tentu saja masyarakatnya hidup dari usaha pelayaran, perniagaan, dan juga perikanan (Edi S. Ekadjati,

1986: 3). Tome Pires (1511) pernah mencatat, bahwa ternyata di antara beberapa pelabuhan tersebut, Pelabuhan Banten, Kalapa, dan Cirebon termasuk pelabuhan yang cukup baik dan besar. Hal itu juga pernah ditulis oleh Halwany M. dalam bukunya yang berjudul "*Catatan Masa Lalu Banten*". Dalam buku tersebut dikatakan bahwa bandar-bandar Kerajaan Sunda digambarkan sebagai berikut.

1. Banten, merupakan sebuah kota niaga yang baik, terletak di tepi sebuah sungai. Kota ini dikepalai oleh seorang Kapten (syahbandar), sedangkan wilayah niaganya mencapai Sumatra dan bahkan Kepulauan Maladewa. Pelabuhan Banten merupakan pelabuhan besar dan merupakan pula bandar untuk beras, bahkan makanan dan lada.
2. Pondang (pontang), merupakan sebuah kota yang besar, tetapi pelabuhannya tidak sepenting Banten. Jalur niaga dan barang-barang yang diperdagangkan sama dengan Banten.
3. Cheguide (Cikande), juga sebuah kota besar. Perniagaan dari bandar ini dilakukan dengan Pariaman, Andalas, Tulang Bawang, Sekampung, dan lain-lain. Barang dagangannya sama dengan Banten dan Pondang.
4. Tangaram (Tangerang), yang merupakan kota besar, barang dagangannya juga sama dengan bandar-bandar yang disebutnya terdahulu.
5. Calapa (Xacatra = Jakarta, menurut Joao de Barros), merupakan sebuah kota yang sangat besar, serta terbaik. Hubungan niaganya juga lebih luas, antara lain dengan Sumatra, Palembang, Lawe, Tanjungpura, Malaka, Makasar, Jawa, dan Madura. Pelabuhan ini letaknya kira-kira dua hari perjalanan dari ibukota Kerajaan Pajajaran, yang disebut Dayo (dayoh = kota), tempat raja bersemayam. Para pedagang dari seluruh kerajaan (Pajajaran) selalu berdatangan ke Kalapa. Pelabuhan ini diperintah secara teratur, lengkap dengan hakim dan klerek. Raja mengeluarkan peraturan tertulis untuk setiap pelanggaran yang dilakukan penduduk setempat.

6. Chi Manuk/Chemano (Cimanuk), merupakan Bandar Kerajaan Sunda yang paling timur, sekaligus sebagai batas Kerajaan Sunda. Walaupun Bandar itu dikatakan sebagai Bandar yang besar dan cukup ramai, tetapi jung tidak dapat merapat. Di Cimanuk, sudah banyak berdiam orang-orang yang beragama Islam, walaupun syahbandarnya sendiri beragama Sunda. (Halwany, 1993 : 41-42)

Menilik kegiatan perniagaannya, kota-kota pelabuhan tersebut diatas lebih menonjol dibandingkan dengan kota-kota pelabuhan lainnya. Para saudagar dari berbagai daerah dan negara datang ke pelabuhan ini. Mereka, selain tinggal menetap seperti saudagar Sunda juga ada yang pulang-pergi dari kota-kota pelabuhan tempat tinggalnya. Dari Kerajaan Sunda para saudagar memperdagangkan beras, lada, kayu, dan beberapa jenis makanan, sedangkan barang-barang yang masuk ke Kerajaan Sunda dari kota-kota pelabuhan tersebut di antaranya sutra dan barang keramik. Kegiatan perniagaan ini berlanjut sampai masa Kesultanan Banten. Para saudagar yang tinggal di ibukota Kerajaan Pajajaran, bila akan pergi ke Pelabuhan Kelapa dapat menempuh perjalanan selama dua hari, sebab kedua tempat tersebut dihubungkan oleh Sungai Ciliwung.

Selain memiliki bandar pelabuhan yang cukup ramai, Kerajaan Sunda juga memiliki lalu lintas darat yang cukup penting, dengan pusatnya di Pakuan Pajajaran menuju ke arah timur dan barat. Bila dari Pakuan/Pakwan, ibukota Pajajaran akan menuju ke Pelabuhan Banten, terdapat dua jalur yang akan digunakan yaitu darat, melalui Jasinga, Rangkasbitung, Pandeglang, dan Serang. Akan halnya dari Banten Girang menuju Pelabuhan Banten digunakan jalur sungai, yaitu Sungai Cibanten yang merupakan jalur transportasi utama. Jadi pada abad tersebut, di Banten telah ada jalur sungai sebagai sarana transportasi, dan pelabuhan serta pasar Banten sebagai pusat kegiatan ekonominya.

Sementara kota-kota pelabuhan tersebut diatas disibukkan oleh saudagar-saudagar Sunda maupun saudagar lainnya, sekitar tahun 1400-an bangsa-bangsa Eropa telah melakukan pelayaran dalam rangka usaha dagang. Bahan-bahan perdagangan yang mereka cari

adalah rempah-rempah. Bagi negara-negara Eropa, rempah-rempah tersebut banyak dibutuhkan, baik untuk obat-obatan, bumbu, ataupun campuran minuman. Dalam melakukan pelayaran tersebut, bangsa-bangsa Eropa pun singgah di Pelabuhan Banten. Mengenai keberadaan pelabuhan Banten pernah dilukiskan oleh Tome Pires (1513) secara ringkas bahwa

“Kerajaan Banten mempunyai banyak pelabuhan. Pertama Pelabuhan Banten. Jung dapat berlabuh di sini. Sebuah pelabuhan niaga. Sebuah kota yang baik pada aliran sungai. Kota itu dipimpin seorang kepala. Kedudukannya sangat penting. Pelabuhan ini hampir merupakan yang terpenting di antara yang lain-lainnya, sebuah sungai bermuara ke laut. Pada bagian ini sangat kaya akan beras, bahan makanan, dan merica” (Saleh Dana sasmita, 1983/1984 : 45)

Adapun dalam catatan Portugis yang lain dikatakan bahwa, Kota Banten dibelah oleh aliran sungai untuk menambatkan kapal. Pada salah satu sisinya terdapat benteng dan landasan pancang yang terbuat dari kayu serta perlengkapan meriam yang baik. Negerinya subur, banyak emas, ikan, aneka macam makanan, dan asam yang oleh penduduk dijadikan bahan cuka.

Mengenai keberadaan Pelabuhan Banten juga pernah ditulis oleh seorang Portugis bernama Tome Pinto. Ia menulis perjalanannya di tahun 1546 Dalam catatan Tome Pinto tersebut disebutkan bahwa :

“Aku terlibat di Goa ikut dengan Jung Pedro de Faria yang akan pergi dagang ke Sunda dan tiba di Malaka pada hari kematian komandan benteng di situ, Ruy Vaz Pereyra Marramaque. Dari Malaka berlayar lagi. Setelah 17 hari tibalah aku di Pelabuhan Banten tempat yang biasa dikunjungi orang Portugis untuk berdagang. Di sana keperluan untuk muatan kapal kita, merica. Ketika itu sedang jarang didapat di seluruh negeri. Karena itu kami terpaksa harus tinggal di sini selama musim penghujan” (Saleh Danasasmita, 1983/ 1984 : 46)

Pada bagian catatan lain yang ditulis oleh Tome Pinto, ia mengatakan :

“Dari 46 orang Portugis yang kebetulan sedang berada di Banten, 40 orang ikut serta dan dengan kejadian ini raja berjanji bahwa ia akan membantu perdagangan Portugis di Banten. Dengan demikian, pergi mengikuti ekspedisi perang ini (merupakan kesempatan yang) tak dapat dilewatkan. Raja Sunda bertolak dari Pelabuhan Banten pada tanggal 5 Januari 1546 dan tiba pada tanggal 19 bulan itu di Kota Jepara. Di sana peralatan perang sedang dipersiapkan”

Tome Pires yang mengunjungi Banten tahun 1513, menggambarkan bahwa Banten merupakan pelabuhan yang belum begitu berarti tetapi sudah disebutkan sebagai pelabuhan kedua terbesar dari Kerajaan Sunda sesudah Kalapa. Hubungan dagang telah banyak dilakukan antara Banten dengan Sumatra, demikian juga, dengan daerah lain. Pada waktu itu Banten sudah merupakan pelabuhan pengekspor beras, bahan makanan, dan lada. Sedangkan sekitar tahun 1522 Banten sudah merupakan pelabuhan pengekspor 1.000 bahan lada per tahun. (464 tahun Kab. Serang, 1990:21). Di samping itu, Banten juga memiliki pelabuhan yang tidak hanya besar tetapi juga lengkap dengan prasarana pelabuhan lainnya, seperti dermaga yang panjang menjorok ke laut, dok kapal, hingga gudang-gudang penyimpanan. Banten juga disebut-sebut sebagai pelabuhan yang strategis, yang menghubungkan Asia dengan bangsa Eropa pada saat itu. Selain mengandalkan aktivitas perdagangan melalui dua pelabuhannya, Banten juga mempunyai modal lain di bidang ekonomi yaitu perkebunan. Rempah-rempah asal Banten telah dikenal oleh pedagang Cina yang memasarkan ke Eropa sejak abad 16 lokasi perkebunan rempah-rempah (lada, merica, dan kayu manis) milik Banten dipusatkan di daerah Sumatera Selatan dan wilayah bekas Kerajaan Tulang Bawang yang meliputi Jambi sampai Lampung sekarang. Kerajaan Tulang Bawang sewaktu dikuasai Banten, dijadikan sebagai pusat perkebunan rempah-rempah.

Banten sebagai Kota Pelabuhan kemudian berkembang menjadi sebuah bandar, sehingga dinamakan Bandar Banten. Sekitar abad 16-19, Bandar Banten merupakan salah satu Bandar Internasional, sebab letaknya sangat strategis yaitu antara Malaka dan Gresik.

Bandar Banten juga menjadi salah satu bandar internasional yang berpengaruh di Nusantara, baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya maupun agama. Dikatakan sebagai bandar internasional karena kapal-kapal yang berlabuh di sana berasal dari berbagai daerah di Nusantara, dan daerah-daerah asing seperti Cina, Arab, India, dan Eropa, sehingga pada masa-masa itu diperkirakan Banten mempunyai hubungan dengan daerah-daerah di pedalaman. Hal itu juga disebabkan karena di Bandar Banten telah diperdagangkan barang-barang niaga yang berasal dari daerah Banten dan pedalaman. Dengan diperdagangkannya barang-barang dari daerah pedalaman, maka Banten pun dijadikan sebagai pintu gerbang bagi dunia luar. Kapal-kapal asing yang berlabuh di Bandar Banten selain membeli barang-barang niaga hasil dari daerah pedalaman Banten, mereka juga menjual barang da-gangannya yang dibawa dari negeri asalnya.

Selain Bandar Banten yang dijadikan sebagai tempat perniagaan, disana juga terjadi adanya interaksi sosial sehingga memperlancar kontak budaya. Kontak budaya yang berawal dari kegiatan ekonomi dan berkembang ke bidang-bidang lain, sebab di sinilah berlabuh puluhan kapal dari berbagai bangsa, antara lain Cina, Keling, Pagu (sekarang Myanmar). Keberadaan Banten sebagai bandar perniagaan juga ditulis oleh Nina H. Lubis. Dalam Tambo Tulang-bawang yang ditulis Nina H. Lubis, dalam bukunya "*Sejarah Kota-kota lama*", bahwa sekitar abad 13 Mang Wang, Maharaja Bulugading (Tiongkok) memesan cula badak putih dari Medanggili (sebutan untuk Banten) yang biasa dipakai orang-orang pada zaman Hindu pada abad 13 (Nina Lubis, 2000 : 50).

B. Datangnya Islam ke Banten

Selain Banten dikenal sebagai Kota Pelabuhan yang kemudian dijadikan sebagai Bandar Perdagangan, ternyata Bandar Banten pun dijadikan sebagai tempat sosialisasi dalam menyebarkan agama Islam. Seperti pendapat Tome Pires bahwa, beberapa bandar yang terletak di pantai utara Pulau Jawa tersebut dijadikan sebagai tempat sosialisasi dalam penyebaran Agama Islam. Bandar-badar tersebut di antaranya adalah Gresik, Demak, dan Banten.

Tentang keberadaan orang-orang Islam di Banten, Tome Pires (1512-1515) menyebutkan bahwa di daerah Cimanuk, kota pelabuhan dan batas kerajaan Sunda dengan Cirebon banyak dijumpai orang Islam. Ini berarti bahwa pada akhir abad ke-15 M di wilayah Kerajaan Sunda Hindu sudah ada masyarakat yang beragama Islam. Mereka umumnya tinggal di kota pelabuhan, seperti di Kalapa dan Banten. Begitu pula sewaktu Sunan Ampel datang ke Banten, sebagian masyarakatnya sudah memeluk agama Islam.

Seiring dengan perkembangan pelabuhan Banten, maka semakin banyak pula orang-orang Islam yang berkunjung dan menetap di kota pelabuhan ini, sehingga lama-kelamaan Banten menjadi pusat penyebaran Agama Islam di Jawa Barat. Awal mula Banten dijadikan sebagai tempat penyebaran Agama Islam, adalah dilakukan oleh Sunan Gunung Jati.

Menurut sumber-sumber lokal di Banten menyebutkan bahwa pendiri Kerajaan Banten adalah Sunan Gunung Jati (1662/1663). Sunan Gunung Jati adalah putra dari Nyi Larasantang. Nyi Larasantang adalah putra Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Hasil perkawinan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subanglarang melahirkan 3 putra, dua di antaranya adalah Raden Walangsungsang, dan Nyi Larasantang. Ketika menginjak dewasa Raden Walangsungsang memutuskan untuk meninggalkan istana karena tidak mendapat ijin dari ayahnya untuk memperdalam agama Islam. Pada saat itu ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi memeluk agama Hindu. Ternyata kepergian Walangsungsang diikuti oleh adiknya, Nyi Larasantang.

Dalam pengembaraan Waangsungsang dan Larasantang sampailah di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan Kebon Pesisir yang dikenal dengan nama Kebon Alang-alang dengan penguasanya Ki Danusela. Di tempat itu Walangsungsang mendirikan sebuah kampung dan sekaligus ditunjuk sebagai pangraksa bumi, yaitu yang mengurus segala sesuatu baik di bidang perikanan ataupun pertanian. Oleh Ki Danusela, Raden Walangsungsang dan adiknya disuruh menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah selesai Nyi Larasantang harus tinggal di Mesir karena dipersunting oleh Pangeran Mesir, sedangkan Walangsungsang pulang ke Cirebon meneruskan

pekerjaan sebagai pangraksa bumi. Dari perkawinan antara Nyi Larasantang dengan Pangeran Mesir lahirlah Syarif Hidayatullah. Setelah menginjak dewasa yaitu saat berusia 18 tahun, ia menunaikan ibadah haji. Seharusnya setelah Syarif Hidayatullah selesai menunaikan ibadah haji, ia mewarisi tahta untuk menggantikan ayahnya menjadi raja di Mesir, namun Syarif Hidayatullah lebih memilih sebagai penyebar agama Islam. Tahta sebagai raja diserahkan kepada adiknya ia pun memutuskan untuk kembali ke Pulau Jawa. Dalam perjalanan dari Mesir ke Pulau Jawa, Syarif Hidayatullah singgah di beberapa tempat seperti Gujarat, Samudra Pasai, dan Banten, dengan tujuannya untuk memperdalam ilmu agama juga menyebarkan agama Islam. Sesampainya di Banten, ternyata sebagian masyarakatnya sudah memeluk agama Islam berkat dakwahnya Sunan Ampel. Syarif Hidayat pun langsung ke Cirebon untuk menemui Raden Walangsungsang (uwanya). Di Cirebon ia mengajar di pesantren sambil berdakwah.

Setelah Syarif Hidayatullah tinggal beberapa lama di Cirebon, pada suatu ketika datanglah beberapa orang dari Banten ke Pasambangan menemui Syarif Hidayatullah. Mereka mengajukan permohonan agar Syarif Hidayatullah memberikan pelajaran agama Islam di Banten (Unang Soemardjo, 1983: 56). Maka berangkatlah Syarif Hidayatullah ke Banten melalui Muarajati. Dalam beberapa waktu ia mengajar agama Islam disana, dengan teknik penerapan pengembangan agama Islam yang mudah diterima. Cara penyebaran tersebut membuat Bupati Kawunganten dan pengikutnya tertarik dan akhirnya memeluk Agama Islam. Bahkan adiknya yang bernama Nhay Kawunganten direstui untuk mengikat tali pernikahan dengan Syarif Hidayatullah. Dari pernikahan itu lahirlah Ratu Winaon dan Pangeran Sabakingkin.

Selanjutnya Syarif Hidayatullah kembali ke Cirebon karena ia sangat diperlukan untuk pengembangan Nagari Cirebon, apalagi Pangeran Walangsungsang sudah bertambah tua. Sesampainya di Cirebon Syarif Hidayatullah dinobatkan menjadi penguasa dan diberi gelar Tumenggung untuk memimpin Nagari Cirebon menggantikan kedudukan Pangeran Walangsungsang. Penobatan tersebut tersiar

abar sampai ke Ampel Denta dan juga Demak, maka wali sepulau Jawa dengan sistem hubungan dan pemberitaan segera menyambut dan memberikan gelar “Panetep Panatagama Rasul di Tanah Sunda” dan kedudukan tersebut sejajar dengan wali lainnya, khususnya wali sanga.

Dalam tahun itu juga Raden Sepat utusan dari Demak dan pengikutnya datang ke Sunan Gunung Jati guna membantu perluasan Keraton Pakungwati dan pembangunan jalan ke Pasambangan yang menghubungkan Keraton Pakungwati dengan Muara Jati. Dalam waktu tiga tahun setelah gelar Tumenggung disandang Sunan Gunung Jati dan pemberian wali, maka tampaklah berbagai kemajuan di Nagari Cirebon, seperti adanya pintu masuk yang menghubungkan Keraton Pakungwati dengan Pelabuhan Muara Jati, dibangunnya Masjid Agung sebagai tempat ibadah dan tempat merumuskan program, Pelabuhan Muara Jati dapat diandalkan bagi peningkatan perekonomian, dibangunnya pasar sebagai tempat perdagangan yang ada di sekitar Pelabuhan Cirebon, dan lain-lain. Kondisi dan potensi seperti itu membuat Cirebon bisa telah mencapai posisi penting di pesisir utara Jawa Barat. Beberapa tahun kemudian situasi Cirebon dalam keadaan tenang dan tentram, Cirebon juga membangun dan mengembangkan berbagai bidang terutama syiar agama Islam.

Ketika Sunan Gunung Jati sedang tenang-tenangnya membangun Nagari Cirebon, datanglah utusan dari Demak. Dengan menggunakan kapal-kapal besar, utusan tersebut berangkat ke Cirebon untuk mendengarkan nasihat dari Syarif Hidayatullah. Pertama-tama mereka memberitahukan bahwa sudah sejak lama bangsa Portugis menduduki Malaka dan mengalahkan Sultan Mahmud Syah dari Malaka. Kemudian Demak membantu Sultan Mahmud Syah dengan mengirim pasukan yang dipimpin Dipati Unus dari Jepara, namun Dipati Unus dan pengikutnya mengalami kekalahan.

Utusan tersebut memberitahukan kealahannya kepada Sunan Gunung Jati, sekaligus telah menyiapkan armada besar yang akan dipimpin oleh Fadillah/Fatahillah untuk mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Keberadaan Portugis di Sunda Kelapa karena adanya kerjasama dengan Kerajaan Pajajaran, sehingga pengiriman Fatahillah

tersebut meminta bantuan kepada Cirebon. Sunan Gunung Jati pun segera memanggil beberapa utusan untuk bermusyawarah dengan para pembantu utama, para gedeng (kepala wilayah), dan para penasihat, yang hasilnya Cirebon segera mengirimkan bantuan.

Kedatangan pasukan Fatahillah yang dibantu Cirebon ke Sunda Kelapa berakibat Portugis kalah, dan kemenangan ada di tangan Fatahillah. Atas kemenangan Fatahillah ini maka Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta, Sunan Gunung jati pun mengangkat Fatahillah menjadi bupati di Jayakarta.

Kekalahan Pajajaran di Pelabuhan Jayakarta, membuat Pajajaran ingin menguasai Pelabuhan Banten yang sudah semakin ramai dengan datangnya kapal-kapal pedagang asing di pelabuhan ini, selain orang-orang yang masih setia kepada Pajajaran juga masih banyak. Atas permintaan Sunan Gunung Jati, Fatahillah pada tahun 1526 bersama para Dipati Cirebon segera mengadakan “Operasi” di Banten, guna membantu Pangeran Sabakingkin dalam menghadapi pasukan Pajajaran. Sesuai dengan saran Syarif Hidayatullah, pasukan gabungan Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahillah, Pangeran Cirebon, Dipati Keling, dan Dipati Cangkuang berangkat ke Banten.

Dalam pertempuran hari pertama, pasukan Demak dan Cirebon berhasil membunuh pimpinan Lasykar Pajajaran. Hari berikutnya mereka berhasil menghancurkan pos Portugis yang berada di kapal yang bersandar di Pelabuhan Sunda kelapa, Pertempuran ini tidak memakan waktu lama, Pajajaran segera menyerah. Banyak orang-orang Pajajaran yang melarikan diri ke hutan, kembali kemenangan jatuh ke tangan Demak-Cirebon. Tanpa mengalami banyak kesulitan yang berarti, pasukan gabungan ini dapat menguasai Banten. Akhirnya Fatahillah memindahkan perdagangan dari Jayakarta ke Banten.

Pelabuhan Banten menjadi sangat ramai dan banyak dikunjungi pedagang-pedagang asing, seperti Arab, Cina, Persia, Suriah, India, Turki, Jepang, Philipina, Eropa (Inggris, Belanda, Perancis, Denmark, Portugis), dan dari daerah Indonesia (Maluku, Solor, Makassar, Sumbawa, Jaratan, Gresik, Juwana, dan Sumatra). Dengan ditaklukkannya Pajajaran sebagai ibukota Kerajaan Sunda oleh Banten maka Kerajaan Sunda dapat dikatakan berakhir. Sehingga di Jawa

Barat tinggal kerajaan kecil seperti Banten, Cirebon, Sumedang, dan Galuh.

Dengan selesainya “Operasi” di Banten, Pangeran Sa-bakingkin pun diangkat menjadi Bupati Banten dengan nama baru Pangeran Hasanudin, Sunan Gunung Jati mengangkat Pangeran Hasanudian menjadi Sultan Banten I. Akan halnya ia sendiri memfokuskan diri ke pedalaman untuk melakukan syiar agama Islam. Setelah Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon, proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh putranya yaitu Sultan Maulana Hasanudin. Sewaktu Banten diislamkan oleh Hasanudin, hasilnya sangat menakjubkan di Banten Hilir kurang lebih 800 orang pertapa memeluk agama Islam.

Setelah Banten dikuasai pasukan Demak dan Cirebon pada tahun 1525, atas petunjuk Syarif Hidayatullah pada tanggal 1 Muharram 1526 M atau 8 oktober 1526 M, pusat pemerintahan Banten yang tadinya berada di pedalaman yaitu Banten Girang, yang memiliki jarak 3 km dari kota Serang dipindahkan ke dekat Pelabuhan Banten. Dalam pemindahan tersebut Syarif Hidayatullah pulalah yang menentukan tempat pembangunan dalem atau istana, benteng, pasar, dan alun-alun. Tahun 1552 Banten yang tadinya sebagai sebuah kadipaten diubah menjadi Negara bagian Demak dengan Hasanudin sebagai rajanya, dan bergelar Maulana Hasanudin Panembahan Surosowan.

Menurut Halwany berdasarkan keterangan Caeff, bahwa saat ke Banten tahun 1671 ia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Banten Girang adalah Banten Lama. Letaknya sedikit di atas *Clappadoa*, kira-kira enam jam perjalanan kaki dari Tirtayasa ke Pontang dan tiga jam dari Banten. Kelapa Dua sekarang masih merupakan sebuah kampung kira-kira di Barat Laut Serang.

Selanjutnya setelah Hasanudin dapat mengalahkan Prabu Pucuk Umum di Banten Girang, ia diperintahkan oleh ayahnya, Sunan Gunung Jati, untuk membuat Keraton Surosowan (1526). Surosowan menjadi ibukota Kerajaan Banten sebagai ganti Banten Girang. Pemilihan Banten Surosowan sebagai pusat administrasi politik Kesultanan Islam nampaknya didasarkan atas pertimbangan, antara

lain Banten Surosowan lebih mudah dikembangkan sebagai bandar pusat perdagangan, sebab dilihat letaknya yang mudah untuk berhubungan dengan dunia luar.

Pada saat mendirikan Keraton Surosowan, Sunan Gunung Jati pernah berpesan agar watugilang yang ada di depan keraton tidak digeser kemanapun karena pemindahan benda itu dapat menyebabkan keruntuhan. Selain mendirikan Keraton Surosowan, ia juga membangun Masjid Agung yang terletak di sebelah barat alun-alun dan Masjid Pacinan (namun mesjid ini sekarang tinggal menaranya saja). Dengan dipindahkannya pusat pemerintahan Banten yang tadinya berada di pedalaman, yakni Banten Girang (3km dari Kota Serang), ke dekat pela-buhan Banten tersebut maka menandai lahirnya Kota Banten.

C. Terbentuknya Kota Banten Lama tanggal 8 Oktober 1526

Pindahnya pusat kerajaan dari Banten Girang ke dekat pelabuhan yang kemudian disebut Surosowan sebagai ibukota Banten, didasarkan atas beberapa alasan, yaitu Banten Girang yang terletak di Kampung Sempu kira-kira 3 km di selatan Serang merupakan pedataran dan bukit yang kurang subur dan gersang. Selain itu juga didasarkan atas beberapa faktor, di antaranya :

1. Ekonomi: berdasarkan potensi maritimnya, Banten berpotensi sebagai pelabuhan besar, yang dapat menggantikan Sunda Kelapa.
2. Mistis religius: kota dan keraton yang telah ditaklukkan harus ditinggalkan, karena dianggap sudah tidak memiliki kekuatan magis lagi.
3. Politik: memudahkan hubungan antara pesisir Jawa dan Sumatra melalui Selat Sunda.

Selain itu Halwany juga mengatakan bahwa, berdirinya Kasultanan Banten di Surosowan dituliskan sebagai berikut ;

Ingkang kalang Banten nagari sedengnyan haro harra ikang nunaya jeng sisa Sabakingking anak ia susuhunan Jatipurba lawan pra saparisharanya teka wong muslim prasiya sira, wiweha kahanan ika wadya Demak lan Charbon teka ta prahwa nira mandeg ing labuhan Banten nagari, irika tang ayudha mwanng anggepek wadyua bala Budha-prawa, Bopatya Banten nagari lawan saparicharyanya lumayu menjing wanantara paran ira mangidul ngetan ringkitha-gung Pakuan Pajajaran, witan ikang pramatya Banten nagari. Ring huwu-weus ika binu patyakna tasira Sabakingking Banten nagari lawwan nawastwan ngaran Hasanudin. Deng Ramanira Susuhunan Jatipurba kang lungguh raja paditha atahwa Sang Kamastwing sarat Sunda, kang tamolah ing Puserbumi nagari ya ta Charbon, kithaya sinebut Garage

Terjemahannya :

Pada waktu itu di Banten sedang timbul huru-hara yang disebabkan oleh Pangeran Sabakingking, putra susuhunan Jatipurba dengan para pengikutnya. Orang-orang muslim dan para muridnya, bertambah dengan kedatangan angkatan bersenjata Demak dan Cirebon yang telah berlabuh di Pelabuhan Banten. Kemudian menyerang dan memukul angkatan bersenjata Budhaprawa. Adipati Banten dan para pengikutnya melarikan diri masuk hutan belantara menuju ke arah tenggara ke kota besar Pakuan Pajajaran. Setelah itu dinobatkanlah Pangeran Sabakingkin di Negeri Banten dengan gelar Pangeran Hasanudin oleh ayahnya dipertuan bagi seluruh daerah Sunda, yang berpusat di Puserbumi yaitu negeri Cirebon atau Garage. (Halwany Michrob, 1993 : 60)

Adapun nama Banten berasal dari kata Wahanten yang berarti sungai atau *ketiban inten*, yang artinya ketiban intan. Banten dalam arti lain adalah bantahan yang artinya membantah.

Menurut Kevin Lynch, yang dikutip oleh Drs. Halwany Michrob, M.Sc, bahwa terdapat beberapa teori normative mengenai bentuk kota-kota lama serta alasan-alasannya. Menurut Lynch bahwa kota,

pertama yang tumbuh itu pada mulanya berakar dari pertumbuhan pusat-pusat seremoni atau tempat-tempat suci yang dapat dijelaskan kaitannya terhadap kekuatan-kekuatan alam, serta dikendalikan bagi keuntungan manusia.

Kota Lama di daerah Barat yang menarik untuk dibahas adalah “Banten Lama”. Ada sesuatu yang menarik dalam Kota Banten Lama, yaitu pada saat sekarang kota tersebut sangat lambat mengalami perkembangan. Padahal dulu kota tersebut pernah menjadi Kota Pelabuhan Internasional dari sebuah kerajaan Islam yang makmur, yang ramai dikunjungi para pedagang asing dari berbagai negara. Ada sisi yang menarik pada Banten Lama, yaitu sebagai pusat kota maupun Bandar utama Kerajaan Banten yang mulai berkembang pada abad XII (atau dapat dikatakan bahwa pada abad tersebut merupakan abad kejayaan).

Kota Banten Lama yang sekarang sudah dikatakan sebagai situs Banten Lama terletak kurang lebih 10 km di sebelah utara Kota Serang, pada koordinat $105^{\circ} 07' - 106^{\circ} 22' \text{ BT}$ dan $5^{\circ} 20' - 6^{\circ} 21'$. Untuk menuju ke lokasi tersebut, sekarang bisa melalui dua akses, yaitu dari Serang yang melintasi jalan tol Jakarta-Merak, dan dari Kramatwatu, kurang lebih 8 km di sebelah Barat Serang. (Halwany Michrob, 1993: 31). Selain itu Banten juga terletak di pantai utara Jawa Barat, garis pantai berbatasan dengan Teluk Banten, dengan ketinggian maksimum $\pm 6 \text{ m}$ di atas permukaan laut. Apabila melihat dari sejarah perkembangannya, Banten Lama dapat dilihat dari:

1. Tumbuhnya Banten sebagai kota pelabuhan semata-mata karena perdagangan lada
2. Banten sebagai pusat kota dalam artian politik, ekonomi, dan militer, terutama sejak Banten diislamkan.

Banten Lama adalah bekas kota dengan tamaddun Islam, terlepas dari tipe kotanya yang kota pantai, bandar dagang atau lainnya.

Dalam konsep Islam mengenai kota pemukiman, bahwa kota-kota di Asia Tenggara juga terbentuk dari unit-unit rumah yang dapat diidentifikasi sebagai unit-unit pemukiman etnis. Peta-peta yang dapat dianalisis memperlihatkan kesan tentang besar dan jumlah

bagian-bagian kota yang membentuk kelompok penghuni para saudagar bangsawan (bangsawan pedagang) yang masing-masing mempunyai tembok keliling. Pasar pada umumnya dibangun di bagian selatan kota, sedangkan pusat-pusat kegiatan penting lainnya adalah pemerintahan, istana, pasar, dan kota itu sendiri.

Adapun kota-kota pantai di Asia Tenggara, kuat kharistiknya dibedakan dengan fungsi-fungsi ruang kota, atas dasar kualitas dan teknis menjadi: (1) unit-unit pelabuhan; (2) pasar serta perdagangan; dan (3) kuil/masjid, istana, dan lapangan dimana berlangsung kegiatan pemerintahan, militer, dan keagamaan. (Halwany Michrob, 1993: 23)

Mengacu pada konsep kota-kota di Asia Tenggara, dalam catatan tersebut disebutkan bahwa Kota Banten dikelilingi tembok kota berukuran cukup besar, hampir sama dengan Kota Amsterdam. Masih dalam catatan tersebut, juga disebutkan bahwa kapal-kapal asing yang bersandar di Pelabuhan Banten harus mendapat ijin dari syahbandar. Begitu pula untuk masuk ke kota Banten dari pelabuhan, terlebih dahulu harus melalui toulhuis (tempat memungut pajak).

Jadi Kota Banten merupakan sebuah kota yang cukup luas. Di pusat kota terdapat sebuah bangunan istana yang megah dengan dua pintu utama yang terletak di bagian utara dengan gerbang yang berbentuk lengkung Persia, sedangkan pintu kedua terdapat di bagian timur istana. Di bagian barat istana terdapat sebuah masjid yang megah dengan menara masjid menjulang tinggi yang sekaligus berfungsi sebagai mercusuar. Bangunan istana pun dikelilingi oleh rumah penduduk yang tertutup dan tertata rapi. Penduduk asli boleh tinggal dibalik dinding bagian dalam Kota Banten. Di sebelah barat dinding kota terdapat sebuah pelabuhan besar yang digunakan sebagai pusat perdagangan internasional.

Pemukiman penduduk pribumi berkembang terutama di sekitar keraton dan alun-alun. Sungai masih tetap sebagai alat transportasi utama. Hal itu diharapkan alat transportasi menjadi lebih mudah dan efisien. Itulah yang diharapkan dapat mendukung aktifitas Banten sebagai pusat perdagangan. Pada masa itu pelabuhan dan Pasar Karangantu berkembang menjadi pelabuhan internasional. Perlu diketahui bahwa Pelabuhan Karangantu telah menjadi saksi sejarah,

sebab di sinilah dahulunya terjadi perniagaan antar pulau dan antar negara, serta hubungan-hubungan yang menyebabkan keharusan dikembangkan sistem dan teknologi transportasi kelautan. Untuk melayani lintas barang, orang, dan jasa.

Dari uraian diatas dapatlah disebutkan elemen-elemen kota yang dominan pada periode ini adalah sebagai berikut:

1. Pelabuhan dan Pasar Karangantu yang berkembang menjadi pelabuhan internasional, dari Pelabuhan Karangantu di-eksport lada.
2. Keraton Surosowan sebagai pusat kekuatan politik.
3. Mesjid Pecinan Tinggi, merupakan mesjid pertama yang dibangun Syarif Hidayatullah di Banten. Tidak diketahui pasti apakah mesjid ini digunakan oleh pedagang-pedagang Cina yang beragama Islam atau penduduk pribumi.
4. Pasar Pecinan tidak diketahui secara pasti letaknya di daerah Pecinan.
5. Masjid Agung Banten, sebagai mesjid utama di Banten beratap tumpang susun lima.
6. Alun-alun sebagai tempat berkumpul rakyat untuk mendengarkan pengumuman dari Sultan, tempat berlatih para prajurit keraton, tempat pertunjukan kesenian, dan sebagainya, dengan kata lain alun-alun sebagai tempat aktifitas sosial.
7. Pasar Paseban, terletak di sekitar alun-alun hanya dibuka setiap hari Minggu

Demikianlah usaha Hasanudin dalam mengubah satu daerah nelayan kecil menjadi sebuah kota yang layak dijadikan sebuah ibukota negara, dan itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Pembangunan Kota Banten dapat terlaksana dengan mulus berkat bantuan dari Cirebon, Demak, dan masyarakat sekitar.

Penataan Kota Banten semasa Sultan Hasanudin dapat digambarkan sebagaimana yang diuraikan Halwany dibawah ini. Kota Banten terletak di pertengahan pesisir teluk, yang lebarnya

mencapai tiga mil, dengan kedalaman antara dua sampai 6 depa. Kota ini panjangnya 850 depa, di tepi pantai panjangnya 400 depa masuk ke dalamnya lebih panjang. Melalui tengah kota ada sungai jernih, dimana kapal jung dan gale dapat berlayar masuk. Sepanjang pinggiran kota ada anak sungai yang hanya bisa dilalui perahu kecil saja. Kota Banten dikelilingi benteng terbuat dari bata dan lebarnya tujuh telapak tangan. Bangunan-bangunan pertahanannya terbuat dari kayu, terdiri atas dua tingkat yang dilengkapi dengan meriam. Teluk itu di beberapa bagian berlumpur dan di beberapa tempat lagi berpasir, dalamnya antara dua dan enam depa (Halwany, 1993: 71).

Langkah yang diambil Hasanudin dalam memindahkan pusat pemerintahan dari daerah pedalaman ke pesisir sangat menguntungkan, baik dalam bidang politik maupun sosial ekonomi. Beberapa keuntungan tersebut seperti:

1. Hubungan dengan negara-negara lain di pesisir Jawa, Sumatra Barat, dan Malaka lebih mudah.
2. Pelabuhan Banten menjadi sebuah bandar yang besar, dibandingkan sebelumnya yang menjadi pelabuhan kedua setelah Sunda Kelapa, dan menjadi persinggahan utama serta penghubung antara pedagang dari Arab, Parsi, India, dan Cina dengan negara-negara dari Arab, Parsi, dan Cina.

Hasanudin dalam membangun dan mengembangkan Kota Banten lebih menitikberatkan pada pengembangan di sektor perdagangan disamping memperluas daerah pertanian dan perkebunan. Ia juga mendorong peningkatan pendapatan rakyatnya dengan melalui pertumbuhan pasar yang cepat. Banten semasa Hasanudin memiliki persediaan lada yang cukup banyak, karena lada merupakan hasil perdagangan utama.

Untuk menggambarkan betapa ramainya perdagangan di Banten, hal ini dapat diceritakan sebagai berikut dibawah ini. Sekitar tahun 1596 di Kota Banten terdapat tiga pasar yang dibuka setiap hari. Pasar pertama dan terbesar terletak di sebelah timur kota yaitu Karangantu. Di sana banyak ditemukan pedagang-pedagang asing seperti India, Cina, Portugis, Arab, Turki, Pegu (Birma), Melayu,

Benggala, Gujarat, Malabar, Abesinia, dan dari seluruh Nusantara. Mereka berdagang sampai pukul sembilan pagi. Pasar kedua terletak di alun-alun dekat masjid agung, yang dibuka sampai tengah hari bahkan sampai sore hari. Di pasar ini diperdagangkan merica, buah-buahan, senjata keris, tombak, pisau, meriam kecil, kayu cendana, tekstil, kain putih untuk bahan batik, binatang peliharaan, kambing, dan sayuran. Orang Cina menjual benang sulam, sutra, damast, porselen, dan lain-lain. Di sini juga dijual rempah-rempah dan obat-obatan. Demikian besarnya pasar kedua ini sehingga ujungnya hampir menyambung dengan pasar pertama di pelabuhan. Pasar ketiga terletak di daerah Pecinan yang dibuka setiap hari sampai malam (Nina Lubis, 2003: 30). Cara jual belinya waktu itu masih berupa barter, yaitu menukar barang dengan barang yang lain terutama di daerah pedalaman.

Di Kota Banten ini juga terdapat bangunan-bangunan semi permanen milik pedagang pedagang Eropa (Belanda, Prancis, Denmark bahkan Portugis). Untuk memudahkan transaksi dagang dengan masyarakat Banten, masing-masing negara tersebut mempunyai gudang sendiri. Di sepanjang jalan menuju pusat kota terdapat toko-toko yang dikelola oleh bangsa Cina dan pedagang Islam.

Sultan Hasanudin kemudian membangun pusat kota Banten yang mengacu kepada rancangan pembangunan kota tradisional Jawa. Dibagilah wilayah Banten menjadi empat wilayah sesuai dengan arah mata angin. Bangunan istana berada di pusat kota dikelilingi beberapa bangunan penting. Di selatan istana didirikan rumah kepala pemerintahan Banten yang bertugas menjalankan seluruh aktifitas perdagangan dan pemerintahan.

Setelah Maulana Hasanudin wafat, ia digantikan oleh Maulana Yusuf yang naik tahta tahun 1570. Semasa Banten dipimpin oleh Maulana Yusuf, ia berhasil menyebarkan agama Islam sampai ke Banten Selatan, bahkan berhasil menduduki ibukota Kerajaan Pajajaran (Sunda) di Pakuan (Bogor). Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, strategi pembangunan dititikberatkan pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan, dan pertanian. Sultan Maulana Yusuf memperluas wilayah kekuasaan Banten

sampai jauh ke pedalaman. Pada masa ini pembangunan kota-kota berlangsung dengan pesat, seperti:

1. Wilayah kekuasaan Kerajaan Banten diperluas sampai jauh ke pedalaman, pembangunan kotanya berlangsung cukup pesat.
2. Masjid Agung diperluas dengan membuat serambi muka dan samping.
3. Dibangun Masjid Kasunyatan, di selatan Banten.
4. Batas kota diperjelas dengan membangun dinding/benteng kota yang terbuat dari batu bata dan karang.
5. Terdapat pemukiman/kampung-kampung di dalam kota yang letaknya mengelilingi keraton.

Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf perdagangan sudah sangat maju, sehingga Banten merupakan tempat penimbunan barang-barang dari segala penjuru dunia yang nantinya disebar ke seluruh kerajaan di Nusantara. Pada masa ini Islam sedang berkembang, bahkan Masjid Agung Banten dijadikan sebagai sarana dakwah dan bermusyawarah oleh para pemimpin kerajaan dengan ulama untuk membicarakan tentang ibadah dan keagamaan. Ia juga mengembangkan Pesantren Kasunyatan untuk tempat mengembangkan ajaran-ajaran Islam .

Mengenai Maulana Yusuf juga pernah diceritakan dalam babad Banten yang isinya bahwa Maulana Yusuf adalah seorang yang gagah perkasa dan memiliki keterampilan istimewa dalam ilmu perang. Pada masa Maulana Yusuf ini seluruh wilayah Banten baik di pusat Kota Banten Girang dan Banten Surosowan maupun daerah selatan telah masuk agama Islam. Pada masa ini Pelabuhan Banten sudah menjadi lebih ramai lagi, pedagang-pedagang dari berbagai negara berdatangan ke Banten untuk menjual hasil daerahnya dan membeli segala kebutuhan yang diperlukan. Situasi perdagangan tersebut dapat digambarkan seperti pedagang Cina membawa uang kepeng, porselen, sutra, beludru, benang mas, jarum, sisir, selop, kipas, kertas, dan sebagainya. Ketika pulang mereka membeli lada, nila, kayu cendana, buah pala, cengkih, kulit penyu, dan gading gajah.

Orang Arab dan Persia membawa permata dan obat-obatan, orang Gujarat menjual kain dari kapas dan sutra, kain putih dari koromandel, pulangnya mereka membeli rempah-rempah, sedangkan orang Portugis membawa kain dari Eropah dan India

Ketika Maulana Yusuf memerintah Banten, ia lebih menekankan pada pengembangan Kota Banten, keamanan, dan pertanian. Ia membuat terusan-terusan dan bendungan-bendungan. Bahkan di pusat kota Ia juga membuat danau buatan yang terletak di tengah pesawahan yang disebut "*Tasikardi*" Tasikardi berasal dari air dari Sungai Cibanten dialirkan melalui terusan khusus ke danau, kemudian dibagi ke daerah-daerah pesawahan di sekelilingnya. Danau Tasikardi selain untuk pengairan sawah, juga digunakan sebagai penampungan air untuk kebutuhan kota. Setelah dibersihkan/diendapkan, melalui pipa-pipa yang terbuat dari keramik, air tersebut dialirkan ke keraton dan tempat-tempat lain di dalam kota. Di tengah-tengah danau buatan tersebut terdapat sebuah pulau kecil yang dipergunakan sebagai tempat rekreasi.

Semasa pemerintahan Maulana Yusuf, Banten menjadi semakin ramai oleh penduduk pribumi maupun pendatang. Untuk menangani masalah penduduk, dibuatlah aturan penempatan penduduk sesuai dengan keahlian dan asal daerah penduduk itu, sehingga tumbuh perkampungan untuk orang India, orang Pegu, Orang Arab, dan sebagainya. Selain itu juga dibuatkan perkampungan untuk orang asing yang ditempatkan di luar tembok kota. Seperti Kampung Pekojan yang letaknya di sebelah barat Pasar Karangantu yang diperuntukkan bagi orang Arab, Gujarat, Mesir, dan Turki. Kampung Pecinan yang terletak di sebelah barat Masjid Agung dan luar batas kota, diperuntukkan bagi orang Cina. Kampung Panjunan, tempat bermukim tukang anjun (gerabah), Kampung Kepandean, tempat pandai besi, dan Pagongan, pemukiman orang-orang penabuh gong. Pengelompokan pemukim ini selain untuk keserasian kota juga dimaksudkan untuk keamanan. Tembok di sekeliling kota juga diperkuat dan dipertebal. Demikian juga tembok benteng di sekeliling istana, diperkuat dengan lapisan luar yang terbuat dari bata dan batu karang serta parit-parit di sekelilingnya. Data sejarah

menyebutkan bahwa di Banten terdapat pemukiman orang asing diantaranya pemukiman orang Cina dan Portugis yang letaknya di sebelah barat kota. Orang Cina tersebut mendiami rumah mewah dan tercatat mereka tinggal di Banten melengkapi diri dengan tong-tong minuman yang dilapisi emas. Masyarakat Cina di Banten, memiliki catatan unik. Mereka dan keturunannya telah mempunyai hubungan dagang dengan Banten, jauh sebelum hubungan dagang Banten dengan bangsa Eropa. Masyarakat Cina juga telah berlayar dan berdagang pada abad 12 dan kemudian singgah di Banten untuk melakukan transaksi dagang. Sebagian awak kapalnya memilih untuk tidak kembali pulang ke negeri asalnya tetapi sebaliknya malah tinggal dan menetap khusus yang diaktualkan dengan wilayah atau kampung khusus masyarakat Cina. Kampung Pecinan terletak di sebelah barat wilayah Banten dan hingga sekarang sisa-sisa bangunannya masih ada.

Menurut Willem Lodewijckzs, pada tahun 1596 perkampungan Cina tersebut terletak di sebelah barat kota, dikelilingi pagar kayu dan rawa yang cukup baik untuk pertahanan alam. Selanjutnya pada tahun 1616 orang-orang Cina telah memindahkan perkampungannya lebih ke selatan Kota Banten. Tujuan mereka adalah agar dapat lebih dahulu mencegat perahu bermuatan lada yang baru turun dari pedalaman dan memborongnya semua. Adapun lokasi yang lama menjadi perkampungan nelayan. (Retno Wujati, 1990: 137).

Adapun pemukiman untuk orang Belanda sendiri digambarkan terpisah, yaitu berpagar kuat terhadap daratan dan terdapat pula rawa-rawa. Menurut Wijbbrant van Waerwijk, pada tanggal 20 Agustus 1603 orang-orang Belanda memperoleh sebidang tanah dari sultan yang terletak di bagian kota yang berposisi baik. Mereka mendirikan bangunan di tanah tersebut. Akan tetapi menurut Chijs, bangunan ini terletak di wilayah kota di tepi jalan lurus menuju istana sultan. Namun lama kelamaan, tempat tersebut tidak dapat menampung orang-orang Belanda yang jumlahnya semakin bertambah. Selain itu orang-orang Belanda juga ditempatkan di muara Sungai Cibanten, tepatnya di Benteng Speelwijk. Namun ternyata tidak semua orang Belanda bertempat tinggal di dalam benteng tersebut. Ada sekitar 31 buah rumah orang Belanda yang

letaknya berseberangan dengan jembatan gantung, yaitu di sebelah barat Benteng Speelwijk. Akan halnya pedagang utama yang berkebangsaan Belanda menempati sebuah rumah yang letaknya di bagian timur kota.

Pada tahun 1580 Mulana Yusuf meninggal dunia dan dimakamkan di Pakalangan Gede, dekat Kampung Kasunyatan sekarang. Oleh karena itu kemudian ia diberi gelar “Pangeran Panembahan Pekalangan Gede atau Pangeran Pasarean”. Sebagai penggantinya adalah Pangeran Muhammad.

Keadaan Banten semasa Maulana Muhammad ini dapat diketahui dari kesaksian Willem Lodewyksz yang mengikuti perjalanan Cornelis de Houtman. Willem Lodewyksz mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Ia menjelaskan mengenai Kota Banten waktu itu, bahwa Banten telah mempunyai tembok-tembok yang lebarnya lebih dari depa orang dewasa, dan terbuat dari bata merah. Tembok itu tidak mempunyai menara, melainkan semacam tiang gantungan setinggi tiga stage yang terbuat dari kayu besar (kira-kira 3 m). Orang dapat melayari kota seluruhnya melalui banyak sungai. Diperkirakan luas Kota Banten seluas Kota Amsterdam pada tahun 1480.

Pada masa pemerintahan Maulana Muhammad, bangunan keraton dapat dikatakan sudah sempurna. Mulai dari pintu gerbang istana samping di luar terdapat bangunan-bangunan *Made Bahan* juga *Made Mundu* dan *Made Gayam*, selanjutnya *Sitiluhur* atau *Sitinggil* yang di dekatnya terdapat bangunan untuk gudang senjata dan kandang kuda kerajaan. Kemudian terdapat *Pakumbalan* yaitu penjagaan untuk *Wonggunung*, di sebelah utara terdapat perbendaharaan, dan di sebelah barat berdiri masjid dengan menara disampingnya. Selanjutnya terdapat perkampungan yang disebut Candiraras, dimana terdapat bangunan-bangunan yang di antaranya bernama *Made bobot* dan *Made Sirap*. Di sebelah timur *Made Bobot* terdapat *Mandapa*, yaitu suatu bangunan terbuka yang dipasang meriam *Ki Jimat* mengarah ke utara. Dekat Sri Manganti terdapat *Waringin kurung* dan *watu gilang*, di tepi sungai ada *panyurugan* atau galangan kapal-kapal kerajaan. Kemudian di

sebelah barat laut terdapat pasar dan di sebelah barat terdapat masjid besar kerajaan.

Maulana Muhammad dikenal sebagai orang yang saleh, sebab selain dapat menyebarkan agama Islam, ia juga dikenal sebagai penulis kitab-kitab keagamaan. Dalam bidang keagamaan (agama Islam), Maulana Muhammad banyak sekali berperan, antara lain ia membuat tempat sholat bagi wanita yang kemudian disebut *pawadonan* atau *pawestren* di Masjid Agung Banten. Ia juga memperbaiki dan memperindah Masjid Agung Banten. Semasa hidupnya Pangeran Muhammad mendapat gelar “Kanjeng Ratu Banten Surosowan” atau Pangeran Ratu Ing Banten” Gelar ini diberikan karena waktu itu Sultan berusia 9 tahun, maka segala urusan pemerintahan ditangani oleh Mangkubumi.

Maulana Muhammad terus berupaya menyebarkan agama Islam, bahkan hingga melakukan invasi ke Palembang, sayang sekali ketika Palembang hampir jatuh, Maulana Muhammad meninggal dunia tertembus peluru. Ia meninggal dalam usia yang masih sangat muda, kurang lebih berusia 25 tahun. Maulana Muhammad mendapat gelar “Pangeran Seda ing Palembang” atau “Pangeran Seda ing Rana”. ♦

BAB III

KEJAYAAN KOTABANTEN LAMA

A. Kedatangan Belanda di Banten

SETELAH Maulana Muhammad meninggal dunia, sebagai penggantinya seharusnya adalah putra mahkota yaitu Sultan Abdul Mafakhir. Namun karena usianya baru 5 bulan, untuk menjalankan roda pemerintahan ditunjuklah Mangkubumi Jayanagara sebagai walinya. Mangkubumi Jayanagara dikenal sebagai seorang yang lemah lembut dan luas pengalamannya, terutama di bidang pemerintahan. Setiap akan mengambil keputusan, ia selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar lainnya terutama dengan seseorang yang bijaksana. Bertepatan dengan itu, datanglah Belanda ke Banten (1596). Pada mulanya kedatangan Belanda tersebut sebagai pedagang.

Ketika Belanda datang, Banten sudah menjadi sebuah bandar perdagangan yang penting. Dalam buku hariannya yang ditulis Tome Pires, menggambarkan tentang situasi kota, pusat perdagangan, masyarakat pasar, dan produk maupun harga, yang semuanya menggambarkan situasi Bandar.

Banten bagi Belanda dilukiskan bagaikan Amsterdam Kuno. Lukisan tersebut menggambarkan bahwa Banten terletak pada dataran kosong, pada kaki perbukitan kira-kira 25 mil berlayar antara Sumatra dan Jawa. Pada kedua sisi dari kota mengalir sungai dan yang ketiga melewati tengah kota. Pada tanggal 23 Juni 1596 rombongan orang Belanda pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Waktu itu Banten sudah merupakan

pusat kekuasaan yang dikepalai seorang raja, di samping sebagai kota pelabuhan besar, disana banyak terdapat saudagar dari Jawa, Cina, Benggali, Gujarat, Arab, Persi, Turki, dan lain-lain. Para saudagar tersebut menjajakan dagangannya masing-masing di Banten.

Sebelum Belanda datang ke Banten, sebenarnya terlebih dahulu telah datang orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang Inggris. Mereka mendirikan loji. Melihat kedua negara tersebut mendirikan loji, orang Belanda pun mendirikan loji. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Banten tersebut selain bertujuan berdagang, mereka juga mencari rempah-rempah dan lada dimana kedua barang tersebut sangat dibutuhkan di Benua Eropa. Oleh karena negara tersebut mempunyai tujuan yang sama, maka persaingan dagang pun tidak dapat dihindari. Dalam persaingan dagang tersebut ternyata dimenangkan bangsa Belanda. Bangsa Portugis melarikan diri dari perairan Banten setelah armada mereka diserang oleh armada Belanda.

Kedatangan Belanda bagi Banten merupakan sebuah ancaman besar, meskipun pada awal kedatangannya disambut dengan baik, oleh karena pihak Banten banyak yang memusuhi orang-orang Belanda, akhirnya mereka pun meninggalkan Banten.

Kedatangan orang Belanda bertepatan dengan rencana penyerangan Banten ke Palembang. Namun sepulang pasukan Banten dari Palembang, ternyata rombongan orang Belanda masih berada di Banten, mereka menunggu panen lada yang akan dibelinya dengan harga murah. Selain itu juga terdengar kabar kalau orang-orang Belanda tersebut telah merampok dua buah kapal milik Banten yang membawa lada, dan lari ke luar Pelabuhan Banten. Namun beberapa orang pasukan Banten berhasil menangkap Cornelis de Houtman, dan menahannya. Setelah ditebus dengan 45.000 gulden, Cornelis de Houtman pun dilepaskan.

Tidak lama kemudian pada tahun 1598 datang lagi orang-orang Belanda ke Banten, rombongan ini datang dibawah pimpinan Jacob Van Neck dan Van Waerwyck. Mereka mencoba untuk mendapatkan *konsesi*. Kedatangan Belanda di bawah pimpinan Van Neck kali ini dapat mengambil hati para pembesar Banten, sehingga mereka

mendapat ijin untuk mendirikan kantor dagang di Banten. Keberhasilan dua ekspedisi dagang Belanda ini membuka jalan orang-orang Belanda untuk kembali berdagang ke Indonesia.

Orang-orang Belanda semakin banyak berdatangan ke Banten. Hal itu membuat iri Negara lain. Suatu hari datanglah utusan khusus dari Portugis untuk memberikan hadiah kepada Mangkubumi Jayanagara sebesar 10.000 rial dan berbagai perhiasan mahal, dengan catatan agar Banten memutuskan hubungan dagang dengan Belanda dan akan menyergap kapal-kapal milik Belanda. Keinginan Portugis tersebut ternyata didengar oleh Belanda, sehingga kapal-kapal dagang mereka tidak berlabuh di Banten. Oleh karena tidak ada lagi kapal dagang Belanda yang berlabuh, Mangkubumi pun dituduh Portugis telah berkhianat membocorkan, rencana Portugis untuk menyergap kapal Belanda.

Sebagai kota pelabuhan, segala aktifitas Banten bertumpu di Pelabuhan Banten. Moment ini bagi Belanda merupakan kesempatan emas untuk mengambil keuntungan, apalagi tahun 1600 Kerajaan Banten sedang mencapai puncak kejayaannya. Dalam arti setiap pedagang yang akan membeli atau menjual lada selalu datang ke Banten. Saat itu Banten menjadi pusat perdagangan lada, cengkeh, dan pala dari Maluku.

Sebuah kenyataan persaingan dagang untuk mendapatkan rempah-rempah dan lada sangatlah ketat. Untuk mengantisipasi agar kapal dagang milik Belanda tidak kehabisan lada, maka tahun 1602 didirikanlah *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang kita kenal sebagai kompeni (kumpeni) atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Persekutuan ini melakukan monopoli di mana-mana. Badan ini selain untuk melindungi para pedagang Belanda, juga untuk menghadapi persaingan dengan para pedagang Inggris yang tergabung dalam *East India Company* (EIC). Selain itu VOC mempunyai hak-hak khusus, seperti monopoli untuk berdagang di wilayah antara Amerika dan Afrika, membentuk angkatan perang sendiri, mengadakan peperangan, mendirikan benteng, bahkan menjajah. VOC juga berhak mengangkat pegawainya sendiri dan mempunyai mata uang sendiri.

Selain memiliki hak-hak khusus, VOC pun memiliki kewajiban tersendiri. Kewajiban VOC adalah bertanggung jawab kepada Statwen General dan pada waktu perang harus membantu pemerintah dengan uang dan angkatan perang. Sementara itu Inggris pun mendapat konsesi yang sama, sehingga Banten saat itu menjadi arena persaingan di antara orang-orang asing itu.

Ketika Pemerintahan Belanda di Indonesia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, ia berhasil memajukan usaha dagang (VOC) di Batavia (Jakarta). Dengan didirikannya VOC di Jakarta, Belanda akhirnya berhasil memblokir perdagangan di Pelabuhan Banten. Hal itu tentunya sangat merugikan Banten. Banyak sekali perahu-perahu Cina yang seharusnya melakukan perdagangan di Banten, kemudian dipatahkan perjalanannya oleh VOC agar melakukan perdagangan di Batavia. Hal inilah yang membuat Banten membenci VOC, sehingga hubungan antara keduanya menjadi renggang.

Pada masa Banten di bawah pemerintahan perwalian oleh Mangkubumi Jayanagara sebagai wakil dari Sultan Abdul Mafakkir dapat dikatakan sebagai masa yang paling pahit bagi Banten. Hal itu disebabkan adanya pertentangan di antara keluarga kasultanan Banten, yang pada intinya ingin merebut tahta kerajaan karena sultan masih kecil. Pertentangan antarkeluarga kerajaan semakin memanjang, sebab Mangkubumi terkadang sibuk mengatasi para pedagang Belanda yang banyak bersengketa, baik dengan anak negeri Banten maupun pedagang dari Inggris dan Portugis.

Tahun 1602 Mangkubumi meninggal, dan digantikan oleh adiknya. Namun itupun tidak bertahan lama karena selama kepemimpinan Mangkubumi menimbulkan pertentangan di antara keluarga keraton. Selanjutnya kepemimpinan diberikan kepada ibunda Sultan yaitu Nyai Gede Wanagiri. Nyai Gede Wanagiri menikah lagi dengan salah seorang bangsawan keraton, atas desakan dari pihak tertentu, suaminya diangkat sebagai Mangkubumi yang baru. Kerajaan dibawah kepemimpinan Mangkubumi baru semakin kacau, selain tidak mempunyai wibawa, Mangkubumi baru juga banyak menerima suap dari pedagang-pedagang asing, sehingga banyak peraturan-

peraturan dan perjanjian dagang yang lebih banyak menguntungkan mereka dibanding untuk kepentingan negara dan rakyat. Akibatnya rakyat menderita, sedangkan raja tidak tahu apa-apa. Kekacauan pun semakin bertambah.

Kerajaan Banten akhirnya dapat diselamatkan dari segala pertentangan antarkeluarga kerajaan. Hal itu berkat Pangeran Rana Manggala, yaitu pangeran yang menggantikan Mangkubumi. Ia adalah putra Maulana Yusuf dari istri yang bukan permaisuri. Tindakan pertama yang dilakukannya adalah menertibkan keamanan negara, yaitu dengan memberikan hukuman yang tegas kepada pangeran atau ponggawa yang melakukan penyelewengan, bahkan untuk kelancaran pemerintahan Sultan Muda tidak diijinkan mempengaruhi urusan pemerintahan. Pangeran Rana Manggala juga melakukan pembaharuan-pembaharuan atas keputusan mangkubumi-mangkubumi terdahulu. Peraturan mengenai keharusan pedagang Cina untuk menjual lada hanya kepada Belanda juga dicabut. Dan dibuatlah peraturan baru, yaitu siapa saja dapat bebas membeli atau menjual ladanya dengan harga yang disetujui bersama. Dalam menghadapi pedagang-pedagang asing Eropa, Mangkubumi tidak bertindak “berat sebelah” Tindakan Belanda yang kira-kira menyinggung selalu dihadapi dengan kepala dingin. Seperti naskah perjanjian tahun 1609 yang dibuat Belanda untuk Mangkubumi Rana Manggala, yang isinya:

1. Belanda bersedia membantu Banten apabila Banten diserang oleh negara lain, tetapi kalau Banten akan menyerang negara lain, Belanda tidak akan membantu.
2. Belanda dibolehkan berniaga dengan rakyat Banten. Dan apabila ada orang Belanda yang ingin menetap di Banten dia tidak dikenakan pajak.
3. Bangsa Eropa selain bangsa Belanda tidak dibolehkan tinggal di Banten. (464 Tahun Kabupaten Serang, 1990: 30)

Isi perjanjian tersebut sebenarnya sangat merugikan Banten, namun Mangkubumi Rana Manggala tetap menerimanya dengan senyum, walaupun hati kecilnya menolak isi perjanjian tersebut.

Rana Mangggala sebenarnya sangat keras terhadap Belanda, lebih-lebih dalam hal menerapkan pajak. Belanda diharapkan untuk membayar pajak yang tinggi sebesar f. 11.533.760,00, yang diuraikan dalam pajak ekspor barang f. 33.760,00, kemudian kain dikenakan pajak 3 % dari harga jual. Pajak itu hanya berlaku untuk Belanda, sebab pedagang Cina hanya dikenakan pajak sebesar 5 %, hal ini dimaksudkan agar Belanda tidak lagi berdagang di Banten. Akibat dari peraturan yang dibuat oleh Mangkubumi Rana Manggala tersebut, maka kantor dagang VOC pun tidak didirikan di Banten, melainkan di Jayakarta (Jakarta).

Sementara itu yang menjadi penguasa di Jayakarta adalah Pangeran Wijayakrama. Ia menginginkan Pelabuhan Jayakarta menjadi ramai seperti Pelabuhan Banten, sehingga ketika ada tawaran Belanda untuk mendirikan kantor dagang VOC diterimanya dengan baik. Akibatnya hubungan baik antara Mangkubumi Rana Manggala dengan Pangeran Wijayakrama pun menjadi renggang, sebab Mangkubumi Rana Manggala anti Belanda sedangkan Pangeran Wijayakrama justru bekerja sama dengan Belanda. Semenjak dibukanya kantor dagang VOC di Jayakarta, pelabuhan Banten semakin lama semakin sepi, meskipun kantor dagang milik Inggris masih berdiri di sana.

Dengan dibukanya kantor dagang VOC di Jayakarta, semakin mempersulit perdagangan di Pelabuhan Banten, apalagi Belanda sudah mulai melarang kapal-kapal asing untuk berlabuh di Pelabuhan Banten atau pun membeli lada ke Banten. Hal itu terjadi pada kapal dagang milik Cina yang berlabuh di Pelabuhan Banten, dan membeli lada. Ketika diketahui Belanda Cina tersebut diperintahkan kembali lagi ke Pelabuhan Jayakarta.

Semakin dipersempitnya Pelabuhan Banten dari pedagang kapal-kapal asing, maka pelabuhan Jayakarta menjadi semakin ramai. Bahkan gudang VOC sudah tidak dapat lagi menampung barang-barang seperti lada dan rempah-rempah. Akhirnya VOC membangun lagi benteng. Pembangunan benteng ini ditentang keras oleh Pangeran Jayakarta, tetapi Belanda tidak menghiraukannya. Hati kecil Pangeran Jayakarta terpukul, tetapi tidak bisa berbuat banyak sebab pembesar-

pembesar keraton pun sering mendapat hadiah dari Belanda. Salah satunya jalan bagi Pangeran Jayakarta Wijayakrama adalah mengeluarkan ijin agar semua bangsa asing boleh mendirikan benteng. Keputusan tersebut disambut baik oleh Inggris yang langsung membuat benteng. Tindakan Inggris ini ditentang Belanda, bentengnya pun kemudian dihancurkan. Dengan dihancurkannya benteng, Inggris mendatangkan bantuan guna menyerang Belanda, dan Jan Pieter Zoon Coen pun lari ke Ambon.

Ketika pertempuran antara Inggris dan Belanda terjadi para pembesar Keraton Surosowan segera mengadakan pertemuan guna mengirimkan bala bantuan ke Pelabuhan Jayakarta, sebab Mangkubumi Rana Manggala mengharapkan kehancuran Belanda. Benteng Belanda pun terkepung. Namun sayang dalam pengepungan tersebut tidak dilakukan penyerangan, hanya penahanan komandan pasukan Belanda dan membayar kerugian 6.000 real kepada Pangeran Jayakarta. Meskipun pasukan bala bantuan Banten mundur ke Pelabuhan Banten, tetapi Mangkubumi Rana Manggala tetap bersikukuh agar Belanda menyerahkan benteng untuk dihancurkan. Belanda tidak mau menyerah, sebab kekuatan pasukan Rana Manggala tidak begitu kuat.

Sepulang Jan Pieter Zoon Coen dari Ambon, ia melakukan perampasan daerah-daerah Jayakarta dan Banten, tembok-tembok batas kota dibakar, dan benteng Jayakarta dihancurkan, sehingga Mangkubumi Rana Manggala pun menyerahkan kembali orang-orang Belanda yang ditawannya. Kekalahan pasukan Banten di Jayakarta, membuat rakyat Banten tidak pernah berhenti menyerang VOC.

Tahun 1624 Mangkubumi Rana Manggala jatuh sakit, sehingga masalah kerajaan diserahkan kepada Sultan Abdullah Kadir. Meskipun demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan keraton Mangkubumi Rana Manggala masih dimintai pendapatnya. Hal itu dibuktikan dalam keputusan mengenai hubungan antara Banten dan Kumpeni Belanda, yang pada intinya Banten tetap tidak ingin bersahabat dengan Kumpeni Belanda, walaupun ada sebagian pembesar Kerajaan Banten yang menginginkan sebaliknya, dalam arti ingin berdamai. Pada tahun 1626, Mangkubumi Arya Rana

Manggala meninggal dunia, kekuasaan Banten sepenuhnya berada di tangan Sultan Abdullah Kadir atau nama kepanjangannya Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir.

Pada masa pemerintahannya, Sultan Abdulmafakir Mahmud Abdulkadir berusaha meningkatkan Kerajaan Banten dalam bidang politik, kesejahteraan masyarakat, pertanian, perdagangan. Di samping itu sultan juga amat gigih dalam menentang penjajahan berikut monopoli Kumpeni Belanda. Bertepatan dengan itu hubungan antara Banten dan Jayakarta (Batavia) sedang memburuk. Banyak terjadi perampokan yang dilakukan orang Banten terhadap barang-barang milik Kumpeni. Gangguan-gangguan tersebut bukan saja terjadi di darat tetapi juga di laut. Bahkan kapal-kapal milik Kumpeni Belanda banyak yang dibajak, kapalnya dirampas dan awak kapalnya dibunuh atau ditawan.

Kumpeni Belanda mengantisipasi kejadian-kejadian di atas dengan melakukan pembalasan. Mereka mengadakan pembersihan ke daerah-daerah kekuasaan Banten, seperti di Tanahara, Anyer, dan beberapa daerah di Lampung. Pertempuran-pertempuran di daerah tersebut pun tidak dapat dihindari. Pertempuran diakhiri dengan kemenangan Banten. Hal itu disebabkan kekuatan Kumpeni sedang lemah, yang pada saat itu juga mereka sedang diserang dari Mataram.

Selanjutnya Kota Banten kembali diblokade oleh pasukan laut Kumpeni Belanda. Blokade di Tanahara dapat digagalkan oleh pasukan Tubagus Singaraja. Akan halnya pengepungan Belanda di perairan Pelabuhan Banten baru dapat digagalkan setelah ada taktik baru. Atas usul Wangsadipa, prajurit Banten memuat sampah dan rumput-rumput kering di atas beratus-ratus perahu kecil yang kemudian disiram minyak tanah dan dibakar di dekat kapal-kapal Belanda, sehingga kapal-kapal Belanda pun banyak yang ikut terbakar.

Tahun 1650 di Banten terjadi perselisihan antara Banten dan Cirebon. Hal ini karena Cirebon berada di bawah dua kerajaan Islam, yaitu Banten dan Mataram. Waktu itu Mataram berkeinginan agar Banten dan Cirebon tunduk di bawah Mataram, Cirebon sendiri terjalin hubungan perkawinan dengan Mataram. Oleh karena itu

Cirebon dapat tunduk kepada Mataram. Adapun Banten tidak mau tunduk kepada Mataram, sehingga Mataram mencaricari kesempatan agar Banten dan Cirebon dapat berselisih, Mataram pun pernah mengancam, seandainya Banten tidak mengakui kekuasaan Mataram, maka Cirebon akan melakukan penyerangan ke Banten. Ancaman tersebut tidak dihiraukan, sehingga Cirebon melakukan penyerangan ke Banten. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama “Peristiwa Pagarage” atau “Peristiwa Pacerebonan” dimana Cirebon mengalami kekalahan. Untuk memperingati kemenangannya, Banten mengadakan Sasapton.

Tahun 1661 Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir meninggal dunia. Sebagai penggantinya diangkatlah putranya, Pangeran Adipati Anom atau Pangeran Surya.

B. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap Belanda

Sultan ageng Tirtayasa adalah salah seorang di antara putra Sultan Abdulma'ali Achmad, putra Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir yang memerintah Banten 1596-1661 jadi Sultan Ageng Tirtayasa adalah cucu dari Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir. Sultan Ageng Tirtayasa adalah nama julukan, sebenarnya ia bernama Sultan Abdul Fath Abdulfathi. Semasa Banten di bawah pimpinan Sultan Abdulfathi inilah Banten mengalami puncak kejayaan.

Sultan Ageng Tirtayasa dikenal gigih dalam menentang Belanda. Ia adalah seorang ahli strategi perang, selain itu ia juga banyak menaruh perhatian pada perkembangan pendidikan agama Islam. Ia berhasil memulihkan perdagangan Banten yang mengalami masa surut akibat berdirinya kantor dagang VOC. Banten pun menjadi lebih dekat dengan pedagang-pedagang Eropa seperti Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis. Selain itu Banten mampu mengembangkan usaha dagang dengan Persia, Mekah, Koromandel, Benggala, dan Siam. Belanda, melalui Gubernur Jenderalnya, Rijklof van Goens menyatakan bahwa Sultan Ageng Tirtayasa adalah musuh terbesar Belanda. Pada masa inilah rakyat Banten terus-menerus

melakukan perlawanan terhadap Belanda, yaitu antara tahun 1656, 1658, dan 1659.

Sepak terjang Sultan Ageng Tirtayasa dapat dilihat dari kegiatannya baik di dalam maupun di luar wilayah Banten. Dalam wilayah Banten Sultan Ageng Tirtayasa banyak melakukan pembangunan di bidang sarana dan prasarana, seperti pembuatan irigasi untuk menunjang perairan dan pertanian. Tujuan pembangunan perairan adalah dalam rangka meningkatkan ketahanan Banten dan memudahkan transportasi dalam peperangan. Adapun tujuan dalam pembangunan pertanian adalah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menghadapi sepak terjang Sultan Ageng Tirtayasa, Belanda kemudian ingin melakukan pembaharuan, adapun caranya dengan memberi berbagai hadiah untuk sultan Banten agar hatinya melunak kepada Belanda. Namun hadiah-hadiah tersebut ditolak dan Sultan Abdulfath tetap ingin mengusir penjajah dari Banten. Selanjutnya Sultan pun mengadakan gerilya besar-besaran, dengan cara melakukan pengrusakan-pengrusakan kebun tebu, pencegatan serdadu Belanda, dan pembakaran markas patroli Belanda, bahkan kapal Belanda yang memasuki perairan Banten pun dikawal ketat oleh pasukan Abdulfath.

Selain berhubungan ke dalam wilayah Banten, Sultan Ageng Tirtayasa juga melakukan hubungan ke luar wilayah, yaitu melakukan konsolidasi kekuatan dengan Lampung, Salebar, Bengkulu, Cirebon dan lainnya. Hubungan pelayaran juga dilakukan dengan Kerajaan Goa. Semakin banyak berhubungan dengan daerah-daerah di luar Banten, maka Pelabuhan Banten menjadi sangat ramai dikunjungi para pedagang asing seperti dari Persi (Iran), India, Arab, Jepang, Filipina, Melayu, Pagu, dan sebagainya. Bahkan beberapa daerah seperti Lampung dan Indragiri memberikan bantuan langsung kepada Sultan Banten untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Bersamaan dengan itu Belanda juga sedang sibuk menyiapkan pasukan untuk menghadapi perlawanan rakyat Indonesia di Makasar, sehingga ketika menghadapi perlawanan Sultan Fath di Banten ini Belanda tidak bisa menyiapkan pasukannya.

Setelah beberapa kali pertempuran yang banyak merugikan kedua belah pihak, maka bulan Oktober atau Desember 1657, Kumpeni mengajukan usul gencatan senjata. Perjanjian tersebut belum semuanya disepakati, karena antara kepentingan Belanda dan Banten selalu berbeda. Kemudian pada tanggal 29 April 1658 datanglah utusan Belanda ke Banten membawa surat dari Gubernur Jenderal Belanda yang berisi rancangan perjanjian persahabatan, yaitu:

1. Kedua belah pihak harus mengembalikan tawanan perangnya masing-masing.
2. Banten harus membayar kerugian perang berupa 500 ekor kerbau dan 1.500 ekor sapi.
3. Blokade Belanda atas Banten akan dihentikan setelah Sultan Banten menyerahkan pampasan perang.
4. Kantor perwakilan Belanda di Banten harus diperbaiki atas biaya dari Banten.
5. Sultan Banten harus menjamin keamanan dan kemerdekaan perwakilan Kumpeni di Banten.
6. Karena banyaknya barang-barang Kumpeni dicuri dan digelapkan oleh orang Banten, maka kapal-kapal Kumpeni yang datang di Banten dibebaskan dari pemeriksaan.
7. Setiap orang Banten yang ada di Batavia harus dikembalikan ke Banten, demikian juga sebaliknya.
8. Kapal-kapal Kumpeni yang datang ke Pelabuhan Banten dibebaskan dari bea masuk dan bea keluar.
9. Perbatasan Banten dan Batavia ialah garis lurus dari Untung Jawa hingga ke pedalaman dan pegunungan.
10. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, warga kedua belah pihak dilarang melewati batas daerahnya masing-masing. (Halwany, 1993: 137).

Dari rancangan yang diajukan Belanda tersebut, isinya sangat merugikan Banten, sebab terdapat kecurangan-kecurangan dan ketidaksesuaian Kumpeni atas perdamaian. Kemudian tanggal 4

Mei 1658, Sultan mengirimkan utusan ke Batavia untuk mengajukan perubahan naskah perjanjian, yaitu:

1. Rakyat Banten dibolehkan datang ke Batavia setahun sekali untuk membeli senjata, meriam, peluru, mesiu, besi, cengkeh, dan pala.
2. Rakyat Banten dibebaskan berdagang di Ambon dan Perak tanpa dikenakan pajak dan cukai.

Usulan Sultan diatas ditolak oleh Belanda, sebab bagi Belanda kalau point satu dikabulkan maka Banten akan memperkuat diri dan dapat merebut Batavia dari tangannya. Begitu pula dengan point kedua, bila usul tersebut dikabulkan maka Banten akan melakukan monopoli rempah-rempah di Ambon. Dengan adanya penolakan tersebut, hal ini berarti antara Belanda dan Banten memang tidak sepaham, sehingga jalan satu-satunya adalah peperangan. Dan sejak saat itulah Sultan Abdulfath Abdulfatah mengumumkan perang sabil untuk menghadapi Belanda, apalagi kemudian dipicu dengan terbunuhnya Lurah Astrasusila oleh Kumpeni.

Dalam menghadapi perang tersebut, prajurit Banten telah mempersiapkan kekuatannya, baik di sektor laut yang tujuannya untuk menjaga perairan, maupun di sektor darat yang tujuannya untuk menjaga musuh yang ditempatkan di daerah selatan, daerah kota Surosowan, dan pasukan penyerang. Selain itu juga disiapkan pasukan meriam. Pasukan ini ditempatkan di sekitar pantai, sekitar ibukota kasultanan, yang tujuannya untuk menjaga musuh yang datang dari Teluk Banten.

Pada hari yang telah ditentukan Senin (1580 Saka atau 1657 M), pasukan perang Banten berangkat ke pos penyerangannya masing-masing. Demikian pula dengan pasukan tambahan yang berangkat pada hari itu juga, sehingga barisan terdepan sudah sampai di Pangapon sedangkan barisan belakang masih berada di alun-alun Surosowan. Untuk tempat peristirahatan, pasukan Banten mengambil tempat di daerah Angke Tangerang.

Selama tujuh hari tujuh malam, pasukan Banten dan Belanda saling berhadapan tanpa ada salah satu pun yang mendahului

menyerang. Baru setelah Senopati Ing Ngalaga naik kuda berkeliling sambil menantang musuh, pertempuran pun berlangsung hingga berhari-hari. Hari berikutnya peperangan dilanjutkan dengan formasi penyerangan, yaitu untuk pasukan Banten menggunakan taktik *manuk dadali* (yaitu formasi menyebar), sedangkan pasukan Belanda dengan formasi *papak* (melingkar tetapi bersatu). Dalam pertempuran tersebut, yang banyak mengalami kerugian adalah pihak Belanda, sebab pasukan Banten melakukan penyerangan dari berbagai penjuru, baik belakang ataupun depan markas Belanda. Apalagi pasukan pimpinan Wiraangunangun kemudian melakukan pembakaran di berbagai tempat, baik di kampung-kampung, maupun markas Belanda, atau kebun-kebun tebu milik Belanda, sehingga pihak Belanda banyak menanggung kerugian materi, dan tidak sedikit anggota pasukannya yang tewas terbunuh. Hari berikutnya Raden Senopati memanggil beberapa pengikutnya dan mengumumkan bahwa dia telah berhasil merampas barang-barang rampasan perang milik Belanda untuk diserahkan kepada Sultan di Surosowan. Sultan pun memberikan hadiah berupa tanah kepada prajuritnya yang telah berjasa kepada Sultan.

Keberhasilan prajurit Banten dalam menyerang pasukan Belanda tidak hanya terjadi di darat saja, juga di laut. Untuk sektor laut, pasukan Banten berhasil menghancurkan kapal milik Kumpeni, di antaranya di Tanjung Balukbuk, Tanjung Barabang, dan di perairan Gosong Bugang, serta berhasil merampas barang-barang. Hasil rampasan tersebut kemudian diserahkan kepada Sultan. Bahkan untuk pasukan meriam telah berhasil menembak kapal milik Belanda yang datang mengepung. Armada penyerang Belanda ini kemudian melarikan diri ke Batavia dan kapalnya ditinggalkan begitu saja.

Pos pertempuran yang berada di Angke Tangerang sudah berlangsung kurang lebih satu tahun. Untuk itu perlu dipikirkan adanya penggantian pasukan dalam melakukan penyerangan melawan Belanda. Tujuannya agar pasukan yang baru akan lebih segar. Namun dalam penggantian pasukan tersebut terdengar oleh Kumpeni Belanda, sehingga Belanda pun melakukan penambahan pasukan dari Batavia. Pertempuran di Angke pun berlangsung lagi.

Oleh karena Banten terus-menerus melakukan penyerangan, Belanda merasa terdesak sampai mendekati batas wilayah Batavia dan pejabat Kumpeni pun banyak yang mengungsi ke daerah lain.

Ketika penyerangan pasukan Banten terjadi bersamaan dengan itu Belanda sedang menghadapi perlawanan dari rakyat Makasar. Dalam keadaan terdesak, akhirnya Belanda mengusulkan jalan damai dengan Sultan Abdulfath, namun usulnya itu ditolak Sultan. Belanda kemudian meminta bantuan Sultan Jambi, agar mendesak Sultan Banten mau menerima jalan damai. Akhirnya tanggal 10 Juli 1859 ditandatangani jalan damai antara Sultan Abdulfath Abdulfatah dengan Gubernur Jenderal Belanda Joan Matsuiyker, dengan demikian untuk sementara peperangan antara Sultan Banten dan pasukan Belanda berhenti.

Pada saat-saat peperangan berhenti, Sultan Abdulfath mulai menata kembali kondisi kota dan Keraton Surosowan yang rusak. Sementara itu situasi hubungan dagang antara Inggris, Belanda, Perancis, dan Portugis dalam persaingan yang sangat ketat. Sultan pun banyak memesan senjata dari kedua negara tersebut. Masa-masa itu juga banyak digunakan oleh orang-orang Banten untuk pergi haji ke Mekah. Ketika pulang diantara mereka banyak yang membeli senjata ke Turki, apalagi hubungan antara Banten dan Turki sangat baik.

Upaya lain dari Sultan dalam menata kota adalah membuat tempat peristirahatan di Tangerang, membangun perkampungan prajurit di Pontang, dan membuat istana yang nantinya digunakan untuk pengontrol kegiatan di Tangerang dan Batavia. Pontang sendiri akan dijadikan penghubung antara Surosowan dan Tangerang. Pontang memang dipersiapkan sebagai tempat yang strategis, di samping sebagai daerah pertanian, penghasil padi untuk wilayah Banten, juga sebagai pos pembantu penyerangan ke Batavia.

Upaya Sultan dalam bidang ekonomi adalah memulihkan perniagaan di Banten. Selama ini perniagaan telah diambil alih oleh Belanda dengan dipindahkannya pusat perdagangan ke Pelabuhan Batavia saat ditandatanganinya perjanjian antara Banten dan Batavia. Kepulihan perniagaan di Banten menarik kapal-kapal dagang asing

untuk kembali berlabuh di Pelabuhan Banten. Pelabuhan Banten menjadi ramai kembali. Banyak kapal niaga asing seperti dari Manila, Jepang, Cina, India, Persia, dan Arab bahkan perwakilan Inggris, Denmark, dan Perancis, serta Belanda kembali membuat kantor perwakilannya di Banten.

Ramainya perdagangan di Banten ini, membuat Banten kemudian mengeluarkan uang emas Kesultanan Banten Selain itu di Banten, khususnya di komplek Masjid Agung dibuka pesantren untuk mendidik para pemimpin rakyat yang saleh dan taat beragama, bahkan untuk membina rakyat dan prajurit Banten didatangkan ulama dari Makasar yaitu Syekh Yusuf Taju'l Khalwati, yang kemudian dijadikan guru dan mantu Sultan Abdulfath.

Begitulah semasa Sultan Abdulfath memimpin sebagai Sultan Banten, ia membangun kemakmuran rakyat Banten dan selalu mengusir penjajah Belanda. Sehingga gubernur Belanda pun pernah mengirim surat kepada pemerintah Kerajaan Belanda, yang isinya : “yang amat perlu untuk pembinaan negeri kita adalah penghancuran dan penghapusan Banten harus ditaklukkan, bahkan dihancurleburkan, atau Kumpeni yang lenyap” (Halwany, 1993: 149)

Anak pertama Sultan Abulfath Abdul Fattah bernama Abdul Kohar. Seperti kebiasaan yang dilakukan sultan-sultan sebelumnya, Sultan Abdulfath mengangkat putra pertama sebagai putra mahkota. Jabatan ini biasanya dikaitkan dengan Mangkubumi pembantu atau Mangkubumi kedua dalam struktur pemerintahan. Wewenang yang diberikan ini cukup besar pengaruhnya, sehingga semua kebijaksanaan Sultan haruslah berdasarkan musyawarah antara sultan, mangkubumi, dan putra mahkota. Oleh karena itu putra mahkota memiliki pembantu sendiri seperti pasukan pengawal. Putra mahkota ini oleh Sultan Abdulfath diberi kekuasaan penuh untuk mengatur urusan dalam negeri, sedangkan urusan luar negeri dipegang oleh Sultan sendiri. Sejak itulah sultan pindah dari Keraton Surosowan dan menempati keraton di Pontang Tirtayasa.

Sultan Abdulfath menempati istana yang letaknya sangat strategis baik untuk perlawanan di lautan maupun di daratan. Tempat ini juga

terletak di tepi pantai di jalan kuno, yang dapat dipergunakan untuk menghubungkan serta mempercepat bantuan tentara yang dengan mudah mencapai daerah Jakarta. Dari Tirtayasa itulah Sultan Abdulfath merencanakan dan melaksanakan pembangunan di bidang pertanian dan pengairan.

Kepindahan Sultan Abdulfath ke Pontang Tirtayasa, merupakan kesempatan emas bagi Belanda untuk mendekati Putra Mahkota Abdul Kohar. Bahkan Putra Mahkota termakan oleh bujuk rayu dan bujukan halus Belanda. Dari bujuk rayunya Belanda memperoleh segala kemudahan dalam hal perdagangan atau bidang lainnya. Bahkan dalam setiap acara keraton utusan Belanda selalu diundang.

Kebiasaan Putra Mahkota Abdul Kohar ini tidak mendapat simpati dari ayahnya. Untuk kebajikannya, Sultan kemudian menyuruh Abdul Kohar menunaikan ibadah haji, dengan harapan sepulang dari haji dapat berubah pikiran. Selama Abdul Kohar menunaikan ibadah haji, segala urusan Istana Surosowan diserahkan kepada adiknya, yaitu Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya menuruni sifat ayahnya, yaitu membenci orang-orang Belanda.

Setelah Sultan Abdul Kohar pulang dari haji, ia kaget sebab ternyata Pangeran Purbaya lebih banyak mendapat kekuasaan dari ayahnya. Terjadilah ketegangan antara Pangeran Purbaya, Pangeran Abdul Kohar yang kemudian mendapat sebutan Sultan Haji, dan Sultan Abdulfath.

Ketegangan yang terjadi dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengadu domba antara anak dan ayah. Akibatnya Sultan Haji lebih percaya kepada Belanda, dan sekaligus dijadikan sebagai teman dan penasihatnya. Hubungan antara Sultan Haji dan ayahnya menjadi renggang. Kerenggangan ini juga berdampak pada kerenggangan hubungan antara Banten terhadap Belanda kembali terulang. Apalagi Sultan yang memegang kekuasaan di Banten adalah Sultan yang sangat benci terhadap keberadaan Belanda di Banten.

Selama dalam masa kekuasaannya, Sultan Abdulfath harus berjuang melawan VOC sedangkan putranya sendiri yaitu Sultan Haji

sangat lunak terhadap VOC. Akibat ketidaksejajaran dengan putranya itu Sultan Abdulfath pun mengundurkan diri dari pemerintahan sehari-hari dan pergi ke Istana Pontang Tirtayasa, untuk mendirikan keraton yang baru di tempat itu. Sejak menempati istana Tirtayasa, Sultan Abdulfath lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa.

Dalam sepak terjangnya Sultan Ageng Tirtayasa selalu bersikap waspada terhadap musuh dan tidak mau tunduk kepada Kumpeni Belanda, hal itu dibuktikan dari usaha-usahanya dalam melancarkan gerilya terutama di daerah Angke Tangerang yang sejak lama merupakan front terdepan. Sultan Ageng Tirtayasa juga sering mengirimkan tentaranya untuk mengadakan penyerangan terhadap Kumpeni Belanda di Jakarta, baik melalui front laut maupun darat. Peristiwa-peristiwa kecil pun sering terjadi di berbagai front tempat kedua belah pihak bertemu. Pihak Kumpeni Belanda menjadi khawatir, sehingga kemudian memblokade pelabuhan dan melarang kapal-kapal asing untuk berdagang dan berlabuh di Banten. Faktor kedua adalah putra Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama Sultan Haji sangat berbeda haluan dan sangat lunak terhadap Belanda.

Kepindahan Sultan Ageng Tirtayasa ke Istana Pontang Tirtayasa mempunyai tujuan tersendiri, yaitu agar ia dapat dengan mudah mengawasi gerak-gerik putranya; Sultan Haji yang memegang pemerintahan sehari-hari di Surosowan. Sebenarnya Sultan Ageng Tirtayasa mempunyai kewenangan dalam memegang tampuk pimpinan. Situasi ini dimanfaatkan Sultan Haji sebagai bahan untuk menghasut ayahnya, karena Sultan ia ingin memperoleh kekuasaan penuh di Banten. Selain itu Sultan Haji mempunyai rasa khawatir akan saudaranya sendiri, yaitu Pangeran Purbaya akan merebut kekuasaan sebagai penguasa Banten.

Rasa kekhawatiran demi kekhawatiran tersebut akhirnya mendorong Sultan Haji untuk meminta bantuan kepada VOC, agar tahta kerajaan tidak jatuh ke tangan orang lain selain pada dirinya. VOC pun bersedia membantu, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC.
2. Monopoli lada di Banten dipegang VOC.

3. Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji.
4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. (Nina Lubis, 2003: 52)

Perjanjian tersebut diterima oleh Sultan Haji. Atas bantuan VOC, Sultan Haji dapat menguasai Keraton Surosowan, yang kemudian berada di bawah kekuasaan Belanda.

Dari segi kepribadian, jelas sekali antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji sangat bertentangan. Seperti halnya Sultan Haji memberi ucapan selamat atas diangkatnya kembali Speelman menjadi Gubernur Jenderal VOC menggantikan Rijklof van Goens pada tanggal 25 November 1680, padahal Kumpeni Belanda baru saja menghancurkan Keraton Surosowan. Tindakan Sultan Haji ini sangat bertentangan dengan ayahnya yang sangat anti terhadap Belanda.

Mengantisipasi tindakan Sultan Haji tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa berusaha untuk memobilisasi pasukan perangnya untuk digunakan sewaktu-waktu. Rakyat dari berbagai daerah ikut bergabung dengan Sultan baik dari daerah Tanahara, Pontang Tirtayasa, Caringin, Carita, dan sebagainya mereka mendaftarkan diri menjadi prajurit. Demikian pula tentara pelarian dari Makasar, Jawa Timur, Lampung, Solebar, Bengkulu, dan Cirebon, berkeinginan bergabung dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Bahkan satu regu pasukan Sultan Haji yang diutus untuk menyelidiki Istana Tirtayasa pun justru malah ikut bergabung dengan Sultan Ageng Tirtayasa.

Suatu ketika Sultan Ageng Tirtayasa mendengar kabar kalau beberapa kapal Banten yang pulang dari Jawa Timur ditahan Kumpeni karena dianggap sebagai kapal perompak. Sultan Ageng menuntut Belanda agar membebaskan mereka. Tuntutan Sultan tidak dihiraukan oleh Belanda. Satu-satunya jalan bagi Sultan Ageng Tirtayasa adalah mengumumkan perang terhadap Belanda.

Pengumuman perang Sultan Ageng Tirtayasa ternyata ditentang oleh anaknya, yaitu Sultan Haji. Di depan Kumpeni, Sultan Haji menyanggah dan mengharapkan Belanda memaklumi ayahnya

yang sudah pikun. Keputusan tersebut tidak dimusyawarahkan dengan dirinya, katanya. Permintaan Sultan Haji pun dikabulkan oleh Kumpeni Belanda, sehingga mulai saat itu kekuasaan di Banten sepenuhnya di tangan Sultan Haji.

Sultan Ageng Tirtayasa sudah tak tahan lagi melihat tingkah laku anaknya tersebut. Oleh karena itu untuk menyatukan kekuatan pasukan Banten dalam menyerbu Batavia, maka tanggal 26 malam 27 Februari 1682 Sultan memimpin sendiri penyerbuan ke Surosowan. Penyerbuan mendadak ini berhasil mematahkan perlawanan pasukan Sultan Haji dan dalam waktu singkat istana dapat dikuasai. Sultan Haji sendiri melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Jacon de Roy, bekas pegawai Kumpeni. Ia dibawa ke loji milik VOC oleh Jacon de Roy.

Penyerbuan Sultan Tirtayasa ke Surosowan dengan cepat diketahui Kumpeni Belanda. Belanda segera mengirimkan pasukannya untuk menguasai Keraton Surosowan kembali. Pengiriman pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Sain Martin dengan menggunakan dua kapal lengkap dengan pasukan perangnya. Pasukan Belanda juga dibantu oleh Kapten Franscois Tack dan Kapten Hartsinck. Dengan jumlah pasukan Belanda yang cukup banyak, akhirnya Keraton Surosowan dapat dikuasai oleh Belanda.

Setelah Keraton Surosowan dapat dikuasai kembali oleh Belanda, Sultan Ageng Tirtayasa beserta pasukannya bergerak mundur ke Kademangan dan Tanahara. Namun Tanahara pun akhirnya juga dapat direbut pasukan Kumpeni yang dipimpin oleh Kapten Jonker. Akhirnya hanya di Tirtayasa lah yang merupakan pertahanan terakhir Sultan Ageng.

Meskipun pertahanan Sultan Ageng Tirtayasa hanya tinggal di Istana Tirtayasa, namun itu tidak menyurutkan semangat juang Sultan dalam melawan Belanda. Ia tetap memerintahkan kepada pengikutnya untuk tetap berjuang melawan Belanda. Sultan juga menyerukan kepada pasukannya untuk mundur ke Hutan Keranggan dan melanjutkan perjalanan ke Lebak. Sebelum menuju Lebak, terlebih dahulu ia membakar Istana Tirtayasa agar tidak dikuasai Belanda. Selama satu tahun Sultan Ageng melakukan gerilya di Lebak,

namun akhirnya terkepung juga oleh Belanda. Pasukan Sultan Ageng kemudian terpecah menjadi dua bagian, yaitu Pangeran Purbaya dan sejumlah tentaranya bergerak di daerah sekitar Parijan, di pedalaman Tangerang, sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Kidul, Pangeran Kulon, Syekh Yusuf beserta pasukannya bergerak ke daerah Sajira di perbatasan Bogor.

Bagi Belanda Sultan Ageng Tirtayasa merupakan bahaya besar. Ia dianggap seorang pemberontak, karena selalu menentang perbuatan yang dibuat Belanda. Bahkan di daerah yang sudah terkepung pun Sultan Ageng Tirtayasa masih selalu melakukan perlawanan. Oleh karena itu, seandainya Sultan Ageng tidak segera ditangkap oleh Belanda maka bagi Belanda Sultan Ageng merupakan orang yang membahayakan.

Agar Sultan Ageng tidak melakukan perlawanan secara terus-menerus, maka Belanda berinisiatif untuk segera menangkap Sultan Ageng. Satu-satunya jalan Belanda adalah dengan memanfaatkan anaknya, Sultan Haji agar dapat membujuk Sultan Ageng. Hal itu digunakan sebagai siasat agar Sultan Ageng dapat kembali ke Surosowan. Sultan Haji pun mengirim surat bujukan, agar ayahnya Sultan Ageng dapat kembali ke Surosowan. Sultan Ageng yang sudah semakin tua dan karena telah terbunuhnya Pangeran Kulon oleh suruhan Belanda, maka ia pun tidak menaruh curiga apapun terhadap isi surat bujukan tersebut. Sultan Ageng dan beberapa pengawalinya serta pengantar surat, utusan Sultan Haji segera berangkat bersama-sama ke Surosowan.

Awal kedatangan Sultan Ageng ke Surosowan disambut dengan baik oleh Sultan Haji. Namun setelah beberapa lama tinggal di Surosowan, Sultan Ageng ditangkap Belanda dan dibawa ke Jakarta. Di Jakarta, Sultan Ageng ditawan Belanda sampai meninggal. Bagi rakyat Banten dengan meninggalnya Sultan Ageng yang merupakan panutan rakyat karena kegigihannya dalam menentang kolonial Belanda merupakan pukulan berat. Oleh karena itu, mereka meminta Belanda untuk mengirimkan jenazahnya agar dapat dimakamkan di Banten. Sultan Ageng pun dimakamkan di samping sultan-sultan, di sebelah utara Masjid Agung

Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dunia tahun 1651 dan diberitakan kepada cucunya yang ada di Mekah. Selang beberapa waktu lamanya utusan dari Mekah datang bersamaan dengan utusan dari Banten yang akan memberikan gelar sultan kepadanya

C. Perlawanan Syekh Yusuf

Setelah meninggalnya Sultan Ageng Tirtayasa, bukan berarti menyurutkan semangat juang penerus dan pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Semangat juang Sultan Ageng Tirtayasa masih diteruskan oleh Syekh Yusuf. Syekh Yusuf adalah ulama Banten yang berasal dari Makasar. Perjuangan Syekh Yusuf adalah meneruskan perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa. Ia bersama Pangeran Purbaya dan Pangeran Kulon menyusuri hutan dan tepi sungai dengan tujuan Cirebon, dengan harapan dapat meminta bantuan. Namun di tengah perjalanan bertemu dengan Belanda yang dikhawatirkan akan ke Jawa Tengah untuk bergabung dengan Kartasura. Akhirnya ketiga orang tersebut berserta pengikutnya memutar arah. Sampai di Cikaniki, pasukan Syekh Yusuf menuju Cianten lewat jalan Cisarua dan Jampang. Adapun Pangeran Purbaya dan pasukannya melanjutkan perjalanan ke Galunggung untuk bergabung dengan Tumenggung Tanubaya. Dari Jampang, Syekh Yusuf dan pasukannya terus menuju Pamotan dan dilanjutkan ke Cilacap dengan menggunakan perahu. Akan tetapi pasukan Belanda pimpinan De Ruys sudah berada di sana dan Syekh Yusuf pun pergi ke Padaherang dengan menyusuri Sungai Citanduy dan disinilah Syekh Yusuf mengadakan serbuan ke benteng-benteng pertahanan Belanda. Belanda mengadakan serangan balasan ke Padaherang, sehingga Pangeran Purbaya dan para pembesar Istana Banten banyak yang gugur.

Syekh Yusuf sendiri berhasil meloloskan diri sampai ke Sukapura, namun istrinya berhasil ditawan Belanda. Oleh karena Belanda masih kesulitan untuk menangkap Syekh Yusuf, Kumpeni kemudian menangkap anak perempuan Syekh Yusuf. Belanda mengajak Syekh Yusuf berunding dengan cara menyandera anaknya terlebih dahulu. Syekh Yusuf datang berunding, sekaligus mau menjemput putrinya.

Siasat Belanda berhasil, Syekh Yusuf ditangkap dan ditawan di Batavia, hingga akhirnya meninggal di Tanjung Harapan.

Sementara itu Pangeran Purbaya dan pengikutnya masih melanjutkan perjuangannya di daerah Cicalong Bogor Selatan. Untuk menangkap Pangeran Purbaya, Belanda menggunakan Untung Surapati untuk berunding. Namun tatkala Untung Surapati dan Pangeran Purbaya sedang berunding, datanglah Kuffeler (orang Belanda) dan pasukannya yang datang marah-marah kepada Pangeran Purbaya. Untung Surapati yang tadinya berpihak kepada Belanda justru sebaliknya malah melawan Belanda di Priyangan yang kemudian ke Kartasura. Dalam pertempuran di Cicalong, Belanda menderita kekalahan namun berhasil menangkap Pangeran Muhammad Sake (saudaranya Pangeran Purbaya). Adapun Pangeran Purbaya sendiri juga berhasil ditangkap dan dipenjara di Batavia setelah sebelumnya dilakukan tipu muslihat oleh Belanda. ◇

BAB IV

RUNTUHNYA KOTA BANTEN LAMA DAN PERUBAHAN ADMINISTRASI WILAYAH

A. Hancurnya Kota Banten Lama.

SEJAK tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa hingga meninggal dunia di tempat tawanannya di Jakarta, semangat juang dan upaya dalam menentang Belanda terus dilakukan terutama oleh Syekh Yusuf, Pangeran Purbaya, dan pengikutnya. Namun akhirnya Syekh Yusuf juga ditangkap oleh Belanda dengan tipu muslihat. Begitu pula Pangeran Purbaya, ia mengalami nasib yang sama. Walaupun Syekh Yusuf dan Pangeran Purbaya telah tertangkap, berbagai upaya perlawanan dalam menentang penjajah Belanda masih terus berlanjut, meski dalam skala kecil. Namun dalam menghadapi Belanda tentu saja perlawanan yang dalam skala kecil tersebut tidak berarti bagi Belanda, sebab Belanda dengan mudah dapat menghadapinya.

Perlawanan demi perlawanan tersebut semakin lama semakin berkurang, dan surutlah pengaruh politik Kerajaan Banten. Apalagi Sultan Haji sebagai penerus ayahnya dalam memegang pimpinan di Keraton Surosowan telah lama bekerja sama dengan Belanda, dan secara politik ada dalam pengaruh Belanda. Dengan demikian, Sultan Haji merupakan satu-satunya penerus Kerajaan Banten dikukuhkan oleh Belanda, dengan beberapa syarat-syarat:

1. Perjanjian 10 Juli 1959 tetap berlaku dengan utuh kecuali beberapa hal yang diubah dalam perjanjian ini. Di samping

itu untuk kedamaian Banten dan Kumpeni Belanda, maka Banten dilarang memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada musuh-musuh Kumpeni. Demikian juga Banten tidak boleh campur tangan dalam politik di Cirebon.

2. Penduduk Banten tidak boleh datang ke Batavia, demikian juga sebaliknya kecuali ada keperluan khusus dengan mendapat surat ijin dari yang berwenang.
3. Sungai Untung Jawa (Cisadane) dan garis sambungnya ke selatan dan utara sampai Laut Kidul, menjadi batas Banten dan Kumpeni.
4. Apabila ada kapal milik kumpeni atau milik Banten atau warganya terdampar mendapat pertolongan baik penumpangnya atau barang-barangnya.
5. Untuk kerugian-kerugian perang dan perampokan oleh penduduk Banten atas Kumpeni, maka Sultan harus menggantikan kerugian sejumlah 12.000 ringgit kepada Kumpeni.
6. Tentara ataupun penduduk sipil atau siapa saja yang berani melanggar hukum yang telah disepakati ini akan ditangkap dan diserahkan kepada Kumpeni.
7. Sultan Banten harus melepaskan tuntutan atas Cirebon dan harus menganggap sebagai negara sahabat yang bersekutu di bawah lindungan Kumpeni.
8. Sampai dengan isi perjanjian 1659 pasal 4, yang menyatakan bahwa Kumpeni tidak memberikan sewa tanah atau rumah yang digunakan untuk loji, maka menyinggung dari hal itu Kumpeni akan menentukan pembayaran kembali dengan cara debet.
9. Sultan berkewajiban untuk waktu yang akan datang tidak mengadakan perjanjian atau persekutuan, perserikatan dengan kekuatan-kekuatan atau bangsa lain. Karena hal itu bertentangan dengan isi perjanjian ini.
10. karena perjanjian ini harus terpelihara dan berlaku terus hingga masa-masa yang akan datang, maka Paduka Sri

Sultan Kahar Nas'r beserta seluruh keturunannya haruslah menerima seluruh pasal dari perjanjian ini, dimaklumi serta dianggap suci, dipercayai dan benar-benar akan dilaksanakan oleh segenap pembesar kerajaan tanpa penolakan, demikian pula sebaliknya dari pihak Kumpeni (464 th. Kab serang, 1990: 39-40)

Bila menyimak isi perjanjian tersebut jelas menggambarkan bahwa Kesultanan Banten ada dalam pengaruh kekuasaan Belanda, sehingga dapat dikatakan bahwa kedaulatan Kesultanan Banten runtuh. Apalagi perjanjian yang ditandatangani oleh pihak Kumpeni, Francois Tack, Kapten Herman Dirkse Wonderpoel, Evenhart van der Schere, serta Kapten bangsa Melayu, Wan Abdul Bagus tersebut ditulis dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Belanda, Jawa, dan Melayu. Penandatangan perjanjian tersebut waktunya bersamaan dengan pembangunan Benteng Speelwijk di pantai utara dekat Pasar Karangantu.

Setelah Sultan Haji dikukuhkan sebagai Sultan Banten oleh Belanda, yang muncul kemudian adalah berbagai pemberontakan dan kekacauan di segala bidang. Sebagian rakyat tidak mengakui lagi Sultan Haji sebagai sultan., sehingga perang saudara pun tidak dapat dihindarkan. Akibat dari perang saudara tersebut banyak bangunan kota rusak berat, seperti istana dan Benteng Surosowan.

Oleh karena keadaan kota yang porak poranda, Sultan meminta bantuan kepada Pangeran Wiraguna atau Hendrik Laurenzoon van Speelwijk Cardeel untuk memperbaikinya. Atas bantuan Cardeel, semua benteng dan bangunan keraton tersebut diratakan terlebih dahulu sampai fondasi, baru kemudian benteng dan keraton dibangun kembali seperti wujud semula. Pembangunan tersebut memakan waktu selama 2 tahun.

Meskipun benteng dan keraton sudah berbentuk lagi seperti semula, bukan berarti keadaan situasi di lingkungan Keraton Surosowan adem ayem, sebab masih juga timbul berbagai kesalahpahaman dan Sultan sendiri sering mendapat tekanan-tekanan dari dalam keraton. Penderitaan rakyat semakin berat bukan saja

karena pembersihan atas pengikut Sultan Ageng Tirtayasa, serta pajak yang tinggi, selain itu karena sultan juga harus membayar biaya perang, dan adanya perdagangan monopoli dari Kumpeni. Rakyat dipaksa untuk menjual hasil pertaniannya, terutama lada dan cengkeh kepada Kumpeni.

Penderitaan rakyat yang semakin berat tersebut menimbulkan kerusuhan melawan Belanda kembali terjadi. Pemicunya adalah para pedagang Eropa yang dulu banyak membantu Sultan Ageng Tirtayasa banyak diusir dari Banten, sehingga menimbulkan kerusuhan, pemberontakan, dan kekacauan di segala bidang. Mereka melakukan pembakaran sarana kota maupun pembajakan kapal-kapal dagang milik Kumpeni, bahkan sebagian besar rakyat tidak mengakui lagi Sultan Haji sebagai sultan.

Dengan berbagai kekisruhan yang terjadi tidak mengherankan kalau kemudian masyarakat dan lingkungan kerabat keraton ingin mendapatkan “Ratu Adil”. Sultan pun sering mengalami kegelisahan dan ketakutan, apalagi Kumpeni Belanda bagi Sultan Haji yang dahulu sebagai teman telah berubah menjadi tuan yang harus dituruti segala kehendaknya. Akhirnya Sultan Haji jatuh sakit dan meninggal dunia pada tahun 1687. Mengenai gambaran Kota Banten sepeninggal Sultan Haji, pernah ada catatan sensus pada masa pemerintahan Sultan Abul Mahasin Zainul ‘Abidin. Menurut data sensus tahun 1694, penduduk Kota Banten berjumlah 31.848 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, Banten merupakan sebuah kota yang ramai.

Sultan Haji meninggal dunia dengan meninggalkan 10 putra yaitu, Pangeran Ratu (Sultan ‘Abul Fadh), Pangeran Adipati (Sultan Muhammad Zaenul Abidin), Pangeran Mohammad Thohir, Pangeran Fahdluddin, Pangeran Ja’faruddin, Pangeran Muhammad ‘Alim, Ratu Rokhimah, Ratu Hamimah, Pangeran Kesatrian, dan Ratu Mumbay (Ratu Bombay).

Sepeninggal Sultan Haji, di Banten terjadi perebutan kekuasaan di antara anak-anak Sultan Haji. Namun atas bantuan Kumpeni, akhirnya kekuasaan jatuh ke tangan putra pertamanya yaitu Pangeran Fadh yang bergelar Sultan Abu’l Fadh Muhammad Yahya. Ternyata

Sultan Abu'l Fadh adalah orang yang anti Belanda. Ia menata kembali Kota Banten yang porak-poranda. Namun sayang, baru menjabat 3 tahun ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Tahta kerajaan kemudian diserahkan kepada adiknya, yaitu Pangeran Adipati yang bergelar Sultan Abu'l Mahasin Muhammad Zainul Abidin. Kemudian iapun digantikan oleh putra keduanya yaitu Sultan Abulfathi Muhammad Shifa Zaenul Arifin, karena putra pertamanya meninggal dunia.

Ketika Banten diperintah oleh Sultan Abulfathi Muhammad Zaenul Arifin, Gubernur Jenderal Belanda yang dipercayakan di Indonesia adalah Daendels. Bersamaan dengan itu pada tahun 1789, terjadi Revolusi Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte yang mengguncangkan Eropa. Sebagian besar Eropa dikuasai Perancis, kecuali Inggris. Bahkan Belanda pun termasuk negara yang dikuasai Perancis, sehingga daerah jajahan Belanda pun termasuk Indonesia ada ditangan Perancis. Luis Napoleon, yaitu adik Kaisar Napoleon yang bertugas di Belanda mengangkat Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara. Daendels datang ke Batavia tahun 1808 dengan tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang sedang mendirikan pangkalan di India. Pada masa Indonesia di bawah Gubernur Jenderal Daendels ini dapat dikatakan sebagai masa-masa pahit, sebab VOC sebagai kantor dagang yang pernah memonopoli perdagangan di Batavia dan sempat menghancurkan perdagangan di Banten mengalami kebangkrutan. Hutang Kumpeni bertumpuk apalagi adanya sebab-sebab lain, seperti:

1. Persaingan dagang yang semakin ketat dari bangsa Perancis dan Inggris.
2. Miskinnya penduduk Nusantara, terutama Pulau Jawa karena monopoli, sehingga rakyat tidak mampu membeli barang dagangan yang dibawa VOC.
3. Turunnya harga rempah-rempah di pasaran dunia, karena di samping seringnya penduduk pribumi yang melanggar monopoli Kumpeni, Inggris pun sudah berhasil menanamnya di India.

4. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi.
5. Banyak biaya yang harus dikeluarkan VOC terutama untuk membayar tentara dan pegawainya yang sangat besar. Demikian juga untuk menguasai daerah-daerah yang baru, terutama di Jawa dan Madura. (Halwany, 1993: 173)

Tumbuhnya berbagai masalah tersebut diatas, maka VOC pun dibubarkan dan utang-utangnya ditanggung pemerintah Belanda. Sejak saat itulah Belanda menjajah Indonesia. Dalam menghadapi masa-masa pahit, Daendels membuat berbagai sarana, seperti sarana pertahanan, rumah sakit, tentara, dan barak militer, serta pabrik mesiu. Semua itu dilakukan dengan dana yang serendah mungkin, karena dana dari Negeri Belanda tidak bisa diharapkan. Untuk itu Daendels mengambil keputusan dengan memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa, mempekerjakan orang-orang pribumi tanpa diberi upah.

Untuk Kota Banten, Daendels membuat pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon, dan memerintahkan kepada Sultan Banten untuk mengirimkan pekerja rodi sebanyak-banyaknya. Akan tetapi para pekerja rodi tersebut kemudian banyak yang melarikan diri, karena daerahnya berawa-rawa sehingga banyak pekerja yang mati. Kaburnya para pekerja rodi tersebut membuat Daendels marah. Ia menuduh Sultan Banten sebagai dalangnya, dan sebagai konsekuensinya Sultan harus memenuhi beberapa tuntutan, yaitu :

1. Mengirimkan 1.000 orang rakyat setiap hari untuk dipekerjakan di Ujung Kulon.
2. Menyerahkan Patih Mangkubumi Wanggadiraja ke Batavia.
3. Segera memindahkan keratonnya ke daerah Anyer, karena Surosowan akan dijadikan benteng Belanda.

Tuntutan ini ditolak oleh Sultan Banten. Atas penolakan Sultan tersebut, secara diam-diam kemudian Daendels beserta pasukannya pergi ke Banten bersama untuk menghancurkan Istana Surosowan. Sesampai di Kota Banten, Daendels mengutus Komondeur Philip Pieter du Puy dengan beberapa pengawalnya ke Istana Surosowan

untuk menanyakan kesanggupan Sultan, namun du Puy beserta pasukan justru dibunuh oleh pasukan pengawal keraton.

Akibat terbunuhnya du Puy dan pengikutnya, Daendels segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang Istana Surosowan pada hari itu juga. Serangan yang tiba-tiba dan mengejutkan tersebut membuat sultan tidak dapat mempersiapkan pasukannya, sehingga Surosowan dapat direbut dari tangan Sultan, Sultan sendiri kemudian ditangkap dan diasingkan ke Ambon.

Pada masa pemerintahan Sultan Zaenul Arifin ini banyak terjadi pemberontakan rakyat yang tidak senang dengan perlakuan Kumpeni yang sudah di luar batas. Misalnya dengan adanya kerja rodi dan tanam paksa. Pada abad 18 terjadi perubahan politik Kumpeni dalam pengelolaan daerah yang dikuasainya. Monopoli rempah-rempah dianggap tidak menguntungkan lagi, karena Inggris berhasil dalam menanam cengkeh sehingga harga cengkeh pun mengalami penurunan. Dengan demikian Kumpeni pun mengalihkan usahanya dengan menanam tebu dan kopi, disamping rempah-rempah, hasilnya dijual ke Kumpeni dengan harga yang ditetapkan. Akhirnya rakyat dipaksa untuk menanam tebu atau kopi, yang kemudian hasilnya harus dijual kepada kumpeni. Rakyat sebagai petani akhirnya tetap menjadi orang yang tertindas, sebab Kumpeni yang membeli kopi kepada raja dengan harga 21 ringgit per pikul, namun raja hanya membayar petani 5 ringgit per pikul, dengan demikian birokrasi perdagangan pun menjadi berbelit-belit

Selama Sultan Muhammad Zaenul Arifin menjabat sebagai Raja Banten, ia didampingi oleh permaisuri Ratu Syarifah Fatimah. Ia adalah agen VOC yang sengaja oleh Kumpeni ditempatkan di sana, agar segala urusan kerajaan berada di bawah pengaruhnya. Kenyataannya memang demikian, Ratu Syarifah Fatimahlah yang memegang keputusan akhir. Bahkan Ratu mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad. Namun pengakuan tersebut akhirnya terbongkar.

Terbongkarnya kebusukan seorang Ratu Syarifah Fatimah adalah ketika Putra Mahkota pangeran Gusti menolak untuk menikah

dengan saudaranya sang Ratu. Hal inilah yang menyebabkan Sang Ratu menolak pelantikan Pangeran Gusti. Akibat pengaruhnya yang kuat, Sang Ratu justru mengajukan keponakannya sendiri, yaitu Pangeran Syarif untuk menjadi calon putra mahkota. Sultan pun tidak dapat menentukan karena pengaruh Sang Ratu sangat kuat. Akhirnya keputusan ini diserahkan kepada Kumpeni. Anehnya Kumpeni justru lebih memilih Pangeran Syarif, Pangeran Gusti justru ditangkap dan dibuang ke Srilangka (Ceylon). Dengan demikian Sang Ratu Fatimah pun semakin berambisi dalam menguasai Banten. Sang Ratu mulai menghilangkan pengaruh kerabat keraton yang menentang dirinya. Ia juga bertindak sewenang-wenang abdi dalem. Tentu saja tindakan ini tidak dapat dicegah

Atas persetujuan Kumpeni, Pangeran Syarif Abdullah dinobatkan menjadi putra mahkota. Atas jasa tersebut kumpeni Ratu Fatimah menghadiahkan sebidang tanah di daerah Cisadane dan hak separuh penghasilan tambang emas di Tulang Bawang, Lampung kepada Kumpeni. Oleh karena fitnah istrinya juga, Sultan Zaenul Arifin dituduh gila dan ditangkap Kumpeni, kemudian diasingkan ke Ambon. Sebagai penggantinya adalah Sultan Syarifuddin menjadi Sultan Banten. Namun pengangkatan Sultan Banten tersebut tidak berpengaruh terhadap kelangsungan keraton, sebab Ratu Fatimahlah yang memegang kuasa.

Menghadapi ketidakberesan yang dilakukan Ratu Fatimah, akhirnya rakyat mengadakan perlawanan bersenjata yang dipimpin oleh Kyai Tapa dan Ratu Bagus Buang. Ratu Bagus Buang langsung menyerbu Keraton Surosowan. Sebagian lagi mencegat bala bantuan Belanda dari Batavia yang dipimpin langsung oleh Kyai Tapa. Dalam penyerbuan kali ini mereka berhasil. Akan tetapi tatkala bantuan dari Belanda datang yang kedua kalinya, serangan Kyai Tapa dan Ratu Bagus Buang ke Keraton Surosowan dapat digagalkan. Kumpeni pun akhirnya menangkap Ratu Fatimah dan Sultan Syarifuddin.

Berbagai kemenangan yang didapat Kumpeni Belanda, berakibat mereka merasa di atas angin. Kumpeni terus melakukan campur tangan dalam jalannya pemerintahan di Keraton Surosowan. Mereka

mengangkat Pangeran Aria Adisantika yaitu adik Sultan Arifin menjadi wakil raja dan mengembalikan Pangeran Gusti dari tempat pengasingan. Sementara itu, perjuangan Kyai Tapa dan Ratu Bagus Buang masih terus berlanjut meskipun dalam setiap serangan dapat dikalahkan oleh Kumpeni.

Pangeran Arya Adisantika menjadi Sultan Banten dengan gelar Sultan Abulma'ali Muhammad Wasi' Zainul Alimim (1752) dan Pangeran Gusti ditetapkan sebagai putra mahkota, tetapi dengan syarat harus menandatangani perjanjian dengan Kumpeni. Isi perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Banten di bawah kuasa penuh Kumpeni walaupun pemerintahan tetap di tangan Sultan.
2. Sultan akan mengirim utusan ke Batavia setiap tahun sambil membawa upeti berupa lada yang jumlahnya ditetapkan Kumpeni.
3. Hanya Kumpeni Belanda yang boleh mendirikan benteng di Banten.
4. Banten hanya boleh menjual kopi dan tebu kepada Kumpeni saja.
5. Sejalan dengan bunyi pasal 4, banyaknya produksi kopi dan tebu di Banten haruslah ditentukan Kumpeni. (Halwany, 1993: 169).

Perjanjian yang sangat memberatkan Banten tersebut, menimbulkan ketidakpuasan, sehingga perlawanan rakyat pun kembali muncul. Rakyat berserta para pembesar menghubungi Kyai Tapa dan Ratu Bagus Buang yang berada di pedalaman untuk bergabung agar kembali menyerang Kota Surosowan. Ratu Bagus Buang dan rakyat Banten mengadakan penyerangan dari luar, sedangkan penggawa Banten mengadakan pengacauan di dalam kota Surosowan. Pertempuran pun terjadi di daerah Caringin dan Kota Surosowan. Belanda kembali dapat melumpuhkan serangan-serangan tersebut.

Perlawanan rakyat di dalam Kota Surosowan terjadi terus menerus oleh karena itu Sultan Abdulma'ali Muhammad Wasi' Zainul "Alamin menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Gusti, dan Pangeran Gusti pun dinobatkan menjadi Sultan dengan gelar Abu'l Nasr Muhammad 'Arif Zainul "Asiqin, yang kemudian digantikan oleh Sultan Abu'l Mafakhir Muhamad Aliuddin. Ketika Muhammad Aliuddin yang tidak mempunyai anak laki-laki wafat, ia digantikan oleh adiknya yaitu Pangeran Muhiddin dengan gelar Sultan Abu'l fath Muhamad Muhiddin Zainushalihin. Sultan Abu'l fath kemudian terbunuh oleh Tubagus Ali, dan sebagai penggantinya adalah Sultan "Aliuddin (dari selir) dengan gelar Sultan Abu'l Nash Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin atau Sultan Aliuddin II (1803-1808).

Hancurnya Istana Surosowan oleh Daendels diikuti dengan melemahnya perlawanan rakyat. Untuk memperlemah perlawanan rakyat, Daendels membagi daerah Banten menjadi kabupaten-kabupaten.

B. Perubahan Wilayah Administrasi

Sebelum Daendels membagi wilayah Banten menjadi kabupaten-kabupaten, ia mulai melakukan berbagai perombakan di bidang administrasi wilayah. Seperti membagi Pulau Jawa menjadi 3 propinsi yaitu Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Istilah kesultanan juga masih diperlukan untuk wilayah Banten dan Cirebon dan wilayah westerlanden yang terbagi atas Jakarta dan daerah sekitarnya (Bogor, Tangerang, dan Karawang), Kesultanan Banten, Priangan (Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang), dan Kesultanan Cirebon mencakup Limbangan, Sukapura, dan Galuh.

Pemikiran Daendels dalam pembagian wilayah Pulau Jawa tersebut, selain berdasarkan sistem pemerintahan sentralistik, juga dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan, yakni:

1. Tugas utama Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dari kemungkinan serangan Inggris, musuh utama Napoleon.

2. Kecilnya jumlah pegawai tinggi sipil di Hindia Belanda.
3. Terbatasnya keuangan Negara Kolonial.

Daendels ingin menjalankan pemerintahan secara langsung, untuk itu ia sangat memperhatikan urusan pemerintahan dan administrasi Negara. Ia juga ingin menjalankan pemerintahan yang bersifat sentralistik, maksudnya semua pemerintahan daerah diatur dari pusat dengan instruksi dari gubernur jenderal. Berkaitan dengan itu, maka Daendels juga melakukan birokratisasi di kalangan pemerintah yang menerima gaji, di bawah pengawasan prefek. Selama ini sistem pergantian sultan yang dilakukan secara turun-temurun selama ini, sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Sebagai gantinya dilakukan secara penunjukan, dengan demikian kekuasaan mereka pun berangsur-angsur dikurangi. Daendels juga melibatkan para bupati dalam politik militer, hal itu disebabkan untuk Pulau Jawa Daendels kekurangan personil militer. Gelar bupati dalam kepangkatan militer disetarakan, seperti untuk bupati gelar Tumenggung mendapat pangkat mayor, sedangkan bupati gelar Aria disamakan dengan pangkat letnan kolonel.

Selanjutnya Daendels juga membagi bekas wilayah Kesultanan Banten menjadi tiga kabupaten, yang masing-masing disebut Banten Hulu, Banten Hilir, dan Anyer. Dalam masa Daendels setelah terpuruknya Kesultanan Banten ini, Kumpeni Belanda benar-benar telah mencampuri urusan rumah tangga kerajaan. Hal itu terbukti ketika Sultan Abumufakir Muhammad Aliuddin II dilantik oleh Daendels. Dalam pelantikan tersebut sebenarnya mengandung makna, bahwa adanya pelantikan tersebut bukan berarti Sultan Banten mempunyai kewenangan khusus seperti pada sultan-sultan sebelumnya, namun hanya sebagai simbol belaka. Dalam segala hal, Sultan harus tetap tunduk kepada Kumpeni. Apalagi Sultan mendapat tunjangan dari Daendels sebesar 15.000 ringgit setiap tahunnya. Artinya, tunjangan yang diberikan Daendels kepada Sultan bukanlah tunjangan cuma-cuma, namun ada keinginan khusus dari Daendels. Keraguan tersebut tentunya berupa pengabdian Sultan kepada Kumpeni.

Ketika kekuasaan Daendels harus berakhir di tangan Inggris, Inggris mengutus Gubernur Jenderal untuk membawahi Indonesia. Gubernur Jenderal tersebut bernama adalah Raffles. Pada awal masa pemerintahan Raffles, tidak ada perubahan-perubahan yang menonjol dalam sistem pemerintahan elit pribumi Banten, seakan-akan Raffles meneruskan apa yang telah dijalankan oleh Daendels. Namun suasana di Banten sangat lain saat pemerintahan Belanda semasa pemerintahan Muhammad Aliuddin, sebab Muhammad Aliuddin sangat taat kepada Kumpeni Belanda. Akan halnya semasa Inggris, kekuasaan Aliuddin telah digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Ahmad atau Muhammad Aliuddin II. Sultan Aliuddin II ini ternyata mempunyai karakter yang berbeda dengan ayahnya. Ayahnya sangat lunak dengan penjajah, sang putra ini justru sebaliknya. Dia sangat anti penjajah, dan melakukan perlawanan yang dipimpinnya langsung. Perampokan kapal-kapal Belanda sering terjadi. Pengacauan pun dilakukan rakyat di bawah pimpinan para ulama yang bermarkas di daerah Cibungur, pantai Teluk Merica. Daendels tidak berhasil mengamankan daerah ini, dan ia mencurigai Sultan sebagai penggerak perlawanan. Oleh karena itu, Sultan ditangkap dan dipenjarakan di Batavia. Benteng dan Istana Surosowan dihancurkan dan dibakar.

Untuk mengalahkan perlawanan, akhirnya Daendels membagi wilayah Banten menjadi tiga, masing-masing setingkat dengan kabupaten, yaitu Banten Hulu, Banten Hilir, dan Anyer serta ditempatkan di bawah pengawasan prefek/ landdrossamdt yang berkedudukan di Serang. Oleh karena Keraton Surosowan sudah hancur, maka pusat pemerintahan dipindahkan ke Keraton Kaibon.

Daendels juga membangun pangkalan militer di Ujungkulon, namun akhirnya dihentikan karena banyaknya pekerja yang mati di daerah berawarawa itu. Pembangunan kemudian dialihkan ke Anyer di ujung Pulau Jawa sampai daerah Panarukan di ujung timur. Tujuan pembangunan jalan ini adalah untuk memperlancar jalan raya pos dalam rangka pengiriman surat. Adapun penanggung jawab pembangunan jalan tersebut langsung di bawah bupati setempat. Dengan pengerahan tenaga secara paksa tersebut, akhirnya pembangunan jalan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Perilaku Daendels ini terlalu keras bagi rakyat Indonesia, sehingga Daendels pun akhirnya dipanggil pulang ke negerinya. Perlawanan rakyat melawan Belanda pun mulai mereda.

Sementara itu di daerah Serang, tepatnya di Undar-Andir juga terjadi kerusuhan yang dipimpin Mas Jakaria dan Ngabehi Lanang. Utusan Inggris datang langsung ke Istana Banten, dan menurunkan status sultan menjadi “bupati sultan” serta menerima tunjangan 10.000 ringgit. (Nina Lubis, 2000; 65). Adanya penurunan status tersebut secara otomatis Sultan Banten ada dibawah kekuasaan Residen Inggris.

Perubahan status di tubuh kesultanan membuat, Inggris semakin leluasa mencampuri urusan kesultanan, di antaranya Residen Inggris dalam hal ini Raffles membagi Banten menjadi empat kabupaten yang dipimpin oleh empat bupati sowan. Keempat bupati sowan adalah keluarga Kesultanan Banten. Tujuan Inggris adalah untuk memanfaatkan keluarga kesultanan, agar mereka mudah memudahkan menjalankan pemerintahannya. Adapun keempat kabupaten tersebut adalah:

1. Kabupaten Banten Lor (utara) yang dipimpin oleh Bupati Pangeran Suramenggala.
2. Kabupaten Banten Kulon (barat) yang dipimpin oleh Bupati Tubagus Hayudin
3. Kabupaten Banten Tengah yang dipimpin oleh Bupati Tubagus Ramlan.
4. Kabupaten Banten Kidul (selatan) yang dipimpin oleh Bupati Tumenggung Suradilaga.

Pada masa pemerintahan Inggris istilah *prefecture* diganti menjadi karesidenan, dan istilah *prefect/landroostambt* pun diganti menjadi residen. Raffles juga memperkenalkan jabatan baru dalam pemerintahannya, yaitu asisten residen, dan jabatan wedana yang mengepalai distrik. Pada masa itu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Seperti halnya dengan Daendels, Raffles ingin melaksanakan sistem pemerintahan langsung, tetapi gagal, sebab antara rakyat dan Kesultanan Banten masih tetap bersatu.

Meskipun Raffles telah melakukan perombakan di bidang administrasi wilayah dan berhasil menurunkan status sultan menjadi bupati sultan, tetapi kekuasaan Inggris tersebut tidak bertahan lama. Selama Indonesia dipimpin gubernur Jenderal Raffles, Banten di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Rafiudin, yang pada tahun 1832 diasingkan ke Surabaya karena dituduh berkomplot dengan bajak laut. Dengan tindakan Raffles ini maka berakhirilah eksistensi Kesultanan Banten. Seluruh daerah Banten telah dikuasai oleh pemerintah Inggris dan dijadikan sebagai sebuah karesidenan. Dengan demikian maka sultan pun menjadi aparat pemerintah Inggris dengan status sebagai bupati, yang berada di bawah residen.

Masa pemerintahan Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa tidak bertahan lama, iapun harus mengembalikan kekuasaannya kepada pemerintahan Belanda pada tanggal 19 Agustus 1816, ia pun sempat membagi wilayah Banten menjadi 4 daerah, yaitu:

1. Kabupaten Banten Lor (Banten Utara) diperintah oleh Pangeran Suramenggala
2. Kabupaten Banten Kulon (Banten Barat) diperintah oleh Bupati Tubagus Hayudin.
3. Kabupaten Banten Tengah diperintah oleh Bupati Tubagus Ramlan.
4. Kabupaten Banten Kidul (Banten Selatan) diperintah oleh Bupati Tumenggung.

Pada tahun 1816, Raffles menyerahkan kekuasaannya kembali ke pemerintah Belanda yang didasarkan atas Konvensi London tahun 1814. Pemerintahan Belanda dipegang oleh tiga orang komisaris yaitu Mr. C.Th. Elout, G.A. G. Ph. Baron van der Cappellen, dan A.A. Buyskes. Selanjutnya 1819, jabatan komisaris jenderal dihapuskan dan diganti dengan jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dipercayakan untuk menduduki jabatan tersebut adalah Van der Cappelen.

Rasanya Van der Cappelen yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal juga tidak jauh berbeda dengan penguasa-penguasa terdahulu seperti Daendels maupun Raffles. Van der Cappelen kemudian

mengeluarkan kebijakan yaitu administrasi wilayah yang sudah ditetapkan oleh Raffles harus dirombak lagi. Gubernur jenderal Van der Capelen mempertahankan sistem pemerintahan sentralistik yang dilakukan secara otokratis. Pada pemerintahan yang sentralistik ini dijalankan pula asas dekonsentrasi. Pemerintah pusat melimpahkan tugas-tugas pemerintahan kepada pejabat-pejabat Belanda yang lebih rendah tingkatannya secara hirarkhis. Pejabat-pejabat itu ditempatkan di daerah-daerah dan menjalankan tugasnya terbatas pada lingkungan wilayah tertentu yang disebut daerah administratif atau pemerintahan lokal administratif. Oleh karena pemerintahan dijalankan oleh pangrehpraja, maka pemerintahan itu dikenal dengan sebutan "Pemerintahan Pangrehpraja". Meskipun demikian pelaksanaan pemerintahan secara tradisional masih tetap dijalankan, seperti halnya dalam menjalankan pemerintahan, bupati tetap dibantu oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional. Pejabat struktural tersebut terdiri atas patih, wedana (kepala distrik), asisten wedana (hoofd onderdistrik), dan lurah (kepala desa). Adapun pejabat fungsional terdiri atas jaksa kepala, penghulu kepala, kanduruan, (kepala/mantra), kumitir kepala (hoofd penghulu), demang, ngabehi, kaliwon, panglaku, lengser (kabayan), sejumlah mantri, dan lain-lain.

Untuk mengurangi kekuasaan bupati, pemerintah Kolonial membentuk sistem afdeling dalam pembagian wilayah kabupaten. Tiap kabupaten yang memiliki wilayah yang sangat luas rata-rata dibagi menjadi dua *afdeling*. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari di wilayah afdeling dilakukan oleh asisten residen dengan didampingi patih afdeeling yang disebut "*zelfstandige patih*"

Kalau Raffles menetapkan empat kabupaten untuk Banten, ternyata oleh Van der Cappellen diciutkan menjadi dua kabupaten yaitu Banten Utara dan Banten Selatan. Namun tidak lama kemudian dua kabupaten, tersebut dirombak lagi menjadi tiga kabupaten, yaitu :

1. Kabupaten Banten Utara dengan ibukota Serang
2. Kabupaten Banten Barat dengan ibukota Caringin.
3. Kabupaten Banten Selatan dengan ibukota Lebak.

Perkembangan ibukota tersebut semakin ramai semenjak dibukanya jalan antara Anyer – Caringin.

Pada tahun 1854, di wilayah Banten terjadi lagi perubahan wilayah, yaitu Banten yang tadinya dibagi menjadi tiga kabupaten, kemudian dibagi lagi menjadi 4 kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Banten utara dengan ibukota Serang
2. Kabupaten Banten Barat dengan ibukota Caringin.
3. Kabupaten Banten Tengah dengan ibukota Pandeglang
4. Kabupaten Banten Selatan dengan ibukota Lebak.

Pada masa pemerintahan Van der Cappellen ini, maka masih memanfaatkan kerabat Sultan Banten yang menjadi bupati. Pada tahun 1922 wilayah Banten terdiri atas dua afdeling yaitu:

1. Afdeling Banten Utara yang meliputi Kabupaten Banten Utara dengan ibukotanya di Serang dan bupati, P.A.A Achmad Jayadiningrat.
2. Afdeling Banten Selatan dengan ibukotanya di Rangkas-bitung yang meliputi Kabupaten Lebak dengan bupati, R.T.A. Karta Adiningrat.

Jadi Pada abad 19, wilayah Jawa Barat dibagi ke dalam lima karesidenan. Tiap karesidenan terdiri atas sejumlah afdeling dan kabupaten, kelima karesidenan yang dimaksud adalah:

1. Karesidenan Batavia terdiri atas tiga afdeling, yaitu Meeter Cornelis (Jatinegara), Tangerang, dan Buitenzorg (Bogor).
2. Karesidenan Karawang terdiri atas tiga afdeling yaitu tanah-tanah Negara, Pamanukan dan Ciasem, dan Tegalwaru.
3. Karesidenan Banten terdiri atas empat afdeling, yaitu Anyer, Pandeglang, Caringin, dan Lebak.
4. Karesidenan Priangan terdiri atas sembilan afdeling, yaitu Bandung, Cicalengka, Cianjur, Sukabumi, Sumedang, Limbangan, Tasikmalaya, dan Sukapura Kolot.
5. Karesidenan Cirebon terdiri atas sembilan afdeling, yaitu Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Galuh. ♦

BAB V

PENUTUP

BEBERAPA peristiwa sejarah yang menandai adanya kemunduran atau surutnya Kota Banten Lama adalah terjadinya beberapa intrik seperti Banten sering diguncang perang, bencana, wabah, pemberontakan, dan penindasan berkepanjangan. Adapun hal-hal yang menandai adanya beberapa peristiwa tersebut di antaranya:

1. Intrik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yaitu Sultan Haji.
2. Pemberontakan Ratu Bagus Buang dan Kiyai Tapa, penetrasi militer VOC/Belanda dalam menghancurkan kekuatan ekonomi Banten.
3. Penghancuran Istana Surosowan dan penghapusan kesultanan sekaligus pengalihan administrasi pemerintahan ke Serang di awal abad XIX dan peristiwa alam, beberapa letusan Gunung Kratakau pada tahun 1883.
4. Terjadinya pemberontakan Cilegon yang memakan banyak korban bagi rakyat Banten.
5. Menyebarnya wabah penyakit, tanam paksa akibat penindasan fasisme Jepang.

Kekalahan antara Sultan Ageng Tirtayasa melawan Kumpeni Belanda, mengakibatkan hancurnya Kota Banten Lama, termasuk bangunan keraton. Setelah bangunan Keraton Surosowan hancur, Belanda pun membangun benteng-benteng dengan arsitekturnya seorang arsitek yang menjadi anggota kesultanan, Hendrick

Lucaszoon Cardeel. Demikian pula dengan pembangunan Benteng Spelwijk. Pembangunan Benteng Spelwijk tersebut akan mengingatkan pada Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Speelman. Dengan dibangunnya benteng-benteng tersebut, praktis Banten sebagai kekuasaan dan kesultanan pudar.

Hancurnya Kesultanan Banten juga diakibatkan oleh pemberontakan demi pemberontakan, yang akhirnya hancur pula kemerdekaan Kesultanan Banten, lebih-lebih setelah keratonnya dihancurkan oleh Daendels tahun 1809 dan disusul dengan penghapusan kesultanan menjadi Kabupaten Serang dan Caringin.

Keraton di bekas ibukota kesultanan yang dahulu menjadi pusat kekuasaan dan perniagaan antarbangsa dibiarkan menjadi reruntuhan penuh semak belukar. Namun pada tahun 1963 berhasil diselamatkan dan pada masa berikutnya berhasil dilakukan pemugaran.

Kota Banten Lama, yang dulu mempunyai kharisma sebagai pelabuhan terpenting, perkembangan saat ini hanya merupakan pelabuhan nelayan lokal/daerah. Hal ini dilakukan karena ulah Belanda/VOC yang membuka bandar perdagangan di Jakarta, sehingga pelabuhan Banten yang waktu itu mengalami kejayaan lama-kelamaan menjadi surut. Kota Banten Lama yang tadinya begitu makmur dan pernah mengalami masa kejayaan pada abad XVI, sekarang tinggal sebuah kota kecil tempat peziarahan.

Kota Banten Lama yang pernah mengalami kejayaan pada abad ke XVI, kini tinggalah sisa reruntuhan saja. Yang masih tersisa hanyalah sistem kanal, tembok-tembok keraton, Keraton Kaibon, Benteng Spelwijk. Begitu pula Banten yang dulunya pernah jaya hingga mendapat sebutan sebagai kota pelabuhan, kini hanyalah tinggal sarananya saja. Walaupun Banten Kota Lama tinggal reruntuhan, namun kharisma Sultan Banten masih terasa hingga sekarang. Hal itu dengan adanya para wisatawan yang sengaja berziarah ke makam Sultan Banten yang lokasinya tidak jauh dari reruntuhan Keraton Surosowan.

Sebenarnya peristiwa sejarah yang terjadi pada awal abad XIX M, yakni setelah penghapusan sistem administrasi pemerintahan ke Residens Serang, wilayah Banten menjadi kawasan tanpa adikuasa pribumi dalam rangka meluluhlantakan Banten. ♦

DAFTAR PUSTAKA

- Daldjoeni, N, Drs, *Geografi Kota dan Desa*, edisi revisi, lumni, Bandung, 2003
- Ekadjati, Edi S Dr, dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986
- _____, *Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat*, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Bandung, 1993
- Halwany Michrob, Drs, MSc, *Sejarah Perkembangan Arsitektur, Kota Islam Banten, Suatu kajian arsitektural Kota Banten lama Menjelang Abad XVI sampai dengan Abad XX*, Yayasan Baluwarti, Jakarta, 1993
- _____, *Catatan Masa Lalu Banten*, Penerbit Saudara, Serang, edisi III, 1993
- Haryoto Kunto, Ir, *Riwayat Kota di Tatar Sunda, Penelitian Sejarah Perkembangan Kota*, Kerjasama Bappeda Tk I Jabar dengan PT. Hexagon, 1992/1993 ,
- Hasan Muarif Ambary, Prof, Dr, *Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1998
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, edisi kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003
- Lasmiyati, dkk., *Peninggalan Sejarah di Banten Lama kabupaten Serang*, Laporan Pendataan Sejarah, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung, 1999/2000

Nina H. Lubis, Dr. M.S, dkk., *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat*, Alqaprint Jatinangor, Bandung, 2000

_____, *Banten dalam Pergumulan Sejarah, Sultan, Ulama, Jawara*, Pengantar Taufik Abdullah, LP3ES, 2003

Saleh Danasasmita, Drs., *Rintisan Penelusuran Masa Silam, Sejarah Jawa Barat*, jilid IV, Proyek Penerbitan Sejarah Jawa Barat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1983/1984

Sri Sutjiatiningsih (penyunting), *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*, kumpulan Makalah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1995

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1990

Unang Soemardjo, RH, SH, *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cirebon, 1479 -1809*, Tarsito, Bandung, 1983.

464 tahun Kabupaten daerah Tingkat II Serang, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, 1990 ♦

Sejarah Pembangunan Kabupaten Lebak

Ketua

Drs. M. Halwi Dahlan

Anggota

Drs. H. Iwan Roswandi

Drs. Herry Wiryono

Drs. Rosyadi

Drs. Hermana

Drs. Nandang Rusnandar

File [D : AlqaPrint\pmd.]

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PEMBANGUNAN suatu daerah adalah suatu langkah yang sistematis, bertahap, melalui perencanaan, dan tinjauan masa depan yang akan dituju. Proses tersebut dilakukan dengan cara mengawinkan antara potensi yang dimiliki, kemauan, dan keseriusan untuk melakukannya. Potensi yang dimaksud adalah tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia, dua pilar utama sebagai bahan baku untuk melaksanakan pembangunan. Sedangkan kemauan adalah kemampuan mengeluarkan ide-ide, konsep-konsep yang kemudian diramu menjadi suatu program kerja yang teratur serta dengan penentuan target agar kegiatan tersebut memiliki makna dan hasil nyata. Sementara keseriusan adalah langkah kongkrit dari pelaksanaan program tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab dibawah suatu kepemimpinan yang diakui.

Pada intinya komponen-komponen tersebut akan berwujud sebagai suatu hasil karya manakala telah disatukan dengan baik. Ibarat beragam komponen elektrolit yang dirangkai kemudian disatukan hingga akhirnya jadilah sebuah benda yang bermakna dan berguna seperti sebuah radio misalnya. Akan tetapi, sebuah radio tidaklah berfungsi dengan baik apabila dia hanya menjadi benda yang terdiri dari benda-benda (komponen elektrolit) saja tanpa kerjasama dengan pihak luar dalam hal ini siaran-siaran yang dapat ditangkapnya. Demikian pula dengan pembangunan suatu daerah, misalkan sebuah kabupaten yang memiliki segudang konsep, tersedinya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan

program pembangunan, namun bila tanpa arahan dan pantauan dari propinsi induknya, maka pembangunan kabupaten tersebut akan seperti “katak dalam tempurung” hanya bermakna bagi kabupaten itu tetapi tidak berarti bagi kabupaten lain. Dengan kata lain pembangunan yang dilakukan suatu saat akan stagnan dan membosankan hingga lambat laun tertinggal di segala bidang serta tidak memiliki daya saing.

Pembahasan pada laporan ini dimulai dari Pelita V dengan alasan pada pelita inilah pola pembangunan di Indonesia yang berlangsung selama 25 tahun yang lazim disebut Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I berakhir, sehingga pada Pelita Kelima inilah dilakukan berbagai perbaikan-perbaikan untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan pada PJP berikutnya. Pada awal PJP I pola pembangunan dilaksanakan berdasarkan instruksi pemerintah pusat, dimana sebelumnya (pelita I—IV) pola pembangunan infrastruktur Kabupaten Lebak masih berdasarkan sistem sentralistik (sistem dan pendekatan sektoral). Pada masa itu ide-ide pembangunan yang sifatnya merupakan gambaran kebutuhan masyarakat terbatas hanya pada perbincangan saja, sebab model dan pola pembangunan sesungguhnya ada di tangan pemerintah pusat (lintas sektoral), sehingga terjadi perbedaan pertumbuhan yang mencolok antara wilayah yang satu dengan lainnya. Biasanya prioritas pembangunan bertumpu di perkotaan saja terutama di pusat-pusat kota yang merupakan ibukota suatu daerah, sehingga daerah-daerah lainnya menjadi tertinggal padahal pasokan kebutuhan kota justru berasal dari daerah sekitarnya. Uniknya lagi kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh petualang-petualang politik dengan memberi “janji” kepada masyarakat bahwa daerahnya atau lebih spesifik sarana jalan yang menjadi penghubung antar daerah dengan perkotaan akan mendapat giliran perbaikan apabila daerah tersebut mampu memenangkan kontestan pemilu tertentu.

Perubahan iklim pembangunan di Indonesia khususnya di Kabupaten Lebak mulai memperlihatkan perubahan menjelang akhir PJP I yaitu pada Pelita Kelima. Sedikit demi sedikit sistem sentralistik diubah menjadi desentralisasi menuju pada otonomi daerah meski masalah otonomi daerah masih menjadi perdebatan di tingkat pusat.

Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lebak dievaluasi pada akhir PJP I dengan tujuan penyempurnaan program dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Lebak. Beberapa program utama yang menjadi sorotan adalah peningkatan kemampuan SDM di lingkungan aparatur pemerintah termasuk didalamnya penambahan jumlah pegawai dengan kualifikasi yang lebih spesifik (ahli dibidang masing-masing) dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan guna menunjang sdm tersebut. Program lainnya yang turut menjadi perhatian adalah perbaikan dan penambahan jalur perhubungan darat yang menjadi urat nadi bergeraknya perekonomian timbal balik antara daerah penghasil dengan pasar. Jaringan komunikasi serta jaringan listrik yang merata turut menjadi perhatian sebab kedua infrastruktur ini sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan pembangunan tersebut.

B. Masalah dan Batasan Masalah

Dalam rangkaian sejarah panjang Kabupaten Lebak, keragaman suasana tentu saja turut dialaminya dan menjadi permasalahan sendiri. Dari sekian banyak masalah yang dihadapi, yang cukup krusial adalah bagaimana kondisi Kabupaten Lebak dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Apakah kabupaten ini tetap stagnan atau berubah perlahan sesuai kehendak masa yang dijalaninya, atau dia justru melakukan loncatan jauh kedepan. Ini menjadi penting untuk dianalisis karena menyangkut perkembangan suatu daerah yang menjadi bagian dari suatu negara. Paling tidak sebagai bagian suatu negara, kabupaten ini apakah mendapat porsi yang semestinya dalam rangka pembangunan jangka pendek maupun panjang atau malah menjadi daerah terbelakang. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan kabupaten ini akan diperoleh melalui daya serap dan pengolahannya sebagai daerah tingkat II. Kemudian dalam suasana otonomi daerah bagaimana sikap Kabupaten Lebak menghadapinya atau mungkin “terpaksa” harus menerima otonomi daerah mengikuti euforia yang sedang terjadi di Republik ini.

Deretan permasalahan di atas diupayakan mendapat jawaban melalui uraian masalah sesuai kondisi Kabupaten Lebak pada masa-

masa yang dialaminya. Oleh karena itu mengingat panjangnya untai sejarah Kabupaten Lebak yang jika ditelusuri sejak tanggal didirikannya 2 Desember 1828 hingga milenium ketiga ini, maka perlu dilakukan batasan temporal agar dapat ditampilkan kondisi riil dengan alasan data masih tersedia. Batasan temporal yang akan digunakan adalah PJP I dengan fokus utama Pelita Kelima hingga PJP II pada Repelita Ketujuh di tahun 2003.

Digunakannya Pelita Kelima sebagai awal batasan waktu penelitian adalah karena pada masa ini merupakan bagian akhir dari program pembangunan jangka panjang yang diberlakukan secara nasional, sehingga hasil-hasil pembangunan sejak diberlakukannya sistem PJP (Pelita Pertama tahun 1969) dapat dilihat demikian pula proyeksi pembangunan di masa-masa berikutnya. Sedangkan batas akhir obyek penelitian ini tahun 2003 guna mendapatkan gambaran bagaimana kondisi Kabupaten Lebak setelah diberlakukannya otonomi daerah secara nasional. Namun demikian, agar tidak terjadi pemutusan total perjalanan sejarah Kabupaten Lebak, maka dalam bab II diuraikan secara singkat sejarah Kabupaten Lebak masa pemerintahan Hindia Belanda.

Batasan lain yang menjadi ketentuan suatu penelitian adalah batasan obyek penelitian. Dalam hal ini sebagai sebuah pengkajian sejarah daerah, maka daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Lebak yang saat penelitian ini dilaksanakan telah menjadi bagian dari Propinsi Banten.

C. Tujuan

Penelitian sejarah daerah ini merupakan salah satu bentuk rekonstruksi terhadap pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Lebak pada kurun waktu tertentu. Penelitian ini juga merupakan realisasi program kerja rutin BKSNT Bandung pada tahun anggaran 2005 dimana pengelolaannya diserahkan kepada suatu tim yang terdiri dari staf teknis di lingkungan BKSNT Bandung dengan hasil laporan penelitian.

BKSNT Bandung sebagai salah satu UPT di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bersama instansi terkait

dan organisasi yang berafiliasi kebudayaan pada umumnya, mengemban tugas melakukan inventarisasi terhadap aset sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Salah satu di antara tugas tersebut adalah menyediakan informasi kesejarahan tentang sejarah wilayah dalam rangka memperkuat jati diri dan integritas bangsa.

D. Metodologi

Metode adalah cara mendapatkan sesuatu dengan melalui tahapan-tahapan tertentu yang merupakan proses kegiatan guna memperoleh penjabaran secara rinci dan akurat sehingga mendapatkan hasil atau mencapai tujuan. Di samping itu metode juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah teratur berkesinambungan yang diikat dengan aturan-aturan tertentu disertai arah yang jelas menuju satu titik yaitu hasil akhir yang hendak dicapai.

Oleh karena itu; untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian yang menjawab permasalahan pokok penelitian serta mendapatkan data yang relevan, maka yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan cara mendatangi lokasi yaitu wilayah Kabupaten Lebak, mengumpulkan informasi tertulis maupun lisan, melakukan pencatatan, hingga membuat laporan. Dalam penelitian ini, informasi tertulis yang dibutuhkan adalah literatur yang relevan dengan judul kegiatan dan diperoleh beberapa buah buku seperti yang tertera pada daftar pustaka. Penggunaan data yang tersedia kemudian dipadukan dengan survei lapangan untuk mengantisipasi jika terjadi kekurangan data.

Data yang didapat kemudian diolah bersama sesuai dengan metode atau prosedur penelitian yang menjadi acuan kerja. Metode yang dimaksud adalah metode penelitian dan penulisan sejarah seperti yang diuraikan Louis Gottschalk (1985) yang diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto, dengan intisari sebagai berikut:

1. Heuristik, suatu kegiatan pemilihan subyek yang diselidiki kemudian dilakukan pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan.
2. Kritik Ekstern, pengujian sumber-sumber untuk mengetahui keasliannya

3. Kritik Intern, pengambilan unsur-unsur yang dipercaya keasliannya ataupun penyaringan terhadap informasi-informasi yang diperoleh untuk disesuaikan dengan permasalahan pendataan.
4. Historiografi atau penulisan/pelaporan sebagai hasil akhir kegiatan.

E. Sistematika Pelaporan

Laporan penelitian ini tertuang ke dalam 6 bab.

- Bab I. Merupakan pendahuluan, berisi tentang pemikiran mengapa penelitian ini perlu dilakukan yang terurai dalam: latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan metode guna mengarahkan kegiatan sebagai standar resmi sebuah karya tulis ilmiah, dan sistematika pelaporan.
- BAB II. Berjudul “Profil Kabupaten Lebak” berisi tentang: sejarah terbentuknya Kabupaten Lebak, identifikasi lokasi penelitian, dan gambaran umum program Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
- BAB III Berjudul “Pelita V” berisi tentang program pembangunan lima tahunan Kabupaten Lebak yang telah dilaksanakan dalam Pelita Kelima. Dalam bab ini ada uraian tentang permasalahan di setiap bidang pembangunan dan langkah yang ditempuh pemerintah dalam mengatasinya.
- BAB IV Berjudul “Pelita VI” berisi tentang program pembangunan lima tahunan dalam Pelita Keenam dan permasalahannya serta langkah pemecahan yang ditempuh pemerintah daerah.
- BAB V. berjudul “Program Pembangunan Di Masa Reformasi” mendiskripsikan terjadinya perubahan program pembangunan yang tadinya berlangsung dalam jangka lima tahunan menjadi program pembangunan satu tahunan. Bab ini juga menampilkan rancangan program pembangunan Kabupaten Lebak di masa Reformasi. Bab keenam, yang merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. ♦

BAB II

PROFIL KABUPATEN LEBAK

A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Lebak

LEBAK pertama kali menjadi sebuah kabupaten setelah diberlakukannya *Staatsbalaad* Nomor 81 Tahun 1828 yang dikeluarkan oleh Komisaris Jenderal Hindia Belanda melalui Surat Keputusan tertanggal 2 Desember 1828. Pada Surat Keputusan ini Keresidenan Banten¹ dibagi menjadi 3 kabupaten masing-masing: (1) Kabupaten Serang, (2) Kabupaten Lebak, dan (3) Kabupaten Caringin.

Kabupaten Lebak yang berpusat di suatu daerah bernama Lebak Parahiang² yang diberlakukan sejak tanggal 2 Desember 1828 hingga 17 Januari 1849. Kemudian, pada tanggal 17 Januari 1849 hingga 31 Maret 1851 dipindahkan ke Warunggunung³. Dari Warunggunung

¹ Keresidenan Banten dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada 18 Maret 1813 yaitu dengan membagi 4 wilayah bekas Kesultanan Banten yaitu: a. Banten Lor; b. Banten Kulon; c. Banten Tengah; d. Banten Kidul. Pembentukan ini terjadi ketika Raffles menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang kemudian mengangkat Tumenggung Suradilaga menjadi Bupati Banten Kidul dengan pusat pemerintahan kabupaten di Cilangkahan dimana Lebak menjadi bagian kabupaten ini.

² Lebak Parahiang sekarang menjadi sebuah desa di Kecamatan Leuwidamar dalam wilayah Kabupaten Lebak. Kecamatan Leuwidamar dikenal juga sebagai wilayah permukiman “orang Baduy”.

dilakukan pemindahan pusat kota kabupaten lagi yaitu di Rangkasbitung berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 15 tanggal 17 Januari 1849. Pemindahan ini baru dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1851.

B. Identifikasi Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak dari masa penjajahan Belanda sampai sekarang telah mengalami tiga kali pergantian induk artinya sepanjang sejarah Kabupaten Lebak posisi daerah ini tetap berada di bawah daerah tingkat satu. Pergantian induk ini terjadi akibat berubahnya aktifitas politik baik masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pemerintahan Republik Indonesia. Kabupaten Lebak sejak tahun 1828 merupakan bagian dari Keresidenan Banten kemudian berurut-turut mengalami perubahan menjadi bagian dari Propinsi Jawa Barat hingga akhirnya menjadi bagian dari Propinsi Banten. Posisi sebagai bagian dari Propinsi Banten tampaknya melanjutkan statusnya terdahulu ketika menjadi salah satu kabupaten di Karesidenan Banten.

29 Oktober 1882 khusus wilayah Kabupaten Lebak dilakukan perubahan tepatnya pembenahan dan pemberdayaan wilayah administrasi dimana sebelumnya (1813) hanya terdapat 4 distrik⁴ yaitu: Distrik Sajira meliputi Onderdistrik⁵ Ciangsa, Somang, dan Sajira; Distrik Lebak Parahiyan meliputi Onderdistrik Koncang dan

³ Alasan pemindahan dari Lebak Parahiyan ke Warunggunung, lebih dikarenakan posisi Warunggunung relatif lebih mudah dijangkau karena posisinya di ujung Utara dan berbatasan dengan Kabupaten Serang sebagai pusat pemerintahan Keresidenan Banten, sedangkan Lebak Parahiyan terletak jauh kepedalaman di bagian tengah-tengah Kabupaten Lebak. Warunggunung sekarang masih berstatus sebagai bagian wilayah Kabupaten Lebak dan menjadi sebuah kecamatan, sedangkan ibukota Kabupaten Lebak dipindahkan ke Rangkasbitung ± 4 Km ke arah Timur Warunggunung.

⁴ semacam wilayah kecamatan sekarang

⁵ semacam kelurahan atau desa sekarang

Parahiyang; Distrik Parungkujang meliputi Onderdistrik Parungkujang dan Kosek; Distrik Madhoor (Madur) yang meliputi Onderdistrik Binuangeun, Sawarna, dan Madhoor⁶, menjadi 5 distrik yaitu:

1. Distrik Parungkujang terdiri dari Onderdistrik Parungkujang, Cileles, Kumpai, dan Bojongmanik.
2. Distrik Rangkasbitung terdiri dari Onderdistrik Rangkasbitung, Kolelet Wetan, Warunggunung, dan Cikulur.
3. Distrik Lebak terdiri dari Onderdistrik Lebak, Muncang, Cilaki, dan Cikeuyeup.
4. Distrik Sajira meliputi terdiri dari Onderdistrik Sajira, Candi, dan Maja.
5. Distrik Cilangkahan terdiri dari Onderdistrik Cilangkahan, Cipalabuh, Cihara, dan Bayah.⁷

Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal 14 Agustus 1925 yaitu dengan diberlakukannya Staatsblad No. 381 tahun 1925, Lebak menjadi sebuah kabupaten otonom yang memiliki 5 distrik yaitu Distrik Parungkujang, Rangkasbitung, Lebak Parahiyang, dan Cilangkahan. Sajira yang tadinya adalah sebuah distrik masuk menjadi bagian dari Distrik Lebak Parahiyang.

Enam puluh satu tahun kemudian (1986) Kabupaten Lebak terdiri dari 4 pembantu kabupaten, 15 kecamatan, 13 kematren (perwakilan kecamatan), 5 kelurahan, dan 295 desa. Pada masa ini Kabupaten Lebak masih menjadi bagian dari Propinsi Jawa Barat.

Tahun 2003 Kabupaten Lebak menjadi semakin semarak dengan bertambahnya jumlah wilayah kecamatan akibat program pemekaran wilayah. Jumlah kecamatan menjadi 23 buah, 5 kelurahan, dan 295 desa.⁸ Pada masa ini Kabupaten Lebak kembali menjadi bagian

⁶ Agus Sutisna, dkk., Ed., *Lebak dalam Arus Perubahan. Kado Ulang Tahun ke- 176 Kabupaten Lebak*. Lebak: Dinas INKOSBUDPAR Kabupaten Lebak, 2004:10.

⁷ Ibid. Perubahan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Staatsblad No. 266 tahun 1882.

⁸ Sumber: Setda Bagian Pemerintahan Keadaan tahun 2003.

dari Propinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23/2000 tanggal 17 Oktober 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten.⁹

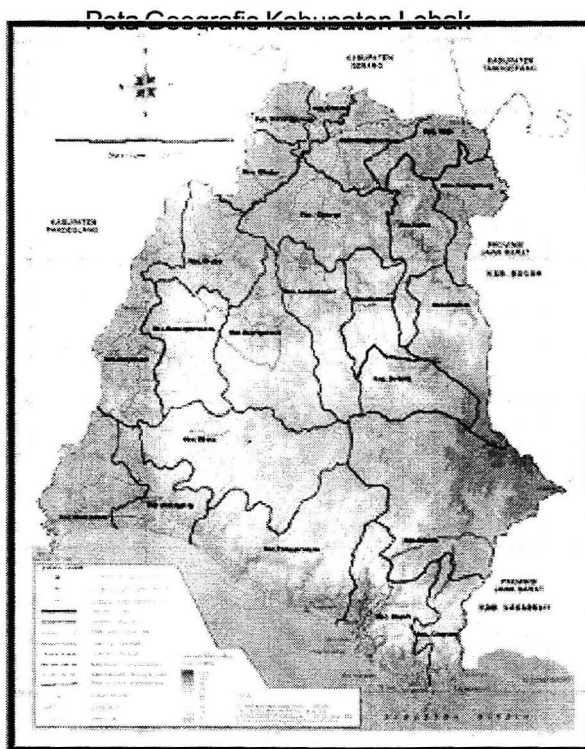
Batas wilayah Kabupaten Lebak adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang, sebelah Timur dengan Kabupaten Bogor dan Sukabumi, sebelah Selatan dengan Samudera Hindia, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Pandeglang.

Luas wilayah tahun 1986 adalah 3.120 km² kemudian berkurang¹⁰ pada tahun 2004 menjadi 2.859,96 km² sehingga menimbulkan kesan wilayah Kabupaten Lebak menciut seluas 260,04 km². Namun dengan jumlah luas sedemikian Kabupaten Lebak adalah daerah yang terluas di Propinsi Banten. Akibat diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 Luas kawasan lautnya adalah 555,6 km² dengan panjang pantai \pm 75 km.

⁹ Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, Banten merupakan wilayah propinsi Jawa Barat, Keresidenan Banten merupakan wilayah Pembantu Gubernur Wilayah I yang mencakup Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang. Yang dimekarkan menjadi Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Sedangkan Kabupaten Tangerang dimekarkan menjadi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Pada tahun 1998, Peme-rintahan Indonesia melakukan perubahan mendasar pada sistim pemerintahan daerah (era reformasi), maka sesuai dengan tuntutan dan aspirasi rakyat, wilayah Keresidenan Banten mengajukan pemisahan diri dari Wilayah Propinsi Jawa Barat. Setelah melalui proses yang cukup memakan tenaga dan pikiran, namun demokratis, Propinsi Banten dikukuhkan dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, tanggal 17 Oktober 2000.

¹⁰ Pengurangan wilayah ini tidak bisa dijelaskan penyebabnya, namun kemungkinan besar pada pengukuran tahun 1986 hasil pengukuran belum tepat/detail kemudian disempurnakan pada tahun 2003 dimana hasilnya telah dihitung secara digital sehingga diperoleh angka yang mendekati sempurna. Ditambah lagi antara tahun 1986 sampai tahun 2003 tidak ada peristiwa alam (misalnya longsor, retakan tanah, pergeseran tanah) yang terjadi yang mampu menciutkan luas wilayah tersebut.

Secara geografis Kabupaten Lebak terletak pada posisi $105^{\circ}25'$ - $106^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}18'$ - $7^{\circ}00'$ Lintang Selatan. Pegunungan Kendeng menjadi pembelah antara Lebak bagian Utara dan Selatan. Dengan adanya Gunung Kendeng ini maka kontur tanah di Kabupaten Lebak datar bergelombang dengan variasi ketinggian antara 0-1000 meter dari permukaan laut (dpl). Perinciannya adalah ketinggian 0-200 m dpl berada di kawasan pantai, 201-500 m dpl di Lebak bagian tengah, 501-1000 m dpl di Lebak bagian Timur.

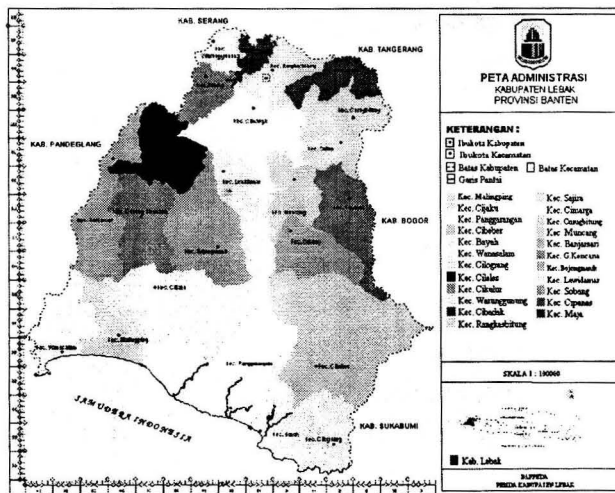


Sumber: Bappedda Kabupaten Lebak, 2005

Rata-rata curah hujan tiap tahun diterima kabupaten ini antara 2000—4000 mm. Posisi Gunung Kendeng yang membelah Lebak menjadikan sebelah Selatan lebih banyak menerima curah hujan

daripada bagian Utaranya, hal ini disebabkan daerah Selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia relatif lebih cepat membentuk awan hujan akibat uap air lautnya, sedangkan bagian Utara terhalang oleh puncak Gunung Kendeng. Suhu rata-rata 24—25°C.

Gunung Kendeng selain menjadi pembatas alam juga merupakan sumber mata air bagi aliran sungai-sungainya. Ci Ujung adalah sungai terbesar yang mengalir dari Selatan ke Utara kemudian menyebarkan aliran airnya melalui 2 anak sungai yaitu Ci Simeut dan Ci Laki. Anak Ci Ujung yang mengalir ke arah Barat adalah Ci Liman. Aliran air sungai ini akhirnya bermuara di Teluk Lada. Sungai lain yang mengalir ke arah Selatan relatif lebih kecil yaitu Ci Langkahan, Ci Pager, Ci Mandiri, Ci Pandalan, dan Ci Sawarna. Sungai-sungai ini bermata air di Pegunungan Kendeng dan bermuara di Samudera Indonesia.



Sumber: Bappeda Kabupaten Lebak, 2005

Sebagai kabupaten yang menitikberatkan pembangunan daerahnya di bidang pertanian, kondisi dan jenis tanah di Kabupaten

Lebak termasuk potensial. Tercatat 6 jenis tanah yaitu : podsolik merah kuning, latosol, aluvial, regosol, dan tanah hutan coklat non kalsit.¹¹ Kondisi tanah ini juga menjadi potensi bagi hasil tambang yang terkandung di dalamnya. Kabupaten Lebak memiliki bahan tambang emas, perak, timbel, minyak bumi, dan biji besi yang sudah dikelola baik secara tradisional maupun dengan teknologi modern. Batu-batu mulia dan jenis batu yang potensial untuk dijadikan komoditi bagi pendapatan asli daerah (PAD) juga dapat ditemui di kabupaten ini. Batu-batu tersebut dari jenis batu gamping, batu bara, andesit, deolit, bentonit, pasir kuarsa, kalsit, gips, marmer, batu hias, batu apung, dan batu karang. Batu mulia dari Kabupaten Lebak yang terkenal sampai ke manca negara adalah Batu Kali Maya yang dapat di jumpai di dalam tanah dan sungai yang mengalir di Kecamatan Maja.

C. Gambaran Umum Pelita

Pelita adalah sebuah program pembangunan yang dibuat dan dilaksanakan semasa Orde Baru. Pelita yang bermakna pelaksanaan program pembangunan selama lima tahun¹² sehingga menjadi singkatan Pembangunan Lima Tahun, bertujuan untuk merencanakan prioritas pembangunan di Indonesia yang akan dievaluasi pada setiap akhir periode. Prioritas pembangunan tersebut kemudian diserahkan ke propinsi-propinsi untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hasil dari pelaksanaan setiap Pelita diserahkan ke pemerintah pusat, pemerintah pusat kemudian membagi ke tiap propinsi secara merata. Sistem seperti ini seharusnya mampu menyeimbangkan perkembangan pembangunan di wilayah Indonesia,

¹¹ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jld. 9. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990 : 334.

¹² Pelita pertama dimulai dari tahun 1969 hingga 1974, Pelita kedua 1974—1979, Pelita ketiga 1979—1984, Pelita keempat 1984—1989, Pelita kelima 1989—1994, Pelita keenam 1994—1999. Pelita keenam ini adalah temporal terakhir pembangunan di Indonesia masa Orde Baru, sebab setelah Orde Baru diganti oleh suatu keadaan yang disebut Reformasi sistem lima tahunan juga berganti menjadi pembangunan sistem satu tahunan.

sayangnya daerah surplus misalnya Riau, Kalimantan dan Irian Jaya (sekarang Papua) menjadi lebih banyak memberi daripada menerima, akibatnya daerah-daerah tersebut malah tertinggal dibanding dengan Jakarta. Alasannya tentu saja karena Jakarta adalah ibukota NKRI. Ketika Reformasi menggantikan Orde Baru, riak kecil yang sifatnya laten menyeruak keluar, daerah-daerah surplus terang-terangan mengeluh karena potensi daerah mereka dikeruk sementara hasilnya tidak maksimal bagi pembangunan daerah mereka. Dampaknya Riau dan Papua menuntut kemerdekaan lepas dari NKRI.

Kembali ke Pelita. Pembangunan dalam setiap Pelita dilaksanakan berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah dengan landasan operasional Garis-garis Besar Haluan Negara dan landasan spiritual Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan setiap Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan pada tahap berikutnya.

Sebagai suatu harapan akan kemajuan dalam pembangunan di daerah, Kabupaten Lebak juga turut melakukan pembenahan diantaranya menetapkan sasaran pokok pada tiap bidang pembangunan yang menjadi pengarah dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bidang Ekonomi

Di bidang ini upaya yang akan dilakukan adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang. Kabupaten Lebak diupayakan menjadi daerah penyuplai bahan kebutuhan pokok untuk daerah-daerah Jakarta, Serang dan Tangerang melalui pengembangan kegiatan sektor pertanian serta argo industri.

2. *Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Sosial Budaya*

Bidang ini mengarah kepada pembinaan rohani warga masyarakat agar tercapai keseimbangan dan keselarasan lahiriah dan batiniah baik dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, maupun dengan alam sekitarnya. Upaya ini untuk memacu semangat gotong royong dalam mencapai tujuan nasional yaitu kemakmuran yang merata. Dengan memanfaatkan landasan ekonomi yang seimbang.

3. *Bidang Politik*

Bidang ini memiliki target untuk memantapkan kesadaran politik masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sehingga dapat menjadi jaminan lancarnya usaha untuk mencapai tujuan pembangunan.

4. *Bidang Pertahanan dan Keamanan*

Terciptanya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang mampu menjadi alat dan strategi dalam menyukseskan dan mengamankan perjuangan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan regional dari kemungkinan ancaman dari dalam dan infiltrasi dari luar.

Pembangunan di Kabupaten Lebak lebih didominasi sektor pertanian di bidang ekonomi. Hal ini terjadi karena karakteristik daerah Kabupaten Lebak sesuai untuk lahanlahan persawahan dan perkebunan, sehingga potensi yang dapat dikembangkan selain tanaman padi adalah komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa hybrida, karet, dan tanaman hortikultura lainnya. Selain itu sektor perikanan juga merupakan potensi yang baik untuk dikembangkan melalui proses pembinaan dan penyuluhan guna mencapai hasil yang maksimal dan mampu bersaing di dunia pemasaran. ♦

BAB III

PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA

PEMBANGUNAN di setiap daerah di Indonesia baik di tingkat I (provinsi) maupun tingkat II (kota/kabupaten) lebih diarahkan kepada pembangunan berdasarkan wilayah. Wilayah yang dimaksudkan ini adalah pembagian suatu areal pembangunan misalnya beberapa desa, kecamatan atau gabungan desa-desa pada dua atau lebih kecamatan yang lebih diprioritaskan. Prioritas ini bisa sejenis juga dapat beragam, bergantung kepada potensi yang akan dikembangkan pada wilayah pembangunan tersebut. Pelaksanaan wilayah pembangunan ini telah dimulai sejak Pelita II (1974 sampai dengan 1979). Dengan wilayah pembangunan ini diharapkan tercapainya keseimbangan baik di dalam wilayah itu sendiri maupun antar wilayah pembangunan lainnya. Faktor yang menjadi patokan masuknya daerah-daerah kecamatan secara terpadu ke dalam wilayah pembangunan adalah kesamaan pada unsur sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusianya, dan tinggi rendahnya tingkat jalinan dan arus kegiatan ekonomi dan sosial. Sementara pendekatan yang dilakukan untuk menunjang program ini adalah melalui pantauan, pemasukan ide-ide, dan pelaksanaannya dibidang ekonomi, sosial, administrasi pemerintahan dan tata ruang daerah.

Potensi setiap kecamatan berbeda dan bervariasi bergantung kepada karakteristik alam dan sumber daya manusianya yang mampu memberi kontribusi bagi perkembangan setiap wilayah. Potensi ini dapat memberikan keuntungan sepanjang dilaksanakan dengan tetap

berpadu pada sistem dan pendekatan yang selaras dan terorganisasikan dengan baik. Artinya pelaksanaan pembangunan tetap harus berpedoman pada azas kepentingan bersama dipandu dengan tata kerja terpimpin sehingga dapat memberi hasil optimal disertai tanggung jawab bersama untuk maju dan berkembang.

Dalam rangka pembagian wilayah pembangunan tersebut, maka Kabupaten Lebak pada Pelita keempat yang hanya mencakup tiga wilayah (Lebak Timur dan Lebak Barat disatukan disebut Wilayah Pembangunan II Lebak Tengah), pada Pelita Kelima dibagi menjadi 4 wilayah masing-masing; Wilayah Pembangunan Lebak Utara, Lebak Timur, Lebak Barat, dan Lebak Selatan.

Wilayah pembangunan Lebak Utara terdiri dari Kecamatan Rangkasbitung, Warunggunung, Maja, dan Cimarga dengan pusat pertumbuhan di Rangkasbitung dan sub pusat pengembangan di Maja. Wilayah pembangunan Lebak Timur terdiri dari Kecamatan Leuwidamar, Muncang, Bojongmanik, Cipanas, dan Sajira dengan pusat pertumbuhan di Leuwidamar dan sub pusat pengembangannya di Desa Gajrug Kecamatan Cipanas. Wilayah pembangunan Lebak Barat terdiri dari Kecamatan Banjarsari, Cileles, dan Gunungkencana dengan pusat pertumbuhan wilayah di Banjarsari dan sub pusat pengembangannya di Sajir dan Gunungkencana. Wilayah pembangunan Lebak Selatan terdiri dari Kecamatan Malimping Panggarangan dan Bayah dengan pusat pertumbuhan wilayah di Malimping dan sub pusat pengembangan di Bayah.

A. Permasalahan

1. Lebak Utara

Luas wilayah pembangunan I ini adalah 512,33 Km² dengan perincian Kecamatan Rangkasbitung yang merupakan pusat ibukota Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah 19,65 % atau 132,69 Km², Kecamatan Warunggunung 19,42 % atau 135,85 Km², Kecamatan Maja 26,68 % atau 71,97 Km², dan Kecamatan Cimarga 34,23 % atau seluas 43,73 Km². Topografi atau bentuk permukaan daratan

Lebak Utara adalah relatif datar dengan ketinggian 24 sampai 78 m dpa.¹³

Tahun 1971 jumlah penduduk wilayah ini sebesar 182.311 jiwa sembilan tahun kemudian menjadi 231.642 jiwa. Tahun 1987 kembali terjadi peningkatan sehingga menjadi 265.740 jiwa. Dari data tersebut antara tahun 1971 sampai 1980 meningkat 2,70 % pertahun sementara antara tahun 1980 sampai 1987 turun rata-rata 1,81 % pertahun. Tahun 1989 jumlah penduduk wilayah pembangunan Lebak Utara berkisar 272.017 jiwa dan pada tahun 1993 diperkirakan akan meningkat sebanyak 293.642 jiwa terjadi peningkatan 1,53 % per tahun.¹⁴

Tingkat kepadatan penduduk tahun 1980 adalah 452 jiwa/km² meningkat menjadi 507 jiwa/km² pada tahun 1987. Kecamatan terpadat adalah Rangkasbitung sebanyak 1.165 jiwa/km² terjarang adalah Kecamatan Cimarga yang hanya berjarak \pm 10 km dari Rangkasbitung yaitu sebanyak 213 jiwa/km². Meskipun Cimarga adalah kecamatan terjarang penduduknya, namun kecamatan ini memiliki jumlah pengangguran terbanyak yaitu 7.047 orang atau 25,56 % 106.204 orang angkatan kerja. Sedangkan Rangkasbitung yang merupakan ibukota kabupaten memiliki data pengangguran sebanyak 2.857 orang atau 10.36 %.

Sebagai daerah pertanian, maka mata pencaharian penduduk Lebak Utara sebagian besar adalah petani yaitu 64.057 orang yang terdiri dari petani penggarap 52.230 orang dan buruh tani 11.827 orang. Petani penggarap adalah mereka yang memiliki lahan persawahan sekaligus menggarapnya, sedangkan buruh tani adalah penggarap atau pekerja tani saja. Sektor mata pencaharian lainnya adalah pedagang sebanyak 6.419 orang, sektor pemerintahan dari berbagai instansi sebanyak 6.683 orang, dan buruh industri/kerajinan sebanyak 1.185 orang dimana sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Rangkasbitung.¹⁵

¹³ Repelita Kelima Dati II Lebak 1989/1990-1993/1994. Buku III. Rangkasbitung: Pemda Tk II Kabupaten Lebak

¹⁴ BPS Kabupaten Lebak 1990.

¹⁵ Ibid

Pendapatan perkapita Kecamatan Rangkasbitung sebesar Rp 520.781,25,- disusul Kecamatan Maja sebesar Rp359.469,04,-.Kemudian, Kecamatan Warunggunung sebesar Rp 313.661,62,-, dan Kecamatan Cimarga Rp 284.831,16 menjadikan Lebak Utara memiliki pendapatan perkapita lebih besar dibanding dengan 3 wilayah pembangunan lainnya.¹⁶ Dari struktur perekonomian, Lebak Utara cenderung meningkat akibat posisinya sebagai pusat pemerintahan (Kecamatan Rangkasbitung), pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan tempat hubungan antar kabupaten dan kota lain di luar Kabupaten Lebak.

Dari data di atas pemerintah Kabupaten Lebak merumuskan masalah yang dianggap paling krusial di wilayah pembangunan Lebak Utara yaitu:

1. Tingkat produktifitas tenaga kerja masih kurang.
2. Tingkat pendidikan dan keterampilan sebagian masyarakat masih belum berimbang dengan kebutuhan pembangunan.
3. Sikap tradisional sebagian masyarakat yang kurang menguntungkan pembangunan masih cukup kuat mempengaruhi kehidupan.
4. Kemampuan aparatur pemerintah masih terbatas, serta prasarana fisik pemerintahan masih banyak belum memadai.
5. Industri kecil dan kerajinan, terutama yang mengolah hasil pertanian, belum memiliki kemampuan pemasaran.
6. Pengetahuan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
7. Tingkat pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, dengan penyebaran yang tidak merata serta terjadinya pemusatan penduduk di ibu kota kecamatan.
8. Komunikasi pertelepon baik antar kota kecamatan maupun dalam kota belum memadai.
9. Usaha pertanian masih belum mengarah kepada orientasi pasar.¹⁷

¹⁶ BPS Kabupaten Dati II Lebak tahun 1987.

¹⁷ Op.Cit.

2. Lebak Timur

Wilayah pembangunan ini memiliki total luas 644,56 Km² atau 23,23 % dari luas Kabupaten Lebak. Kecamatan Muncang memiliki luas 22,80 %, disusul Kecamatan Bojongmanik 21,26 %, kemudian Kecamatan Leuwidamar 20,89 %, Kecamatan Cipanas 19,54 %, dan Kecamatan Sajira 15,49 %. Bentuk daratan terdiri dari bukit-bukit kecil dengan ketinggian bervariasi antara 70 sampai 200 meter dpa.

Tahun 1971, penduduk Lebak Timur berjumlah 128.022 jiwa sembilan tahun kemudian (1980) meningkat menjadi 153.574 jiwa atau mengalami kenaikan rata-rata 1,99% pertahun dengan pertumbuhan tertinggi ditempati oleh Kecamatan Cipanas yaitu 2,98 % dan terendah adalah Bojongmanik 1,36 %. Tahun 1987 naik lagi menjadi 179.226 jiwa atau naik sebesar 2,05 % pertahun dengan pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Leuwidamar 2,44 % dan terendah di Kecamatan Cipanas 1,72 %. Tahun 1989 jumlah penduduk Lebak Timur diperkirakan sebesar 185.285 jiwa atau naik menjadi rata-rata 1,74 % pertahun.

Tingkat kepadatan penduduk wilayah pembangunan II ini pada tahun 1971 sebanyak 192 jiwa/km², tahun 1980 menjadi 231 jiwa/km², dan tahun 1987 meningkat seiring pertumbuhan penduduk menjadi 269 jiwa/km². Kecamatan terpadat adalah Cipanas yaitu sebesar 338 jiwa/km².

Angkatan kerja penduduk Lebak Timur sebesar 129,021 orang 71,58 % atau sebanyak 92.362 orang memiliki pekerjaan sedangkan 39,69 % adalah pengangguran. Kecamatan Leuwidamar memiliki pengangguran tertinggi yaitu sebanyak 8.659 orang dan terendah adalah Bojongmanik 3.850 orang atau 10,51 %.

Rumusan permasalahan pokok yang dialami Lebak Timur sebagai berikut:

1. Kesempatan kerja dan keterampilan angkatan kerja serta produktivitas tenaga kerja masih rendah.
2. Tingkat pengetahuan kesehatan masyarakat masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana kesehatan.

3. Kondisi fisik sebagian daerah kurang menguntungkan di samping masih terdapatnya perkebunan terlantar dan luasnya lahan kritis.
4. Bahan galian C yang merupakan sumber daya alam belum terolah secara maksimal.
5. Sarana dan prasarana perhubungan kurang berimbang dibanding dengan luas wilayah yang dimiliki.
6. Lingkungan potensi sumber daya alam di beberapa daerah terjadi pengrusakan sehingga kurang menguntungkan.
7. Sarana dan prasarana pemerintahan belum memadai terutama di tingkat pedesaan. Sementara itu sumber daya manusia yang merupakan aparatur masih belum selaras dengan besarnya tugas di daerah.
8. Eksistensi di desa belum mencapai tingkat perkembangan yang diinginkan.
9. Penyebaran Listrik Masuk Desa masih menghadapi berbagai hambatan.

3. *Lebak Barat*

Luas wilayah pembangunan III ini adalah 391,98 Km² atau 13,70 % luas keseluruhan Kabupaten Lebak. Dari ketiga kecamatan di Lebak Barat ini Kecamatan Gunungkencana adalah yang terluas dengan 137,74 km² atau 35,13 %, kemudian Kecamatan Banjarsari 137,29 km², dan Kecamatan Cileles 116,95 km² atau 29,83 %. Topografi wilayahnya bervariasi dari ketinggian 24 sampai 270 meter dpa. Kecamatan tertinggi adalah Gunungkencana 270 meter dpa.

Tahun 1971 penduduk Lebak Barat berjumlah 69.540 jiwa, tahun 1980 naik menjadi 87.544 jiwa. Artinya sepanjang 1971 sampai 1980 terjadi kenaikan penduduk rata-rata 2,58 % pertahun dengan kepadatan penduduk sebanyak 223 jiwa/km². Pada tahun 1987 meningkat lagi menjadi 100.080 jiwa. Peningkatan sepanjang tahun 1980 sampai 1987 rata-rata 1,78 % pertahun dengan kepadatan rata-rata 255 jiwa/km². Perkiraan pertumbuhan penduduk antara tahun

1989 sampai 1993 akan mencapai 1,57 % atau menjadi 111.890 jiwa pada tahun 1993 jiwa.

Penduduk dengan angkatan kerja sebanyak 66.538 orang atau 66,48 % tetapi yang telah mendapat pekerjaan hanya sebanyak 12.587 orang atau 18,91 %. Ini berarti jumlah pengangguran di Lebak Barat cukup fantastis yaitu sebesar 53.951 orang. Adapun penduduk usia sekolah sebanyak 46.420 orang.

Princian jumlah penduduk angkatan kerja yang telah bekerja berdasarkan jenis pekerjaannya adalah; 9.814 orang disektor pertanian terdiri dari 6.059 petani penggarap dan 3.755 buruh tani. Sektor perdagangan 1.270 orang, jasa pemerintahan 1.072 orang, buruh industri/kerajinan 13 orang, pengusaha 35 orang, dan pekerja lainnya sebanyak 311 orang. Banjarsari adalah kecamatan tempat konsentrasi para pekerja tersebut.

Dari data statistik tahun 1987 Lebak Barat adalah wilayah pembangunan yang memiliki pendapatan perkapita tertinggi ketiga setelah Lebak Utara dan Lebak Selatan. Ini terlihat dari pendapatan perkapita ketiga kecamatan di bawah wilayah ini yaitu Cileles sebesar Rp 329.477,12,-, Gunungkencana Rp 292.677,44,-, dan Banjarsari Rp 248.689,80,-. Jumlah yang sangat ironis bila dibandingkan dengan jumlah pengangguran di wilayah pembangunan III Lebak Barat ini. Ini suatu bukti bahwa dengan tingginya pendapatan perkapita tidak sertamerta mampu mengurangi jumlah pengangguran, karena jenis pekerjaan sangat jelas bentuknya. Sedangkan, pengangguran bisa beragam penyebabnya. Salah satu diantaranya adalah kemalasan akibat kondisi alam yang kurang menguntungkan.

Permasalahan di wilayah ini adalah:

1. Tingkat pengetahuan kesehatan masyarakat masih rendah, penyebabnya adalah sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai.
2. Kesempatan dan keterampilan angkatan kerja serta produktifitas tenaga kerja masih rendah.

3. Kondisi fisik sebagian daerah kurang menguntungkan berbukit-bukit, berawa dan rawan bencana alam seperti longsor.
4. Sarana dan prasarana perhubungan tidak sebanding dengan luasnya wilayah.
5. Potensi sumber daya alam belum dikelola secara maksimal.
6. Sarana dan prasarana pemerintahan kurang mencukupi terutama di pedesaan.
7. Kemampuan sumber daya manusia di tingkat aparat pemerintah belum dapat mengimbangi besar dan beragamnya tugas di daerah.
8. Eksistensi koperasi di desa belum mencapai tingkat perkembangan sesuai yang direncanakan.
9. Penyebaran Listrik Masuk Desa masih menuai hambatan.

4. *Lebak Selatan*

Lebak Selatan yang merupakan wilayah pembangunan IV memiliki luas 1.291,58 km². Luas masing-masing kecamatan bervariasi dengan kecamatan terluas adalah Bayah yaitu 606,62 km², menyusul Kecamatan Malingping 369,58 km², dan Kecamatan Panggarangan seluas 314,90 km². Uniknya dua kecamatan di wilayah ini yaitu Bayah dan Panggarangan juga termasuk dalam wilayah pengembangan Kabupaten Sukabumi. Dari keseluruhan wilayah pembangunan di Kabupaten Lebak, Lebak Selatan adalah yang terendah topografinya yaitu antara 0 sampai 10 meter dpa. Ini disebabkan letak wilayah ini berada disekitar pantai Selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.

Tahun 1971 jumlah penduduk Lebak Selatan sebanyak 160.821 jiwa dengan kepadatan penduduk 130 jiwa/ km² dan pada tahun 1980 menjadi 211.731 jiwa dengan kepadatan rata-rata 163 jiwa/km² atau mengalami kenaikan prosentase sebesar 2,54 % pertahun. Tahun 1987 kembali Lebak Selatan mengalami kenaikan jumlah penduduk menjadi 249,530 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 296 jiwa/km².

Antara tahun 1971 sampai 1980 Kecamatan Bayah adalah kecamatan terbanyak penduduknya yaitu 2,92 % pertahun disusul Malingping 2,58 % pertahun dan Panggarangan 1,81 % pertahun. Tahun 1980 sampai 1987 posisi Bayah digantikan oleh Malingping yang memiliki jumlah penduduk 2,92 % pertahun, disusul Panggarangan 2,20 % pertahun, dan Bayah diurutan terakhir dengan prosesntase jumlah penduduk 1,49 % pertahun. Perkiraan pertumbuhan penduduk Lebak Selatan antara tahun 1989 sampai 1993 dapat mencapai rata-rata 2,12 % pertahun.

Tahun 1987 jumlah angkatan kerja di Lebak Selatan mencapai angka 182.067 orang atau 72,96 % dari total jumlah penduduk (249,530 jiwa). Penduduk yang telah bekerja berjumlah 89.384 orang sedangkan pengangguran 92.683 orang. Kecamatan terbanyak penganggurannya adaah Bayah yaitu 28,17 %, menyusul Malingping sebanyak 16,34 %, dan Panggarangan 12,50 %.

Meskipun kondisi alam Lebak Selatan adalah daerah pantai namun kehidupan pertanian sangat mendominasi. Jumlah penduduk yang bermatapencanharian di sektor pertanian sebanyak 74.475 orang terdiri dari petani penggarap sebanyak 54.950 orang, buruh tani sebanyak 19.525 orang, nelayan 1.492 orang, pedagang 8.441 orang, pemerintahan 2.879 orang, buruh industri/kerajinan sebanyak 1677 orang. Konsentrasi pekerja ini sebagian besar di Kecamatan Malingping.

Tahun 1987, pendapatan perkapita wilayah ini cukup signifikan karena menjadi urutan kedua setelah Lebak Utara. Kamatan Malingping menduduki posisi pertama di Lebak Selatan dengan jumlah pendapatan Rp 366.604,88,-, posisi kedua ditempati oleh Kecamatan Bayah yaitu Rp 362.943,36,- dan posisi ketiga adalah Kecamatan Panggarangan dengan jumlah Rp 282.002,62,-.

Dari gambaran kondisi di atas, maka permasalahan yang timbul di Lebak Selatan adalah:

1. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif rendah yaitu masih berada di bawah rata-rata Kabupaten Lebak.
2. Keterampilan dan produktifitas angkatan kerja masih rendah.

3. Kondisi fisik sebagian daerah terutama bagian Utara dan Timur kurang menguntungkan karena topografi relatif terjal.
4. Bahan galian C belum dimanfaatkan secara optimal karena pengusahanya masih menggunakan teknologi tradisional dan berlangsung secara ilegal.
5. Sarana dan prasarana perhubungan sebagian belum memadai dibanding dengan kebutuhan yang makin besar.
6. Potensi alam belum dimanfaatkan secara optimal.
7. Sarana dan prasarana penangkapan ikan laut masih kurang memadai, jumlah pelabuhan nelayan masih sedikit.
8. Listrik di tingkat pedesaan belum merata.
9. Peningkatan produksi pertanian khususnya sayur-sayuran masih terhambat oleh faktor pemasaran yang tidak menguntungkan.
10. Abrasi pantai dan pelumpuran merupakan permasalahan khusus.
11. Jalur jalan lintas Selatan rawan longsor akibat abrasi pantai Selatan.

B. Arah dan Kebijakan Pembangunan

Arah dan kebijakan pembangunan adalah suatu tata kerja yang menjadi pedoman untuk menghadapi sekaligus mengatasi permasalahan yang timbul pada masing-masing wilayah. Arah dan kebijakan ini disesuaikan dengan potensi dan permasalahan yang terjadi. Tujuannya adalah percepatan pembangunan dan upaya pemerataan dengan harapan hasil yang signifikan.

1. Lebak Utara

Rangkasbitung adalah ibukota Kabupaten Lebak dan dalam pembagian wilayah pembangunan ini bersama dengan Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Maja, dan Kecamatan Cimarga termasuk dalam Wilayah Pembangunan I Lebak Utara. Potensi pengembangan

untuk Rangkasbitung selain sebagai pusat pemerintahan kabupaten kota ini juga dijadikan pusat pendidikan, perdagangan dan industri. Adapun kecamatan lainnya menjadi penyangga kota ini. Warunggunung diprioritaskan untuk pengembangan pertanian lahan sawah, perkebunan buah-buahan, perikanan darat, dan peternakan. Kecamatan Maja menjadi tempat pengembangan berbagai industri kecil, perkebunan buah-buahan, pertambangan, dan perkebunan Kelapa Hybrida melalui proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) V. Sedangkan, kecamatan penyangga lainnya yaitu Cimarga prioritas pengembangannya adalah perkebunan terutama Karet, Kelapa Sawit, dan Hybrida.

Upaya merealisasikan program-program tersebut ditempuh melalui dua kebijakan pembangunan yaitu umum dan sektoral. Kebijakan umum adalah langkah atau upaya pengklasifikasian masalah dengan melihat kepada permasalahan secara global. Sedangkan, kebijakan sektoral adalah perincian langkah atau upaya yang dilakukan secara spesifik atau dikenal dengan istilah langsung kesasaran.

Dalam kebijakan umum Kota Rangkasbitung memerlukan peningkatan kelengkapan sebagai sebuah ibukota kabupaten serta peningkatan mobilitas pertumbuhannya. Peningkatan ini akan berimbang jika daerah-daerah penyangga turut memberikan dukungan sehingga upaya ini menjadi timbal balik dan saling menguntungkan.

Adapun kebijakan sektoral pembangunan di Lebak Utara mencakup 6 sektor yaitu:

1. Sektor Pertanian dan Pengairan dengan 5 sub sektor, yaitu:
 - (a) Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan. Pada sektor ini 2 sasaran utama yang menjadi fokus utama adalah Pertanian Tanaman pangan dan Perikanan. Dibidang pertanian dan tanaman pangan penekanan upaya diberikan kepada peningkatan produksi tanaman padi, palawija dan buah-buahan. Guna mendukung upaya ini, maka pada Pelita V diprogramkan peningkatan tanaman pangan dan rehabilitas irigasi; (b) Sub Sektor Perikanan. Dibidang perikanan program yang dikembangkan adalah peningkatan produksi perikanan dan penyuluhan bagi petani ikan; (c) Sub Sektor Peternakan. Pengembangan sektor ini ditekan-

kan pada peningkatan populasi dan kualitas ternak terutama pada jenis ternak kambing, domba, ayam, dan itik; (d) Sub Sektor Perkebunan. Sasaran utama program pembangunan di sektor ini adalah peremajaan perkebunan, pembinaan petani peserta Perkebunan Inti Rakyat (PIR), bimbingan dan penyuluhan, serta peningkatan produksi tanaman ekspor non minyak dan gas; dan (e) Sub Sektor Pengairan. Kebijakan di sektor ini ditekankan pada usah pemeliharaan, rehabilitasi, dan eksploitasi irigasi yang telah ada dan pembangunan baru terutama di daerah Warunggunung dan Rangkasbitung. Turut menjadi perencanaan adalah pengembangan irigasi sistem pompanisasi terutama di areal sawah tadah hujan.

2. Sektor Industri. Pengembangan di sektor ini diarahkan pada industri yang mengelola hasil pertanian untuk mendorong pertumbuhan produksi pertanian. Industri kecil seperti pembuatan tempe dan tahu serat pembuatan batu bata dan genteng turut menjadi prioritas di sektor ini. Oleh karena itu program yang akan dilaksanakan adalah bimbingan dan penyuluhan untuk peningkatan mutu dan daya saing, serta bantuan modal dan pemasaran.
3. Sektor Pendidikan, Generasi Muda, dan Olah Raga. Sebagai wilayah yang mengembangkan pertanian dan industri, maka pelatihan keterampilan difokuskan kepada sekolah-sekolah kejuruan untuk pengembangan teknologi. Sehingga dimungkinkan untuk pembangunan fasilitas ruang belajar pada tingkat SMTP dan SMTA. Di bidang olah raga pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan juga diperlukan sebagai sarana pembinaan fisik dan mental, sedapat mungkin menemukan bibit atlet yang mampu mengangkat nama Kabupaten Lebak.
4. Sektor Perhubungan dan Pariwisata. Peningkatan jalan dan jembatan yang menghubungkan daerah produksi dengan daerah pemasaran serta perintisan pembuatan jalan baru mutlak diperlukan untuk menyukseskan program-program lainnya. Fasilitas telepon sistem manual diganti dengan sis-

tem otomatisasi serta pengembangan kepariwisataan berupa promosi daerah wisata turut menjadi program utama sektor ini.

5. Sektor Pembangunan Daerah, Kota, dan Desa. Fokus utama sektor ini adalah pembangunan masyarakat pedesaan di wilayah Kecamatan Maja.
6. Sektor Perdagangan dan Koperasi. Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam hal pemasaran hasil-hasil produksi pertanian dan industri rakyat sangat signifikan. Oleh karena itu dalam Pelita V dilakukan program peningkatan operasional perdagangan lokal dan regional, pengembangan koperasi yang sudah ada, dan penyuluhan perkoperasian.

2. *Lebak Timur*

Secara garis besar wilayah ini memiliki potensi dari sektor pertanian dan bahan tambang. Namun luasnya lahan pertanian kurang ditunjang dengan kepadatan penduduk, sehingga beberapa perkampungan menjadi terisolir menyebar di pelosok-pelosok wilayah. Hal ini semakin memperihatinkan karena prasarana perhubungan berupa jalan-jalan belum memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas jalan yang sudah ada. Jalan yang sudah ada relatif sempit bila dikaitkan dengan mobilitas perekonomian dari Lebak Timur ke Lebak Utara. Oleh karena itu pembangunan jalan menjadi prioritas pembangunan di wilayah ini.

Sebagai daerah pertambangan yang belum dikelola dengan baik ditambah pola pertanian berpindah yang masih diterapkan oleh masyarakat, berkibat pada rusaknya lingkungan sehingga perlu dilakukan konservasi alam melalui kegiatan reboisasi. Daerah-daerah yang mengalami kerusakan cukup signifikan adalah Kecamatan Muncang, Bojongmanik, dan Leuwidamar.

Kebijakan sektoral yang perlu dilakukan di wilayah ini masing-masing:

1. Sektor Pertanian dan Perikanan. Sektor ini meliputi Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, kehutanan, dan Perikanan.

Pertanian Tanaman Pangan

Pada sub sektor ini kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan produksi padi dan palawija, serta tanaman hortikultura. Tak kalah penting adalah kebijakan untuk melakukan reboisasi, pembangunan teras-teras atau dinding batu di sisi sungai yang rawan longsor, dan pembenahan batas-batas hutan.

Peternakan

Sub sektor ini ditekankan pada peningkatan populasi dan produksi hewan ternak termasuk segi kualitas dan pengembangan makanan ternak untuk kebutuhan pasar.

Perkebunan

Fokus utama di sub sektor ini adalah pemanfaatan kembali kebun-kebun yang telah habis izin Hak Guna Usaha (HGU) serta areal perkebunan yang terlantar lainnya akibat pola berpidah.

Kehutanan

Pada sub sektor ini pembangunan ditekankan pada peningkatan hasil produksi ikan air tawar untuk meningkatkan penghasilan petani ikan.

2. Sektor Pendidikan. Pemberantasan buta huruf masih menjadi prioritas utama sektor ini terutama menurunkan angka DO (*Droup Out*) pada tingkat sekolah dasar. Meningkatkan daya tampung SMTP dan SMTA melalui penambahan bangunan lokal sekolah yang sudah ada maupun pembangunan sekolah baru. Turut menjadi kebijakan di sektor ini adalah pemberdayaan keterampilan masyarakat untuk menumbuhkan industri rumah tangga.
3. Kesehatan. Penekanan di sektor ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan peningkatan

- pelayanan kesehatan melalui penyuluhan, perbaikan gizi, pemberantasan penyakit menular, dan penyediaan air bersih.
4. Aparatur Pemerintahan. Sektor ini menekankan pada pengefektifan dan pengefesiensian aparat pemerintah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengadaan kelengkapan sarana fisik terutama di pedesaan, dan pemerkeran wilayah tingkat kecamatan dan desa.
 5. Industri. Pemberdayaan masyarakat melalui industri kecil seperti pengolahan gula aren, kerajinan ijuk dan anyam-anyaman di Kecamatan Muncang dan Leuwidamar melalui program bimbingan dan penyuluhan industri kecil.
 6. Pembangunan Daerah, Kota, dan Desa. Fokus utama pembangunan di sektor ini adalah tingkat pedesaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berkarya agar keluar dari kategori kurang mampu.

3. *Lebak Barat*

Kebijakan umum di wilayah ini adalah menjadikan Kecamatan Banjarsari sebagai pusat wilayah Lebak Barat dengan cara memfasilitasi sarana dan prasarananya. Sedangkan, kebijakan sektoral di wilayah ini pada dasarnya memiliki kesamaan dengan wilayah Lebak Timur. Permasalahan yang muncul pada tiap sektor menjadikan upaya penanganan dan peningkatannya sama.

4. *Lebak Selatan*

Jika tiga wilayah pembangunan di atas bertumpu pada pengembangan dan peningkatan sektor pertanian, maka wilayah pembangunan Lebak Selatan ditambah dengan pengembangan sub sektor perikanan khusus produksi perikanan laut mengingat wilayah ini berbatasan dengan Samudera Hindia. Keunikan lainnya adalah wilayah ini juga berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi sehingga dua kecamatannya yaitu Panggarangan dan Bayah juga masuk ke

dalam wilayah pengembangan Jawa Barat Selatan. Adapun Kecamatan Malimping menjadi pusat pengembangan wilayah Lebak Selatan.

Komoditi utama yang diarahkan adalah perkebunan kelapa di Malimping dan Panggarangan sedangkan di Bayah pertanian tanaman pangan menjadi prioritas bersama dengan pertambangan emas di Cikotok dan Cirotan. Sektor pariwisata juga diarahkan untuk menjadi andalan wilayah ini. Perihal dimasukkannya Panggarangan dan Bayah dalam pembangunan wilayah Jabar Selatan lebih diarahkan pada pelestarian alam berupa penanggulangan lahan kritis di hulu-hulu sungai.

Kebijakan sektoral mencakup seluruh aspek potensi yang dimiliki yang secara umum memiliki kesamaan dengan wilayah pembangunan lainnya di Kabupaten Lebak. Meski demikian karena kekhasan Lebak Selatan yang memiliki pantai, maka beberapa sektor yang tidak dimiliki wilayah lainnya di wilayah Lebak Selatan justru menjadi prioritas. Sektor tersebut adalah pertanian dan tanaman pangan pada sub sektor perikanan dengan peningkatan produksi ikan laut dan pembangunan pelabuhan ikan di Binuangeun Kecamatan Bayah. Program di sub sektor ini adalah rehabilitasi dan penyempurnaan sarana dan prasarana perikanan laut serta penyebaran dan penyerapan teknologi perikanan.

Di sektor pertambangan kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan usaha eksploitasi bahan tambang termasuk dampaknya pada lingkungan sekitar. Sektor lainnya adalah Pariwisata yaitu wisata pantai melalui kegiatan penelitian dan promosi obyek wisata pantai dan pengembangan kesenian daerah.

C. Hasil yang Dicapai

Memasuki tahun 1996 berarti batas akhir waktu Pelita Kelima semakin dekat, demikian pula Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun (PJP) I yang telah dimulai pada tahun 1969 akan berakhir pula. Menjelang masa-masa akhir tersebut evaluasi terhadap program pembangunan dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana keberhasilan program-program tersebut. Hal ini menjadi penting

karena menjadi tolok ukur untuk pembuatan program pembangunan pada Pelita Keenam dan atau PJP II berikutnya.

Pembangunan Lima Tahun Kelima telah dilaksanakan dalam rangka Trilogi Pembangunan yaitu upaya mewujudkan pemerataan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Hasil-hasil yang dicapai telah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi landasan bagi tahap pembangunan berikutnya. Adapun hasil yang telah dicapai diklasifikasikan dalam bidang-bidang pembangunan sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi

Sampai dengan tahun 1990 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak meningkat dari 8,82 % pada Pelita Keempat menjadi 8,89 % pada Pelita Kelima. Peningkatan ini terjadi setelah terbukanya jalur jalan regional yang menghubungkan Rangkasbitung, Cikande, Bayah, Pelabuhan Ratu, Cibinuang, dan Cikeusik. Kontribusi sektor pertanian sampai tahun ketiga Pelita Kelima juga turut naik dari 35,59 % menjadi 43,75 %. Kenaikan sektor pertanian ini tidak diikuti oleh sektor lainnya misalnya sektor industri yang mengalami penurunan dari 7,95 % menjadi 6,31 %. Ini menjadi bukti bahwa sektor pertanian yang menjadi andalan Kabupaten Lebak relatif masih kuat pada Pelita Kelima.

2. Prasarana Pengairan

Sektor ini juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 1972 luas sawah yang terairi irigasi yang ada hanya 50 % dari total luas sawah seluruhnya yaitu 24.993 Ha yaitu 14.053 Ha, sedangkan sampai dengan akhir Pelita Kelima dari 43.097 luas sawah yang dapat diairi adalah 20.775 Ha. Indikasi ini memperlihatkan bahwa irigasi yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh areal persawahan yang ada, meskipun dari segi jumlah luas sawah meningkat hampir 99 %.

3. *Prasarana Perhubungan*

Sampai tahun 1992 jaringan jalan yang tersedia telah mencapai 1.047,28 Km dengan kepadatan rata-rata 366 Km/1000 Km². Perkembangan lainnya telah terjadi peralihan sambungan telepon dari sistem manual ke sistem otomatis (sambungan telepon tidak lagi melalui operator) dengan jumlah pelanggan 1.168 Satuan Sambungan Telepon (SST) dimana sebelumnya hanya 720 SST.

4. *Listrik Pedesaan*

Kabupaten Lebak memperoleh aliran listrik dari PLN distribusi Jawa Barat PLTA di Bogor dan Suralaya. Jumlah pelanggan PLN pada tahun 1972 untuk kategori penggunaan di rumah tangga adalah 1.892 yang menggunakan daya terpasang sebesar 1.127.800 VA. Dua puluh tahun kemudian terjadi peningkatan menjadi 15.579 pelanggan rumah tangga dengan jumlah pemakaian arus 1.424.202 KWH dan daya terpasang 9.243.690 VA.

5. *Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*

Pembangunan yang dilakukan sampai dengan Pelita Kelima mencakup pembangunan baru dan rehabilitasi sarana peribadatan dan peningkatan pelayanan ibadah haji. Pada tahun 1988/1989 tempat peribadatan berjumlah 4.238 buah dan tahun 1993/1994 bertambah 293 buah menjadi 4.531 buah. Adapun calon jemaah haji pada tahun 1988/1989 sebanyak 83 orang, tahun 1993/1994 naik menjadi 286 orang.

6. *Pendidikan dan Olah Raga*

Gencarnya kampanye Wajib Belajar usia 7 sampai 12 tahun memberikan hasil yang memuaskan pada Pelita Kelima ini. Hampir 97 % anak usia sekolah telah mengenyam pendidikan dasar baik melalui jalur formal (SD dan MI) maupun non formal seperti

pesantren-pesantren yang banyak terdapat di Kabupaten Lebak. Jumlah siswa yang melanjutkan ke tingkat selanjutnya sampai tahun 1993/1994 mencapai angka 85,84 %.

Dibidang olah raga, pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya untuk menemukan atlit-atlit potensial yang diharapkan dapat mengangkat nama Lebak dalam kancah olah raga. Oleh karena itu penyediaan sarana dan parasarana olah raga mutlak harus dipenuhi, maka pada Pelita Kelima ini dua prasarana utama telah dibangun yaitu Stadion Pasir Ona dan Gedung Olah Raga Kertanegara. Warga Kabupaten Lebak dapat dikatakan senang dengan olah raga, hal ini terbukti seringnya diadakan pertandingan olah raga antar desa atau antar klub-klub olah raga pada momen-momen tertentu misalnya menjelang peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun.

7. Kesehatan dan Keluarga Berencana

Guna memenuhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat maka keberadaan Puskesmas di tiap kecamatan sangat diperlukan, ratio antara puskesmas dengan masyarakat masih terlalu jauh yaitu 1:35.398. Kondisi geografis dan persebaran penduduk yang tidak merata juga menjadi kendala tersendiri kurang maksimalnya pelayanan kesehatan masyarakat ini. Langkah pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dengan memberi tugas kepada mantri-mantri kesehatan untuk berkeliling baik memberikan penyuluhan maupun pelayanan kesehatan lainnya seperti pada program Posyandu sangat berguna bagi masyarakat. Namun demikian harapan masyarakat adalah dilakukannya penambahan jumlah tempat pelayanan kesehatan. Patut menjadi perhatian lainnya adalah penyuluhan contoh bangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) yang memenuhi standar kesehatan dimana selama ini sebagian besar masyarakat terutama di pelosok pedesaan masih melakukannya di sungai-sungai.

Program Keluarga Berencana untuk menekan jumlah penduduk turut menuai kesuksesan sampai dengan Pelita Kelima ini. Data BKKBN Kabupaten Lebak bahwa pada tahun 1988 peserta KB aktif baik melalui program pemerintah maupun swasta mencapai

angka 93.466 orang, tahun 1992 meningkat menjadi 109.004 orang sebagian besar diantara akseptor KB tersebut menggunakan Pil KB.

Berhasilnya program pembangunan juga turut ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya terutama para penyelenggara pemerintahan dan umum atau yang lazim disebut aparatur pemerintah, sehingga jumlah aparatur pemerintah perlu ditingkatkan sesuai dengan semakin tinggi dan beragamnya tantangan pelaksanaan pembangunan yang sedang dan akan dihadapi. Sampai dengan Pelita Kelima jumlah aparatur pemerintah Kabupaten Lebak sebanyak 2.735 pegawai terdiri dari berbagai jenjang, jabatan, dan kepangkatan. Jumlah ini tentu tidak cukup bila dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dikelola serta keragaman program yang telah disiapkan. Namun demikian adanya keberhasilan yang dicapai pemerintah Kabupaten Lebak memperlihatkan bahwa aparat tersebut telah bekerja semaksimal kemampuan yang tentu saja bekerjasama dengan masyarakat Kabupaten Lebak. ♦

BAB IV

PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM

PELAKSANAAN pembangunan di tahun 1998 ini juga menjadi awal Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua (PJP II). Dalam skala nasional ini berarti bahwa pelaksanaan pembangunan di Indonesia telah memasuki program pembangunan selanjutnya yang direncanakan selama 25 tahun kedepan, setelah PJP I dilewati pada akhir Pelita Kelima (1997) dengan segala keberhasilan maupun kegagalan bahkan program yang tertunda sekalipun.

Di Kabupaten Lebak prioritas pembangunan masih di sektor pertanian dan argo industri pedesaan, bidang pendidikan dan kebudayaan. Bidang tambahan yang menjadi pritoritas pada PJP II adalah kesejahteraan rakyat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum, politik, penerangan, komunikasi dan media massa, serta pertahanan dan keamanan. Pada Pelita sebelumnya bidang-bidang tersebut sebenarnya turut diprogram dan dilaksanakan hanya saja akibat sistem pembagian wilayah pembangunan yang memusatkan pembangunan di bidang pertanian, sehingga bidang tambahan tersebut berjalan stagnan.

Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Lebak pada PJP II difokuskan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada PJP I sebesar 8,89 % melalui peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktifitas sumber daya manusia.

Selama PJP I tenaga kerja kebanyakan terserap di sektor pertanian yang dinilai memiliki produktifitas rendah, sedangkan pada

sektor industri dan jasa yang dianggap sebagai sektor yang mampu mempercepat laju perekonomian daerah memerlukan tenaga kerja yang terampil belum berkembang. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri untuk pengembangan sumber daya manusia yang berjiwa wiraswasta dan diharapkan mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan pekerjaan serta kesempatan berusaha.

Penilaian sektor pertanian berproduktifitas rendah disebabkan pekerjaan ini cenderung memberi kontribusi tetap terhadap laju pertumbuhan ekonomi, bahkan dapat memberi hasil yang semakin sedikit bila sektor ini terkena dampak seperti hasil pertanian yang terkena hama, kelangkaan pupuk, dan semakin menyempitnya areal pertanian (sawah maupun kebun termasuk kolam-kolam ikan). Faktor berkurangnya debit air terutama pada musim kemarau juga dapat menjadi penyebab berkurangnya produksi sektor pertanian. Sektor ini juga tidak banyak menyerap tenaga kerja sebab biasanya areal pertanian dimiliki oleh orang perorang maupun keluarga, sehingga dalam proses produksinya tidak melibatkan banyak tenaga kerja, biasanya hanya terdiri dari pemilik dan buruh.

Hal ini berbeda dengan sektor industri dan jasa yang memerlukan keterampilan dalam memproduksi. Sektor industri memerlukan tenaga-tenaga terampil dari berbagai tingkat sesuai dengan jenis pekerjaannya, sehingga pekerja yang diserapnya memiliki status sebagai perancang, pengolah, pemroses, dan pengepak. Adapun sektor jasa selain keterampilan khusus yang dimiliki, pelaku usaha ini dapat memotifasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Semakin banyak pelaku jasa yang membuka usaha akan semakin membuka peluang perkembangan suatu bisnis sebagai akibat terjadinya persaingan usaha.

Tantangan lain yang dialami Kabupaten Lebak adalah kemampuan investasi pemerintah daerah yang terbatas sehingga membutuhkan investor untuk menanamkan modal usahanya. Dengan kondisi seperti ini pemerintah harus menyediakan iklim usaha yang mampu menarik minat para investor melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat memperluas lapangan pekerjaan sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan. Dengan demikian Kabupaten Lebak pada Pelita ini memiliki rencana untuk mengembangkan sektor industri.

Kehadiran investor menjadi ciri khas beralihnya (separuh ataupun seluruhnya) suatu kondisi ekonomi yang sebelumnya berfokus pada sumber dari pertanian mutlak menjadi industri dominan. Potensi alam Kabupaten Lebak yang terdiri dari lahan subur untuk pertanian dan pertambangan menyebabkan peralihan tersebut sangat memungkinkan dan dapat meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah). Sektor pertanian yang sebagian besar masih memanfaatkan teknologi tradisional dapat dialihkan ke teknologi industri terutama pada bagian pengolahan, sehingga peningkatan mutu dapat dicapai. Pemanfaatan teknologi industri juga dapat menambah lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dapat dicapai melalui pelatihan-pelatihan untuk menyesuaikan teknologi yang digunakan. Ini berarti secara langsung tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat menjadi meningkat.

Dari kondisi di atas sehingga pemerintah Kabupaten Lebak yang meski masih melanjutkan program Pelita Keempat, namun pada Pelita Kelima ini melakukan beberapa langkah perubahan. Perubahan tersebut adalah semakin terperinci sasaran dan kebijaksanaan pokok program dan pelaksanaan pembangunan. Tidak tanggung-tanggung Pemda Lebak memprioritaskan 40 item yang akan dilaksanakan antara tahun 1994 hingga 1999 nanti. Adapun ke-40 item tersebut adalah:

1. Kerangka rencana dan pembiayaan pembangunan
2. Keuangan daerah
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan
5. Tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
6. Pangan dan perbikan gizi
7. Pengembangan usaha daerah
8. Koperasi
9. Ilmu pengetahuan dan teknologi
10. Kelautan dan dirgantara
11. Pembangunan daerah
12. Pembangunan perkotaan dan pedesaan
13. Lingkungan hidup

14. Penataan ruang dan pertanahan
15. Industri
16. Pertanian
17. Pengairan
18. Perdagangan
19. Transportasi
20. Pertambangan
21. Kehutanan
22. Pariwisata
23. Pos dan Telekomunikasi
24. Transmigrasi
25. Energi
26. Agama
27. Pendidikan dan Olah Raga
28. Kebudayaan Daerah dan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
29. Kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana
30. Kesehatan
31. Kependudukan dan keluarga sejahtera
32. Peranan wanita, anak, dan remaja serta pemuda
33. Perumahan dan permukiman
34. Hukum
35. Aparatur negara
36. Politik dalam negeri
37. Penerangan, komunikasi, dan media massa
38. Pertahanan keamanan
39. sistem informasi dan statistik
40. Sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Dari 40 item tersebut dapat diklasifikasi berdasarkan jenis sasaran pembangunan masing-masing yaitu:

1. Sasaran lintas sektoral berupa pelaksanaan beberapa bidang secara terpadu yaitu peningkatan sumber daya manusia, Pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, peranan perkotaan dan pedesaan yang tumbuh sebagai penguat perekonomian daerah, penataan ruang dan pertanahan.

2. Sasaran bidang ekonomi yang diarahkan pada peningkatan keterpaduan antara argoindustri dengan sektor ekonomi lainnya. Sektor ini mencakup; industri, pertanian, pengairan, pangan dan perbaikan gizi, ketenagakerjaan, perdagangan, transportasi, pertambangan, kehutanan, peningkatan kualitas dan kemampuan usaha daerah yang menjadi bagian suatu organisasi unit usaha formal seperti koperasi, pariwisata, pos dan telekomunikasi, koperasi, pembangunan daerah keuangan, transmigrasi, energi berupa penerapan teknologi pemanfaatan batu bara untuk memperoleh energi listrik pedesaan, dan lingkungan hidup.
3. Sasaran bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan. Sesuai dengan sasarannya maka bidang yang dicakup adalah; kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kependudukan, keluarga sejahtera, anak dan remaja, dan olah raga .
4. Sasaran bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sasaran bidang hukum
6. Sasaran bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa. Selain bidang tersebut juga dalam sasaran bidang ini dipadukan bidang informasi dan statistik.
7. Sasaran pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan melalui pengefektifan berbagai prosedur pelaksanaan pembangunan meliputi pemantapan koordinasi, kerjasama antar lembaga/instansi, pemantapan sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem pemantauan, pengendalian dan pertanggungjawaban, dan peningkatan keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan pengawasan pembangunan.

Pelaksanaan program dan sasaran pembangunan di atas bertujuan untuk memantapkan sikap dan perilaku mandiri manusia dan masyarakat Kabuapten Lebak dalam rangka meningkatkan

kualitas dan kreatifitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang selaras, adil dan merata, menuju masyarakat sesuai motto Kabupaten Lebak “Aman, Iman, Uman, Amin”, serta terciptanya landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya.

Pada Pelita keenam ini salah satu program menarik adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berupa keinginan untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek dengan prinsip alih teknologi yang berimbang dengan kemampuan sumber daya manusianya serta penggunaan sumber dana secara efisien. Pada program ini pemda benar-benar ingin memajukan masyarakat dan wilayah Kabupaten Lebak melalui penerapan iptek yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena kondisi alam yang menyediakan komoditas pertanian, peternakan, kehutanan, dan pertambangan maka industri tepat guna yang dipakai adalah teknologi agroindustri. Teknologi ini selain menafaatkan secara maksimal pengolahan hasil pertanian juga mampu menjaga keseimbangan alam, tentu saja melalui pengawasan dan pembinaan terus menerus oleh aparat pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. ♦

BAB V

PEMBANGUNAN DALAM MASA REFORMASI

MEMASUKI tahun 1996 berarti batas akhir waktu Pelita Kelima semakin dekat, demikian pula Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun (PJP) I yang telah dimulai pada tahun 1969 akan berakhir pula. Menjelang masa-masa akhir tersebut evaluasi terhadap program pembangunan dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana keberhasilan program-program tersebut. Hal ini menjadi penting karena menjadi tolok ukur untuk pembuatan program pembangunan pada Pelita Keenam dan atau PJP II berikutnya.

Pembangunan Lima Tahun Kelima telah dilaksanakan dalam rangka Trilogi Pembangunan yaitu upaya mewujudkan pemerataan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Hasil-hasil yang dicapai telah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi landasan bagi tahap pembangunan berikutnya.

Pelaksanaan pembangunan di tahun 1998 juga menjadi awal Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua (PJP II). Dalam skala nasional ini berarti bahwa pelaksanaan pembangunan di Indonesia telah memasuki program pembangunan selanjutnya yang direncanakan selama 25 tahun kedepan, setelah PJP I dilewati pada akhir Pelita Kelima (1997) dengan segala keberhasilan maupun kegagalan bahkan program yang tertunda sekalipun.

Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Lebak pada PJP II diupayakan dapat mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada PJP I sebesar 8,89 %. Upaya ini ditempuh melalui peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan produktifitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan penyerapan teknologi, dan upaya penggalangan investasi melalui para investor.

Dengan demikian pola pembangunan yang diterapkan pada pelita keenam ini adalah pembangunan berkelanjutan, artinya peningkatan yang akan diraih melanjutkan pelaksanaan pelita sebelumnya. Hal ini telah dilakukan sejak pelita kedua.

Pola pembangunan berkelanjutan adalah pentahapan pencapaian yang rasional dan telah diselaraskan dengan kondisi potensi wilayah disertai daya dukung finansial. Konsep ini digunakan demi mencapai keseimbangan yang nyata antara “kebutuhan” dan “kemampuan” yang sekaligus menjadi cita-cita pembangunan.

Berubahnya kondisi pemerintahan di tingkat pusat langsung menyebar ke daerah-daerah lainnya. Pola pembangunan di masa Orde Baru yang menerapkan pelaksanaan jangka pendek melalui pelaksanaan pembangunan dalam waktu limatahunan dan jangka panjang duapuluh lima tahunan, juga turut mengalami perubahan di masa reformasi pemerintahan menjadi pelaksanaan pembangunan tiap tahun. Pelita Kelima yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2002, hanya mampu bertahan selama ± 3 tahun (1998—2001).

Runtuhnya¹⁸ pemerintah an Orde Baru pada tahun 1998 tidak serta merta meruntuhkan program pembangunan nasional yang diprogram selama lima tahun. Program ini masih terus berlangsung meski di tengah kondisi pemerintahan yang serba berubah (atau menuntut perubahan).

¹⁸ Istilah “runtuh” digunakan untuk menyebut beralihnya zaman pemerintahan Orde Baru menjadi zaman pemerintahan Reformasi, dimana peralihan pemerintahan Orde Baru tidak dalam kondisi normal melainkan berubah disebabkan tekanan (sebagian menyatakan peristiwa ini sebagai revolusi pemerintahan) dalam negeri yang melumpuhkannya.

Perubahan tersebut baru dapat terlaksana pada tahun 2002 dan pada tahun inilah mulai diterapkan pola pembangunan pertahun. Dengan demikian pelita keenam hanya berlangsung sampai dengan tahun 2001 dari target lima tahunan 1998 sampai 2003.

Pemerintah Kabupaten Lebak menyikapi perubahan jangka pelaksanaan pembangunan dengan menyiapkan strategi¹⁹ dengan tujuan memusatkan dan menyatukan seluruh potensi sumber daya (sda dan sdm) yang dimiliki Kabupaten Lebak untuk menjawab seluruh permasalahan dan pelaksanaan seluruh kegiatan secara efektif dan efisien. Dari strategi inilah diharapkan kekuatan dan potensi yang dimiliki dapat dikembangkan termasuk memperhitungkan segala resiko yang akan dihadapi dengan tidak menutup kemungkinan membuka peluang pihak lain (investor) untuk bersama-sama pemerintah mencapai keberhasilan.

Mengacu kepada hasil pelaksanaan program pembangunan tahun 2001, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan sasaran APBD tahun 2002 sebagai berikut:

1. Pemanfaatan lahan 550 ha dengan penanaman komoditas unggulan penunjang ekonomi daerah berupa penanaman padi, palawija, hortikultura, serta buah-buahan diseluruh wilayah Kabupaten Lebak.
2. Peningkatan produksi padi dimana pada tahun 2001 mencapai 360.869 ton menjadi 375.127 ton pada tahun 2002.
3. Dibiidang peternakan diharapkan terjadi peningkatan populasi ternak besar (sapi dan kerbau) 52.015 ekor, ternak kecil (kambing dan domba) 388.838 ekor, dan unggas (ayam dan itik) sebanyak 2.546.907 ekor.
4. Bidang perikanan diharapkan juga meningkat hingga dapat mencapai produksi sebesar 43.751 ton. Peningkatan ini

¹⁹ Strategi adalah suatu seni menggunakan keterampilan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan kondisi lingkungan dalam posisi yang paling menguntungkan (Pemerintah Kabupaten Lebak, *Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten Lebak Tahun 2002*.

diperoleh melalui penataan lingkungan permukiman nelayan di Kecamatan Malimping, pembangunan dan rehabilitasi TPI (tempat pengolahan ikan) di Kecamatan Panggarangan dan Bayah, serta optimalisasi fungsi Balai Benih Ikan Air Tawar di Rangkasbitung melalui peningkatan penyediaan benih ikan air tawar.

5. Kabupaten Lebak memiliki lahan kritis (selain disebabkan oleh longsor di musim penghujan, kondisi kritis juga disebabkan masih dilakukannya pola ladang berpindah oleh sebagian penduduk) seluas 1.010 ha yang memerlukan reboisasi melalui kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi *Catchment Area* di Kecamatan Cimarga.
6. Listrik pedesaan juga menjadi prioritas. Pada tahun 2002 diharapkan jumlah 268 desa dapat menikmati penerangan listrik dari sebelumnya sebanyak 261 desa terutama di Kecamatan Malimping dan Cijaku.
7. Peningkatan penyaluran air bersih di perkotaan yang diperkirakan dapat mencapai 69,72% dan di pedesaan sebesar 55%.
8. Di bidang kesehatan, akan dilakukan penambahan sarana dan prasarana kesehatan pada 33 Puskesmas, 74 Puskesmas Pembantu, dan 1.468 Posyandu. Khusus wilayah Kecamatan Malimping mendapat prioritas pembangunan rumah sakit umum tipe C. Adapun RSUD di kota Rangkasbitung dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan berupa pengadaan dan renovasi sarana fasilitas.
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap sarana dan prasarana pendidikan di seluruh tingkatan mulai dari SD/MI sampai SMU/SMK/Madrasah Aliyah. Bentuk peningkatan tersebut seperti pengadaan tanah untuk pembangunan lahan SMK 1 Rangkasbitung, pengadaan dan penambahan buku-buku pada Dinas Pendidikan.
10. Peningkatan prasarana jalan sepanjang 223 km berupa pemeliharaan dan pembuatan ruas jalan baru. Ruas jalan

baru dibangun di Kecamatan Maja dari Desa Gardubatok sampai Desa Candi sepanjang 2 km. Ruas jalan baru lainnya di Kecamatan Cijaku berupa jalan lingkungan sepanjang 4 km. Jalan lainnya mengalami perbaikan termasuk pelebaran yang tersebar di kecamatan lain di Kabupaten Lebak. Khusus Kecamatan Cimarga dilakukan penghotmixon jalan sepanjang 12,5 km.

11. Sebagai daerah agraris, Kabupaten Lebak memerlukan sarana pengairan yang mampu mengiri areal persawahan yang ada. Oleh karena itu diperlukan rehabilitasi irigasi terutama yang berada di Kecamatan Bayah yaitu di Desa Cikatomas dan Cibeber. Di tempat lain dilakukan rehabilitasi irigasi akibat terkena bencana alam yaitu antara jaringan Cimandiri dan Kaduguling serta jaringan Cisihi, Kaduguling, dan Cilengkong Datar Cae. Rehabilitasi ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan air pada areal sawah dan perkebunan masyarakat.
12. Target dalam tahun 2002 juga termasuk bidang keamanan. Bidang ini penting mengingat situasi politik di tingkat pusat tentu saja sampai ke pelosok-pelosok daerah termasuk wilayah Kabupaten Lebak, mengingat dalam tahun 2002 nanti akan terselenggara pemilihan umum.
13. Pelaksana birokrasi adalah aparat pemerintah yang dalam tugas kesehariannya berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Mengingat permasalahan dalam masyarakat kompleks, maka dibutuhkan aparat yang mampu mengatasinya minimal memberikan solusi atau dapat menjadi inspirator dalam rangka menciptakan masyarakat yang terampil dalam berusaha. Aparat pemerintah juga harus mampu menyampaikan pesan pembangunan dengan bahasa yang dimengerti masyarakat luas. Oleh karena itu pada rencana pembangunan ini program pelatihan dan pendidikan aparatur menjadi prioritas di samping melakukan penataan kepegawaian (termasuk rotasi jabatan bila perlu) untuk mencapai tingkat profesionalime. Selain itu diperlukan juga

kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sehari-hari, seperti kendaraan operasional mengingat kontur tanah dan sebaran rakyat Kabupaten Lebak yang mencapai daerah pelosok dengan kondisi jalan yang belum memadai sehingga diperlukan sarana transportasi yang sesuai.

14. Era Reformasi adalah suatu zaman di mana perubahan signifikan menampakkan diri. Peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, sebab masyarakatlah yang menghendaki adanya perubahan, sehingga program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat turut menjadi pengawas pelaksanaan program pembangunan tersebut. Implikasinya adalah kemampuan Kabupaten Lebak untuk berkompetisi dengan daerah lainnya.
15. Sumber daya alam dan sumber daya manusia Kabupaten Lebak jika dikelola dan dioptimalkan sangat potensial menjadi kekuatan dalam pembangunan daerah. Kondisi ini akan tercapai jika masyarakat terlibat dalam pembangunan sebagai investor bersama pihak swasta sedangkan pemerintah daerah sebagai fasilitatornya. Dengan prinsip kebersamaan inilah Kabupaten Lebak dapat maju dan berkembang di era otonomi daerah ini.

Strategi dan prioritas program dan pelaksanaan pembangunan tahun 2002 di Kabupaten Lebak akan berhasil jika dapat dipersatukannya tiga pilar penentu yaitu; pemerintah daerah (termasuk DPRD), masyarakat luas dan dunia usaha. ♦

BAB VI

PENUTUP

PELAKSANAAN pembangunan di Kabupaten Lebak merambat perlahan jika diperhatikan dari segi pendapatan yang diperoleh baik dalam program Pelita di masa Orde Baru maupun program pembangunan tiap tahun di masa Reformasi, setidaknya dari sejak dicanangkannya program Pelita (1969) sampai era otonomi daerah di tahun 2002.

Merambatnya perkembangan pembangunan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pembangunan sentralistik (di masa Orde Baru) menjadi penyebab daerah tidak dapat berdikari. Program pemerintah pusat misalnya proyek penanaman kelapa sawit dan hybrida ternyata hanya memberi keuntungan bagi pemerintah, tetapi rakyat Lebak tidak memperoleh apa-apa. Buktinya sampai dengan tahun 1997 Kabupaten Lebak termasuk daerah yang memiliki “Desa Tertinggal” cukup signifikan.

Faktor lainnya tidak dapat dipungkiri terjadinya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan informasi dengan kemampuan sumber daya manusia Kabupaten Lebak. Faktor berikutnya adalah kemampuan pemerintah daerah yang belum maksimal untuk menciptakan iklim yang sehat di segala bidang agar dapat menyerap investasi dari para investor. Padahal keberadaan investor sangat penting untuk perkembangan daerah dalam rangka otonomi daerah.

Apakah ini berarti Kabupaten Lebak tidak siap menjalani program otonomi daerah? Tersedianya sumber daya alam yang

melimpah terutama di bidang pertanian, industri, dan pariwisata menjadi jawaban bahwa Kabupaten Lebak mampu berjalan cepat menyusul daerah lainnya, sehingga dalam kondisi apapun atau dalam program pemerintah pusat yang bagaimanapun Kabupaten Lebak selalu siap menghadapinya. Masalahnya hanya terletak pada sumber daya manusianya. Dari segi jumlah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk bergerak cepat menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan informasi, masih sangat kurang dibanding dengan luas dan beragamnya sumber daya alam. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui beragam pendidikan dan berbagai tingkat menjadi sangat signifikan untuk dilaksanakan. Kemampuan orang Lebak sama dengan kemampuan orang-orang lainnya. Bedanya hanya terletak pada bisa atau tidak memanfaatkan kesempatan yang ada mengolah sumber daya alam secara maksimal, teratur dan berkesinambungan bersama kemajuan teknologi dan informasi.

Pemerintah daerah sebagai pembuat program pembangunan dan bersama rakyatnya melaksanakan program tersebut, harus memprioritaskan peningkatan kualitas rakyatnya untuk membangun Lebak dalam era serba gerak cepat ini melalui peningkatan bidang pendidikan. Pemerintah harus menyediakan segala fasilitas yang menunjang peningkatan mutu juga kemudahan dalam mengakses pendidikan dan keterampilan tersebut. ♦

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Lebak tahun 1987.
Rangkasbitung: BPS, 1988.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Lebak tahun 1989.
Rangkasbitung: BPS, 1990.
- Data Pokok Kabupaten. Pembangunan Kabupaten Lebak Tahun 2003/2004.* Rangkasbitung. Pemerintah Kabupaten Lebak BAPPEDA, 2004.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jld. 9. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990
- Gottschalk, Louis. *Understanding History : A Primer of Historical Method*, atau Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, Cet. V. Jakarta : UI-Press, 1986.
- Repelita Kelima Dati II Lebak 1989/1990-1993/1994.* Buku III. Rangkasbitung: Pemda Tk II Kabupaten Lebak, 1988.
- Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Kabupaten Dati II Lebak.* Rangkasbitung: Pemerintah Daerah Tingkat II Lebak, 1994.
- Sutisna Agus, dkk., Ed.. *Lebak dalam Arus Perubahan. Kado Ulang Tahun ke- 176 Kabupaten Lebak.* Rangkasbitung: Dinas INKOSBUDPAR Kabupaten Lebak, 2004.
- Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten Lebak Tahun 2002.* Rangkas-bitung: Pemerintah Kabupaten Lebak, 2001.

Sejarah Kabupaten Subang

Ketua

Drs. H. Iwan Roswandi

Anggota

Drs. M. Halwi Dahlan

Drs. Adeng

Drs. Toto Sucipto

Drs. Tjetjep Rosmana

Drs. Rosyadi

File [D : AlqaPrint\ pmd]

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PERJALANAN sejarah pemerintahan Kabupaten Subang berkaitan dengan dua kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Kabupaten Subang pernah menjadi salah satu daerah di bawah wilayah Karesidenan Purwakarta, sedangkan ketiganya juga pernah digabung dalam wilayah Kabupaten Karawang.

Subang mulai mengalami perubahan ketika Pemerintahan Hindia Belanda menjadikan daerah ini memiliki pemerintahan sendiri dengan bentuk *Binnenland Bestuur*. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1907 dan tahun 1945 setelah kemerdekaan RI. Subang menjadi pusat Pemerintahan Sipil Karawang Timur dengan kedudukan pemerintahnya disebut *Patih*. Tahun 1949 berdasarkan SK No. 12 tanggal 29 Januari 1949 Kabupaten Karawang dibagi menjadi dua Kabupaten yaitu Karawang dan Purwakarta. Kabupaten Purwakarta meskipun namanya demikian tetapi kedudukan pusat ibukota berada di Subang. Hal ini semakin kuat setelah dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1950 pada pasal 2 ayat 2 tentang penetapan Subang sebagai ibukota Kabupaten Purwakarta. Terakhir berdasarkan UU No. 4 tahun 1968, Kabupaten Purwakarta dibagi dua masing-masing Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Subang berkewajiban mengurus, mengatur, melayani, membina, dan mengembangkan daerah beserta rakyatnya berdasarkan azas ekonomi dan dekonsentrasi dengan landasan utama Undang-undang Dasar 1945, serta Garis-garis Besar Haluan Negara dan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas serta kewajiban tersebut di atas, Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Subang di lengkapi oleh Lembaga-lembaga pelaksana teknis seperti dinas-dinas atau jawatan-jawatan, wedana-wedana berikut camat-camat dan kepala-kepala desa yang dipimpin oleh bupati.

B. Permasalahan

Sejak Subang menjadi daerah Otonomi Tingkat II dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kewajiban mengurus sendiri Rumah Tangga Daerah, dengan biaya sendiri, telah melahirkan berbagai usaha dan cara untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan dari daerah sendiri bagi keperluan pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan. Dari kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintahan Pusat sejak awal terbentuknya Daerah Otonomi hingga saat ini, maka pendapatan yang masuk setiap tahun menunjukkan angka naik, demikian juga penggunaannya lebih meluas untuk mencapai sasaran pembangunan.

Di bidang pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Daerah Subang juga melengkapi diri dengan sarana dan prasarana seperti untuk kelancaran komunikasi melalui telepon maupun surat, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, industri-industri ringan sampai menengah, angkutan umum dan perdagangan.

Adanya perubahan-perubahan bentuk pemerintahan inilah yang menjadi pokok permasalahan penelitian sejarah Kabupaten Subang ini dengan mengangkat masalah-masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perubahan daerah pemerintahan Kabupaten Subang, yang di akibatkan adanya pembagian antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Subang?

2. Bagaimana perkembangan pembangunan daerah pada masa-masa tersebut?
3. Apa dampak dari perubahan pemerintahan tersebut utamanya bagi pemerintah daerah dan masyarakat Subang?
4. Tantangan dan hambatan apa yang dialami pemerintah daerah dan apa upaya penanggulangannya?

Seluruh masalah tersebut akan diuraikan pada bab-bab berikut guna menjawab permasalahan pada penelitian ini.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah dalam rangka mendukung dan merealisasikan program kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, umumnya program kerja rutin Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung tahun anggaran 2005 dengan fokus penelitian Sejarah Kabupaten Subang.

Adapun tujuan khususnya adalah untuk mengungkap latar belakang sejarah lahirnya Kabupaten Subang termasuk proses kemandirian daerah tersebut dan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi, dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang masa lampau yang mempunyai makna penting dan berguna di dalam membangun masa kini dan hari esok.

D. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup sejarah Kabupaten Subang yang akan diteliti berlokasi di Kabupaten Subang dan berlangsung selama dua periode yaitu masa Kabupaten Subang dan adanya pembagian wilayah dengan Kabupaten Purwakarta sehingga dengan demikian secara temporal, penelitian ini dibatasi dari tahun 1968 sampai 2002. Namun tidak menutup kemungkinan penelusuran dari masa sebelumnya, yang merupakan suatu proses historis tidak dapat diabaikan. Peristiwa yang satu, biasanya merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Atau dengan perkataan lain, bahwa suatu peristiwa yang

terjadi adalah sebagai akibat dari faktor kondisional yang mendahuluinya. Hal ini dimaksudkan agar sebab musabab dan faktor kondisional yang mendasari terbentuknya suatu Kabupaten Subang.

E. Metode Penelitian

Metode yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, yaitu proses penelitian dan penulisan sejarah kritis yang mencakup empat langkah. Pertama-tama yang dilakukan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan sejarah Kabupaten Subang. Sumber-sumber yang dimaksud baik primer maupun sekunder. Sumber-sumber yang dikumpulkan tersebut, tidak hanya terbatas pada sumber tertulis, melainkan juga sumber lisan. Mengenai sumber tertulis, berasal dari berbagai tulisan baik berupa berbagai dokumen dari koleksi pribadi maupun dari instansi terkait, berbagai buku, majalah, dan surat kabar. Sementara sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan tokoh-tokoh di Kabupaten Subang yang mengetahui atau menyimpan informasi tentang latar belakang dan permasalahan Kabupaten Subang.

Langkah kedua yang ditempuh adalah dengan melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan. Kritik tersebut dilakukan baik secara intern maupun ekstern guna menetapkan sumber ini sebagai fakta yang valid. Dengan demikian akan dapat diputuskan apakah sumber-sumber tersebut, layak atau tidak untuk digunakan sebagai dasar penulisan.

Langkah ketiga yaitu melakukan interpretasi untuk merangkaikan berbagai fakta yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan suatu deskripsi dan juga penjelasan tentang sejarah Kabupaten Subang (deskriptif analisis). Kemudian, pada langkah selanjutnya ialah menyusun sebuah rekonstruksi sejarah mengenai peristiwa itu dengan merangkaikan berbagai fakta yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dengan demikian, maka pada tahap akhir dari seluruh rangkaian penelitian ini, adalah penyusunan historiografi yang akan melahirkan sebuah kisah sejarah mengenai Sejarah Pemerintahan Kabupaten Subang: Studi Tentang Perkembangan Pemerintahan di Kabupaten Subang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam menelaah dan menyimak tulisan ini maka laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab. Antara bab satu dan lainnya saling terkait dan integral sebagai sebuah sistem. Isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut.

- Bab I yang merupakan pendahuluan berisi serangkaian pemikiran tentang pentingnya penelitian ini. Bab ini terurai dalam: latar belakang, permasalahan, tujuan, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II yang berjudul “Profil Sosial Ekonomi Kabupaten Subang” berisi tentang keadaan Kabupaten Subang secara umum mulai: keadaan alam, kependudukan, dan keadaan masyarakatnya.
- Bab III yang berjudul “Subang sebagai Sebuah Kabupaten” yang merupakan bab inti berisi mengenai perjalanan pemerintahan Kabupaten Subang. Kajian yang difokuskan bab ini adalah pada perubahan-perubahan di sekitar pemerintahan dan perkembangan wilayahnya.
- Bab IV yang merupakan bab penutup berisi tentang simpulan dan saran. ♦

BAB II

PROFIL SOSIAL EKONOMI KABUPATEN SUBANG

KONDISI sosial-ekonomi suatu wilayah (provinsi, kabupaten/kota ataupun kecamatan) merupakan salah satu faktor krusial dalam mencermati derajat kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut.

Secara umum ada beberapa tugas utama Pemerintah dalam perekonomian, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatur penyediaan barang publik (alokasi), mengurangi inflasi dan pengangguran (stabilisasi), dan melaksanakan pemerataan (keadilan sosial) atau distribusi. Peran tersebut dilakukan melalui sektor riil (sektor barang), sektor moneter (sektor keuangan), sektor internasional (perdagangan internasional dan keuangan internasional), dan sektor tenaga kerja serta sektor pemerataan (W. Partowidagdo, 1999).

Aktivitas dari tugas-tugas pemerintah tersebut diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan sosio-ekonomi yang mempunyai goal target, yaitu kesejahteraan masyarakat yang ada dalam cakupan wilayah pemerintahan tertentu, baik pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten ataupun kota.

Pada intinya, pelaksanaan pembangunan seutuhnya senantiasa menempatkan manusia sebagai titik central. Pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

baik dari aspek fisik dan aspek intelegensinya. Parameter yang digunakan dalam aspek fisik misalnya dari tingkat kesehatan masyarakat. Sedangkan, parameter yang digunakan dalam aspek intelegensinya adalah tingkat pendidikannya, serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan).

Pada bab ini dipaparkan berbagai indikator yang lazim digunakan dalam bidang demografi dan ekonomi regional, untuk mengaktualisasikan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Subang, secara teoritis, fungsi objektif dari penulisan bab ini adalah untuk memperlihatkan sinergis Kabupaten Subang yang diperlihatkan secara fenomenal oleh berbagai indikator sosio-ekonomi.

A. Profil Ekonomi Kabupaten Subang

Dalam teori statistik pendapatan regional, besaran angka PDRB, akan memvisualisasikan kemampuan (potensi) suatu wilayah dalam menggenerate aktivitas perekonomian di wilayahnya, tanpa melihat siapa pemilik dari unit usaha ekonomi yang beroperasi apakah milik penduduk (*residence*) wilayah tersebut atau bukan milik penduduk wilayah tersebut. Di sisi lain, hasil kompilasi ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melihat transformasi perekonomian regional.

Lebih jauh, dalam teori ekonomi regional proses kesejahteraan yang diperoleh secara sistematis dapat dipantau (monitor) dari proses transformasi struktural perekonomian yang terjadi di kabupaten yang diamati, sebagai hasil (result) dari program pembangunan perekonomian yang dijalankan.

Selanjutnya, transformasi struktural perekonomian dapat diamati dari beberapa aspek; yaitu kontribusi sektor terhadap PDRB., sumbangan sektoral terhadap nilai ekspor regional, derajat partisipasi dalam penyediaan kesempatan kerja dan kemampuan sektor perekonomian dalam menyediakan dan memasok kebutuhan masyarakat.

Analog dengan perkembangan perekonomian suatu negara, perkembangan perekonomian suatu provinsi/ kabupaten kota atau regional yang merupakan bagian dari suatu negara/propinsi akan

ditentukan pula oleh dua (2) faktor produksi, yaitu kapital (*capital*) dan tenaga kerja (*labour*). Kapital secara teoritis akan memperbesar kebutuhan akan tenaga kerja, bilamana sistem aktivitas ekonomi yang dilakukan merupakan sistem ekonomi padat karya. Sementara dengan memberdayakan jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam suatu aktivitas perekonomian regional, diharapkan akan diperoleh produktivitas yang diinginkan.

Tabel 1 Data Perekonomian Kabupaten Subang Tahun 1993-2002

Uraian	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PDRB, Adh berlaku (milyar rupiah)	1.378.38	1.564.21	1.771.34	2.045.07	2.412.41	3.550.12	3.672.98	4.002.86	4.562.85	5.180.10
PDRB, Adh berlaku (milyar rupiah)	1.378.38	1.453.59	1.553.00	1.667.73	1.722.42	1.610.92	1.645.96	1.713.12	1.788.54	1.869.66
PDRB per kapita adh Berlaku (ribu rupiah)	1.123.87	1.269.04	1.430.75	1.645.40	1.934.34	2.792.48	2.876.91	3.116.07	3.386.63	3.881.21
PDRB per kapita adh Konstan (ribu rupiah)	1.123.87	1.179.28	1.254.39	1.341.80	1.381.08	1.278.61	1.299.92	1.346.37	1.347.58	1.400.85
LPE (%)	-	5.46	6.84	7.39	3.28	-7.17	2.28	4.11	4.47	4.54
% Sektor Industri	8.01	7.82	8.23	8.00	7.63	5.61	5.43	8.84	5.45	5.19
% Sektor Pertanian	42.37	41.20	40.76	40.67	42.39	47.41	42.20	40.58	44.40	42.80

Sumber: BPS Jawa Barat, dari berbagai penerbitan

Catatan: adh. = atas dasar harga

*) = angka perbaikan **) = angka sementara

Lebih jauh, ke dua faktor produksi tersebut akan merupakan penggerak utama (*prime mover*) dalam suatu sistem perekonomian. Kapital memberikan kontribusi berupa barang-barang modal (*capital goods*) seperti mesin-mesin dan peralatannya, sedangkan tenaga kerja memberikan kontribusi berupa *skill*; yang secara bersama-sama mengubah input menjadi output. Kontribusi ke dua faktor produksi ini menyebabkan bergeraknya suatu perekonomian yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya perkembangan dan pertumbuhan (BPS, Agustus 2001).

Teori ekonomi klasik menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (*region*) akan dipengaruhi oleh tiga faktor produksi yang "*crucial*"; yaitu faktor tanah, modal dan tenaga kerja. Lebih jauh pengembangan teori ekonomi dalam versi modern, telah mengubah istilah faktor tanah dengan Sumber Daya Alam (SDA), faktor modal menjadi sumber daya buatan/teknologi dan faktor tenaga kerja sebagai Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebenarnya tujuan utama (*goal target*) dari suatu program pembangunan sosial-ekonomi, ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja program pembangunan tersebut, akan tetapi strategi yang dilakukan akan tergantung pada resepsi para perencana pembangunan (*development planner*) dalam menterjemahkan visi yang tertera dalam UUD-1945.

Suatu kriteria yang direkomendasikan UNIDO (suatu badan PBB untuk pengembangan industri) memilah-milah daerah berdasarkan kontribusi sektor industri pada aktivitas perekonomian:

- 1) Daerah yang masih tradisional (% kontribusi sektor industri terhadap perekonomian di bawah 10 persen);
- 2) Daerah transisi (% kontribusi sektor industri terhadap perekonomian 10-20 persen)
- 3) Daerah semi industri (% kontribusi sektor industri terhadap perekonomian 20-30 persen)
- 4) Daerah industri (% kontribusi sektor industri terhadap perekonomian 30 persen) (Thee Kian Wee, 1990; H. Suseno T.W., 1997).

Kriteria tersebut digunakan dalam kasus ini, sehingga dapat diperoleh informasi bagaimana kondisi perekonomian Kabupaten Subang apakah masih dianggap tradisional ataukah sudah memiliki kategori daerah lainnya. Berdasarkan kriteria tersebut dengan mengamati kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kabupaten Subang, maka diinterpretasikan Kabupaten Subang masih diklasifikasikan sebagai daerah tradisional; dengan besaran kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kabupaten Subang di bawah 10 persen. Dengan demikian kemajuan (progres) pembangunan sebetulnya dapat diamati secara statistik, dengan menggunakan suatu alat ukur (*yardstick*) yang dilansir oleh UNINDO (*United Nation Industrial Development Organization*).

Hasil pengamatan melalui kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Subang, dapat pula disimpulkan bahwa wilayah ini memang merupakan daerah agraris yang ditunjukkan oleh besaran kontribusi sektor pertanian terletak antara 40,58 persen (tahun 2000)–47,41 persen (tahun 1998). Tingginya angka kontribusi sektor pertanian pada tahun 1998 merupakan suatu dampak dari penurunan kontribusi sektor industri yang terkena dampak krisis moneter pada tahun 1997.

Seperti diketahui, pada umumnya produk industri yang dihasilkan perusahaan industri yang berdomisili di wilayah Jawa Barat (termasuk Kabupaten Subang) merupakan produk komoditi yang dirancang untuk konsumsi ekspor, sehingga diperlukan bahan baku (input) yang berasal dari negara pemberi lisensi produk tersebut. Dengan demikian, nilai input dari bahan baku tersebut akan tergantung dari nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Pengamatan atas data presentase kontribusi sektoral PDRB *spatial* Kecamatan pada tahun 2001, memperlihatkan adanya beberapa kecamatan yang sudah mengalami proses transformasi perekonomian, bila digunakan kriteria UNINDO, yaitu berpindah dari daerah perekonomian tradisional ke perekonomian transisi ataupun ke perekonomian semi industri. Paparan data selengkapnya disajikan di bawah ini dan memperlihatkan pula secara simultan potret adanya ketimpangan antara wilayah kecamatan di Kabupaten Subang.

Persepsi adanya fenomena ketimpangan antar kecamatan tersebut mengemuka manakala dilakukan perbandingan tahapan perekonomian antar kecamatan dengan menggunakan kriteria UNINDO, dan sebagai hasilnya, hanya dua kecamatan yang menapak pada proses transisi, Kecamatan Jalan Cagak dan Kalijati, dua kecamatan lainnya tergolong relatif maju karena memasuki tahapan perekonomian semi industri, yaitu Kecamatan Cipendeuy dan Purwadadi.

Tabel 2 Kontribusi Sektor Perekonomian, LPE (%) dari Kriteria Wilayah di Kabupaten Subang Menurut Kecamatan, Tahun 2001

Nama Kecamatan	Aktivitas Perekonomian				Total	LPE	Kriteria Wilayah
	Per-Tanian	Indus-Tri	Perdagangan	Lain-Nya			
1	2	3	4	5	6	7	8
010. Sagalaherang	60.49	1.58	23.48	14.45	100.00	3.59	Tradisional
020. Jalan Cagak	40.12	16.34	30.15	13.39	100.00	5.89	Transisi
030. Cislak	53.58	2.09	28.77	15.56	100.00	5.52	Tradisional
040. Tanjungsiang	45.89	0.70	30.80	22.61	100.00	5.92	Tradisional
050. Cijambe	40.55	2.86	28.08	28.51	100.00	2.30	Tradisional
060. Cibogo	50.23	0.99	29.04	19.74	100.00	1.93	Tradisional
070. Subang	14.69	4.49	21.13	59.69	100.00	8.30	Tradisional
080. Kalijati	29.34	13.42	27.30	29.94	100.00	6.43	Transisi
090. Cipeundeuy	24.68	23.57	32.45	19.30	100.00	3.79	Semi Industri
110. Patokbeusi	54.92	0.53	30.03	14.52	100.00	1.29	Tradisional
120. Purwadadi	37.90	20.31	30.54	11.25	100.00	5.74	Semi Industri
130. Cikaun	52.03	1.31	16.86	29.80	100.00	3.21	Tradisional
140. Pagaden	46.37	1.96	29.62	22.05	100.00	6.52	Tradisional
150. Cipunaga	51.15	1.52	32.96	14.37	100.00	3.31	Tradisional
160. Comprang	60.55	0.38	25.45	13.62	100.00	0.46	Tradisional
170. Binong	57.73	0.81	28.05	13.41	100.00	5.55	Tradisional
180. Ciasem	42.34	2.19	29.29	26.18	100.00	3.14	Tradisional
190. Pamanukan	35.60	5.17	31.97	27.26	100.00	7.22	Tradisional
200. Pusakanagara	54.07	0.29	29.88	15.76	100.00	1.55	Tradisional
210. Legonkulun	50.79	0.47	29.12	19.62	100.00	0.42	Tradisional
220. Blanakan	56.34	1.37	28.76	13.53	100.00	2.92	Tradisional
Total	44.40	5.45	28.18	21.97	100.00	4.47	Tradisional

Sumber: Bappeda dan BPS. Kabupaten Subang, PDKB. Kab. Subang menurut Lapangan Usaha Tahun 1997-2001

Dari fenomena yang ditampilkan, ditafsirkan relatif agak sukar untuk menata suatu program pemerataan dalam perolehan IPM. Hal ini disebabkan adanya disparitas perekonomian kecamatan akan memunculkan ketimpangan dari aspek multi dimensi, misalnya akan muncul ketimpangan kemampuannya beli masyarakat (*purchasing power parity*), yang berlanjut dengan adanya ketimpangan harapan hidup serta ketimpangan perolehan derajat pendidikan.

Memang diakui, tujuan utama (*goal target*) dari suatu perencanaan program pembangunan ekonomi; ialah meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja program tersebut. Pada dasarnya perekonomian ekonomi adalah keharusan mutlak, karena kita dipaksa oleh keadaan untuk membandingkan tujuan-tujuan sosial kita dengan sumber-sumber yang tersedia dan memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber tersebut (Glass-burner B & Chandra A., 1977, LPES – Jakarta).

Akan tetapi tidak dapat dibantah, bahwa dalam proses pembangunan yang berlangsung memiliki suatu peluang untuk memunculkan suatu masalah ketimpangan pendapatan; meskipun fenomena tersebut merupakan suatu produk ikutan (*by product*). Suatu pengukuran lainnya untuk mengamati disparitas (ketimpangan) pendapatan penduduk yang berdomisili di wilayah ini dilakukan dengan menerapkan indeks GINI (*Gini ratio*), suatu metode teknik pengukuran angka indeks yang ditemukan oleh Corrado Gini, di mana hasilnya dipaparkan pada tabel 3.

Untuk membaca paparan data indeks Gini pada tabel 3., digunakan kriteria Todaro P. Michael (1994), yang mengatakan bahwa besaran angka *Gini Rasio* (GR) akan memperlihatkan:

1. Jika nilai GR antara 0,20 – 0,35 maka tingkat pemerataan pendapatan dinyatakan tidak timpang dengan kata lain pemerataan pendapatannya relatif sama.
2. Jika nilai GR antara 0,36 – 0,49 maka tingkat pemerataan pendapatan dinyatakan cukup timpang
3. Jika nilai GR antara 0,50 – 0,70 maka tingkat pemerataan pendapatan dinyatakan sangat timpang.

Tabel 3 Perbandingan Angka Indeks GINI, % Pendapatan 40% Penduduk yang Berpendapatan Rendah dan % konsumsi Non Makanan

Tahun	Indeks Gini	% Konsumsi Non Makanan	% Pendapatan 40 % Penduduk yang Berpendapatan Rendah
1	2	3	4
1998	-	35.48	26.60
1999	0.153	28.06	27.04
2000	0.171	29.76	24.85
2001	0.183	31.59	21.67
2002	0.153	33.46	17.75

Sumber: BPS, Jawa Barat, dari berbagai penerbitan.

Dari hasil aplikasi kriteria tersebut, disimpulkan pendapatan penduduk Kabupaten Subang relatif memiliki ketimpangan yang rendah; sehingga kondisi lingkungan sangat kondusif untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan sosio-ekonomi yang digelar. Hal ini diperoleh dari fakta yang menunjukkan besaran angka indeks GINI Kabupaten Subang antara 0,153 - 0,183.

Hasil yang sama diperoleh, bila menggunakan Kriteria Bank Dunia (KBD) di mana bila 40% penduduk yang berpendapatan rendah mendapatkan porsi di atas 17% ($> 17\%$), maka disimpulkan wilayah tersebut memiliki derajat ketimpangan pendapatan yang rendah, atau dengan perkataan lain derajat kesejahteraan dari aspek sebaran pendapatan relatif cukup baik. Angka pada tabel memperlihatkan besaran porsi tersebut antara 17,75 (tahun 2002) -27,04 (tahun 1999).

Dengan mengamati hasil terapan Kriteria Bank Dunia terhadap data hasil kompilasi secara serial (1998-2002), ada kecenderungan derajat kesejahteraan masyarakat Subang dari aspek pendapatan menurun. Hal ini merupakan suatu fakta krusial yang perlu diantisipasi secara dini.

Lebih jauh, bila daya beli diaplikasikan pada pola konsumsi non makanan; maka dapat dilihat bagaimana sebenarnya situasi kesejahteraan masyarakat dari aspek konsumsi. Dalam teori ekonomi

kesejahteraan (*welfare economics*), tingkat konsumsi pangan dijadikan indikator kesejahteraan rakyat, di mana pengamatan atas pola konsumsi dalam hal ini persentase pengeluaran non makanan akan dapat melihat adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan ini diperoleh apabila digunakan tolok ukur sebagai berikut: (a) Pengeluaran Konsumsi non makanan $\geq 50\%$, menunjukkan kondisi rumah tangga baik; (b) Pengeluaran Konsumsi non makanan $20-49\%$, menunjukkan kondisi rumah tangga sedang; dan (c) Pengeluaran Konsumsi non makanan $< 20\%$, menunjukkan kondisi rumah tangga buruk (Kantor Menko Kesra, Buku Panduan Penyusunan IKKA, 1992).

Dari penggunaan ukuran di atas, dapat diinterpretasikan bahwa secara umum kondisi rumah tangga di Kabupaten Subang relatif sedang pada kurun waktu 1998-2002 karena persentase pengeluaran konsumsi non makanan berada pada selang $20-49\%$ (lihat tabel 3). Pada umumnya pola konsumsi di negara-negara maju memperlihatkan persentase pengeluaran untuk makanan di bawah 50% . Sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang persentase makanan selalu di atas 50% (BPS, Laporan Perekonomian Indonesia, 1984).

Secara faktual data yang disajikan pada tabel 3 memperlihatkan adanya pola pergeseran konsumsi non makanan, yang menunjukkan adanya pola naik turunnya kesejahteraan penduduk Subang. Bila pada tahun 1998, persentase pengeluaran konsumsi non makanan sekitar $35,48\%$ maka pada tahun 1999 menurun menjadi sekitar $28,06\%$. Hal ini dapat ditafsirkan ada penurunan kesejahteraan masyarakat, dan secara faktual memiliki peluang diakibatkan krisis moneter 1997. Pada tahun 2001 dan 2002 besaran persentase konsumsi non makanan kembali meningkat, sehingga terlihat pola umum yang membentuk huruf U.

Walaupun demikian, kita tidak dapat menuduh aparat pemerintah tidak mampu memberikan kesejahteraan yang baik; karena bila diamati data serial dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Subang terlihat adanya kontraksi pertumbuhan perekonomian di tahun 1998. Suatu peristiwa yang tidak terduga, berlangsung pada medio Juli 1997, yaitu krisis moneter. Di mana pada proses waktu yang

kemudian, krisis ini berubah tidak hanya menjadi krisis ekonomi, akan tetapi menjadi pula suatu krisis yang multi dimensi. Dampak negatif dari krisis ekonomi tersebut terhadap perekonomian Kabupaten Subang, ialah munculnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang negatif dan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kabupaten Subang (lihat tabel 1).

Upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi didasarkan pada asumsi bahwa hal tersebut pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat. Peningkatan ini diharapkan mampu memperbaiki kemampuan masyarakat dalam memenuhi, tidak saja kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan tetapi juga kebutuhan pokok lainnya seperti kesehatan maupun pendidikan.

Seperti diketahui, perekonomian merupakan suatu sistem dari rangkaian kegiatan sektoral yang saling kait mengkait. Dalam sistem ini, gerak yang terjadi di satu sektor akan langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan di sektor lain. Oleh karena itu, jika salah satu sektor ekonomi mengalami pertumbuhan, maka pertumbuhan tersebut akan menarik kegiatan di sektor-sektor yang lain.

B. Profil Sosial Kabupaten Subang

Aspek sosial yang diamati secara khusus pada sub-sub ini adalah karakteristik demografis (kependudukan), di mana untuk era sekarang atensi terhadap masalah kependudukan bukan hanya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), kepadatan penduduk, atau masalah pengangguran; akan tetapi sudah beranjak pada masalah kualitas hidup. Seperti kondisi masyarakat dilihat dari aspek sebaran (distribusi) pendapatan, disparitas (ketimpangan) pendapatan dan kemiskinan penduduk.

Fokus ditunjukkan pada insiden kemiskinan, hal ini disebabkan semakin besar jumlah penduduk miskin, mengindikasikan suatu fenomena semakin tidak sejahtera masyarakat ini. Di sisi lain, secara teoritis kemiskinan merupakan faktor krusial dalam menurunkan kemampuan daya beli masyarakat.

BPS menyebutkan, nilai garis kemiskinan nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2100 kkal per

kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumahtangga dan individu yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut garis kemiskinan (BPS, 2002, statistik Indonesia 2001).

Dengan demikian, diakui bahwa salah satu ukuran ketidak berhasilan dalam menata perekonomian, baik nasional maupun regional (provinsi/ kabupaten/kota); ialah meningkatnya derajat kemiskinan di wilayah tersebut.

Salah satunya adalah insiden kemiskinan penduduk. Sehingga tingginya derajat kemiskinan merupakan *surrogate marker* (pertanda utama) dari ketidak mampuan dan disharmonis perencanaan perekonomian yang dibuat dan lebih buruk lagi merupakan suatu tanda ketidak pedulian terhadap masalah perekonomian wilayah.

Pada tabel 4 berikut ini dipaparkan komparasi Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Subang, di mana suatu hal yang perlu dicermati adalah seberapa besar akan mempengaruhi penundaan sukses untuk meraih visi yang diinginkan.

Tabel 4 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin, TPAK dan TPT di Kabupaten Subang Tahun 1993-2002

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	% TPAK	% TPT
1	2	3	4	5
1993	156.263	12.71	59.14	4.66
1996	128.599	10.33	54.19	6.51
1999	160.700	12.60	58.34	5.36
2000	137.400	10.45	53.87	5.42
2002	224.300	16.59	57.39	10.66

Sumber: BPS, Jawa Barat, dari berbagai penerbitan.

Dari paparan serial data (1993-2002) terlihat persentase penduduk miskin fluktuatif, yang memperlihatkan pula bagaimana sulitnya Pemda berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, akan tetapi faktor yang dihadapi bukan hanya faktor internal akan tetapi juga faktor eksternal. Angka terbesar terjadi pada tahun 2002 yang memperlihatkan kondisi perekonomian Kabupaten Subang relatif belum pulih dari dampak krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi.

Untuk mengatasi kemiskinan ini banyak peneliti yang menunjuk pendidikan. Baik Adelman dan Moris (1973) maupun Galbraith (1979) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan langkah paling strategis di dalam usaha-usaha mengatasi kemiskinan.

Namun demikian, Schiller (1973) mengingatkan bahwa peningkatan keterampilan melalui jenjang pendidikan tidak selalu mampu mengatasi masalah kemiskinan. Dalam hal ini perlu diperhatikan kemampuan perekonomian negara untuk menyerap tenaga kerja tersebut. Di satu pihak, peningkatan keterampilan baru merupakan salah satu faktor penawaran, sementara di lain pihak, tidak pula dapat diabaikan faktor permintaan terhadap tenaga kerja itu sendiri. Dengan perkataan lain, pada gilirannya, pendidikan itu berkaitan dengan pendapatan yang memiliki arti penting di dalam kesejahteraan anak. Schiller (1973) mengemukakan tiga alasan utama mengenai jenjang pendidikan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan. *Pertama*, tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat produktivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari penambahan pengetahuan dan keterampilan. *Kedua*, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan terbuka kesempatan kerja. Tersirat dari hal ini bahwa mereka yang berpendidikan tinggi akan mendapat perlakuan istimewa dalam pasar kerja. Namun tidak dapat dilupakan bahwa untuk memperoleh pendidikan tersebut diperlukan investasi yang tidak kecil. Namun demikian, Esmara (1986: 378) mengatakan bahwa kenaikan jenjang pendidikan ini tidak hanya berpengaruh kepada tingkat pendapatan melainkan mencakup cakrawala yang jauh lebih luas daripada yang diduga semula. Kenaikan jenjang pendidikan akan mengubah pula tata cara kehidupan, kebiasaan, lapangan kerja, atau dalam hal kebudayaan, sehingga secara

keseluruhannya mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kehidupan satu bangsa.

Salah satu faktor internal, adalah derajat pengangguran yang merupakan masalah sosial yang perlu diselesaikan oleh Pemda Kabupaten Subang. Pola yang sama ternyata masalah pengangguran berkait erat dengan kondisi dan situasi perekonomian wilayah. Pada tahun 1966 terlihat angka presentase pengangguran yang cukup tinggi sebesar 6,51 % dan tahun 1999 menurun menjadi sebesar 5.36 %. Angka tertinggi pada kurun waktu 1993-2002 terlihat pada tahun 2002, ini mengindikasikan perbaikan ekonomi masih perlu diupayakan, seperti pada presentase penduduk miskin. Dari interpretasi angka tersebut, mereka membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan upah/gaji agar dapat menjamin ongkos kehidupan yang layak untuk mereka.

Bila diamati dari angka Tingkat partisipasi angkatan kerja (1993-2002), dapat disimpulkan bahwa kemauan mereka untuk terjun ke dunia kerja perlu diamati secara cermat; karena bila hal ini terjadi pada usia muda akan menyebabkan rata-rata lama sekolah yang mereka tempuh menjadi relatif kecil.

Salah satu fokus perhatian para ahli kependudukan yang dilakukan terhadap suatu populasi penduduk, adalah struktur umur penduduk. Hal ini berkaitan dengan pola populasi penduduk, apakah termasuk dalam pola penduduk muda ataupun pola penduduk tua.

Aspek lain yang diamati dari struktur umur adalah rasio beban ketergantungan, yaitu suatu ukuran untuk mengamati seberapa banyak penduduk yang termasuk usia non-produktif menjadi beban usia produktif. Dalam kaitan ini, yang dimaksudkan dengan usia produktif adalah penduduk yang berusia pada kelompok (15-64) tahun; sedangkan yang dimaksudkan dengan usia non produktif adalah penduduk dalam kelompok usia (0-14) tahun dan (65 ±) tahun.

Besaran rasio beban ketergantungan yang lain, ialah rasio beban ketergantungan anak sebagai hasil bagi penduduk usia (0-14) dengan penduduk usia produktif; yang dimaksudkan untuk melihat seberapa besar peningkatan jumlah anak yang berusia (0-14) yang pada akhirnya menjadi beban bagi penduduk usia produktif. Angka rasio beban ketergantungan anak secara konseptual digunakan pula sebagai alat ukur monitoring keberhasilan program Keluarga Berencana

(KB) di suatu wilayah, semakin kecil angka ini dapat ditafsirkan program KB semakin berhasil dan sebaliknya.

Tabel 5 Penduduk Kabupaten Subang Menurut Kelompok Umur, Tahun 1994-2002

Tahun	Kelompok Umur			Jumlah	Rasio Ketergantungan Anak
	(0 – 14)	(15 – 64)	65 +		
1	2	3	4	5	6
1994	382	801	48	1 261	47,66
1995	046	585	256	887	43,66
1996	356	815	65	1 237	43,52
1997	168	844	679	691	40,47
1998	357	821	61	1 240	40,06
1999	642	789	218	649	36,50
2000	344	850	51	1 246	38,75
2001	301	658	200	159	37,82
2002	337	842	74	1 254	35,62
	563	744	306	613	
	322	884	67	1 274	
	870	606	444	920	
	344	889	80	1 315	
	802	907	690	399	
	341	903	83	1 328	
	613	335	573	521	
	338	949	77	1 364	
	060	107	455	622	

Sumber: BPS Jawa Barat, dari Susenas berbagai penerbitan.

Pada tabel di atas, dipaparkan jumlah penduduk usia produktif dan non produktif untuk tahun 1994-2002, dengan maksud memperlihatkan pula suatu perbandingan antar tahun. Selain itu

disajikan pula angka rasio beban ketergantungan anak untuk melihat progress program pembangunan KB dilihat dari aspek kependudukan di Kabupaten Subang.

Hasil perhitungan yang dilakukan, besaran rasio beban ketergantungan anak berkecenderungan menurun, pada tahun 1994 sekitar 47,66 yang dapat diinterpretasikan setiap seratus orang penduduk usia produktif akan menanggung beban untuk menghidupi 47,66 orang yang dikategorikan anak usia (0-14), dan pada tahun 2002, besaran ini menjadi 35,62 (lihat tabel 5); yang berarti apabila diperbandingkan antara dua angka tersebut terlihat adanya penurunan beban anak terhadap penduduk usia produktif.

Selanjutnya, pola penurunan angka beban ketergantungan anak tersebut dapat diartikan adanya penurunan tingkat kelahiran sebagai dampak dari program KB yang dilansir di daerah Kabupaten Subang, sehingga jumlah penduduk usia (0-14) tidak terlampaui besar.

Suatu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk usia (0-4) adalah proses perkawinan, di mana faktor umum perkawinan pertama sangat mempengaruhi produktivitas bayi yang lahir di wilayah ini. Prosesi perkawinan (*Nuptialitas*) merupakan salah satu fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Secara sosiologis, media perkawinan merupakan proses sepasang manusia dalam mencari kesejahteraan diri. Di pihak lain secara biologis, media ini merupakan alat kesejahteraan manusia dalam membentuk suatu keluarga besar yang merupakan perbesaran dari keluarga batih (*nucleus family*).

Sebagai suatu alat untuk mengamati tingkat kesejahteraan masyarakat, proses ini diamati dari dua segi; yaitu status perkawinan dan umur perkawinan pertama. Pengamatan ini dilakukan dari aspek sosio-demografis, yang mempunyai kecenderungan perilaku sosial dalam bermasyarakat; yaitu adanya suatu persepsi pembentukan keluarga ini yang dibentuk oleh seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan aspek demografis memperlihatkan berbagai ukuran yang menunjukkan kecenderungan dapat menjadi stimulan dalam perubahan jumlah penduduk.

Pada tabel di bawah ini, disajikan penduduk perempuan usia sepuluh tahun ke atas di Kabupaten Subang yang pernah kawin menurut kelompok umur perkawinan pertama. Jumlah Wanita berusia sepuluh tahun ke atas yang pernah kawin pada tahun 1994 sekitar 393.083 orang (63,16 % dari populasi perempuan pada tahun yang sama), di mana 43,15 % menikah pada usia di bawah 16 tahun.

Tabel 6 Persentase Penduduk Perempuan Kabupaten Subang yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur, Tahun 1994-2002

Tahun	Kelompok Umur Perkawinan Pertama				Jumlah Persentase	Jumlah
	< 16	(17 – 18)	(19 – 24)	25+		
1	2	3	4	5	6	7
1994	43,15	29,85	25,95	1,05	100,00	393
1995	44,84	30,71	23,40	0,95	100,00	082
1996	46,62	28,90	23,49	0,99	100,00	401
1997	41,55	30,42	26,97	1,06	100,00	768
1998	41,37	29,53	27,74	1,36	100,00	397
1999	40,44	33,86	24,67	1,04	100,00	022
2000	47,03	31,11	19,84	2,03	100,00	405
2001	39,04	34,26	25,81	0,89	100,00	477
2002	46,49	31,40	20,44	1,67	100,00	412
						269
						419
						726
						426
						026
						433
						807
						446
						556

Sumber: BPS Jawa Barat, Susenas dari berbagai penerbitan

Kondisi lingkungan budaya di kabupaten ini membaik, pada tahun 1999 hanya 40,44 % yang menikah di bawah usia 16 tahun dari 419.726 orang perempuan usia sepuluh tahun ke atas yang pernah menikah (lihat tabel 3.6). Dan pada tahun 2002, besaran persentase yang diperoleh menunjukkan, bahwa yang menikah di bawah usia 16 tahun sekitar 46,49 %.

Fenomena yang digambarkan oleh paparan data pada tabel 3.6 memperlihatkan adanya trend penurunan usia kawin di bawah 16 tahun, yang merupakan asset paling berharga dalam mengurangi jumlah produksi bayi di wilayah Kabupaten Subang.

Selanjutnya pengamatan dari aspek gender untuk derajat partisipasi penduduk usia kerja dan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Subang dapat dilihat pada tabel 7, di mana periode pengamatan dimulai dari tahun 1993.

Secara teoritis sebetulnya paparan data serial pada tabel 7 juga sekaligus memperlihatkan secara faktual fenomena ketidakmampuan aktivitas perekonomian Kabupaten Subang dalam menyerap pasar kerja. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara seksual memperlihatkan pola yang sedikit berbeda, di mana puncak pengangguran untuk laki-laki terjadi pada tahun 1997 (7,18 %); sedangkan untuk perempuan pada tahun 1996 (11,13 %). Akan tetapi secara umum derajat pengangguran terbesar muncul pada tahun 1997 (7,82 %)

Dari data serial yang dipaparkan pada tabel 3,7 maka interpretasi yang muncul adalah masalah pengangguran merupakan suatu masalah serius bagi Kabupaten Subang. Kisaran angka pengangguran terbuka berada pada 4,66 % (tahun 1994) – 7,82 % (tahun 1997) untuk potret secara total. Dan angka pada tahun 2002 naik menjadi 10,66 %, akan tetapi bila kinerja perekonomian tidak dapat terjaga secara baik; maka dampak paling buruk yang terjadi adalah akan dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Di mana efek berantai dari kondisi tersebut adalah munculnya ketidakmampuan rumah tangga (masyarakat) untuk menyekolahkan anak-anaknya. Yang pada akhirnya akan bermuara pada penurunan IPM. (yang berarti menunda pencapaian visi yang diinginkan).

Bila diamati dari fenomena partisipasi penduduk usia kerja dalam aktivitas perekonomian, yang ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), maka terlihat adanya peningkatan yang relatif baik. Masalah yang kemudian mengemuka ialah, bagaimana kualitas tenaga kerja yang dipasarkan. Secara pendekatan, kualitas tenaga kerja akan tercermin pula pada indeks pendidikan yang memiliki besaran yang cukup baik pada komponen penghitungan IPM.

Tabel 7 Perbandingan Tingkat Partisipasinya Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, Tahun 1993-2002

Tahun	TPAK			TPT		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5	6	7
1993	76,83	39,56	58,27	4,95	8,28	6,08
1994	78,63	40,23	59,14	3,75	6,38	4,66
1996	75,30	33,71	54,19	4,38	11,13	6,51
1997	75,45	42,01	58,51	7,18	8,96	7,82
1998	76,46	39,62	58,00	5,25	7,31	5,25
1999	77,42	39,70	58,34	5,36	8,06	5,36
2000	73,49	34,77	53,87	5,43	5,40	5,42
2001	72,87	26,38	56,08	5,98	8,17	6,56
2002	74,94	36,52	57,39	3,54	6,87	10,66

Sumber: BPS, Jawa Barat, dari berbagai penerbitan.

Dengan demikian, peningkatan TPAK, pada aktivitas perekonomian perlu dicermati secara baik dan dikaji secara komprehensif dan sistematis. Tentunya yang diharapkan adalah penduduk yang masuk dalam pasar kerja merupakan penduduk yang berkualitas atau dengan perkataan lain tidak menurunkan komponen indeks pendidikan pada IPM.

1. Potret Pendidikan Kabupaten Subang

Indikator Pembangunan Manusia (IPM) difokuskan pada tiga dimensi yang dianggap essensial bagi kehidupan manusia yaitu usia hidup (*longevity*) yang ditunjukkan oleh indeks harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) yang tercermin dalam angka indeks pendidikan (gabungan antara indeks melek huruf dan rata-rata lama bersekolah) dan standar hidup layak (*decent living*) yang ditunjukkan oleh angka indeks daya beli (*purchasing power parity* – PPP). IPM adalah indikator yang dapat mengukur tingkat kinerja dan merupakan skala perbandingan kualitas pembangunan manusia dalam pola yang dinamis yang mewujudkan interaksi yang kuat antara elemen-elemen terkait misalnya antara komponen pertumbuhan pendapatan, kesempatan hidup dan tingkat pendidikan.

Tabel 8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Subang Menurut Komponennya, Tahun 1990 – 1999

Komponen IPM	1990	1996	1999
1	2	3	4
Angka Harapan Hidup (AHH)	61,1	63,6	65,0
Angka Melek Huruf (AMH)	75,9	82,4	86,2
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	3,8	4,9	5,4
PPP (Puchasing Power Parity)	577,9	590,0	530,06
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	60,2	65,7	63,1
Indeks Pendidikan	59,0	65,8	69,5
% Indeks Pendidikan	32,67	33,38	36,71

Sumber: BPS, Jawa Barat

Salah satu komponen krusial dalam kompilasi IPM ialah indeks pendidikan, di mana indeks terdiri atas dua komponen krusial, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Bagaimana sebetulnya peran sektor pendidikan terhadap IPM., dapat diamati dalam angka-angka yang dipaparkan Tabel 8. Di mana secara teoritis IPM merupakan nilai

rata-rata dari tiga komponen, yaitu indeks pendidikan, indeks harapan hidup dan indeks daya beli (*purchasing power parity*—PPP). Untuk setiap wilayah kabupaten/kota sebetulnya angka peran pendidikan terhadap IPM tidak sama, akan tetapi secara jujur perlu diperhatikan bahwa sektor pendidikan merupakan penyumbang yang signifikan untuk IPM yang digunakan sebagai dasar pengukuran kualitas hidup manusia.

Dari hasil perhitungan menunjukkan, bahwa kontribusi indeks pendidikan terhadap besaran IPM Kabupaten Subang pada tahun 1990 sekitar 32,67 %, tahun 1996 sebesar 33,38 % dan di tahun 1999 menjadi sebesar 36,71 %. Melihat besaran persentase tersebut, maka salah satu upaya untuk meningkatkan besaran IPM, ialah dengan menata ulang kesempatan pendidikan bagi penduduk yang berusia sekolah dan para pekerja yang tidak sempat menikmati tingkat pendidikan yang layak.

Segmentasi penduduk yang harus mendapatkan kesempatan sekolah secara demografis ditentukan pada selang usia (7-18) tahun, di mana secara operasional kelompok umur tersebut dipilih menjadi tiga; yaitu usia (7-12) tahun untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), usia (13-15) tahun untuk tingkat Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan umur 16-18) tahun untuk tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Pada dua kelompok umur yang pertama, yaitu usia (7-12) tahun dan (13-15) tahun merupakan umur yang krusial dikaitkan dengan adanya program yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu wajib belajar (wajib) – 9 tahun. Dengan demikian, sudah selayaknya apabila pengamatan yang lebih serius diarahkan pada kelompok usia ini; dengan asumsi mereka memiliki tingkat normalitas yang sama. Dan pada kenyataannya, derajat kenormalan segmen penduduk ini sebagian kecil tidak sama (misalnya ada yang termasuk dalam tuna-insani-*handicap person*).

Suatu indikator *output* yang dapat digunakan untuk melihat kondisi partisipasi penduduk bersekolah pada segmen usia (7-18) tahun, ialah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Pada tabel 9. dipaparkan besaran APS Kabupaten Subang pada kurun waktu 1997-2002.

Tabel 9 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Subang Usia (7-18) Tahun 1997-2002

Tahun	7 – 12 (Tingkat SD)	13 -15 (Tingkat SLTP)	16 – 18 (Tingkat SLTA)
1	2	3	4
1997	69,81	70,62	29,50
1998	94,03	64,24	34,72
1999	98,33	70,51	36,99
2000	94,09	74,50	30,98
2001	95,46	80,25	32,96
2002	95,80	83,40	49,42

Sumber: BPS. Jawa Barat, dari berbagai penerbitan

Suatu interpretasi atas paparan data serial tersebut, bahwa ada peningkatan atas partisipasi segmen usia (7-15) tahun dan hal yang sama bila diamati untuk besaran APS, usia (16-18) tahun. Suatu catatan krusial yang dapat dikemukakan, meskipun deteksi dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf yang digunakan dalam kompilasi angka IPM adalah untuk kelompok usia 15 tahun ke atas, akan tingginya besaran APS pada usia (7-15) tahun akan merupakan data investasi dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas.

Suatu paparan data indikator pendidikan untuk usia 7-18 tahun disajikan pada tabel 10, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM./*NER-net enrollment ratio*). Angka ini memberikan informasi yang lebih baik, di mana memberikan indikasi jumlah penduduk umur tertentu yang bersekolah pada tingkatan yang sesuai dengan kelompok umurnya. Terlihat besaran APM pada tingkat sekolah dasar untuk tahun 1999 mencapai angka 95,96 % dan fenomena ini memberikan suatu interpretasi bahwa derajat ekonomi penduduk Kabupaten Subang relatif cukup baik, sehingga mereka dapat memberikan kesempatan pendidikan pada anggota rumah tangganya.

Tabel 10 Angka Partisipasi Murni (APM/NER-Net Enrollment Ratio) Penduduk Kabupaten Subang Usia (7-18) Tahun, tahun 1997-2002

Tahun	7 – 12 (Tingkat SD)	13 -15 (Tingkat SLTP)	16 – 18 (Tingkat SLTA)
1	2	3	4
1997	93,93	57,77	23,10
1998	92,16	47,47	22,65
1999	95,96	55,89	27,88
2000	91,61	61,67	23,05
2001	91,48	65,50	24,32
2002	92,47	71,64	35,05

Sumber: BPS. Jawa Barat, dari berbagai penerbitan

2. Situasi Kesehatan Penduduk

Suatu hal lain yang menarik, kondisi suatu wilayah dapat dilihat dari aspek derajat kesehatan, di mana derajat kesehatan itu sendiri diukur dengan menggunakan Angka Kematian Bayi (AKB), berdasarkan kriteria daerah yang direkomendasikan Stan D'Souza¹ dari aspek AKB atau derajat kesehatan, maka diinterpretasikan, pada tahun 1980 wilayah Kabupaten Subang termasuk daerah *soft-rock* dan pada kurun waktu 1990-2002 berdasarkan kriteria Stan D'Souza, Kabupaten Subang masih berada dalam posisi daerah *intermediate-rock*.

¹ Menurut "B-Pichart classification" –Stan D 'Souza (1984) dalam Brotowasisto (1990), Angka kematian Bayi membagi daerah menjadi 3 (tiga) wilayah ; yaitu: (1) Daerah dengan AKB diatas 100 per seribu kelahiran bayi hidup sebagai daerah *Soft-rock*, dimana sebagian besar kejadian kematian bayi disebabkan oleh penyakit menular; (2) Daerah dengan AKB 30-100 per seribu kelahiran bayi hidup dikategorikan sebagai daerah *intermediate-rock*, yang memerlukan perubahan sosial untuk menurunkan AKB-nya; dan (3) Daerah dengan AKB di bawah 30 per seribu kelahiran bayi hidup diklasifikasikan sebagai daerah *hard-rock*, yaitu hanya sebagian kecil saja kematian yang disebabkan oleh penyakit menular dan sebagian besar disebabkan oleh kelahiran bawaan atau *congenital*.

Derajat kesehatan masyarakat Subang pada posisi tahap ke dua (*Intermediate-rock*) relatif cukup baik, akan tetapi perlu suatu aktualisasi kesadaran berbagai pihak dalam meningkatkan derajat kesehatan di wilayah ini. Tanpa kerjasama yang erat dari berbagai pihak (masyarakat, dunia usaha dan pemda) suatu mustahil peningkatan tersebut akan tercapai. Fenomena ini memperlihatkan semakin sulitnya upaya yang harus dilakukan oleh aparat kesehatan menjadikan tatar Kabupaten Subang sebagai daerah sehat (*hard-rock*).

Tabel 11 Angka Kematian Bayi, Rata-rata Umur Wanita Perkawinan Pertama di Kabupaten Subang, 1980-2002

Tahun	AKB	Kriteria Wilayah	Rata-rata Umur Perkawinan	Angka Harapan Hidup
1	2	3	4	5
1980	129,02	Soft – Rock	-	48,50
1990	74,67	Intermediate –	-	59,00
1994	60,80	Rock	-	62,87
1995	57,33	Intermediate –	-	62,46
1996	56,00	Rock	19,70	62,83
1997	51,50	Intermediate –	-	64,30
1998	53,50	Rock	-	64,32
1999	34,33	Intermediate –	20,15	65,00
2000	50,23	Rock	20,39	66,20
2001	49,36	Intermediate –	20,69	66,24
2002	-	Rock	20,59	67,21
		Intermediate –		
		Rock		
		Intermediate –		
		Rock		
		Intermediate –		
		Rock		
		Intermediate –		
		Rock		
		Intermediate –		
		Rock		

Sumber: BPS, Jawa Barat, dari berbagai penerbitan.

Catatan : *) = angka harapan hidup waktu lahir.

Sebagai contoh, dikatakan oleh Singarimbun (1988: vii-viii) bahwa beberapa faktor memiliki kekuatan untuk menurunkan angka kematian, khususnya kematian bayi dan anak, yaitu: (a) Kemajuan dalam bidang ekonomi dan meningkatnya taraf hidup; (b) Kemajuan dalam bidang pengetahuan kedokteran dan teknologi; (c) Perbaikan sanitasi dan higiena; dan (d) Peningkatan persediaan makanan dan perbaikan gizi.

Satu sama lain faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan tidak mudah untuk melihat mana yang lebih penting. Resiko kematian bayi yang tinggi dialami oleh bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kawin muda. Resiko kematian bayi ini pada ibu yang kawin pada umur di bawah 17 tahun 30 % lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang kawin pada umur 20 tahun ke atas (Adioetomo, 1984). Pada umumnya kawin muda mempunyai korelasi positif dengan umur muda mempunyai anak pertama dan ini berkaitan pula dengan keadaan sosial ekonomi yang rendah.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Caldwell dan Mc Donald (1981) ditemukan pula di Indonesia bahwa pendidikan, terutama pendidikan ibu, berpengaruh sangat kuat terhadap kelangsungan hidup anak dan bayinya. Hal ini didukung pula oleh Utomo dan Hatmadji (1982) yang menyimpulkan dari survei fertilitas-mortalitas tahun 1973 bahwa di antara berbagai faktor yang diteliti: pendidikan ibu, umur perkawinan pertama, pekerjaan, indeks fasilitas rumah tangga dan lama kebiasaan menyusui, maka pendidikan berpengaruh paling signifikan dan terkuat. Kemudian dengan menggunakan data SUPAS 1975, diperoleh informasi yang berharga tentang perbedaan AKB dan AKA (Angka Kematian Anak) antara berbagai kelompok pendidikan ibu, AKB dan AKA dua kali lipat lebih tinggi pada ibu yang tidak pernah sekolah dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan SLTP ke atas. Tampak pula bahwa dengan hanya berpendidikan SD sudah bisa menurunkan AKB dan AKA sekitar 10 %. Selanjutnya ditunjukkan pula bahwa kematian menjadi semakin tinggi apabila ibu yang tidak pernah sekolah tadi tinggal di pedesaan. Gambaran serupa diperoleh jika data sensus penduduk 1980 digunakan (Utomo, 1982: 175).

Dikaitkan dengan pemberian ASI dihubungkan dengan penyakit diare, Feachem dan Koblinsky (1984) melakukan peninjauan terhadap 35 penelitian di 14 negara, ternyata 83 % dari penelitian tersebut

menunjukkan bahwa pemberian ASI secara eksklusif lebih memberikan perlindungan dibanding dengan pemberian ASI hanya sebagian. Ditemukan pula bahwa 88% yang diberi ASI secara eksklusif lebih terlindung dibanding yang tidak diberi ASI; dan 76 % yang diberi ASI sebagian menunjukkan lebih terlindung dibanding dengan yang tidak diberi ASI.

Dikatakannya pula bahwa pemberi ASI pada anak berusia di atas satu tahun ternyata tidak memberikan efek perlindungan terhadap morbiditas diare. Dengan demikian pemberian ASI sebaiknya dilakukan terhadap bayi, bukan terhadap anak. Tidak demikian hanya dengan kehamilan yang dikaitkan dengan pemberian ASI.

Bila seorang bayi meninggal, maka masa menyusui pun terputus. Memperpanjang masa menyusui dengan menunda datangnya ovulasi, maka pemberian ASI ini akan melindungi si ibu dari kehamilan. Bila bayinya meninggal dan masa menyusui berhenti, ia akan kehilangan perlindungan itu (Singarimbun dan Hull, 1977).

Meskipun demikian, kemajuan teknologi, perkembangan industri susu formula, urbanisasi dan pengaruh kebudayaan Barat telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai sosio-budaya masyarakat. Seperti disampaikan oleh Tumbelaka (1981) bahwa memberi susu botol dianggap modern dan menempatkan si ibu pada kedudukan sama dengan ibu-ibu golongan atas. Susu botol telah menjadi simbol kemewahan serta payudara menjadi simbol seks.

Fenomena yang ditampilkan tabel 11. menunjukkan hal yang menggembirakan, pertama menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya rata-rata umur perkawinan pertama merupakan dua hal yang menjadi modal dasar bagi meningkatnya angka harapan hidup yang diperlihatkan pula dalam paparan data pada tabel yang sama. Sebagai konsekuensi positif dari perubahan angka-angka tersebut, maka indeks harapan hidup meningkat yang pada akhirnya mendongkrak naik angka IPM. Kabupaten Subang. Meskipun demikian masih terlihat derajat kenaikan IPM masih belum signifikan, sehingga masih perlu suatu pengkajian ulang apa kendala yang sebetulnya dihadapi Pemda Kabupaten Subang dan bagaimana solusi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Subang. ♦

BAB III

PENINGGALAN SEJARAH DI KABUPATEN SUBANG

A. Tinggalan Arkeologis

1. Batuan dan Benda yang Terbuat dari Batu

PENINGGALAN arkeologis berupa batuan dan benda-benda yang terbuat dari batu banyak ditemukan di Kabupaten Subang di antaranya adalah:

a. Artefak Batu pada Situs Cikaliwadas

Pada Situs Cikaliwadas ditemukan 5 buah artefak batu yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) Lokasi | : Cikaliwula/Cigoong |
| Constelation | : Mirach |
| No. Bright Stars (BS) | : 8775 |
| No. Durch Musterung | : 4880 |
| No. General Catalogus (GC) | : 32135 |
| A.D. (Anno Domine) | : 1688 |
| Periode | : Eropa, T.O.C. |
| ad. | : Belum dapat ditentukan |
| 2) Lokasi: Cikaliwula/Cigoong | |
| Constelation | : Andromeda Upsilon |
| No. Bright Stars | : 458 |
| No. Durch Musterung | : 332 |

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| No. General Catalogus | : 1948 |
| Periode | : VOC (1688) |
| Ad | : 20.000.000 |
| 3) Lokasi | : Cikaliwula/Cigoong |
| Constelation | : Scheat |
| No. Bright Stars | : 8775 |
| No. Durch Musterung | : 4480 |
| No. General Catalogus | : 32135 |
| Periode | : VOC/Eropa (1688) |
| Ad | : Belum dapat ditentukan |
| 4) Lokasi | : Cikaliwula/Cigoong |
| Constelation | : Pegasus 60 |
| No. Bright Stars | : 8827 |
| No. Durch Musterung | : 4580 |
| No. General Catalogus | : 32305 |
| Periode | : VOC (1688) |
| Ad | : Belum dapat ditentukan |
| 5) Lokasi | : Cikaliwula/Cigoong |
| Constelation | : Pegasus |
| No. Bright Stars | : 8765 |
| No. Durch Musterung | : 4829 |
| No. General Catalogus | : 32107 |
| Periode | : VOC (1688) |
| Ad | : Belum dapat ditentukan |

b. Situs Kawunganten

Situs Kawunganten berada di Desa Kawunganten Baru Kecamatan Kawunganten Kabupaten Subang. Pada situs ini ditemukan pecahan-pecahan keramik yang berbentuk piring, mangkuk, buli-buli, dan teko. Berdasarkan motif-motif pecahan keramik itu dapat disimpulkan bahwa keramik itu berasal dari Eropa dan Cina.

Lokasi situs ini pernah menjadi perkebunan orang Belanda. Benda-benda tersebut sekarang disimpan di Museum Jawa Barat.

c. Situs Selaawi

Situs Nandi Selaawi berada di Kampung Selaawi Desa Cipancar Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang. Situs terletak di lereng bukit atau kaki Gunung Sunda dan berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut.

Pada situs ini ditemukan dua buah arca nandi yang terbuat dari batu andesit. Arca nandi yang pertama posisinya menghadap ke arah timur laut dalam keadaan tanpa kepala. Arca ini berukuran tinggi 40 cm, panjang 78 cm, lebar 35 cm, dan lingkaran 20 cm. Arca nandi yang kedua terletak sekitar 600 meter ke arah tenggara. Arca ini berukuran tinggi 42 cm, panjang 100 cm, lebar 37 cm, dan lingkaran 25 cm.

Pada saat ditemukan, kedua arca nandi tersebut berada dalam jarak 2 meter ke arah timur. Menurut keterangan masyarakat setempat, kedua arca tersebut sering disebut dengan nama Embah Rashamala dan juga dikenal dengan sebutan Babantangan. Arca Nandi tersebut sekarang disimpan di Museum Negeri Sri Baduga Jawa Barat.

d. Situs Dayeuhkolot

Situs Dayeuhkolot berada di Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Sagalaherang, tepatnya terletak di atas sebuah bukit di pinggir jalan raya Dayeuhkolot. Luas situs 25 m—2—dengan berbentuk bujursangkar dan berpagar tembok. Pada situs terdapat sebuah arca batu yang memiliki tipe megalitik, batu-batu pipih, batu tegak, dan dua makam. Arca dibentuk secara kasar tetapi sudah menampakkan bagian-bagian tubuh dan anggota badannya. Posisi arca duduk dengan tangan bersilang di depan perut. Arca ini berukuran tinggi 35 cm panjang muka 13 cm, lebar muka 10 cm, lebar badan 20 cm. Kuburan terbuat dari batu-batu pipih dengan batu tegak sebagai nisan, bentuknya memanjang utara-selatan dengan panjang 2 meter, lebar 75 cm.

Situs ini terkenal dengan nama Ki Bodas dan hingga saat ini masih dikeramatkan.

e. Gelang Batu

Gelang batu terbuat dari batu onix warna krem (bening tembus cahaya). Berbentuk lebar dan pipih. Di bagian dalam rata dan bagian luar agak cembung. Jenis gelang ini merupakan benda peninggalan masa prasejarah yang telah dikenal sejak masa bercocok tanam. Digunakan sebagai perhiasan dan juga berfungsi sebagai alat upacara, umpamanya bekal kubur yang dapat menunjukkan status sosial pemiliknya.

2. Benda yang Terbuat dari Logam

Peralatan yang terbuat dari logam perunggu banyak ditemukan di Kabupaten Subang, seperti kapak corong, kapak sepatu, dan kapak upacara. Pembuatan alat-alat dari perunggu itu merupakan hasil teknologi baru dan paling menonjol penggunaannya pada masa perundagian. Fungsi alat-alat dari perunggu ini menggantikan fungsi alat-alat dari batu. Selain dipakai untuk keperluan sehari-hari juga berfungsi sebagai perlengkapan dalam kegiatan ritual.

Beberapa peralatan dari perunggu yang ditemukan di Subang dan menjadi koleksi Museum Sri Baduga ialah :

a. Kapak Corong No. Inventaris 305.2959

Kapak ini disebut kapak corong karena mempunyai tangkai yang berbentuk corong. Benda keseluruhan merupakan kesatuan antara tangkai dan bilah. Tangkai lebih panjang dari bilah. Bagian yang tajam berbentuk setengah lingkaran. Garis puncak tangkainya agak cekung.

Kapak ini terbuat dari perunggu dan merupakan peninggalan masa prasejarah. Dibuat setelah manusia mengenal api dan teknologi pengolahan logam atau biasa disebut masa perundagian. Kapak ini ditemukan dalam tempayan hasil penggalian di Desa Nanggeang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Pada masa itu kapak seperti ini berfungsi sebagai alat upacara, yaitu bekal kubur atau simbol status sosial.

b. Kapak Sepatu No. Inventaris 305.2960

Benda ini ditemukan dalam sebuah penggalian di Desa Nanggenang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Terbuat dari perunggu. Tangkai besarnya seperti bentuk corong, melebar di puncak kemudian menyempit pada bagian tajamnya dari tangkainya dengan bentuk mata kapak seperti bulan sabit. Pada bagian tengah lebar kemudian menyempit dan sudut-sudut tajamnya menebal. Ujung tangkai menyambung dengan bilah posisi miring. Pada tangkainya terdapat ragam hias geometri dan pilin berganda.

Kapak ini peninggalan masa prasejarah, dibuat setelah manusia mengenal api dan teknologi pengolahan logam atau biasa disebut masa perundagian. Pada masa itu kapak seperti ini berfungsi sebagai alat upacara, yaitu bekal kubur yang dapat meningkatkan status pemiliknya.

c. Kapak Sepatu No. Inventaris 305.2961

Dalam arkeologi kapak berbentuk seperti ini termasuk tipe V atau tipe bulan sabit. Kadang-kadang disebut pula kapak sepatu. Bentuk mata kapak seperti bulan sabit, bagian tengah lebar, kemudian menyempit ke kedua belah samping dan sudut-sudut tajamnya membuka. Tangkainya lebar di puncak kemudian menyempit pada bagian tajamnya. Pada tangkai terdapat hiasan motif meander dan motif pilin berganda, serta pada sisi kiri tangkai terdapat hiasan timbul membentuk motif geometris.

Kapak bulan sabit/sepatu terbuat dari perunggu merupakan peninggalan masa prasejarah. Dibuat setelah manusia mengenal api dan teknologi pengolahan logam atau biasa disebut masa perundagian. Pada masa itu kapak ini berfungsi sebagai alat upacara, yaitu bekal kubur atau simbol status sosial.

d. Kapak Candrasa No. Inventaris 305.2962

Kapak seperti ini disebut kapak candrasa, terbuat dari perunggu berukuran besar dan pipih. Tangkai pendek dan berongga seperti corong dan melebar pada pangkalnya. Mata kapak lebih panjang

dan lebih tipis daripada tangkainya. Kedua ujungnya melebar dan melengkung ke arah dalam sehingga membentuk bidang mata yang simetris, di dalamnya terdapat pola hias bintang. Ujung tangkainya menyambung dengan bilah posisi miring.

Benda ini merupakan peninggalan masa prasejarah. Dibuat setelah manusia mengenal api dan teknologi pengolahan logam atau biasa disebut masa perundagian. Pada masa itu kapak seperti ini berfungsi sebagai alat upacara yaitu bekal kubur atau simbol status sosial.

e. Kapak Corong No. Inventaris 305.2964

Benda ini adalah hasil temuan dari Desa Nanggenang Kecamatan Binong Kabupaten Subang. Biasa disebut kapak corong dengan ciri-ciri sebagai berikut: bahan terbuat dari perunggu, bentuk keseluruhan merupakan kesatuan antara tangkai dan bilah. Pangkal benda adalah tangkainya berbentuk seperti ekor burung sriti. Bagian tengah terbelah agak dalam. Bilah hampir berbentuk jajaran genjang. Tajamnya melengkung seperti kipas, menyempit ke atas sehingga kedua sisinya cekung dan ramping. Pada salah satu permukaan terdapat sambungan.

Kapak corong merupakan salah satu bentuk tipe kapak perunggu peninggalan budaya masa perundagian seperti kapak perunggu lainnya, berfungsi sebagai sarana upacara maupun status sosial.

f. Kapak Sepatu No. Inventaris 305.2965

Kapak ini terdiri atas tangkai dan bilah. Tangkai berbentuk menyerupai corong, melebar ke bagian atas dan berongga. Pangkalnya agak melengkung dan kedua sisinya mencuat. Ujung tangkai menyambung dengan bilah posisi miring membuat sudut 45 derajat. Pada kedua bidang tangkai berhias motif geometris. Bilah berbentuk seperti sepatu, lebar, ramping, dan pipih. Bagian panjang maupun tajamnya melengkung sehingga kedua ujungnya runcing. Pada salah satu sisi punggungnya terdapat lipitan.

Kapak ini terbuat dari perunggu dan merupakan peninggalan prasejarah. Dibuat setelah manusia mengenal api dan teknologi pengolahan logam atau biasa disebut masa perundagian. Karena

bentuknya, para arkeolog menyebutnya kapak sepatu. Ditemukan di Desa Nanggenang, Kecamatan Binong Kabupaten Subang. Pada masa itu berfungsi sebagai sarana upacara yaitu bekal kubur atau simbol status sosial.

g. Medalion Payung Kastuba

Medalion ini memiliki dua muka. Pada salah satu muka tertera gambar relief payung yang dilingkari dengan tulisan berhuruf Sunda jenis cacarakan berbunga kastuba yaitu sejenis pohon perdu berdaun merah. Pada sisi muka yang lain terdapat gambar payung, distilisasi dalam bentuk daun dan dikelilingi tulisan dengan huruf yang sama berbunyi “Kembang Campaka Mulya”.

Relief payung dan tulisan pada medalion di atas memiliki simbol status sosial seseorang. Payung adalah simbol pengayoman atau perlindungan; warna merah pada daun kastuba melambangkan tingkat jabatan di lingkungan pemerintah Hindia Belanda. Tulisan “Kembang Campaka Mulya” bermakna keharuman dan kemuliaan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kurang lebih abad XIX, medalion seperti ini merupakan tanda jasa bagi seorang pejabat menengah, yaitu *hoofwedana* atau mantri besar, setingkat patih pada masa sekarang.

B. Makam-makam Bersejarah

1. Makam Embah Wangsa Goparana

Makam Wangsa Goparana terletak di Nangkabeurit, Sagalaherang. Makam ini ramai dikunjungi para penziarah yang menganggap makam tersebut sebagai makam keramat, sebab ulama yang bernama Wangsa Goparana inilah yang dianggap penyebar pertama agama Islam di Subang.

Wangsa Goparana adalah seorang putera dari Raja Talaga yang bernama Sunan Wanaperi, yang kemudian menjadi murid Sunan Gunung Jati. Ia berguru kepada Sunan Gunung Jati karena ia merasa tidak puas dengan agama yang telah diwariskan leluhurnya. Setelah berguru, Wangsa Goparana berkeinginan untuk membantu Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam.

Penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat memang telah dipelopori oleh Sunan Gunung Jati. Untuk daerah-daerah Kuningan, Talaga, Majalengka, Sumedang, Garut, dan Galuh masyarakatnya telah berhasil diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Oleh karena itu, Wangsa Goparana ingin menyebarkan agama Islam di daerah yang belum tersentuh oleh ajaran Islam. Ia menempuh jalan raya dari Talaga menuju daerah pegunungan di sebelah utara Gunung Tangkupan Perahu. Wangsa Goparana memasuki daerah yang belum tersentuh agama Islam di antara Karawang dan Majalengka. Pada waktu itu daerah ini (Subang) belum banyak penduduknya. Penduduk yang terbanyak berada di bagian selatan, yaitu antara daerah pegunungan dengan jalan raya Pajajaran di sekitar Sagalaherang dan Cisalak.

Sebagai murid Sunan Gunung Jati, Wangsa Goparana memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai agama Islam. Selama puluhan tahun lamanya ia mengajarkan agama Islam kepada orang-orang yang datang kepadanya. Ia mengetahui isi kepercayaan lama sehingga dapat membandingkannya dengan isi ajaran Islam. Sedapat mungkin ia mencari titik-titik pertemuan agar lebih dapat memberikan pengertian tentang suatu persoalan dengan lebih mudah. Kepercayaan kepada Yang Widi yang sudah dikenal orang, oleh Wangsa Goparana disalurkan keimanan kepada Allah dengan mengajarkan sembahyang lima kali dalam sehari semalam. Kemudian secara bertahap diajarkan pula rukun Islam yang lainnya. Setelah rasa keimanan mulai menyinari kalbu para muslim baru di Sagalaherang, ajaran-ajaran Islam yang lainnya dengan mudah dapat diterima dan dilaksanakan. Berkat usahanya itu, Wangsa Goparana berhasil meng-Islamkan masyarakat di daerah Subang, Pagaden, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, dan Limbangan.

Wangsa Goparana memiliki anak lima orang, yaitu Entol Wangsa Goparana, Wiratanudatar, Yudanegara, Cakradiparana, dan Yudamanggala. Anak-anaknya mendapat pendidikan agama langsung dari Wangsa Goparana sebab mereka dikaderkan untuk membantu ayahnya dalam menyebarkan agama Islam di berbagai tempat, baik yang dekat maupun yang jauh.

Salah seorang puteranya pindah ke Limbangan, menetap di sana dan menjadi cikal bakal keluarga Limbangan. Wiratanudatar juga

meninggalkan Sagalaherang. Ia bersama keluarganya, seorang saudara dan tiga puluh orang kepala keluarga lainnya mencari tempat kediaman baru di seberang Sungai Citarum. Untuk sementara waktu mereka tinggal di Cibalagung, tetapi kemudian mereka menetap di Cijegang (Majalaya, Cikalongkulon), di sebelah selatan Sungai Cikundul. Kepindahannya itu merupakan upaya melanjutkan apa yang telah dirintis oleh ayahnya dengan meninggalkan Talaga. Daerah antara Sungai Citarum dan Gunung Gede pada waktu itu masih kosong, hampir tidak berpenduduk, berhutan lebat yang belum terjamah tangan manusia. Kepindahannya dijiwai oleh semangat mengembara, semangat merintis, membuka daerah baru untuk selanjutnya membentuk masyarakat yang hidup atas dasar ajaran agama Islam.

a. Makam Eyang Embah Dalem Gintung

Riwayat Embah Dalem Gintung menurut Karlin (kuncen/jupel Makam Eyang Embah Dalem Gintung) bermula pada abad ke-14. Pada masa itu, ada seorang pangeran bernama Cakraningrat keturunan dari Kerajaan Galuh. Ia mempunyai keturunan, di antaranya ada yang terkenal bernama Pangeran Astagati. Pangeran Astagati mempunyai putri bernama Raden Nyimas Ayu.

Sementara itu, seorang pangeran bernama Wirakusumah dari Sumedang mempunyai putra yang bernama Dalem Ranggawangsa. Putranya itu ingin mempersunting Raden Nyimas Ayu. Untuk itu, Pangeran Wirakusumah harus membuka hutan untuk dijadikan suatu wilayah pemerintahan (daerah itu sekarang menjadi Kota Subang) sebagai upaya memenuhi syarat yang diajukan oleh Raden Nyimas Ayu. Setelah itu mereka menikah dan Dalem Ranggawangsa menjadi pemimpin di daerah itu. Dalem Ranggawangsa dibantu oleh Ranggawulung memerintah di wilayah sebelah selatan dan Embah Selat Cau (Embah Sukamelang) memerintah di wilayah sebelah utara. Dalem Ranggawangsa pada akhir hayatnya dimakamkan di daerah Gintung. Makam itu sampai sekarang terkenal dengan nama Makam Embah Dalem Gintung.

b. Makam Salahaur Jabong/Embah Rangga Dipa

Menurut cerita M. Aang S. Ujang (kuncen/jupel Makam Salahaur Jabong), Tokoh Embah Rangga Dipa ceritanya berkaitan dengan peristiwa sejarah diserangnya Batavia oleh tentara Kerajaan Mataram. Cerita selengkapnya sebagai diceritakan di bawah ini.

Pada abad ke-17 (sekitar tahun 1628) Belanda berusaha untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Pada waktu itu di Pulau Jawa, kerajaan yang paling berkuasa ialah Kerajaan Mataram dengan Sultan Agung sebagai rajanya. Sultan Agung sangat menentang usaha Belanda, hal itu dibuktikan dengan usaha Mataram menyerang kedudukan Belanda di Batavia.

Sultan Agung mengirinkan para prajuritnya ke Batavia dan di antara para prajuritnya itu, terdapat Embah Rangga Dipa. Para prajurit Sultan Agung melaksanakan tugasnya dengan penuh keikhlasan dan tekad yang kuat ingin menyelamatkan tanah airnya dari ancaman Belanda. Hal itu terlihat dari:

1. Jarak antara wilayah Mataram dengan Batavia sangat jauh, hal itu tetap mereka laksanakan meskipun hanya mengandalkan perjalanan dengan jalan kaki.
2. Dilihat dari segi persenjataan, tentara Mataram hanya menggunakan senjata tradisional, yaitu pedang, tombak, keris, dan lain-lain.
3. Jumlah anggota prajurit yang mahir/ahli perang sangat terbatas.
4. Tidak didukung oleh penyediaan logistik/pangan yang memadai. Para prajurit Mataram mengandalkan pangan dari bekal yang dibawanya. Oleh karena perjalanan sangat jauh, bekal itu habis di perjalanan. Akhirnya, tentara Mataram hanya mengandalkan pangan dari pemberian rakyat yang daerahnya dilalui.

Dengan kondisi seperti itu, tentara Mataram mengalami kekalahan, semua pasukan terpukul mundur. Setelah mengalami kekalahan, para tumenggung mengadakan rapat untuk membahas bagaimana caranya mengalahkan Belanda. Dari rapat itu diperoleh kesimpulan:

1. Harus mendapat tambahan tentara dari luar, sebab dalam peperangan yang lalu banyak prajurit yang gugur.
2. Para prajurit harus memiliki mental yang membaja.
3. Logistik harus dipersiapkan secara matang.

Untuk melaksanakan hasil rapat tersebut, pasukan Mataram mendapat bantuan pasukan dari prajurit Dipati Ukur dan dari Angkatan Laut Aceh yang dipimpin oleh Bahurekso. Kemudian, Embah Rangga Dipa memimpin kerja sama antara para prajurit dengan penduduk membuka persawahan sebagai sumber logistik yang dapat digunakan dalam peperangan di kemudian hari.

Setelah merasa cukup kuat yaitu: (1) memiliki persenjataan yang lebih lengkap; (2) telah mendapat bantuan tenaga prajurit; (3) logistik telah dipersiapkan secara lebih baik; (4) para prajurit memiliki tekad yang lebih membaja; maka pada tahun 1629 pasukan Mataram mengadakan penyerangan kembali ke Batavia dan mendapat kemenangan.

Setelah peperangan selesai, pasukan Mataram kembali ke tempat asalnya, tetapi Embah Rangga Dipa tidak. Ia tinggal di daerah Jabong, memimpin rakyat dalam segala bidang kehidupan, seperti di bidang pertanian, pengetahuan, dan di bidang penyebaran agama Islam. Di daerah Jabong ini, Embah Rangga Dipa didampingi oleh istrinya yang setia bernama Embah Denok dan memiliki dua putra yaitu Ki Jenah dan Ki Gede.

Kepada para putranya, Embah Rangga Dipa selalu berpesan untuk selalu membela rakyat agar terbebas dari segala bentuk penjajahan. Setelah wafat, Embah Rangga Dipa dimakamkan di sela-sela ruyuk haur (rumpun bambu aur). Oleh karena itu, makamnya disebut Makam Embah Salahaur Jabong.

C. Tinggalan Berupa Mata Uang

Masa pendudukan tentara Jepang selama tiga setengah tahun telah meninggalkan benda-benda bersejarah yang sampai pada saat ini, di antaranya benda yang berupa uang. Mata uang peninggalan masa pemerintahan Jepang yang berasal dari daerah Subang dan

berhasil terdokumentasikan oleh Museum Sri Baduga berupa uang kertas.

Semua uang kertas yang disiapkan Jepang dibawa serta bala tentara Dai Nippon dalam penyerbuannya ke Indonesia. Langsung uang itu diedarkan di daerah yang dikuasainya, sekaligus menggantikan uang yang telah beredar sebelumnya. Penukaran uang dilakukan atas dasar satu banding satu, misalnya 1 gulden Hindia Belanda ditukar dengan 1 gulden uang militer Jepang.

Ciri khas uang militer Jepang untuk Indonesia pada bagian muka tercantum *De Japansche Regeering* dan cap Kementrian Keuangan Jepang dengan huruf kanji *Okura Daijin*. Kertas yang dipakai diberi tanda air berupa kembang khusus pada pecahan 50 cent ke atas. Semula seluruh uang militer Jepang dicetak di Jepang, namun setelah hubungan antara Jepang dan negeri kekuasaannya terganggu oleh serangan Sekutu maka uang dicetak di Jakarta. Selain dari “Cara Integrasi” tersebut terdapat pula integrasi dalam segi rekaan bentuk. Plat dasar pada uang bala tentara Jepang sama untuk semua seri, pecahan 1, 2, 1 1/2, dan 10 gulden hanya mengalami perubahan sedikit saja.

Dari sini tampak bahwa penyerbuan Jepang ke wilayah Asia Tenggara lebih cepat berhasil daripada yang dibayangkan oleh para ahli siasat perang Jepang. Semua uang untuk wilayah Asia Tenggara dicetak dengan sangat tergesa-gesa. Oleh karena daerah yang dikuasai Dai Nippon cukup luas maka uang yang dibawa serta bala tentara Jepang tidak cukup. Untuk memenuhi kekurangannya dicetaklah uang tambahan sebagai lanjutan dari satuan gulden yang dicetak di Jepang. Akan tetapi dalam percetakan kali ini tidak digunakan sistem nomor seri, yang digunakan hanya huruf kontrol lanjutan dari alfabet A dan B. Misalnya, untuk Indonesia SC, SD, SE, dan seterusnya.

Tanggal 1 April 1942 pemerintah Kerajaan Dai Nippon membuka Bank Pembangunan Daerah Selatan Nampo Kaihatsu Kinko. Tugasnya mengelola urusan moneter daerah Selatan (daerah kekuasaan), dan mulai 1 April 1943 peredaran serta pengelolaan uang bala tentara Dai Nippon dioperasikan seluruhnya kepada Nampo Kaihatsu Kinko. Bank tersebut diberi kekuasaan untuk mencetak dengan rekaan baru.

Mulai 15 April 1943 pemerintah Jepang memerintahkan untuk mencetak uang seri ha dalam pecahan Rp 100,- di atas kertas biasa pada percetakan Kolf Jakarta. Salah satu keistimewaan seri ha adalah tidak terdapat cap Menteri Keuangan Jepang Okura Daijin pada rekaannya. Sehingga banyak kolektor uang dan penulis Barat menyangka uang tersebut dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam kedudukannya sebagai boneka Jepang.

D. Peninggalan Berupa Bangunan/Monumen

1. Rumah Sejarah di Kalijati

Situs yang bernama “Rumah Sejarah” ini lokasinya ada di desa Kalijati Barat, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang; tepatnya di Blok Garuda E 25 Lanud Kalijati. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten Subang ke situs adalah 16 Km (sebelah barat kota). Status tanahnya milik TNI AU. Situs ini sebelah utara dibatasi oleh jalan, sebelah selatan adalah rumah dinas TNI AU, sebelah barat juga berbatasan dengan rumah dinas TNI AU, dan sebelah timur dibatasi oleh kebun.

Situs yang luasnya 1.728 meter persegi ini di dalamnya terdapat: meja dan kursi perundingan, batu prasasti, sketsel bergambar, lukisan pendaratan Jepang, lukisan perundingan, bendera Jepang, bendera Belanda, dan buku-buku sejarah. Situs yang berarsitektur Belanda ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1917. Namun demikian, sampai saat penelitian ini dilakukan belum pernah dipugar. Luas bangunannya mencapai 265 meter persegi dengan arah pandang bangunan ke timur. Atapnya terbuat dari sirap, dindingnya tembok, dan lantainya berupa tegel dengan pondasi beton. Sementara itu, langit-langitnya berupa eternit, jendela dan pintunya terbuat dari kayu jati, dan ada ragam hiasnya yang berada di tangga besi (di dalam kamar mandi). Situs yang sebelumnya berfungsi sebagai rumah dinas TNI AU ini sekarang telah berubah menjadi museum.

Dewasa ini gedung bersejarah ini menjadi asset benda peninggalan sejarah yang dilindungi undang-undang. Bangunan yang

dibuat pada masa kekuasaan Belanda itu tetap dipertahankan dalam bentuk yang sama sebagaimana bentuk asalnya. Atap bangunan yang dibuat pada tahun 1917 tersebut tetap terbuat dari sirap, kemudian langit-langit, pintu, jendela, wastafel, bahkan lantai tetap dipertahankan seperti aslinya tanpa perubahan.

Pada bagian teras terdapat tiang prasasti yang bertuliskan huruf Jepang pada dua sisinya. Prasasti itu menandai runtuhnya Pemerintahan Hindia Belanda dan beralih pada Dai Nippon. Pada salah satu sudut ruangan depan diletakkan prasasti atau batu peringatan pendudukan Jepang di Eretan, Indramayu. Pada sejumlah papan peraga juga digambarkan akan jatuhnya pangkalan Kalijati yang dimulai dari peta pendudukan Jepang di tiga lokasi, selain itu juga terdapat foto tentang perundingan, situasi menjelang perundingan, dan situasi pesawat yang ada baik yang rusak akibat terkena bom maupun yang berhasil direbut Jepang.

Keadaan situasi bangunan tetap dipertahankan sebagaimana dahulu. Kursi-kursi yang digunakan saat perundingan tetap menjadi koleksi museum ini. Selain itu, di salah satu hanggar terdapat koleksi pesawat rampasan sebanyak 11 unit, yang terbagi atas tujuh pesawat, yaitu BT-13, Harvard, Piper, Grumman Goose, Cessna 180, Cessna 207, dan Lockheed L 12. Salah satu jenis pesawat ditempatkan di Gedung Juang 45. ('Pikiran Rakyat', 9 Maret 1998).

Pada saat ini, Gedung Sejarah Kalijati berfungsi sebagai museum dan banyak dikunjungi, terutama oleh para pemerhati sejarah dan orang-orang asing yang pernah menetap di Kalijati untuk bernostalgia, seperti orang Jepang dan Belanda.

2. Monumen Perjuangan 45 Ciseupan

Monumen perjuangan 45 Ciseupan berada di Kampung Ciseupan Desa Cibuluh Kecamatan Cislak Kabupaten Subang. Monumen ini dibangun pada tanggal 10 Nopember 1975 yang terletak sekitar 30 km sebelah tenggara kota Subang. Komplek monumen berbentuk segi lima dengan ukuran 14 m, 12 m, 40 m, 35 m, dan 35 m. Bangunan kerucut dengan ukuran dasar 8,61 m X 8, 30 m dan ukuran puncaknya

5,15 m X 5,55 m. Pada bagian atasnya berdiri sebuah patung seorang pemimpin pasukan perjuangan, yaitu Mayor Darsono. Tokoh ini digambarkan sedang memberikan aba-aba di medan pertempuran dengan pakaian lengkap dan mengacungkan pistol serta di sebelah patung itu terdapat patung harimau yang siap menerkam mangsanya.

Pada pintu masuk Monumen perjuangan 45 Ciseupan dibangun sebuah gerbang yang menggambarkan peristiwa pertempuran. Di sebelahnya tertera tiga buah prasasti yang menyatakan data hasil pertempuran, ucapan terima kasih Panglima Kodam Siliwangi kepada rakyat yang membantu perjuangan kemerdekaan dan ucapan terima kasih generasi muda kepada para pahlawan yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan.

Monumen perjuangan 45 Ciseupan dibangun untuk mengenang peristiwa pertempuran sengit yang terjadi di daerah Ciseupan pada tanggal 4 Februari 1949 antara pasukan TNI Siliwangi dengan serdadu Belanda dan gerombolan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo. Dalam pertempuran ini kemenangan berada di pihak TNI Siliwangi.

Peristiwa bermula dari Agresi Militer Belanda pertama pada bulan Juli 1947. Pada saat itu, serdadu Belanda dapat menduduki Subang, walau tidak secara utuh, karena masih ada daerah yang dapat digunakan sebagai markas para pejuang dan mereka mengadakan perang gerilya. Sedangkan Aksi Militer Belanda kedua dimulai dengan erangan atas kota Yogyakarta, ibukota Republik Indonesia saat itu, pada tanggal 19 Desember 1948 yang mengakibatkan pasukan TNI dari Jawa Barat yang berada di bawah Panji Divisi Siliwangi harus kembali ke tempat asal mereka (long march). Dalam rangka long march Batalyon Engkong Darsono, Batalyon Lukas, dan Batalyon Soepardjo kembali lewat Subang. Dalam perjalanan pulang mereka mendapat banyak gangguan dan serangan baik dari serdadu Belanda maupun dari gerombolan DI/TII Kartosuwiryo. Walaupun demikian, mereka tetap tegar menghadapi musuh yang mengganggu. Karena lelah, maka pasukan Divisi Siliwangi dari Batalyon 3001 Kian Santang pimpinan Mayor Engkong Darsono beristirahat dan bermalam di Ciseupan. Hal ini diketahui oleh serdadu Belanda lewat mata-mata mereka. Serdadu Belanda segera mengepung dan menyerang tempat bermalam

Tabel 12 Beberapa Bangunan-bangunan Bersejarah di Kabupaten Subang

No.	Nama Monumen/Bangunan	Keterangan
1.	Patung Tuang PW Hopland	Pemilik tanah Perkebunan Tuan tanah P & W Lands Pamanoean & Tjiasem Lands.
2.	Bangunan Kantor Besar	P & W Lands
3.	Monumen Perjuangan	Ciseupan
4.	Gedung Insinyur (gedung percetakan)	Tahun 1945-1947 dijadikan Markas Pasukan Tarate/Pasukan Berani Mati.
5.	Gedung Employe Perkebunan Sumur Barang	Dipakai tempat rapat konsolidasi pertama oleh Residen P & W Lands Jakarta.
6.	Rumah bersejarah di Desa Sumur Barang	Dipakai peristirahatan pertama ketika Residen Jakarta dalam pengungsian.
7.	Gedung Societit sekarang Wisma Karya	Tahun 1945-1947 dijadikan Markas Kartibo.
8.	Gedung Gede	Pada Masa Agresi I dijadikan Markas BKR/TKR/TRI/TNI.
9.	Gedung Tuan Tanah	Tahun 1945-1947 dijadikan Markas Badan Perjuangan Hisbullah.
10.	Gedung Jeding	Tahun 1945-1947 dipakai Markas Badan Perjuangan API/ Pesindo.
11.	Gedung Cipo	Tahun 1945-1947 dipakai Markas Badan Perjuangan Kebaktian Rakyat Sulawesi /KRIS.
12.	Gedung Pasanggrahan ²⁾	Tahun 1945-1947 dipakai sebagai Markas Pasukan Istimewa/PI. Sekarang Mes TNI-AD.

² Gedung Pasanggrahan sebelah timur tahun 1945—1947 dipakai sebagai Markas Pasukan Istimewa. Akan tetapi, sekarang di pakai Mes TNI AD. Sementara Gedung Pasanggrahan sebelah barat tahun yang sama dipakai sebagai Markas BP3, sekarang Mes TNI AD.

pasukan Batalyon 3001 Kian Santang. Terjadilah pertempuran sengit secara tiba-tiba, namun prajurit-prajurit Siliwangi pantang menyerah bahkan bersiap siaga dengan gagah berani melawan serangan musuh. Akibatnya, serdadu Belanda merasa terdesak, maka mereka segera mundur untuk menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini pihak Belanda lebih banyak jatuh korban dan kemenangan ada dipihak pasukan Siliwangi.

Berhubung waktu yang tersedia sangat terbatas maka tidak semua bangunan bersejarah dapat dicatat dan difoto gambarnya secara detail dan rinci. Meskipun demikian, bangunan-bangunan bersejarah yang terdapat di Kabupaten Subang berhasil diinventarisir seperti pada tabel 12 di atas.

E. Peristiwa Sejarah

1. Peristiwa Kalijati

Pada abad 19 akhir, Jepang mulai melancarkan ekspansinya. Ekspansi-ekspansi Jepang di antaranya berkat kemenangan Jepang atas China dalam perang antara keduanya di tahun 1895. Ekspansi berikutnya adalah dalam perang Rusia dengan Jepang di tahun 1905, dalam peperangan ini kemenangan masih di tangan Jepang. Kemudian tahun 1940 Jepang mulai mencari sasaran berikutnya di negara-negara tetangganya yaitu di sebelah barat dan utara Jepang. Dengan adanya ekspansi Jepang tersebut, pada bulan Mei 1940 sampai 5 Desember 1941 pemerintah Hindia Belanda selalu waspada dan khawatir akan kemungkinan serbuan Jepang. Bahkan bagi negara-negara Jerman, Jepang dianggap sebagai musuh berbahaya. Anehnya dengan beberapa ekspansi tersebut, lama-kelamaan Jepang muncul sebagai kekuatan besar di Asia Timur, dan mulai abad ke-20 Jepang mulai masuk ke Indonesia, baik sebagai penetap maupun pencari nafkah. Tidak sedikit orang-orang Jepang yang menjadi pedagang.

Setelah Jepang mengalami beberapa kemenangan atas ekspansinya, Jepang melanjutkan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kedatangan Jepang ke Jawa Barat diawali dengan datangnya pasukan Jepang yang dipimpin Vice Admiral Takahashi dan mendarat di Teluk Banten Merak pada tanggal 1 Maret 1942. Dalam pendaratan tersebut menyertai kedatangan Vice Ad-

miral adalah Letjend Imamura. Sedangkan pendaratan kedua terjadi di Pantai Eretan Wetan yang dipimpin Kolonel Shoji dan didukung satuan angkatan udara. Kedatangan Kolonel Shoji tersebut bertujuan untuk menyerang pangkalan udara Kalijati yang menjadi basis pertahanan udara terbesar Belanda. Pendaratan lain di Pulau Jawa diarahkan di Kranggan Jawa Tengah.

Ketika bala tentara Jepang mendarat di Eretan Wetan, di pantai utara Jawa Barat Indramayu, salah satu bala tentara Jepang yang berada di Eretan menelepon komandan Pangkalan Udara Kalijati guna memberitahukan bahwa rombongan tentara Jepang telah tiba. Kedatangan tentara Jepang di Eretan tersebut dipimpin Kolonel Shoji dan diangkut dengan 7 kapal angkut, serta dikawal oleh 3 kapal pemburu torpedo yang merupakan bagian dari kekuatan ke-16 angkatan darat Jepang untuk menduduki Jawa Barat. Kesatuan tentara Jepang ini telah terkonsentrasi di Teluk Cans Ranh di daerah Vietnam. Rencananya kesatuan tentara Jepang ini akan menyerbu ke Jawa Barat dengan sasaran yang terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu:

1. Kesatuan Kolonel Shoji yang akan mendarat di Pantai Eretan dan segera menuju Subang untuk merebut Kalijati, kemudian ke arah Karawang merebut jembatan Jembatan Kali Citarum untuk menuju Jakarta.
2. Divisi kedua di bawah pimpinan Mayor Jenderal Maruyama mendarat di Teluk Banten dekat Merak. Sebagian dari kekuatan ini menuju Bogor untuk memotong hubungan Jakarta-Bogor-Bandung, sedangkan sebagian menuju Jakarta.
3. Segera setelah Jakarta diduduki, markas tentara ke-16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Imamura akan berkedudukan di Jakarta dan satuan Shoji akan menyerang Bandung (*Pikiran Rakyat*, 8 Maret 1996)

Berita telepon yang dikirimkan dari Eretan akhirnya diterima oleh bintang piket Sersan Stapel. Kemudian perwira piket Letnan dua Servas segera menyampaikan berita ini kepada semua satuan yang berada di pangkalan udara Kalijati.

Gempuran yang melanda Kalijati dilakukan oleh 3000 anggota pasukan yang terbagi ke dalam dua batalyon infanteri yang dipimpin Mayor Egashira dan Mayor Wakamutsu. Serangan yang dilakukan secara tiba-tiba ini sempat memporak-porandakan pertahanan Belanda. Pasukan Belanda pun kalang kabut dan bergerak mundur ke Bandung. Pangkalan Kalijati akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Turut dikuasai 24 pesawat pembom milik TNI AU Inggris yang berisi pembekalan dan bom. Setelah jatuhnya Subang dan Kalijati ke tangan Jepang, Kolonel Shoji menjadikan P dan T Lands atau Pamanukan dan Tjiasem, yaitu suatu perkebunan besar milik Belanda sebagai markas.

Dengan kekalahan Belanda ini, maka Belanda berusaha merebut kembali daerah-daerah yang ditempati Jepang melalui jalur Purwakarta-Subang, tapi usaha tersebut tidak berhasil malah dikejar balik ke arah Lembang. Pukulan mundur ini untuk mematahkan posisi Kalijati.

Setelah tentara Jepang berhasil menguasai wilayah Jawa Barat tanggal 5 Maret 1942, dengan cepat tentara Jepang menduduki beberapa kota-kota besar. Pertama kota-kota yang diduduki adalah Merak, terus menuju ke Bogor. Begitu pula tentara Jepang yang mendarat ke Banten langsung menuju Jakarta. Kedatangan tentara Jepang ke Jakarta tidak disambut dengan perlawanan oleh tentara Belanda, bahkan Belanda justru menghancurkan peralatan perang dan bahan bakar. Belanda pun membakar tangki bahan-bakar yang berada di Tanjung Priok.

Kedatangan tentara Jepang ke Jakarta ini sempat dielu-elukan oleh masyarakat Jakarta dengan meneriakkan “Dai Nippon Banzai”, atau “Hidup Mati Daipon”. Jepang pun membalas sambutan masyarakat Jakarta sambil melambaikan tangannya. Di atas kendaraan Jepang dikibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera matahari terbit. Jepang juga memasang spanduk dengan tulisan “Nippon Jepang sama-sama dan Nippon Indonesia sedarah daging dan hidup Asia Raya”.

Ketika Jepang sudah menguasai Pulau Jawa, Belanda mulai melakukan beberapa perundingan. Pihak Belanda yang hadir di antaranya Jenderal Ter Poorten, Gubernur Jenderal Tjarda, Mayor Bakkers, dan Gubernur Jawa Barat Hogewind mengadakan pertemuan kilat di rumah kediaman Residen Bandung (Tacoma).

Dalam perundingan tersebut akhirnya diputuskan bahwa Kota Bandung akan dinyatakan sebagai Kota Terbuka. Keputusan ini dimaksudkan agar di Kota Bandung tidak terjadi peperangan. Pihak Jepang dipersilakan untuk datang ke Bandung kapan saja. Jenderal Pesman mendapat tugas untuk mengadakan bimbingan dengan pihak Belanda. Pesman yang waktu itu menginap di Vila Isola Bandung (sekarang Kampus IKIP/UPI Bandung) mengutus Kapten Gerharz untuk mencari markas tentara Jepang. Setelah pencarian dilakukan akhirnya ditemukan seorang Jepang bernama Yamashita. Ia menghampiri Gerharz. Dari pertemuan tersebut kemudian kapten Belanda ini dapat menghadap pimpinan pihak Jepang, yaitu Kolonel Shoji. Antara pihak Belanda dan Jepang akhirnya terjadi perundingan. Panglima tertinggi Jenderal Hitoshi Immamura yang berkedudukan di Subang diberitahu oleh Kolonel Shoji tentang maksud Belanda. Immamura pun kemudian menjawab, bahwa seandainya pihak Belanda punya niat untuk berunding dengan Jepang maka mereka harus menghadap ke Subang, dan seandainya Belanda tidak mau datang ke Subang maka Jepang akan menghancurkan Kota Bandung.

Keesokan harinya Yamashita menemui Pesman di Vila Isola Bandung. Yamashita mengutarakan keinginan atasannya. Mula-mula Belanda menolak permintaan Immamura, bahkan Tjarda pun sangat naik pitam. Namun akhirnya permintaan Jepang pun dipenuhi. Tanggal 8 Maret sekitar pukul 10.30 rombongan pembesar Belanda mulai meninggalkan Bandung menuju Kalijati (Subang). Pengawalnya adalah Yamashita yang mengendarai mobil paling depan. Di belakangnya diikuti oleh 2 buah mobil yang membawa Tjarda, Ter Poorten, Bakkers, Pesman, Gesharz, Kiveron, Idenburg serta beberapa orang stafnya. Rombongan ini sampai di Kalijati pukul 13.00. Ketika rombongan Jenderal Immamura tiba di Lapangan Terbang Kalijati, Tjarda bersama Ter Poorten beserta kawan-kawannya beristirahat di suatu ruangan. Saat itulah ia mendengar pidato dari Jenderal Edo. Dalam pidatonya ia menegaskan bahwa pihak Belanda harus menaati perintah Immamura, sebab kalau tidak Bandung akan dihancurkan. Orang-orang Belanda seperti Tjarda maupun Ter Poorten yang sejak dari Bandung sudah berdiam diri, mendengar pidato itu menjadi lebih terdiam lagi.

Setelah satu setengah jam setibanya Immamura, rombongan Belanda dipersilakan masuk ke dalam ruangan yang telah dipilih sebagai tempat perundingan. Kira-kira pukul 17.30, perwakilan Jepang dan Belanda sudah berada di ruang perundingan. Ruangan itu merupakan bekas ruang makan dari rumah tinggal seorang komandan angkatan udara Belanda. Oleh karena tempat duduk hanya ada untuk 6 orang, maka banyak hadirin yang tidak mendapat tempat duduk. Akhirnya mereka menghadiri perundingan tersebut sambil berdiri. Pukul 18.00 Jenderal Immamura memasuki ruangan dengan diapit Jenderal Edo dan Okazaki. Panglima Tertinggi Jepang ini duduk tepat berhadapan dengan Tjarda, sedangkan Ter Poorten duduk bersebelahan dengan Tjarda. Ketika perundingan akan dimulai, Miyoshi dan Nakayama yang bertindak sebagai penerjemah sudah siap di belakang Immamura. Setelah membereskan segala perlengkapannya maka Immamura secara resmi memulai membuka perundingan pada pukul 18.00 lebih. Immamura pun langsung menanyakan kepada Tjarda, “Apakah tuan datang ke mari sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, serta mewakili seluruh angkatan perang, pemerintah, dan rakyat?”

Tjarda pun menjawab, “Ya!”. Kemudian Immamura kembali bertanya, “Jika benar demikian, apakah tuan sanggup membicarakannya di sini tentang penyerahan atau meneruskan peperangan lagi?”

Atas pertanyaan ini, penterjemah dari pihak Belanda tidak kuasa berucap. Ia tampak gugup dan kebingungan. Pasalnya, mereka tidak sampai hati untuk menerjemahkan pernyataan Immamura tersebut. Akhirnya, penterjemah pihak Belanda mengundurkan diri, dan tugasnya diambilalih oleh Miyoshi dan Nakayama (Pikiran Rakyat, 18 Mei 1995)

Perundingan Kalijati yang dilaksanakan pada 8 Maret 1942, akhirnya berakhir dengan penyerahan Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Dengan penyerahan Belanda kepada Jepang tersebut, menandakan berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Naskah perundingan Kalijati ditandatangani langsung oleh Tjarda Van

Starkenborg Stachouwer, Gubernur Hindia Belanda sebagai wakil dari pihak Belanda dan diserahkan kepada Panglima Tentara Jepang, Jenderal Hitashi Imamura.

Perundingan antara pihak Belanda dan Jepang di atas memakan waktu 2 hari. Hari pertama tanggal 8 Maret, perundingan dibuka dengan sebuah pertanyaan dari pihak Jepang yang mengejutkan Belanda. Ketika Imamura menanyakan kepada Tjarda apakah perundingan ini akan membahas soal penyerahan atau melanjutkan peperangan. Ketika pertanyaan tersebut diterjemahkan Tjarda merasa tercengang. Tjarda pun menjawab, tidak bisa. Dengan cepat Imamura pun bertanya, apa sebab. Tjarda menjawab bahwa haknya menjadi gubernur sudah dicabut oleh Ratu Wilhelmina. Oleh karena jawaban Tjarda tidak memuaskan, maka Imamura kembali menanyakannya kepada Ter Poorten, tetapi Terpoorten pun menjawab bahwa ia juga tidak mempunyai hak. Begitulah tanya jawab antara Belanda dan Jepang terus berkelanjutan. Akhirnya Imamura mendesak Tjarda bahwa Belanda harus menyerah saja, sebab segala pertanyaan yang diajukan dalam perundingan tersebut hasilnya selalu tidak memuaskan. Ternyata pernyataan untuk menyerah juga masih dijawab dengan tidak bisa. Akhirnya Imamura mulai kesal karena harus mengulang-ulang pertanyaan. Tjarda menjelaskan bahwa sebenarnya yang menyatakan untuk menyerah adalah Ratu Wilhelmina, sedangkan untuk menghubungi beliau sangatlah mustahil. Oleh karena tidak adanya jawaban yang memuaskan dari kedua pimpinan Belanda tersebut, maka Imamura berkata, "Sekarang kita berada di tengah peperangan, perundingan ini bukan tempat untuk membicarakan soal diplomatik, kita berada di sini hanyalah untuk membicarakan soal menyerah atau meneruskan peperangan" ('*Pikiran Rakyat*', 23 Mei 1995).

Akhirnya kedua pucuk pimpinan Belanda di atas mengambil jawaban bahwa daripada Kota Bandung dihancurkan, lebih baik diserahkan kepada Jepang. Usulan ini diterima Jepang. Meskipun demikian, Imamura kembali menanyakan bahwa bukankah lebih baik Belanda menyerah. Jawaban Tjarda masih seputar, "Kami tidak

punya hak”. Immamura kembali mengeluarkan pernyataan, bahwa lebih baik Terpoorten menyerah. Terpoorten dan kawan-kawannya semakin kalang kabut. Immamura pun kembali mengatakan, “Tuan-tuan harus mengetahui, bahwa pertempuran ini bukan cuma mengurus Kota Bandung. Tujuan kami adalah ingin menghancurkan semua bala tentara Hindia Belanda secepatnya. Dan apabila tuan-tuan sudah menyerah kepada kami, maka penyerahan Kota Bandung pun kami terima. Tetapi kalau tuan-tuan hanya bermaksud menyerahkan kota Bandung, tetapi di daerah-daerah masih terjadi peperangan sudah pasti usul tuan kami tolak”.

Dengan adanya beberapa pertanyaan dari pihak Jepang yang nadanya menekan Belanda, yang intinya agar Belanda cepat-cepat menyerah, tampak orang-orang Belanda menjadi tersudutkan. Pada saat orang-orang Belanda seperti Terpoorten dan lain-lain sudah tampak lelah, Immamura kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, yaitu masih seputar keinginan Jepang agar Belanda menyerah kepada mereka. Oleh karena Belanda pada dasarnya masih merasa keberatan, maka Jepang selaku tuan rumah atau orang yang mengundang untuk melakukan perundingan mengajukan 10 persyaratan, di antaranya berbunyi:” Pemerintah Hindia Belanda harus menyerah dan menghentikan permusuhan. Sebagai tanda menyerah harus mengibarkan bendera putih. Semua tentaranya harus meletakkan senjata dan berkumpul di tempat yang terbuka untuk menyerahkan diri. Dan barang siapa yang menemukan jenazah tentara Nippon berikut barangnya, agar secepatnya diserahkan.” Immamura pun menantikan jawaban dari Belanda. Perundingan akhirnya dilanjutkan pada keesokan harinya, pukul 15.00 (*Pikiran Rakyat*, 23 Mei 1995)

Pada keesokan harinya, tanggal 9 Maret siang hari, Panglima Tertinggi Hindia Belanda menemui Immamura di Kalijati. Pada saat itulah Ter Poorten telah melaporkan bahwa pihaknya akan mematuhi 10 syarat yang diminta Jepang dan telah memerintahkan tentaranya untuk menghentikan perang. Setelah segala sesuatunya dianggap beres, perundingan akhirnya ditutup oleh Immamura dan Ter Poorten beserta rombongan kembali ke Jakarta. Tanggal 10 Maret, Immamura mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan.

Bagi Jepang sebenarnya mempunyai komitmen atau sebuah pernyataan semboyan bahwa, “agi semua bangsa musuh yang berdomisili di negeri kita (Belanda, Amerika, Inggris, Australia) yang berusia antara 20 sampai 39 tahun harus menyerahkan diri. Hal ini juga berlaku bagi kekalahan Belanda terhadap Jepang dalam perundingan Kalijati. Nasib para pembesar Belanda, seperti Ter Poorten, Tjarda, Bakkers, Pesman, Gerharz, Kiveron, Idenburg, dan lain-lain, langsung ditangkap Jepang, dan mereka pun dijebloskan ke penjara.

Atas kemenangannya tersebut, Jepang akhirnya membuat pengumuman, bahwa masa kejayaan Belanda telah berakhir. Masa yang cukup panjang bagi Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun telah berakhir. Jepang merasa bahwa bangsa Indonesia harus berterima kasih kepadanya. Atas kemenangannya dalam perundingan Kalijati tersebut, Jepang pun melakukan pesta kemenangan selama 9 hari, dan pihak pemerintah mengeluarkan pernyataan yang isinya:

“Menyamboet hari harinja genap setahoen kedjadian itoe dan oentoek memperingati oesaha maharadja yang pateot ditjatat dengan tinta emas di dalam sedjarah, karena tanah Djawa moelai waktue termasoek poela ke dalam lingkoengan kemakmoeran bersama sebagai anggauta, maka moelai tanggal 1 Maret oentoek 9 hari lamanja, ditetapkan sebagai “Perajaan Djawa Baroe” oleh Goenseikanboe....” (Pikiran Rakjat, 20 Maret 1996).

Sejak dikeluarkan aturan tersebut dari tanggal 1 sampai 9 Maret 1943, bendera Matahari harus tetap berkibar. Jepang pun mengingatkan agar bangsa Indonesia berterima kasih kepada pihaknya yang telah membebaskan penderitaan mereka dari penjajahan Belanda.

Kemenangan Jepang atas peristiwa Kalijati tersebut, menjadikan bangunan Kalijati yang pernah dijadikan tempat perundingan antara Jepang dan Belanda menyimpan sejuta kenangan sejarah. Sekarang bangunan tersebut dijadikan benda peninggalan sejarah yang dilindungi undang-undang. Bagian atap gedung yang dibuat pada tahun 1917 tersebut terbuat dari sirap, lalu langit-langit, pintu, jendela, wastafel, bahkan lantai tetap dipertahankan seperti aslinya tanpa

perubahan. Pada bagian terasnya juga terdapat tiang prasasti yang bertuliskan aksara Jepang pada dua sisinya. Prasasti itu menandai akan runtuhnya Pemerintahan Hindia Belanda dan beralih pada Dai Nippon. Sedangkan batu peringatan pendudukan Jepang di Eretan diletakkan di salah satu sudut ruangan terdepan. Pada sejumlah papan peraga juga digambarkan akan jatuhnya pangkalan Kalijati yang dimulai dari peta pendudukan Jepang di tiga lokasi, selain itu juga terdapat foto tentang perundingan, situasi menjelang perundingan, dan situasi pesawat yang ada baik yang rusak akibat terkena bom maupun yang berhasil direbut Jepang.

Sampai sekarang seluruh bagian gedung tetap dipertahankan, termasuk kursi-kursi yang digunakan saat perundingan, adapun koleksi pesawat rampasan di salah satu hanggar terdiri atas 11 unit, terbagi dalam tujuh pesawat, yaitu BT-13, Harvard, Piper, Grumman Goose, Cessna 180, Cessna 207, dan Lockheed L 12. Salah satu jenis pesawat ditempatkan di Gedung Juang 45. (Pikiran Rakyat, 9 Maret 1998).

2. Masa Revolusi Fisik

a. Sambutan Masyarakat Subang terhadap Kemerdekaan RI

Berita kekalahan Jepang dengan tidak bersyarat terhadap Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, selalu ditutup-tutupi oleh pemerintah pendudukan militer Jepang di Indonesia. Akan tetapi, berita tersebut ternyata bocor juga dan didengar oleh para pemuda yang bergerak di bawah tanah melalui siaran berita radio luar negeri, yang didengar secara sembunyi-sembunyi (Edi S. Ekadjati, 1979/1980: 85).

Berita kekalahan Jepang tersebut, menyebar dari mulut ke mulut di berbagai lapisan masyarakat, dan sudah barang tentu berita tersebut mendapat sambutan hangat dari mereka, terutama golongan pemuda. Reaksi pertama yang dilakukan oleh para pemuda terutama dari golongan radikal dengan melakukan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi Universitas Indonesia, Jalan Pegangsaan Timur Jakarta. Hasil keputusan rapat yang dihadiri antara lain oleh Chairul Saleh, Djohan Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, dan Armansyah adalah adanya tuntutan agar kemerdekaan

RI dilaksanakan secepatnya oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia, tidak perlu menunggu rapat PPKI yang dianggap buatan Jepang (Marwati Djoened Peospongoro, VI, 1990: 80).

Pada tanggal 15 Agustus 1945 malam, di bawah pimpinan Sukarni, Adam Malik, dan Wikana para pemuda tersebut menyampaikan berita tentang kekalahan Jepang kepada Sekutu dan hasil keputusan rapat kepada Soekarno. Mereka menuntut agar Soekarno segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dengan alasan Jepang sudah menyerah dan tentara Sekutu yang akan menerima penyerahan wilayah Indonesia dari tangan Jepang belum datang.

Soekarno menolak permohonan para pemuda tersebut, karena ia akan meminta penjelasan mengenai masalah tersebut kepada pemerintahan pendudukan Jepang dan esok hari yaitu tanggal 16 Agustus 1945 akan diadakan rapat PPKI untuk membahas perkembangan yang terjadi saat itu. Apabila proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan, Soekarno khawatir akan menimbulkan korban di kalangan rakyat, karena tentara Jepang yang masih memiliki persenjataan yang lengkap tidak akan begitu saja membiarkan adanya pernyataan kemerdekaan Indonesia (Mr. Ahmad Soebardjo, 1978 : 80-82).

Akan tetapi, para pemuda menolak alasan yang disampaikan oleh Soekarno dengan alasan apabila melalui sidang PPKI, maka kemerdekaan RI dapat dianggap sebagai pemberian Jepang. Soekarno tetap pada pendiriannya dan tidak mau melaksanakan tuntutan dan desakan para pemuda tersebut.

Dengan adanya konflik antara para pemuda dengan tokoh pemimpin bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta mengenai pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan RI, maka timbullah apa yang dinamakan Peristiwa Rengasdengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan pemuda di bawah pimpinan Sukarni menculik Soekarno dan Hatta. Kedua pemimpin bangsa tersebut dibawa ke daerah Rengasdengklok, dengan tujuan memaksanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tanpa bantuan pihak Jepang (Marwati Djoened Poespongoro, VI, 1990 : 80-81).

Di tempat yang baru ini, para pemuda tetap pada pendiriannya dan memaksa Soekarno-Hatta untuk tetap melaksanakan proklamasi saat itu juga dengan tidak melalui sidang PPKI. Akhirnya Soekarno-Hatta menyerah pada keinginan para pemuda. Setelah dicapai kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang pelaksanaan proklamasi, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, kurang lebih pukul 10.00 WIB dengan mengambil tempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Bung Karno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia (Adam Malik, 1975, : 40-70).

Sebagai ungkapan langsung dan tanggung jawab terhadap proklamasi kemerdekaan RI, masyarakat Indonesia terutama golongan pemuda di Jakarta berusaha menyiarkan berita proklamasi melalui Jakarta Hosoo Kyoku (Radio Jakarta) agar terdengar ke berbagai pelosok Nusantara. Akan tetapi, karena pemancar tersebut tidak memiliki pemancar yang berkekuatan tinggi, maka berita tersebut hanya terdengar di sekitar Jakarta saja (Tim Fakultas Sastra Unpad, 1978-1979, : 85).

Pada saat itu, pemancar yang berkekuatan tinggi hanya ada di Bandung Hosoo Kyoku (Radio Bandung), maka para pemuda Radio Jakarta memohon bantuan pengiriman microfon untuk digunakan sebagai alat pemancar yang berkekuatan tinggi. Para pemuda Radio Bandung yang telah mengetahui proklamasi tersebut, kemudian bekerja sama dengan pemuda PTT mengambil alih pemancar di Palasari dan menyiarkan berita proklamasi melalui Stasiun Radio Tegallaga. Penyiaran berita proklamasi tersebut disampaikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, diselingi dengan instrumental lagu Indonesia Raya (Tim Fakultas Sastra Unpad, 1978-1979 : 87).

Sementara itu, pegawai Kantor Berita Domei pun menerima berita proklamasi dari karyawan Kantor Berita Domei. Atas inisiatif karyawan Kantor Berita Domei, antara lain Muhamad Adam, A.Z. Palindih, Lalu Danila, dan Matullesy menyalin teks berita proklamasi tersebut dan menempelkannya pada papan pengumuman di depan kantor di Jalan Ir. H. Juanda (Edi S. Ekadjati, 1980/1981 : 86).

Melalui berita radio, penempelan teks proklamasi pada papan pengumuman dan tembok bangunan, serta dari mulut ke mulut, berita

proklamasi segera diketahui oleh masyarakat baik di Kota Bandung maupun di daerah-daerah luar Kota Bandung.

Demikian pula di daerah Subang, berita proklamasi didengar melalui siaran radio dan dari masyarakat yang baru datang dari luar kota. Setelah merasa yakin akan kebenaran berita tersebut, Bupati Subang segera mengumumkan kepada masyarakat untuk melakukan pengibaran bendera merah putih.

Sebagai ungkapan rasa kebahagiaan, masyarakat Subang segera membuat bendera merah putih dari kain, kertas, seng, dan lain-lain untuk dikibar-kibarkan sambil tidak lupa meneriakkan kalimat “merdeka, merdeka, merdeka” berulang kali atau pada saat berpapasan dengan rombongan lain.

b. Pembentukan KNID dan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Setelah teks proklamasi RI berhasil dikumandangkan ke seluruh pelosok tanah air, keesokan harinya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pembentukan alat perlengkapan pemerintahan sipil.

Selain mengesahkan Undang-undang Dasar 1945, sidang PPKI mengangkat Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) untuk membantu presiden (A.H. Nasution, 1991, : 224-225). Bahkan pada sidang tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembentukan KNI Daerah, dengan susunan pengurus yaitu seorang ketua dan beberapa orang anggota pengurus.

Pembentukan KNID daerah Jawa Barat, dimulai pada tingkat Karesidenan yaitu Karesidenan Priangan. Pembentukan KNID Priangan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 1945, dipimpin oleh R. Adil Puradiredja. Pada saat itu yang terpilih sebagai anggota KNID Priangan sebanyak 23 orang, termasuk di dalamnya 3 orang wakil peranakan Arab, Indo, dan Cina. Setelah KNID Priangan terbentuk, maka secara berturut-turut dibentuk KNID Karesidenan Bogor pada tanggal 27 Agustus 1945, di bawah pimpinan R.S. Suriadiraja; KNID Karesidenan Cirebon di bawah pimpinan Dr. Sudarsono; dan KNID Karesidenan Banten (Edi S. Ekadjati, 1991:

361-368). Pembentukan KNID di daerah Jawa Barat tidak saja dilakukan di tingkat karesidenan, tetapi dilakukan pula di tingkat kabupaten, kotapraja, kawedanaan, dan kecamatan. Selanjutnya dengan ketetapan UU No 1 tahun 1945 tanggal 23 Nopember 1945, KNID ditetapkan sebagai Badan Perwakilan Daerah yang dipimpin oleh kepala daerah menjalankan pekerjaan rumah tangga daerah. Adapun tugas KNID ialah:

1. Menyatakan kehendak rakyat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.
2. Mempersatukan berbagai lapisan masyarakat Indonesia sehingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
3. Membantu keselamatan dan ketentraman rakyat.
4. Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan kesejahteraan umum (Pemda TK. II Kabupaten Bandung, 1974 : 202).

Seiring dengan semakin meningkatnya semangat menyambut kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan, golongan pemuda revolusioner di bawah pimpinan Adam Malik memperjuangkan agar segera dibentuk suatu komite nasional tentara rakyat, dan mempersiapkan langkah-langkah untuk merebut kekuasaan secara serentak. Dengan adanya desakan dari masyarakat terutama golongan pemuda, Presiden Soekarno menyetujui pembentukan tentara rakyat, walaupun menggunakan nama dan susunan yang berlainan sebagaimana yang diinginkan oleh para pemuda. Adapun nama yang digunakan ialah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Penggunaan nama tersebut didasarkan pada maksud pemerintah RI yang bertujuan tidak membentuk suatu organisasi ketentaraan, melainkan badan untuk menampung para pemuda yang telah mendapatkan pendidikan semi militer, baik pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang.

Demikianlah pada tanggal 23 Agustus 1945 pukul 21.00, Presiden Soekarno melalui siaran RRI Pusat Jakarta secara resmi mengumumkan agar di daerah-daerah segera dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selain itu, diterangkan pula bahwa anggota BKR terdiri atas bekas para prajurit PETA, Heiho, prajurit

pelaut, dan pemuda lainnya yang mempunyai keinginan untuk membangun dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban (A.H. Nasution, 1966 : 58).

Keputusan PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat dan bukan tentara, dimaksudkan agar tidak menimbulkan permusuhan dari kekuatan-kekuatan asing yang ada, antara lain Jepang dan Sekutu. Selain itu, pemberian nama untuk memberi citra kepada pihak luar/asing bahwa bangsa Indonesia yang baru diproklamasikan ikut mendambakan hidup damai sesuai dengan suasana keinginan dunia pada saat itu (G.P.H. Djatikusumo, Jakarta, 1983 : 26).

Dalam waktu singkat pidato Presiden dan keputusan PPKI mendapat sambutan dari seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali rakyat Jawa Barat. Dua hari setelah pidato Presiden Soekarno tersebut, para bekas Cudanco PETA dan para pemimpin Heiho yang ada di Kota Bandung berkumpul di Balai Prajurit. Rapat tersebut berhasil membagi tugas pekerjaan dalam rangka menyusun Badan Keamanan Rakyat di Jawa Barat. Adapun untuk menyusun BKR di daerah Banten ditetapkan Suriaatmadja, daerah Jakarta ditunjuk Kasman Singodimedjo, daerah Priangan Satalaksana dan Aruji Kartasmita, daerah Bogor Gunawan, dan daerah Cirebon A. Gani (Edi S. Ekadjati, 1980/1981 : 95).

Setelah adanya pembagian tugas tersebut, maka bermunculanlah Badan Keamanan Rakyat di daerah-daerah Jawa Barat. Adapun susunan pengurus BKR karesidenan di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. BKR Kota Jakarta, dipimpin oleh Latief Hendraningrat, Mu'min, Priatna, S. Kunto, Daan Yahya, Taswin, Daan Mogot, Sutono, Kemal Idris, dan Sadikin.
2. BKR Karesidenan Jakarta, dipimpin oleh Sumarna, Aryana, Akhyar Arief, Halim, Marwoto, dan Amir.
3. BKR Karesidenan Banten, dipimpin oleh Kyai H. Syam'un, K.H. Akhmad Khotib, E. Taryana, Jaya Rukmana, A. Kosasih, dan Dule Abdullah.

4. BKR Karesidenan Bogor, dipimpin oleh Gatot Mangkupraja, Eddi Sukardi, Basuni, D. Kosasih, dan Husein.
5. BKR Karesidenan Priangan, dipimpin oleh Aruji kartasasmita, Abdullah, Suridarma, Sukanda Bratamanggala, Hidayat, Omon Abdurachman, Syamsu, dan Suhari.
6. BKR Karesidenan Cirebon, dipimpin oleh Asikin, Sumarno, Rukman, Effendi, dan Syafei (Sejarah Militer Kodam VI Siliwangi, 1968 : 27).

BKR bersama-sama dengan KNID menjelma menjadi badan perjuangan dan merupakan organisasi rakyat yang bertindak selaku pendorong dan pelopor revolusi bersama-sama dengan badan-badan kelasykaran menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan sebagai konsekuensi dari Proklamasi 17 Agustus 1945 (Dinas Sejarah TNI-AD, Bandung, 1982 : 7).

Penggalangan kekuatan perjuangan bersenjata di daerah Subang dilakukan oleh bekas prajurit PETA dan Heiho yang berasal dari daerah Subang. Sementara itu, selain yang tergabung dalam BKR adapula para pemuda yang mendirikan organisasi-organisasi kelasykaran sesuai dengan organisasi politik yang mereka ikuti. Walaupun demikian, organisasi kelasykaran ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adapun organisasi kelasykaran yang dimaksud antara lain:

1. Hizbullah, bermarkas di Gedung Big Hause.
2. KRIS, bermarkas di Gedung Big Hause.
3. Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), bermarkas di Gedung Ciopo.
4. Barisan Banteng bermarkas di Gedung Cipo.
5. Pasukan Istimewa bermarkas di Gedung Big House.
6. Lasykar Buruh Indonesia, bermarkas di gedung yang sekarang dipakai Kantor Polisi Militer.
7. BP BPRI bermarkas di gedung yang sekarang menjadi Rumah Makan Sedap.

8. Pasukan Terate bermarkas di Gedung Insinyur (Tim Peneliti Penulisan Sejarah Kabupaten Subang, 1985 : 68).

Dibentuknya BKR dan Badan-badan perjuangan oleh rakyat Indonesia, menunjukkan telah timbul adanya rasa tanggung jawab untuk turut serta mempertahankan kemerdekaan. Atas dasar itulah, mereka segera melakukan perebutan kekuasaan di kantor-kantor dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang berada di daerah masing-masing.

Perebutan kekuasaan oleh TNI dan para pemuda yang berada di Jakarta yang dipelopori oleh Komite van Aksi Menteng 31 Jakarta, kemudian diikuti oleh pemuda yang ada di daerah lain. Perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang, sering kali menimbulkan perselisihan bahkan insiden bersenjata antara pemuda dengan tentara Jepang. Hal itu, diakibatkan adanya kepentingan yang berbeda. Pihak pemuda menginginkan kantor-kantor yang ada di wilayahnya segera dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan sipil RI, sedangkan tentara Jepang harus taat kepada perintah Panglima Perang Sekutu untuk tetap mempertahankan status quo keadaan di Indonesia (Marwati Joened Poesponegoro, 1990 : 101-103)

Gerakan masyarakat dan badan-badan perjuangan di daerah Subang dalam melakukan perebutan kekuasaan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang, pada umumnya hampir sama dengan daerah lain. Akan tetapi, perebutan kekuasaan dan pelucutan senjata di daerah Subang pada umumnya berjalan lancar tidak mengalami halangan yang berarti. Tentara Jepang (Kempetai) yang bertugas di daerah Subang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka tidak berani membendung atau merintangi pergerakan BKR dan masyarakat untuk menguasai daerah Subang.

c. Kedatangan Pasukan Belanda ke Kota Subang

Pada saat Badan Keamanan Rakyat dan para pemuda lainnya sedang melakukan aksi pengambilalihan kekuasaan dari Tangan Jepang, pada tanggal 8 September 1945 di Lapangan Terbang Kemayoran Jakarta, telah mendarat dengan parasut tujuh orang perwira Inggris di bawah pimpinan Mayor A.G. Greenlagh. Pasukan

ini merupakan misi sekutu (Allied Mission) pertama yang dikirim oleh Komando Asia Tenggara (South East Asia Command) di Singapura, dengan tujuan untuk mempelajari dan melaporkan keadaan di Indonesia menjelang pendaratan rombongan tentara sekutu (Sekretariat Negara RI, 1986 : 34).

Seminggu kemudian, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945, di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta, mendarat pasukan armada Sekutu, dalam hal ini diwakili oleh pasukan dari Inggris, yang terdiri atas kapal penjelajah Inggris Cumberland serta beberapa kapal lainnya yang mengangkut Detasemen Marinir di bawah pimpinan Laksamana W.R. Paterson, Wakil Panglima Sekutu untuk daerah Asia Tenggara.

Bersamaan dengan kedatangan pasukan Sekutu tersebut, turut pula membonceng tentara Belanda di bawah pimpinan Jenderal Van Straten, Kolonel Abdul Kadir, dan Dr. Van Der Plas wakil Dr. Van Mook, kepala Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dengan menggunakan kapal Tromp (Sejarah Militer KODAM VI Siliwangi, 1968 : 47).

Belanda yang datang ke Indonesia dengan jalan membonceng tentara Sekutu tersebut, ternyata ingin menguasai kembali wilayah bekas jajahannya. Kerjasama antara pihak Belanda dan Inggris, dilakukan melalui persetujuan yang dikenal dengan nama "*Civil Affairs Agreement*". Dalam Persetujuan *Civil Agreement* disebutkan, bahwa Panglima kedudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA di bawah tanggung jawab komando Inggris (Sekretariat Negara RI, 1986 : 34).

Pada tanggal 29 September 1945, pasukan tentara Sekutu/Inggris mendarat di Jakarta di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Cristison, Panglima Besar AFNEI (*Allied Forces Netherlands East Indies*). Adapun tugas tentara sekutu di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang.
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.

3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dikembalikan ke negerinya.
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil.
5. Menghimpun keterangan dan menuntut penjahat perang (Marwati Djoened Poesponegoro, et. al., VI, 1990 : 122)

Kedatangan tentara Sekutu di Indonesia, sesuai tugas yang diembannya pada mulanya mendapat sambutan dengan tangan terbuka. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa pendaratan pasukan sekutu diikuti pula oleh pasukan KNIL (*Koninklijk Nederlands Indische Leger*) dan orang-orang NICA yang dengan terang-terangan hendak menegakkan kembali kekuasaan pemerintah Belanda, maka sikap bangsa Indonesia berubah menjadi curiga dan memusuhinya.

Situasi keamanan dengan cepat merosot menjadi buruk sekali, apalagi setelah NICA mempersenjatai kembali orang-orang KNIL yang baru dilepaskan dari Tawanan Jepang. Orang-orang NICA dan KNIL yang ada di Jakarta, Bandung dan kota-kota besar lainnya berusaha memancing kerusuhan dengan cara mengadakan provokasi-provokasi bersenjata (Marwati Joened Poesponegoro, VI, 1990 : 122).

Letnan Jenderal Sir Philip Christison telah memperhitungkan bahwa usaha-usaha pasukan serikat tidak akan berhasil tanpa bantuan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Jenderal Christison berunding dengan pihak pemerintah Indonesia akan adanya pengakuan *de facto* terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Pengakuan ini ditambahkan dengan adanya penegasan, bahwa pasukan serikat tidak akan mencampuri persoalan yang menyangkut status ketatanegaraan Indonesia (Marwati Djoened Poesponegoro, VI, 1990, 122).

Namun kenyataannya adalah lain, di kota-kota yang didatangi oleh pasukan serikat sering terjadi insiden-insiden bahkan pertempuran-pertempuran dengan pihak Indonesia. Hal ini disebabkan, karena pasukan Serikat tidak mau menghormati kedaulatan RI, bahkan memberi kesempatan kepada Belanda untuk menguasai bekas wilayah kekuasaannya.

Kedatangan tentara Serikat/Inggris yang disertai pasukan Belanda, telah menimbulkan berbagai reaksi masyarakat di berbagai daerah yang didatanginya. Semangat juang rakyat Indonesia umumnya dan Jawa Barat khususnya, menjadi bangkit. Mereka berjuang demi mempertahankan kemerdekaan.

Melihat situasi dan didorong oleh keadaan yang tidak menentu serta adanya perasaan umum untuk menyelamatkan negara, maka pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia membentuk tentara berdasarkan maklumat pemerintah RI No. 6 tahun 1945.

Dengan keluarnya maklumat tersebut, maka secara diam-diam Badan Keamanan Rakyat yang telah dibentuk sebelumnya berakhir. Para pemuda yang telah menjadi anggota BKR segera menggabungkan diri ke dalam Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Perubahan Badan Keamanan Rakyat ke Tentara Keamanan Rakyat diikuti pula oleh seluruh daerah Indonesia, tidak terkecuali oleh BKR daerah Jawa Barat yang termasuk di dalamnya BKR Subang.

Dalam susunan sistem organisasi Tentara Keamanan Rakyat, wilayah Jawa Barat dan Jakarta Raya termasuk ke dalam Komandemen I, di bawah pimpinan Panglima Jenderal Mayor Didi Kartasasmita dan didampingi oleh Kepala Staf Kolonel Abdul Haris Nasution.

Komandemen I Jawa Barat dibagi dalam 13 resimen, yaitu:

1. Resimen I Banten, di bawah pimpinan Letnan Kolonel KH. Sam'un.
2. Resimen II Bogor, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Husein Sastranegara.
3. Resimen III Sukabumi, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Eddy Sukardi.
4. Resimen IV Tangerang, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Singgih.
5. Resimen V Cikampek, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Muffreini.
6. Resimen VI Purwakarta, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sumarna.
7. Resimen VII Cirebon, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sapari.

8. Resimen VIII Bandung, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Omon Abdurachman.
9. Resimen IX Padalarang, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Gandawijaya.
10. Resimen X Garut, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ponto Sukawidjaya.
11. Resimen XI Tasikmalaya, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sofyan Iskandar.
12. Resimen XII Jatiwangi, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sumarno.
13. Resimen XIII Sumedang, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Umang (Sejarah Militer Kodam VI Siliwangi, 1968 : 61).

Setelah BKR Jawa Barat berubah menjadi TKR, dengan susunan organisasi yang baru tersebut, BKR yang ada di daerah segera menyesuaikan diri dan menyusun organisasi TKR sesuai dengan petunjuk dari Panglima Komandemen I Jawa Barat. Kepala Staf Komandemen I Jawa Barat, Kolonel A.H. Nasution, berusaha untuk mengatur organisasi resimen yang telah disusun serta mengangkat pejabat-pejabat dengan resmi sesuai dengan kedudukan atau jabatan yang dipegangnya.

Berdasarkan pembagian wilayah komandemen Jawa Barat masih memakai nama Komandemen I Jawa Barat dengan nama Siliwangi, dengan 3 buah divisi yaitu:

1. Divisi I/Banten, berkedudukan di Banten, dengan Panglima divisi yaitu Kolonel KH. Syam'un.
2. Divisi II/Cirebon, berkedudukan di Linggajati, dengan Panglima Divisi yaitu Kolonel Sadikin, dan
3. Divisi III/Purwakarta, berkedudukan di Tasikmalaya, dengan Panglima Divisi Kolonel Arudji Kartawinata (Sejarah Militer Kodam VI Siliwangi, 1968 : 67-69). Pada saat itu, TKR Subang termasuk ke dalam Divisi Batalyon III Purwakarta.

Setelah adanya perubahan dan bentuk organisasi dari BKR ke TKR, tidak saja bekas-bekas anggota BKR yang masuk menjadi anggota TKR, tetapi juga para pemuda lainnya yang tidak memiliki latar belakang pendidikan semi militer, seperti dokter, guru, insinyur, para pelajar, dan sebagainya. Sehubungan dengan kedatangan pasukan Sekutu yang disertai oleh tentara Belanda yang ingi menguasai kembali wilayah Indonesia, TKR dan badan perjuangan lainnya berusaha membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia terutama generasi muda dengan latihan semi militer, baik di kota-kota kabupaten maupun pedesaan-pedesaan.

d. Menghadapi Agresi Militer Belanda

Setelah berhasil menanamkan pengaruh terhadap beberapa orang pemimpin bangsa Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di daerah dan persiapan militer sudah mencukupi, Belanda mulai menyiapkan diri menegakkan kembali kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Orang-orang NICA sering memancing kerusuhan dan mengadakan provokasi-provokasi bersenjata secara terbuka, sehingga sering mengakibatkan timbulnya bentrokan senjata dan pertempuran antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh Sekutu.

Melihat kondisi yang semakin memburuk disertai dengan kondisi pasukan yang tidak memadai, pihak sekutu/ Inggris merasa berkepentingan untuk secepatnya menyelesaikan tugasnya di Indonesia dengan jalan mempertemukan pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Untuk kepentingan tersebut di atas, Inggris mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr dengan tugas menjadi penengah perundingan antara Indonesia dengan Belanda.

Perundingan pertama di mulai tanggal 10 Februari 1946. Saat itu wakil pemerintah Belanda untuk Indonesia H.J. Van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda, yang isinya mengulangi pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942. Intinya antara lain:

1. Indonesia dijadikan sebagai negara persemakmuran berbentuk federal, yang memiliki pemerintahan sendiri di lingkungan Kerajaan Belanda.

2. Masalah urusan dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri diurus oleh Belanda.
3. Sebelum dibentuk negara persemakmuran akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun.
4. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB (Marwati Djoened Poesponegoro, et. al., VI, 1990 : 124).

Atas pernyataan politik pemerintah Belanda tersebut, maka pemerintah RI pada tanggal 12 Maret 1946, melalui Kabinet Sjahrir menyampaikan balasan yang berbunyi :

1. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda.
2. Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan pada masa tertentu, urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda.
3. Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan Tentara Indonesia.
4. Selama Perundingan berlangsung semua aksi militer harus dihentikan dan pihak RI akan melakukan pengawasan terhadap pengungsian tawanan dan interniran lainnya (Sekretariat Negara RI, 1986 : 82).

Apabila melihat nota balasan tersebut, sebenarnya pihak Indonesia telah memberikan konsensi-konsensi kepada pihak Belanda, yang sebenarnya sangat ditentang oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Sudah barang tentu usulan perintah RI ini ditolak oleh Van Mook, karena tujuan Belanda sebenarnya bukan mencari upaya perdamaian, tetapi menguasai kembali wilayah Indonesia.

Keinginan Belanda menguasai kembali nampak sekali ketika perundingan antara pihak Indonesia dengan Belanda sedang berlangsung, secara diam-diam Belanda mendatangkan pasukan tambahan dari Negeri Belanda. Pasukan-pasukan Belanda yang didatangkan dari Negeri Belanda, antara lain Divisi 7 Desember, dimulai pada bulan Maret 1946 dan selesai pada bulan Maret 1947. Pasukan Belanda yang baru datang tersebut, untuk sementara berada

di bawah kendali operasi tentara Inggris, dan sudah langsung dilibatkan dalam berbagai operasi-operasi militer terhadap pejuang Indonesia, baik secara sendiri maupun secara gabungan bersama tentara Inggris (RHA. Saleh, Keadaan Tentara Asing di Jawa Barat Tahun 1945-1946, Simpay Siliwangi, No. 44, tahun XX, 1993 : 27).

Selain melanjutkan perundingan kembali dengan pihak Indonesia dan pengiriman pasukan dari Negeri Belanda, Van Mook mencoba untuk membentuk negara-negara boneka dengan susunan negara federal. Selama perundingan tengah berlangsung, Van Mook telah merancang dan mulai menyusun struktur negara federal yang dikendalikan oleh Belanda. Untuk maksud tersebut seringkali diadakan pertemuan dengan pejabat-pejabat yang pro pemerintah kolonial di daerah-daerah yang telah diduduki Belanda.

Pada tanggal 15 Juli 1946, di Sulawesi Selatan dilaksanakan suatu konferensi yang disebut dengan konferensi Malino. Konferensi itu membahas rencana pembentukan negara-negara bagian dari susunan negara federal. Selain itu dibahas secara khusus tentang pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di wilayah Indonesia Timur (Marwati Djoened Poesponegoro, VI, 1990 : 127).

Sementara itu, bentrokan senjata antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda dan Sekutu semakin sering terjadi, bahkan tidak pernah kunjung selesai. Akhirnya bentrokan senjata ini diupayakan lewat meja perundingan.

Perundingan gencatan senjata ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 September 1946 sampai tanggal 30 September 1946, tetapi tidak membawa hasil. Perundingan gencatan senjata kemudian dilanjutkan kembali pada tanggal 7 Oktober 1946. Pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn.

Perundingan demi perundingan antara pihak Indonesia dengan Belanda terus berlangsung dan tidak kunjung selesai. Nampaknya Inggris dan Belanda dalam melakukan serangkaian perundingan yang diselingi dengan pertempuran dan gencatan senjata, hanya merupakan siasat saja dalam upaya mengulur-ulur waktu guna memperoleh peluang kesempatan dan waktu bagi Belanda untuk menyusun dan mengkonsolidasikan perlengkapan penjajahannya di Indonesia, baik

di bidang politik, pemerintahan, dan militer, guna dikerahkan dalam bentuk penentuan usaha kolonialisasinya.

Hingga akhir bulan Nopember 1946, Inggris telah mengalihkan beberapa kota pendudukannya kepada Belanda, antara lain Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Bogor, Padang, dan Palembang, lengkap dengan jawatan-jawatan sipilnya (Sejarah Kodam VI Siliwangi, 1968 : 52).

Untuk lebih memperkuat kedudukannya, berlangsung dari tanggal 11 sampai 13 Nopember 1946, Belanda melanjutkan perundingannya dengan pihak Indonesia dengan mengambil tempat di Linggarjati Jawa Barat. Perundingan yang dipimpin Lord Killern menghasilkan 17 pasal kesepakatan.

Pemaparan naskah Persetujuan Linggarjati oleh delegasi Indonesia, menimbulkan suara-suara pro dan kontra di kalangan politisi Indonesia. Pendapat yang tidak setuju terhadap naskah perundingan tersebut, kebanyakan datang dari kalangan politisi yang berasal dari partai sayap kiri dan kalangan militer. Mereka berpendapat dengan disepakatinya persetujuan Linggarjati, berarti Pemerintah Indonesia mengorbankan proklamasi dan konstitusi, karena wilayah RI tinggal meliputi Jawa dan Sumatra saja. Selain itu, perundingan ini hanya taktik Belanda untuk menggalang kekuatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan-tindakan Belanda yang melanggar pasal-pasal perundingan Linggarjati.

Pertentangan antara kedua belah pihak semakin jelas, apalagi Belanda terus menerus mengirimkan tentaranya ke Indonesia. Divisi ke-1 sudah lengkap tiba di Indonesia dan ditempatkan di Jakarta - Bogor. Kurang lebih satu lusin batalyon pengawal telah masuk ke Pulau Jawa, bahkan divisi ke-2 setiap minggu terus mengalir masuk ke Pulau Jawa. Pihak Indonesia menganggap hal itu sebagai suatu ketidakjujuran pihak Belanda, bahkan pelanggaran status quo, serta pelanggaran terhadap persetujuan Linggarjati (A.H. Nasution, 5, 1991 : 3).

Dengan adanya penolakan dari pemerintah RI tersebut, ternyata ultimatum Belanda yang disampaikan kepada pemerintah RI tidak membawa hasil. Jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh Belanda

untuk menguasai kembali bekas jajahannya hanyalah dengan menggunakan kekuatan militer.

Ketegangan mulai memuncak, Belanda mulai menyusun dan mengkonsolidasikan angkatan bersenjata. Sepanjang hari hilir mudik kendaraan militer dari Jakarta ke Bandung memuat segala macam peralatan perang, antara lain pengangkutan senjata, amunisi, alat-alat tempur, dan sebagainya yang berlangsung selama bulan Juni 1947.

Akhir bulan Juni 1947, terus menerus nampak terlihat kegiatan pesawat terbang Belanda di atas pertahanan Republik Indonesia hampir di semua front. Di Jawa Barat, pesawat terbang musuh mengintai front pertahanan para pejuang di daerah Tasikmalaya, Subang, Sumedang, dan tempat-tempat lainnya yang diperkirakan sebagai basis TNI dan para pejuang Indonesia (A.H. Nasution, 5, 1991 : 45).

Pada tanggal 20 Juli 1947, pemerintah Kerajaan Belanda telah memberi wewenang kepada alat-alat penjajahannya untuk melancarkan serangan terhadap daerah republik. Setelah adanya wewenang tersebut, Dr. H.J. Van Mook memerintahkan kepada Jenderal Spoor untuk melakukan serangan terhadap wilayah yang masih dikuasai oleh perintah RI (Dinas Sejarah TNI-AD, 1977 :19). Melihat kenyataan di atas, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan instruksi ke seluruh wilayah RI untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.

Pada tanggal 21 Juli 1947 pukul 05.30, Jenderal Spoor mulai mengerahkan pasukan Belanda bergerak memasuki dan menyerang wilayah RI dari segala jurusan, baik dari darat, laut, dan udara. Pesawat-pesawat terbang Belanda melancarkan serangan terhadap lapangan terbang, asrama-asrama tentara, dan garis-garis perhubungan TNI (A.H. Nasution, 5, 1991:101). Agresi militer Belanda secara serentak tersebut, mempunyai tujuan menguasai wilayah RI yang mempunyai objek-objek vital yang bernilai politis dan ekonomi.

Untuk menyerang Jawa Barat, pihak Belanda mengerahkan dua divisi tentaranya yaitu Divisi B KNIL di bawah pimpinan Mayor Jenderal de Waal dan Divisi 7 Desember di bawah pimpinan Mayor Jenderal Durst Britt. Kedua divisi ini terdiri atas lima brigade

berhadapan dengan Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Mayor Jenderal A. H. Nasution yang terdiri atas empat brigade, yaitu :

1. Brigade I/Tirtayasa di bawah pimpinan Letkol Dr. Eri Sudewo berkedudukan di Serang.
2. Brigade II/Surya Kencana di bawah pimpinan Letkol Edi Sukardi berkedudukan di Sukabumi.
3. Brigade III/Guntur di bawah pimpinan Kolonel Hidayat berkedudukan di daerah Priangan.
4. Brigade V/Sunan Gunung Jati di bawah pimpinan Letkol Abimanyu berkedudukan di Cirebon (Edi S. Ekadjati, 1980/1981 : 163).

Pasukan Belanda yang menyerang wilayah Jawa Barat bergerak dari tiga pusat kedudukan, yaitu Bandung, Jakarta, dan Bogor dilakukan secara serentak dan dalam waktu yang bersamaan. Serbuan Belanda yang didahului oleh pasukan lapis baja dan dibantu oleh angkatan udaranya, telah mengakibatkan melemahnya pertahanan TNI yang terdapat di Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon.

Dengan adanya serangan Belanda tersebut, keesokan harinya seluruh rakyat Subang diperintahkan untuk melakukan penebangan pohon-pohon yang terdapat di pinggir jalan raya, menggali jalan-jalan raya secara melintang, dan merusak jembatan untuk menghambat gerak maju pasukan lapis baja dan infanteri Belanda.

Walaupun daerah Subang selalu mendapat serangan dari pasukan Belanda, tetapi karena daerahnya dikelilingi pegunungan, pasukan Belanda sangat kesulitan menguasai daerah Subang. Apalagi setelah kedatangan pasukan TKR dan lasykar rakyat yang terdesak oleh pasukan Belanda, seperti dari Bandung yaitu Batalyon Bandung Utara di bawah pimpinan Letkol Sukanda Bratamanggala, dari Purwakarta yaitu Brigade III/Kiansantang dipimpin oleh Letkol Sadikin.

Para komandan pasukan sepakat menjadikan Subang sebagai basis gerilya, dalam upaya menahan gerak maju dan melakukan serangan dadakan terhadap pasukan musuh di daerah pendudukan. Untuk memudahkan konsolidasi pasukan, mereka sepakat untuk membentuk

front pertahanan yang diberi nama Resimen Kratibo (Karawang Timur Bandung Utara), yaitu front Subang Selatan untuk menahan serangan musuh dari arah Lembang dan Bandung, dan front Krawang Bekasi dengan tugas mengadakan serangan atau penghadangan terhadap pasukan yang datang dari arah Jakarta atau Cirebon.

Selain menjadi basis gerilya, daerah Subang pun menjadi tempat pengungsian para pejabat pemerintahan dan para pemimpin lainnya. Para pejabat yang mengungsi ke Subang, antara lain Mr. Kosasih Purwanegara (Residen Jakarta), Yuda, Karlan, dan Syafei (anggota Badan Pekerja Daerah Karesidenan Jakarta), Tuan Jafar (Administratur PT Lands), dr. Sukono beserta dan Staf RSU, dan lain-lain.

Setelah mengadakan konsolidasi pasukan, para komandan pasukan sepakat pula untuk melakukan pembagian tugas dan penempatan pasukan. Adapun penempatan tugas pasukan adalah sebagai berikut :

1. Komandan Resimen berada di bawah pimpinan Letkol Sukanda Bratamanggala dan H. Rusdi Berkedudukan di Gedung Sociteit (sekarang, Wisma Karya).
2. Batalyon III yang berasal dari Brigade III/Kiansantang berkedudukan di bawah pimpinan Kapten Cecep bermarkas di Pegaden.
3. Batalyon Jamhari bermarkas di Kasomalang, Cislak.
4. Batalyon Jakatingkir yang dipimpin oleh Tirtalaksana.
5. Partisan Siliwangi berkedudukan di Segalaherang
6. Lasykar Rakyat di bawah pimpinan Husen bermarkas di Pamanukan.
7. Pasukan Polisi, bermarkas di Gedung Hejo dan Kontroliran.

Setelah dilakukan konsolidasi pasukan, pasukan TKR dan badan-badan perjuangan mulai melakukan serangan terhadap kedudukan pasukan musuh di daerah Lembang, Karawang, Bekasi dan penghadangan terhadap konvoi pasukan dari arah Jakarta atau Subang. Dengan adanya serangan gerilya dan penghadangan dari

para pejuang tersebut, mengakibatkan pihak musuh menjadi tidak tenang dan pasokan bala bantuan serta peralatan pasukan untuk menunjang garis depan mereka menjadi terhambat.

Keadaan tersebut di atas, mendorong pucuk pimpinan Belanda untuk melakukan serangan terhadap daerah Subang yang telah menjadi basis gerilya para pejuang. Serangan pasukan Belanda yang ingin menguasai daerah Subang, mendapat perlawanan yang gigih dari pasukan TKR dan badan-badan perjuangan yang ada serta bantuan sepenuhnya dari masyarakat.

Meskipun pasukan pejuang mempertahankan daerah Subang dengan gigih, tetapi karena pasukan Belanda melakukan serangan terus menerus dan tidak pernah terputus, serta adanya perbedaan persenjataan yang sangat mencolok dari kedua belah pihak. Akhirnya pasukan para pejuang tidak dapat mempertahankan daerah Subang, mereka mengundurkan diri ke hutan-hutan yang ada di sekitar Subang. Akan tetapi, sebelum mereka mengundurkan diri mereka melakukan bumi hangus dengan menghancurkan bangunan-bangunan penting agar tidak dapat digunakan oleh musuh.

Adapun bangunan-bangunan penting yang dihancurkan, antara lain:

1. Gedung Gede yang dipakai sebagai Markas TRI/TNI.
2. Kantor Besar yang jadi Kantor Pusat PT Lands.
3. Pusat perbengkelan.
4. Gedung Hejo (Sekarang menjadi Masjid Agung.
5. Gedung Tuan Houwing (sekarang menjadi Terminal Bus Subang).

Setelah pasukan Belanda berhasil menerobos seluruh lini pertahanan TKR dan lasykar rakyat daerah Subang serta berhasil menguasai Kota Subang, mereka memusatkan markas besarnya di dalam Kota Subang dan Kalijati. Adapun untuk daerah kecamatan, mereka menempatkan satu pasukan tetap.

Pengunduran pasukan para pejuang ke hutan-hutan diikuti pula oleh para pejabat pemerintah dan sipil beserta staf dan keluarga

masing-masing yang berada di daerah Subang. Pada saat melakukan perundingan, rombongan para pejabat berkesempatan melakukan istirahat di Desa Sumur Bandung. Pada saat itu, ketua rombongan yang dipimpin oleh Mu'min (wakil Residen Subang) mengadakan rapat untuk mengatur siasat dan pembagian tugas. Rapat tersebut menghasilkan beberapa buah keputusan, antara lain:

1. Mu'min beserta staf Karesidenan Subang, mengikuti arus para pejuang yang menuju arah Kadipaten.
2. Dr. Sukono beserta staf RSU Subang kembali ke Subang untuk membantu masyarakat Subang yang membutuhkannya.
3. Tuan Jafar memimpin para pengungsi dan mengusahakan perbekalan, serta mengkoordinir para karyawan PT Lands dalam bidang sabotase dan perbekalan.
4. Residen melaksanakan pemerintah di sekitar daerah perbatasan Sumedang antara lain daerah Bakom, Songgom, Surian, dan Cimenteng.

Keputusan tersebut di atas harus dilaksanakan sebaik mungkin oleh seluruh para pejabat dan staf pemerintah sipil Karesidenan Subang, walaupun penuh dengan resiko ditangkap atau diincar pasukan Belanda. Untuk mempermudah hubungan antara pemerintahan karesidenan dengan masyarakat, maka di tiap pedesaan dibentuk jaringan-jaringan, antara lain jaringan perbekalan. Sebagai koordinator jaringan ditunjuk para kepala desa, dengan tugas menyalurkan bahan-bahan makanan dan obat-obatan yang diperlukan baik oleh masyarakat dipengungsian maupun para pejuang garis depan. Bahkan dengan penuh keberanian, dr. Sungkono menerima para pejuang yang terluka untuk dirawat di RSU Subang.

Untuk menunjang lancarnya perbekalan yang diperlukan oleh masyarakat atau pejuang tersebut, tidak sedikit masyarakat yang mampu menyisihkan harta benda yang masih mereka miliki, seperti yang dilakukan oleh para pegawai PT Lands. Mereka menyisihkan sebagian gaji dan beras yang diperoleh setiap bulannya. Demikian pula karyawan yang bekerja diperkebunan karet, mereka menyisihkan sebagian penghasilan dari hasil menyadap getah karet.

Pengalaman menghadapi serangan yang dilakukan oleh pihak Belanda yang dikenal dengan Agresi Militer I, telah membuka mata dan pikiran para petinggi TNI. Mereka menyadari kekuatan tentara yang hanya bermodalkan semangat saja, tidak akan mampu secara langsung menghadapi musuh yang memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan moderen.

Untuk menghadapi musuh yang mempunyai prajurit yang lebih terlatih dengan persenjataan yang lebih lengkap tersebut, Panglima Divisi Siliwangi Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah tentang pembentukan Komando Daerah Gerilya (KDG) atau Werkhreis. Tugas KDG adalah diperintahkan untuk membentuk pasukan-pasukan kecil dalam rangka melakukan serangan gerilya terhadap kedudukan pasukan Belanda. Komandan KDG Subang diserahkan kepada Letkol Usman Sumantri dan A.S. Wagianto, dengan pemusatan pasukan terletak di daerah atau Kampung Cogore, Cikadu, Songgom, Surian, dan Bakom.

Adapun sasaran serangan gerilya yang dilakukan oleh para gerilya pejuang Subang terhadap kedudukan musuh, antara lain di Gedung Jeding, Gedung Kodim, Gedung Cipo, Gedung Cidongkol, Gedung Rumah Sakit Perkebunan. Serangan yang dilakukan pasukan berupa pencegahan terhadap musuh, serangan malam, atau pencurian senjata di gudang Belanda. Untuk memperlancar gerakan pasukan gerilya, mereka dibantu oleh mata-mata yang berada di Kota Subang yang selalu memberikan informasi tentang gerak-gerik kekuatan dan pemusatan pasukan Belanda.

Mendapat serangan yang terus menerus dari para pejuang Subang, pihak Belanda tidak tinggal diam. Mereka melakukan serangan balasan, dengan melakukan serangan *bombardemen* jarak jauh dengan menggunakan kanon dan senjata berat lainnya terhadap konsentrasi pasukan gerilya. Menghadapi serangan tersebut, sudah barang tentu sangat mengkhawatirkan para pejabat militer dan sipil di daerah gerilya.

Pada tanggal 24 dan 25 Oktober 1947, para pejabat militer dari Subang mengadakan pertemuan di Kampung Cimanggu Desa Cimenteng untuk membahas *bombardemen* pasukan Belanda tersebut. Rapat tersebut langsung dipimpin oleh Residen Subang, Mr. Kosasih Purwanegara dan dihadiri oleh anggota BPD Karesidenan Jakarta, antara lain Yuda, Surawijaya, Sucipto, Harun,

Absar, dan Sudarmo serta dari unsur kepolisian yang mengawal rapat tersebut. Hasil keputusan rapat adalah sebagai berikut:

1. Agar presiden menghubungi Jakarta atau Yogyakarta
2. Sebagai pelaksanaan harian pemerintahan karesidenan dilaksanakan oleh Wakil Residen Mu'min, dengan penyerahan stempel residen dan tanda tangan residen.
3. Untuk menjamin kelancaran roda pemerintahan, dibentuk pemerintahan darurat dengan wilayah kekuasaan yang dikelola oleh Koordinator Wilayah sebagai berikut:
 - a. Wilayah Karawang Timur (Kawedaaan Purwakarta, Sagalaherang, Subang, Pamanukan, dan Ciasem) diserahkan kepada Karlan sebagai koordinator (beberapa bulan kemudian diganti oleh Danta Ganda Wikarna);
 - b. Wilayah Karawang Barat diserahkan kepada Syafei sebagai koordinator (Tim Peneliti Sejarah Kabupaten Subang, 1985:81).

Keesokan harinya, Residen Mr. Kosasih Purwanegara dengan dikawal oleh Astro dan Sanusi berangkat ke Jakarta. Mulai saat itu dikenal adanya wilayah Karawang Timur yang dijabat oleh seorang koordinator.

Setelah pihak Belanda menyadari, bahwa aksi militer menjadi buntu karena adanya perlawanan rakyat Indonesia umumnya dan Jawa Barat khususnya yang dilakukan secara gerilya, maka pihak Belanda kembali mengubah siasat dari aksi militer beralih ke meja perundingan.

Dengan meminjam tangan Komisi Tiga Negara (KTN), yang mendapat tugas menyelesaikan persengketaan Belanda dengan Indonesia, pihak Belanda memaksa pihak Indonesia maju ke meja perundingan. Atas usul pihak Belanda sebagai tempat perundingan dipilihlah kapal induk Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta (George McTurnan Kahin, *Nationalism and revolution in Indonesia*, Ithaca, N.Y. Corell Univ. Press, 1970 : 224).

Perundingan di atas kapal "Renville" tersebut dibuka secara resmi pada tanggal 8 Desember 1947. Delegasi pemerintah RI dipimpin oleh Mr. Amir Syarifudin, sedangkan delegasi pihak Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo. Setelah perundingan yang diawasi oleh KTN itu berjalan satu bulan, naskah perjanjian Renville

ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948 (George McTurnan Kahin, 1970 : 224).

Kesediaan pemerintah RI menyetujui keinginan Belanda maju ke meja perundingan, sudah barang tentu sangat disesalkan tokoh-tokoh pejuang Indonesia terutama di kalangan militer. Karena hasil perundingan tersebut dipastikan sama dengan hasil perundingan-perundingan terdahulu, yaitu selalu merugikan pihak RI. Apalagi kerugian di pihak RI akibat perundingan ini lebih besar, baik dalam segi wilayah, militer, politik, maupun ekonomi.

Dalam bidang militer, saat itu para pejuang beserta rakyat Indonesia telah berhasil menstabilkan perlawanan statis beralih ke offensif gerilya, bahkan dapat dikembangkan ke offensif militer. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka TNI dan para pejuang yang berada di wilayah kekuasaan Belanda harus keluar dari “kantong-kantong” gerilya, terutama di daerah Jawa Barat ke Jawa Tengah yang masih dikuasai oleh Indonesia.

Dalam bidang politik, pihak Indonesia harus mengakui kedaulatan Belanda atas wilayah RI yang diduduki oleh Belanda selama berlangsungnya agresi militer Belanda I meliputi daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan seperlima wilayah Sumatera. Sehingga saat itu wilayah RI hanya tinggal daerah Jawa Tengah saja, karena Jawa Tengah masih dapat dipertahankan oleh TNI dan para pejuang Jawa Tengah.

Adapun di bidang ekonomi, pihak Indonesia harus menyerahkan kota-kota besar yang menjadi pusat perindustrian dan perdagangan, dan pusat-pusat perkebunan. Dengan demikian, pihak Indonesia seakan-akan memberi kesempatan kepada pihak Belanda untuk melakukan blokade ekonomi terhadap RI (KML Tobing, 1986 : 36-42).

Berdasarkan perjanjian Renville, 22.000 ribu pasukan Divisi Siliwangi ditambah dengan anggota lasykar bersenjata lainnya terpaksa hijrah ke Jawa Tengah. Pasukan-pasukan TNI dan lasykar rakyat Subang di bawah pimpinan langsung Komandan Brigade III/ Kiansantang Letnan Kolonel Sadikin, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1948.

Walaupun demikian, tidak semua anggota TNI dan lasykar rakyat ikut hijrah ke Jawa Tengah, sehingga perlawanan gerilya Jawa Barat terhadap daerah pendudukan Belanda masih dapat dilanjutkan. Untuk

daerah Subang, para prajurit TNI dan lasykar rakyat yang ditinggalkan dipimpin oleh Kapten Hadi yang berkedudukan di Surian dan Sdr Tirta yang berkedudukan di Cikadu. Oleh karena itu, walaupun secara formal pasukan TNI sudah ditarik ke daerah Jawa Tengah, tetapi serangan-serangan terhadap kedudukan tentara Belanda yang berada di dalam Kota Subang masih terus berlangsung.

Sementara itu, dengan ditariknya pasukan TNI dan lasykar rakyat ke daerah kekuasaan RI mengakibatkan keberadaan pemerintah sipil Subang menjadi tidak menentu. Apalagi Residen yang sedang berangkat ke Jakarta tidak kunjung tiba, baik secara pribadi maupun beritanya. Keadaan tersebut semakin mempersulit para pejabat karyawan sipil dalam menjalankan roda pemerintahan, sedangkan mereka tidak bermaksud membubarkan diri. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Februari 1948 Wakil Residen Mu'min meninggal-kan Subang menuju Yogyakarta dan sebagai pelaksana harian diserahkan kepada Sdr Syafei.

Akibat keadaan tersebut di atas, situasi semakin tidak menentu dan gawat. Hubungan antara residen dan para koordinator menjadi terputus. Demikian pula sebaliknya, mereka pun tidak mengetahui bahwa pelaksana harian pemerintahan Subang sudah diserahkan kepada Sdr. Syafei. Dengan demikian, pembagian wilayah kekuasaan di bawah koordinator menjadi tidak efektif, apalagi pertahanan pasukan Belanda semakin ketat. Adapun pada satuan-satuan bersenjata para pejuang mulai timbul perpecahan dan mereka beralih pada kepemimpinan perorangan.

Menyadari keadaan semakin gawat, beberapa orang tokoh yang masih berada di daerah Subang sepakat untuk mengadakan pertemuan. Maksud diadakannya pertemuan tersebut, adalah untuk mempertahankan hubungan daerah perjuangan timur-selatan dan utara-barat. Selain itu, mereka berusaha memulihkan pemerintahan sipil di daerah Subang, karena dengan eksisnya bentuk pemerintahan walaupun sesederhana mungkin akan menyiratkan bahwa pemerintah RI masih didukung oleh rakyat.

Setelah beberapa orang tokoh sipil dan militer Subang mengadakan beberapa kali konsultasi, maka disepakati diadakannya sebuah pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 1948,

dengan mengambil tempat di daerah Cimanggu Desa Cimenteng. Rapat tersebut dipimpin oleh Sdr. Karlan dan dihadiri oleh Yuda dari Badan Pekerja Daerah (BPD) Karesidenan Jakarta; Surawijaya, Sucipto, dan Harun dari unsur pemerintahan wilayah Karawang Timur; Absar dan Sudarwao dari kepolisian; serta Danta Ganda Wikarma dan Ismaun dari unsur TNI yang tidak ikut hijrah.

Adapun hasil keputusan pada rapat tersebut adalah:

1. Wakil Residen Mu'min diangkat menjadi residen.
2. Syafei, sebagai koordinator Wilayah Karawang Barat dinyatakan sebagai Bupati Kabupaten Karawang Barat.
3. Danta Ganda Wijaya, yang tadinya menjabat sebagai koordinator wilayah Karawang Timur menggantikan Karlan, diangkat menjadi Bupati Karawang Timur dan Wilayah Karawang Timur menjadi Kabupaten Karawang Timur (Tim Peneliti Sejarah Kabupaten Subang, 1985:85).

Dengan adanya penggantian dan perubahan jabatan pemerintahan sipil tersebut, diharapkan koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah sipil dengan para pejuang sipil dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan RI dapat lebih ditingkatkan.

Keputusan lain yang dihasilkan rapat adalah para pimpinan yang baru diangkat diharapkan segera mengadakan koordinasi dan konsolidasi ke tingkat lebih bawah. Pada Bulan April 1949 Danta Ganda Wikarma, sebagai Bupati Karawang Barat segera melaksanakan konsolidasi dengan mengunjungi Desa Purwadadi sebagai pusat konsentrasi pasukan gerilya utara-barat Subang.

Untuk mengkonsolidasikan kembali potensi yang dimiliki oleh masing-masing kesatuan para gerilyawan di daerah utara-barat Subang, Moch. Kurdie, Moch. Mohtar, dan Darmo berinisiatif untuk mengadakan pertemuan para pemimpin gerilya. Pada pertengahan bulan Maret 1948 dengan mengambil tempat di Desa Prapatan Purwadadi, pertemuan para pemimin gerilya baru dapat terlaksana. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk membentuk suatu wadah bernama Satuan Komando Rakyat (SKR), di bawah koordinasi Gandawijaya.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Karawang Timur yang ditinggalkan oleh Mu'min, pada tanggal 26 Agustus 1948 diadakan pertemuan di rumah Uki Durki (Kampung Citamiang) Desa Siluman. Rapat pertemuan tersebut dipimpin oleh A.S. Wagionto, Setianegara, dan Akhyar Mukhlis, serta dihadiri pula oleh Mukhtar dari SKR; R.S. Sunarya; dan anggota lainnya dari satuan-satuan perjuangan yang tergabung dalam SP 88. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa R.R. Ronggowaluyo diangkat menjadi Kepala Kepamongan Kabupaten Karawang Timur.

Sementara itu, hubungan antara pihak pemerintah pusat RI dengan Belanda tetap tegang. Untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, terutama serangan Belanda pada daerah yang masih dikuasi oleh pemerintah RI, Pimpinan Divisi Siliwangi yang berada di Yogyakarta, segera mempersiapkan segala sesuatu yang akan diperlukan, antara lain kemungkinan kembalinya pasukan Divisi Siliwangi ke Jawa Barat.

Untuk mengadakan persiapan tersebut, pimpinan tertinggi Siliwangi memerintahkan Batalyon I Brigade Rukman (terdiri atas 4 kompi, yaitu Kompi I di bawah pimpinan Kapten Sentot A, Kompi II di bawah pimpinan Kapten Mustopa Sudirja, Kompi III di bawah pimpinan Kapten Mahmud Pasha, dan Kompi IV di bawah pimpinan Kapten Abdul Syukur) untuk kembali ke Jawa Barat, yaitu ke daerah basis gerilya sebelum hijrah.

Guna mengelabui pihak Belanda dan peninjau asing, pada saat kembali ke Jawa Barat pasukan Batalyon Rukman tidak menggunakan seragam TNI, melainkan disamarkan dengan memakai simbul atau seragam lain yang dapat dianggap sebagai tentara liar. Bahkan Divisi Siliwangi melalui siaran radio, secara resmi menyatakan bahwa Batalyon Rukman telah melarikan diri dan dinyatakan sebagai desertir.

Pelepasan Batalyon Rukman dilakukan dengan tata upacara militer pada tanggal 30 Agustus 1948, di Stasiun Solo Balapan dan mendapat sambutan cukup meriah dari masyarakat solo. Perjalanan pasukan ini dilakukan dengan menumpang kereta api tetapi hanya sampai Wonosobo, selanjutnya dilakukan dengan berjalan kaki melalui hutan dan gunung.

Dalam brifing dengan para Komandan Kompi yang diadakan di Hotel Wonosobo, Mayor Rukman menjelaskan tentang rencana

perjalanan dan tujuan pokok kembali ke Jawa Barat. Dijelaskan dalam perjalanan tersebut tidak diberangkatkan sekaligus melainkan perkompi, jarak antara satu kompi dengan kompi lainnya adalah 15 km. Dalam perjalanan tersebut ditekankan kepada anggota pasukan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan rakyat yang dilalui, jangan sampai menyakiti hati rakyat dengan perbuatan yang tercela. Pertempuran dengan pihak musuh sedapat mungkin dihindari, agar perjalanan berjalan lancar.

Adapun tempat-tempat yang diharapkan dapat dituju oleh pasukan Batalyon Rukman adalah sebagai berikut:

1. Markas Batalyon, Kompi Staf, dan keluarga berada di bawah pimpinan Mayor Sukarya dengan tujuan Daerah Kuningan Timur sampai Kuningan Barat.
2. Kompi I di bawah pimpinan Kapten Sentot dengan tujuan Indramayu dan sekitarnya.
3. Kompi II di bawah pimpinan Kapten Mustafa Sudrajat dengan tujuan daerah Sumedang.
4. Kompi III di bawah pimpinan Kapten Machmud Pasha dengan tujuan daerah Cirebon dan sekitarnya.
5. Kompi IV di bawah pimpinan Kapten Abdul Syukur dengan tujuan daerah Majalengka dan sekitarnya (Sejarah Kodam VI Siliwangi, 1968, 287-288).

Tujuan pokok Batalyon Rukman setelah sampai di Jawa Barat adalah membentuk Komando Daerah Militer (KDM) dan melanjutkan perang gerilya melawan Belanda. Pada bulan September 1948, datang utusan dari Mayor U. Rukman yaitu Kapten Romli ke markas gerilya di Desa Prapatan Subang. Kapten Romli mengemban tugas dari Komandan Batalyon XIII, yaitu mewenginstruksikan kepada komandan gerilya Subang untuk membentuk KDM.

Sementara apa yang diperkirakan para pemimpin tersebut menjadi kenyataan, persetujuan Renville ternyata mengalami nasib yang sama dengan persetujuan-persetujuan yang dilakukan sebelumnya. Secara sepihak Belanda tidak mau terikat lagi oleh persetujuan Renville, dengan alasan pemerintah RI atau TNI sudah melanggar

genjatan senjata dan garis demarkasi dengan mengirim pasukan ke daerah pendudukan.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda memulai gerakannya dengan mengirim pasukan untuk menguasai ibukota RI Yogyakarta. Akibat serangan tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moch. Hatta ditawan Belanda, sedangkan Panglima Besar Jenderal Sudirman beserta Staf Markas Besar TNI meninggalkan Yogyakarta mengungsi ke daerah pedalaman. Dengan melakukan serangan ke Yogyakarta, secara yuridis Belanda telah melanggar garis demarkasi. Dengan demikian pemerintah RI tidak terikat lagi oleh persetujuan Renville. Oleh karena itu, sebelum meninggalkan Kota Yogyakarta, Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah harian sebagai berikut:

1. Kita telah diserang.
2. Pada tanggal 19 Desember, Angkatan Perang Belanda menyerang Yogyakarta dan Lapangan Terbang Maguwo.
3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata.
4. Semua angkatan perang RI menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan musuh (A.H. Nasution, 1965 : 149).

Dengan keluarnya instruksi Panglima Besar Jenderal Sudirman tersebut dan sesuai dengan intruksi MBKD No 1/MBKD/1948 tanggal 9 November 1948 yaitu agar pasukan yang hijrah ke Yogyakarta kembali ke kesatuan di daerah asalnya sebelum hijrah. Panglima Divisi Siliwangi, Kolonel A.H. Nasution memerintahkan kepada anggota Divisi Siliwangi yang berada di Yogyakarta untuk berangkat kembali (wingate) ke Jawa Barat. Perjalanan kembalinya Divisi Siliwangi ke Jawa Barat dikenal dengan nama "Long March". Tujuan kembalinya kesatuan-kesatuan tersebut ke daerah asal, untuk membangun Werhkreise (perang gerilya semesta) sebagai basis pemerintah dalam melawan agresi militer Belanda (A.H. Nasution, 1984: 136).

Berdasarkan pengalaman pada saat menghadapi Agresi Militer I Belanda, TNI dan para pejuang lainnya melakukan pertahanan linier yaitu menempatkan sebagian besar berada di garis demarkasi, akibatnya pasukan TNI dan para pejuang dapat didesak mundur dan

terpecah belah. Atas dasar pengalaman tersebut, untuk menjaga kemungkinan dilancarkan agresi militer Belanda selanjutnya, maka Panglima Besar Tentara Teritorium Jawa (PTTD) Kol. A.H. Nasution mengumumkan berdirinya KDM dan STC (A.H. Nasution, 1971 : 351).

Tujuan dibentuknya KDM dan STC, karena saat itu dibutuhkan adanya organisasi pemerintah militer di daerah dan kabupaten dalam rangka menjalankan roda pemerintah RI pada saat keadaan darurat perang. Susunan staf KDM atau STC diambil dari anggota militer, pejabat sipil, tokoh politik, dan kelayakaran. Badan ini berfungsi sebagai pemerintahan sipil, unsur-unsur tempur, teritorial, dan politik.

Pengumuman tersebut di atas, diikuti pula keluarnya perintah siasat No 1/Th 1948, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Aksi memperlambat gerakan musuh.
2. Evakuasi dan bumi hangus
3. Membentuk kantong-kantong gerilya dan perlawanan teritorial (Wehrkreise).
4. Aksi Wingate (A.H. Nasution, 1984 : 352).

Dengan kembalinya pasukan Siliwangi ke daerah Jawa Barat, pertempuran antara para pejuang Jawa umumnya dan daerah Subang khususnya dengan pasukan Belanda kembali meningkat. Salah satu pertempuran yang sengit antara para pejuang Subang dengan pihak pasukan Belanda, terjadi antara pasukan Engkong Darsono dengan pasukan Belanda yang terjadi di daerah Ciseupan Cisalak. Pada saat itu, keberadaan pasukan Engkong Darsono yang sedang beristirahat di Ciseupan diketahui oleh pasukan Belanda yang sedang melakukan patroli. Mengetahui adanya pasukan tersebut, pasukan Belanda langsung melakukan serangan.

Mendapat serangan dadakan dan gencar dari pihak musuh, pasukan Engkong Darsono tidak menjadi gentar ataupun takut. Dengan gagah berani, mereka melakukan perlawanan terhadap serangan pasukan Belanda. Oleh karena keberanian dan kemampuan yang dimiliki pasukan Engkong Darsono, serangan pihak Belanda dapat dipatahkan. Bahkan pasukan Engkong Darsono melakukan serangan balik, sehingga membuat pasukan Belanda mengundurkan diri dengan

meninggalkan beberapa anggota pasukan yang meninggal dunia dan meninggalkan sebagian besar persenjataan yang dimilikinya.

Setelah mengetahui kedatangan kembali pasukan Siliwangi ke daerah Jawa Barat akibat serangan militer Belanda ke daerah Yogyakarta, mendorong pasukan badan-badan perjuangan dan kelasykaran yang bergerilya di dalam hutan berangsur-angsur masuk ke kota. Setelah diadakan reorganisasi dan pembenahan dalam tubuh badan-badan perjuangan, maka pasukan Lukas dirubah menjadi Batalyon "K" di bawah pimpinan Kapten Lukas Sukaryo; pasukan Suparjo menjadi Batalyon "N" dipimpin oleh Mayor Suparjo; pasukan Oking menjadi Batalyon "T:b" dipimpin Kapten Oking; dan pasukan Darsono menjadi Batalyon "L" dipimpin oleh Mayor R. Sudharsono (Tim Penulisan Sejarah Kab. Subang, 1985:93).

e. Subang Kembali ke Pangkuan Negara RI

Guna menghancurkan negara kesatuan RI, di samping melakukan agresi militer, Belanda pun melakukan tindakan politik dengan jalan membentuk negara-negara boneka seperti NIT, Negara Jawa Timur, Negara Sumatra Timur, dan lain-lain.

Di daerah Jawa Barat, melalui tiga kali konferensi Jawa Barat yaitu tanggal 16 Oktober 1947, 16 s.d. 20 Desember 1947, dan 23 Februari s.d. 5 Maret 1948 Belanda melalui antek-anteknya berhasil membentuk Negara Pasundan dengan R.A.A.M. Wiranatakusumah sebagai wali negara (Edi S. Ekadjati, 1980/1981 : 173-174). Adapun yang menjabat sebagai Kepala Kabupaten Kuningan untuk Negara Pasundan adalah Aom Holland, kemudian berturut-turut diganti oleh Asikin Yudadibrata dan Rivai (Dadang Darmayana, 1985: 43).

Dengan terbentuknya Negara Pasundan, Wali Negara Pasundan segera melakukan perombakan dan perubahan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Pada tanggal 29 Januari 1949, Wali negara Pasundan memecah Kabupaten Karawang menjadi dua kabupaten; yaitu Kabupaten Karawang yang meliputi Kawedanaan Karawang, Rengasdengklok, dan Cikampek; dan Kabupaten Purwakarta meliputi meliputi Kawedanaan Purwakarta, Subang, Pamanukan, Ciasem, dan

Sagalaherang. Sejak saat itu di daerah Subang terjadi dualisme pemerintahan; yaitu Pemerintahan Kabupaten Karawang Timur dengan Bupati R.S. Sunatya Ronggowaluyo; dan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta dengan bupati R. Hasan Suriasakusumah (Tim Penulisan Sejarah Kabupaten Subang, 1985:94).

Namun demikian, tidak semua masyarakat Jawa Barat menyetujui pembentukan Negara Pasundan, antara lain kelompok masyarakat Sunda yang ada di Jakarta yang diwakili oleh Prof. Dr. Juhana Wiradikarta, Mr. R.T. Jumhana Wiriatmaja, Mr. Lukman Wiriadinata, R. Ajeng E.F. Jayadinigrat, R. Pandu Suriadinigrat, dan lain-lain. Kelompok ini mengeluarkan pernyataan yang menentang Konferensi Jawa Barat ke-2 (Edi S. Ekadjati, 1980/1981 : 175). Demikian pula, rakyat Jawa Barat yang berada di kota-kota kabupaten, mereka melakukan protes melalui rapat-rapat akbar atau pernyataan-pernyataan yang menolak Negara Pasundan.

Sementara itu, atas dasar resolusi negara-negara Asia yang dipelopori oleh India dan Burma mengenai Indonesia dan reaksi internasional yang mengutuk agresi militer Belanda II, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian tembakan antara kedua belah pihak yang sedang bertikai (Iwa Kusumah Sumantri, 1968, Sejarah Revolusi Indonesia, Masa Revolusi Bersendjata, Djilid II, Djakarta, Grafica : 202).

Pada tanggal 14 Juli 1949, melalui Roem-Royen Statement yang diprakarsai oleh KTN, disepakati adanya penghentian tembakan, pengembalian pemimpin RI ke Yogyakarta, dan merintis ke arah Konferensi Meja Bundar (KMB) (Marwati Djoened dkk, : 169).

Sebagai realisasi dari Roem-Royen Statement, kedua belah pihak menyetujui penghentian permusuhan dan gencatan senjata di daerah yang dipersengketakan. Persetujuan di daerah yang dipersengketakan dilakukan oleh pemerintah sipil dan komandan militer dari kedua belah pihak.

Pada tanggal 23 Agustus 1949, KMB antara pihak Indonesia dengan Belanda secara resmi dibuka, kedua belah pihak menyetujui pengakuan kedaulatan masing-masing. Pengakuan kedaulatan tersebut akan ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1949 di

Den Haag, oleh Ratu Yuliana dari pihak Indonesia dan Moh. Hatta dari pihak Indonesia (Sekretaris Negara, 1986 : 63).

Sementara itu, untuk mengatasi dualisme pemerintahan yang terjadi di daerah Subang akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara Pasundan. Pada bula Januari 1950, di daerah Kabupaten Karawang Timur dibentuk pemerintahan dengan nama Badan Pekerja Darurat Kabupaten Karawang Timur dengan ketuanya dipimpin oleh R.S. Sunarya Rongowaluyo, sedangkan Bupati Militerinya dijabat oleh R.S. Hadipranoto.

Setelah adanya pengakuan kedaulatan pemerintahan RI, maka Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat keputusan No. 4/UH/GDB/50 tanggal 2 Juni 1950 membubarkan Badan Pekerja darurat Karawang Timur dan membentuk dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan SK Gubernur tersebut, pusat pemerintahan Kabupaten Purwakarta adalah Kawedanaan Purwakarta. Akan tetapi dalam kenyataannya, pusat pemerintahan Kabupaten Purwakarta tetap berada di Kawedanaan Subang. Keberadaan Subang sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Purwakarta, berlangsung sampai tahun 1968 setelah terbentuknya Kabupaten Subang berdasarkan UU No. 4 tahun 1968.

F. Tokoh Kabupaten Subang

Tokoh kabupaten Subang tidak seluruhnya putra asli daerah Subang, tetapi ada sebagian tokoh yang bukan kelahiran Subang. Meskipun demikian, mereka mempunyai kecintaan dan rasa memiliki Subang sebagaimana putra asli Subang sendiri. Wujud kecintaan mereka direalisasikan dalam bentuk karya bakti yang bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Subang. Oleh karena itu, keberadaan mereka dapat diakui dan dirasakan oleh warga masyarakat Subang.

Pada paparan di bawah ini akan dikemukakan beberapa tokoh Kabupaten Subang yang banyak berjasa dalam perjalanan Kabupaten Subang.

1. H. Atju Syamsudin

H. Atju Syamsudin adalah Bupati Subang pertama setelah Subang berdiri sendiri sebagai sebuah kabupaten mandiri terpisah dari kabupaten Purwakarta pada tahun 1968. Bupati pertama ini bukan asli putra Subang tetapi berdarah campuran Subang dan Sumedang. Kakeknya adalah Demang Tanjungsari Sumedang dan neneknya berasal dari Subang. Dia dilahirkan di Sumedang pada tanggal 17 Juli 1928. H. Atju Syamsudin menikah dengan Hj. Dewi Hani dan dikarunia 6 orang anak.

Perjalanan karir H. Atju Syamsudin di militer telah dimulai sejak Indonesia Merdeka tahun 1945 sampai 1985 dengan pangkat terakhir Kolonel. H. Atju Syamsudin menjadi tentara karena panggilan nurani untuk ikut berjuang membela negara dari ancaman tentara Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Keterlibatannya dalam militer akibat jaman. “Saya hidup sebagai serdadu itu akibat jaman”, ujar H. Atju Syamsudin.

Sebagai militer, H. Atju Syamsudin memiliki banyak pengalaman dalam perjuangan kemerdekaan di daerah Subang, seperti perjuangan melawan Belanda dan aktif dalam penumpasan PKI di Subang. Peranan H. Atju Syamsudin sangat besar dalam perjalanan sejarah Kabupaten Subang. Oleh karena itu, tidak aneh apabila H. Atju Syamsudin memiliki rasa cinta dan rasa memiliki Kabupaten Subang, meskipun bukan asli kelahiran Subang. Jabatan penting di militer yang pernah dipegang H. Atju Syamsudin adalah sebagai Kasdim 0605 Subang/Purwakarta sedangkan jabatan Dandim dipegang Otje Djundjunan.

H. Atju Syamsudin pernah mengikuti pendidikan tinggi sejak tahun 1962 di Fakultas Sospol UNPAD sampai tingkat III. Berbekal pendidikan dan pengalamannya dalam militer serta adanya dukungan masyarakat telah mendorong H. Atju Syamsudin untuk menduduki jabatan bupati selama 12 tahun, dari tahun 1966 sampai 1978. Pada tahun 1966, H. Atju Syamsudin terpilih sebagai Bupati Purwakarta (ke-3) di Subang. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 4 pada tanggal 29 Juni 1968, yang menetapkan pembagian Kabupaten Purwakarta

menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Purwakarta di Purwakarta dan Kabupaten Subang di Subang. Dengan demikian, sejak tanggal 29 Juni 1968 secara resmi Subang menjadi kabupaten yang mandiri. Untuk memimpin Kabupaten Subang yang baru berdiri ini, maka berdasarkan pasal 6 Undang Undang Nomor 4 tersebut ditetapkan secara otomatis H. Atju Syamsudin yang saat itu menjabat Bupati Purwakarta di Subang menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Subang (Bupati Subang pertama). Selanjutnya, pada tahun 1973 H. Atju Syamsudin terpilih menjadi Bupati Subang dengan masa jabatan dari tahun 1973 sampai 1978. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Bupati Kabupaten Subang Pertama (di Subang) adalah H. Atju Syamsudin.

Pemikiran H. Atju Syamsudin tentang sejarah Subang dan pembangunan Subang cukup menarik. Menurut H. Atju Syamsudin, bahwa penulisan sejarah Subang harus dilakukan secara hati-hati dan jangan terjebak oleh cerita yang tidak didukung data, apalagi menyangkut penentuan Bupati Subang, harus jelas siapa Bupati Subang Pertama dan kapan disebut Bupati Subang. Sementara itu, pemikiran H. Atju Syamsudin mengenai pembangunan Subang menyatakan bahwa Subang akan maju jika menjadi daerah industri dan jangan hanya menggantungkan terhadap sektor pertanian. Dengan demikian, Subang sebagai daerah pertanian harus mengembangkan diri sebagai daerah industri pertanian.

Bupati Subang pertama yang mempunyai hoby berenang, mendaki gunung, dan bulutangkis ini selepas dari jabatan di militer dan pemerintahan di Subang tidak berdiam diri. Karir H. Atju Syamsudin terus meningkat dan pernah memegang berbagai jabatan penting baik di tingkat kabupaten maupun propinsi. Jabatan-jabatan yang pernah disandang H. Atju Syamsudin adalah:

1. Inspektur Pembangunan Daerah Pemda Tk. I Jabar dari tahun 1979 - 1992.
2. Anggota Badan Pembina Corps Kodam III Siliwangi.
3. Ketua DHD Angkatan 45 Jawa Barat.
4. Ketua Harian Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat sampai tahun 1992.

5. Anggota Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat.
6. Pembantu Andalan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
7. Ketua Yayasan Angkatan 45 Propinsi Jawa Barat dari tahun 1993.

2. Ny. Enting Puspitasari

Berjuang tidak hanya dapat dilakukan dengan kekuatan senjata tetapi dapat pula dengan pendidikan. Pendidikan yang baik akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sebuah bangsa untuk tetap eksis dan menyongsong masa depannya dengan gemilang. Salah satu tokoh pejuang Subang yang bergerak dalam bidang pendidikan adalah Ny. Enting Puspitasari.

Penampilan Ny. Enting Puspitasari tampak sebagai tipe istri dan ibu yang bersahaja. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kehidupan masa kanak-kanaknya yang kurang bahagia. Sejak usia lima tahun, Ny. Enting Puspitasari telah berpisah dengan orang tuanya dan ikut kakaknya untuk bersekolah di Sekolah Rakyat, karena di tempat kelahirannya tidak ada sekolah. Setiap pulang sekolah Ny. Enting Puspitasari berkeliling kampung menjajakan kue dan membantu kakaknya mencuci pakaian. Kehidupan masa kecilnya yang pahit telah menempa dirinya menjadi seorang ibu yang tabah dan sabar serta mandiri dalam menjalankan hidup.

Pada masa muda, Ny. Enting Puspitasari ikut menjadi pemain dalam pertunjukan sandiwara (Tonil). Sandiwara ini sering dipergelarkan di Subang setiap lebaran Hari Raya Idul Fitri. Dari sandiwara inilah, Ny. Enting Puspitasari menemukan jodoh dengan sesama pemain tonil, yaitu Odeng Djajawisastra. Pada saat itu, pertunjukan tonil di Subang menampilkan lakon “Dasar Jodoh” dengan Odeng Djajawisastra berperan sebagai pemuda yang melamar Ny. Enting Puspitasari. Lakon tersebut ternyata menjadi kenyataan. Ny. Enting Puspitasari menikah dengan Odeng Djajawisastra. Pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 30 April 1928.

Setelah menikah, Ny. Enting selalu turut dan mendukung setiap gerak langkah suami. Odeng Djajawisastra yang akrab dipanggil Pa

Djaja adalah pegawai percetakan dan sekaligus wartawan koran “Pemandangan” dan “Sipatahun” serta aktif dalam organisasi pergerakan Partai Nasional Indonesia (PNI) di daerahnya. Sebagai wartawan, tulisan Odeng Djajawisastra sangat tajam dalam menentang penjajahan, bahkan seringkali membongkar kasus korupsi para pejabat di perkebunan.

Sementara itu, Ny. Enting Puspitasari sendiri yang berpendidikan Sekolah Rakyat mempunyai kemampuan keras untuk berjuang melawan penjajah Belanda, padahal saat itu tercatat sebagai guru di sekolah pemerintah. Gelora perjuangan Ny. Enting Puspitasari diwujudkan tahun 1932 pada saat di Subang didirikan Perguruan Taman Siswa. Ny. Enting Puspitasari segera bergabung menjadi guru di Perguruan Taman Siswa. Padahal, pada saat itu banyak guru yang takut mengajar di sekolah yang dibangun kaum pergerakan, selain honorinya yang sedikit juga selalu mendapat intimidasi dari pemerintah Belanda. Guru yang melanggar aturan Belanda akan mendapat hukuman badan. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara (pendiri Perguruan Taman Siswa) datang ke Subang untuk memberi semangat kepada para guru.

Dilain pihak, suami Ny. Enting Puspitasari yang aktif menulis di koran, diberi kepercayaan oleh saudaranya untuk menjalankan usaha percetakan di Bogor. Oleh karena itu, suami istri ini meninggalkan Subang dan menetap di Bogor untuk beberapa tahun. Pada saat di Bogor ini, selain menjalankan usaha percetakan, Ny. Enting Puspitasari dan suami mendirikan Perguruan Taman Siswa. Tempat tinggal Ny. Enting Puspitasari sekaligus merangkap sebagai sekolah.

Ny. Enting Puspitasari kembali ke Subang setelah tentara Jepang menguasai Indonesia. Odeng Djajawisastra tetap aktif sebagai wartawan dan Ny. Enting Puspitasari menjadi guru di Perguruan Taman Siswa Subang. Kisah duka sejak berkuasanya tentara Jepang sampai masa revolusi fisik di Subang selalu melanda keluarga ini. Meskipun demikian, pasangan suami istri ini tetap aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di Subang.

Masa Revolusi Fisik merupakan masa paling suram dalam kehidupan Ny. Enting Puspitasari. Sang suami tercinta, Odeng

Djajawisastra yang menjadi anggota badan perjuangan pada tahun 1947 ditangkap tentara Belanda. Sejak saat itu, Ny. Enting Puspitasari hidup sendiri karena sang suami hingga sekarang tidak diketahui nasibnya. “Kalau suami saya meninggal dimana kuburnya,” ujarnya Ny. Enting sendu. Dewasa ini, Ny. Enting Puspitasari hidup bahagia dalam usia senjanya. Kebahagiaan Ny. Enting Puspitasari yang telah berusia lebih dari 80 tahun ini dilengkapi dengan kehadiran 27 cucu dan 23 cicit.

3. Asmara

Asmara adalah sosok pejuang Subang yang banyak terlibat dalam perjuangan membela kemerdekaan Indonesia. Awal keterlibatan Asmara terjadi sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada saat itu, Asmara baru berusia 15 tahun dan duduk di kelas 2 SMP masuk kesatuan tentara di Purwakarta dengan pangkat kopral. Pangkatnya terus melejit hingga menjadi kapten pada tahun 1950.

Pada tahun 1945 sampai 1947, Asmara bertugas di Subang sampai ada perintah hijrah ke Yogyakarta. Pada tahun 1947, Asmara mendapat perintah dari Panglima Divisi (sekarang Panglima Kodam) Letkol Sadikin memimpin gabungan tentara sebanyak satu batalyon untuk hijrah ke Yogyakarta. Asmara yang berpangkat kapten merasa risi atas perintah tersebut karena dalam kesatuan tersebut terdapat tiga orang berpangkat yang berpangkat mayor, yaitu Harahap, Sugiono, dan Supardjo. Namun demikian, Letkol Sadikin dengan tegas memerintahkan agar Asmara yang memimpin dan disuruh memakai pangkat mayor.

Pada saat tiba di Yogyakarta, Asmara melaporkan keadaan pasukannya kepada Letkol Sadikin. Selanjutnya, batalyon yang dipimpin Asmara dibubarkan di Gombang dan anggotanya di kembalikan ke kesatuan asalnya. Asmara sendiri disuruh mencopot pangkat mayornya dan kembali memakai pangkat Kapten. Peristiwa penyelamatan pasukan sebanyak 1.200 orang (satu batalyon) ini sangat dibanggakan oleh Kapten Asmara.

Asmara sebagai tentara lebih banyak aktif di kesatuan 26 artileri. Pada tahun 1949 setelah terjadinya penyerahan kedaulatan Republik Indonesia, maka personil kesatuan 26 artileri dimasukkan ke dalam

TNI dan digabungkan menjadi Batalyon 5. Komandan pasukan Batalyon 5 adalah Supardjo dan wakilnya Asmara. Karir militer Asmara berakhir pada tahun 1954 dengan jabatan terakhir Komandan Batalyon 5 dan pangkat terakhir adalah Mayor. Kenaikan pangkat Asmara sering dilakukan dengan radiogram, seperti kenaikan pangkat dari Kapten menjadi mayor, dari mayor menjadi letkol, dan dari letkol menjadi kolonel. Semua kenaikan pangkat itu tidak pernah diurus oleh Asmara hingga sekarang. Oleh karena itu, tidak aneh apabila sekarang ada orang yang memanggilnya Kolonel, Mayor, bahkan Kapten. “Semua itu tidak pernah saya urus”, kata ayah dari 5 anak hasil perkawinannya dengan Hj. Siti Rachmawati.

Sebagai tentara pejuang '45, Asmara bersama dengan Otje Djundjunan, H. Atju Syamsudin dan rekan-rekannya sangat gigih menumpas PKI di Subang. Untuk menghalangi dan merintangai upaya PKI mendirikan pendidikan tinggi (Universitas Rakyat), maka Asmara bersama dengan Otje Djundjunan dan H. Atju Syamsudin mendirikan Yayasan Kutawaringin. Sebuah yayasan yang berusaha membangun pendidikan tinggi di Subang seperti STIA dan STKIP Kutawaringin.

4. Ny. Popong Otje Djundjunan

Ny. Popong Otje Djundjunan adalah wanita yang gemar berorganisasi dan bermasyarakat. Pemikirannya tentang wanita karir dan pembangunan bangsa sangat menarik. Menurut Ny. Popong Otje Djundjunan bahwa kiprah wanita secara makro dalam pembangunan sebetulnya terjemahan dari kiprah wanita secara mikro dalam lingkungan keluarga. Wanita yang aktif dalam organisasi PKK, Dharma Wanita, dan lain-lain tetapi rumahnya berantakan tidak ada nilainya. Dewasa ini cenderung wanita salah kaprah. Padahal tugas utama wanita secara kodrati berada di lingkungan keluarga.

Oleh karena itu, Ny. Popong Otje Djundjunan berpesan kepada kaum wanita di Kabupaten Subang, agar jangan lepas tanggung jawab terhadap tugas utama wanita. “*Ulah cul dogdog tinggal igel*”. Semua itu, bukan berarti wanita tidak boleh aktif berorganisasi tetapi harus selektif dan bisa membagi waktu. Aktif berorganisasi tidak berarti meninggalkan tugas di keluarga.

Ny. Popong Otje Djundjungan telah aktif dalam organisasi kewanitaan di Subang sejak tahun 1960-an pada saat mendampingi suaminya, Kol. Purn. Otje Djundjungan Alm. menjabat Dandim Purwakarta di subang (1963-1967). Pada saat itu, Ny. Popong Otje Djundjungan menjadi ketua BKOW. Sebuah organisasi yang mengkoordinasikan organisasi-organisasi kewanitaan yang ada di daerah Subang. Sebagai ketua BKOW, Ny. Popong Otje Djundjungan berusaha keras untuk mencegah menjalarnya paham komunis dalam masyarakat, terutama wanita Subang.

Pada sekitar tahun 1965, daerah Subang merupakan daerah basis komunis di Jawa Barat. PKI dengan berbagai cara menarik rakyat Subang menjadi anggotanya. Untuk meraih massa, PKI mengakronimkan PKI menjadi Perkumpulan Kiai Indonesia dan isu pembagian tanah bagi anggota PKI. Dengan demikian, banyak warga masyarakat yang tertarik menjadi anggota PKI. Selain itu, PKI pun mendirikan organisasi-organisasi onderbouw seperti lekra dan gerwani. Gerwani adalah organisasi wanita PKI yang juga menjadi anggota BKOW. Gerwani ini tampak selalu merongrong. Dalam setiap rapat BKOW Subang, anggota gerwani yang hadir pasti 3 orang, yaitu seorang penulis, juru bicara, dan penentang. Apapun bahasan rapat pasti mereka tentang. Melihat sepak terjang anggota Gerwani tersebut dan adanya kekhawatiran terhadap penyusupan paham komunis pada wanita Subang maka Ny. Popong Otje Djundjungan berinisiatif untuk mencegahnya atau merintanginya dengan membentuk Ikatan Seniwati Sunda. Organisasi ini diikuti oleh 300 pesinden. Tujuan organisasi ini adalah membina pesinden agar tidak masuk organisasi onderbouw PKI, Lekra.

Sepeninggal suaminya Kol. Purn. R. Otje Djundjungan yang meninggal tahun 1986, NY. Popong Otje Djundjungan tetap aktif dalam organisasi bahkan pernah menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Dalam usia tuanya Ny. Popong Otje Djundjungan tetap aktif di beberapa organisasi seperti anggota Dewan Pertimbangan Golkar, Pasundan Istri, Bakom PKB, Balai Perguruan Putri, Pramuka, KONI, Pampoka, Damasa dan IMABA.

5. H. Ahmad Sudarman

Mayor Purn. H. Ahmad Sudarman lahir di Sukabumi pada tanggal 15 Nopember 1927. Perjalanan karirnya dalam militer dimulai pada tanggal 30 September 1945 bergabung dengan BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang dipimpin Rd. Ahmad Wirana Kusumah. Sejak tanggal 2 Oktober 1945, H. Ahmad Sudarman diangkat menjadi Komandan Seksi 3 Kompi I BKR dan bertugas di daerah Bandung Selatan. Teman-teman seperjuangan H. Ahmad Sudarman antara lain Kapten Oding Hudaya, Kapten H. Sulaeman, Kapten O. Nata Suarsa, Kapten Suryana, dan Lettu Adria.

Perjalanan karir H. Ahmad Sudarman di militer TNIAD cukup baik. Pada tahun 1960 H. Ahmad Sudarman dipercaya menjadi Komandan Kompi 4 Batalyon 322 Resimen 7/Siliwangi. Pada tahun 1963 H. Ahmad Sudarman menjadi perwira sekuriti/perwira dokumentasi di Sudan I Siliwangi, merangkap anggota DPRD GR Kabupaten Bandung. Pada tahun 1967, H. Ahmad Sudarman diangkat menjadi Kepala Seksi I Kodim 0605 Subang/Purwakarta.

H. Ahmad Sudarman ikut memberi andil besar dalam penumpasan PKI di Subang. Setelah terjadi pemberontakan G30S/PKI di Jakarta, maka Kodim 0605 Subang/Purwakarta melakukan operasi pemberantasan PKI dengan menangkap para tokoh dan kader PKI di Subang dan Purwakarta. Untuk mengankan Subang dari pengaruh sisa-sisa G30S/PKI, maka Kodim 0605 pada tahun 1967 melakukan pembersihan sisa-sisa G30S/PKI dengan nama operasi "PO. Kalajengking". Sasaran operasi diarahkan pada instansi/dinas jawatan sipil dan ABRI, Perkebunan PTP XXX Subang dan Proyek Waduk Jatiluhur.

Upaya pembersihan ke instansi pemerintah ini dilakukan dengan membentuk (*team screening*) di tiap instansi sehingga pegawai atau karyawan yang terlibat PKI atau organisasi (*onderbouw*) PKI akan dapat segera diketahui. Untuk mengefektifkan tugas team (*screening*) dibentuk Badan Koordinasi Intelejen (Bakor Intel), yaitu sebuah badan yang bertugas meneliti kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil team (*screening*) dengan cara melakukan cek ricek sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya fitnahan seseorang.

Bakorintel diketuai Komandan Sub. Detasemen Polisi Militer yang merangkap Laksusda Subang. Anggota Bakorintel terdiri atas semua unsur intel yang berada di kesatuan ABRI dan Kejaksaan Negeri Subang. Menurut H. Ahmad Sudarman, bahwa adanya Bakorintel ini dapat mempercepat penyelesaian karena pelarian PKI dari Subang/Purwakarta dapat segera diselesaikan oleh aparat di daerah tempat mereka bersembunyi. Untuk memberi penerangan terhadap masyarakat tentang kegiatan G30S/PKI maka pada tanggal 17 Agustus 1967 pimpinan Kodam VI Siliwangi merestui dibentuknya organisasi Angkatan Muda Siliwangi (AMS). Motto AMS adalah "Siliwangi adalah Jawa Barat dan Jawa Barat adalah Siliwangi".

Selain itu, mengingat Subang pernah menjadi basis komunis PKI bahkan menjadi barometer kekuatan PKI di Jawa Barat pada waktu itu, maka berkat informasi dari Pusat Intelejen pada tanggal 17 Desember 1968, di kota Subang terbongkar adanya organisasi "Biro Khusus". Oleh karena itu, beberapa orang tokoh pimpinan/kader segera ditangkap. Penyelesaian masalah "Biro Khusus" ini akhirnya diambil alih oleh Intel Pusat karena menyangkut tokoh-tokoh yang berada di luar Subang/Purwakarta.

H. Ahmad Sudarman mengakhiri masa baktinya di militer pada tanggal 30 Juni 1982. Selain memegang jabatan di militer, ayah dari 7 anak ini pernah memegang jabatan di lingkungan DPRD Subang, yaitu Ketua DPRD Subang tahun 1971-1976, Wakil Ketua DPRD Subang tahun 1976-1982.

6. R. Gelar Rachman

R. Gelar Rachman bukan asli orang Subang tetapi berasal dari Ciamis. Dia dilahirkan pada tanggal 11 Juli 1926 dari 6 bersaudara. Dia menikah dengan Nyi Mas Onih Supartini yang berasal dari Subang dan dikaruniai 10 orang anak. Orang tua R. Gelar Rachman termasuk keluarga yang berstatus ekonomi berkecukupan, dibanding masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, orang tua R. Gelar Rachman menaruh perhatian besar terhadap pendidikan anak-anaknya.

Pada saat muda, R. Gelar Rachman bercita-cita untuk menjadi ahli pertanian sebagaimana yang diinginkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, R. Gelar Rachman di sekolahkan di HIS Pasundan di

Sukamandi. Pada masa sekolah ini, R. Gelar Rachman aktif dalam Padvinderly (Kepanduan Yong Pasundan) dan turut bergabung dengan para pemuda yang berjiwa nasionalis untuk membentuk gerakan anti penjajah di Sukamandi. Akhirnya, cita-cita R. Gelar Rachman kandas karena tidak dapat melanjutkan pendidikan ke Cultuur School (Sekolah Pertanian) di Malang akibat pendudukan Jepang di Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang, R. Gelar Rachman masuk menjadi anggota Seinendan. Selanjutnya, setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia R. Gelar Rachman ikut bergabung dengan pasukan BKR menjadi anggota pasukan Kompi IV Batalyon M Sukamandi.

Pada tahun 1947 pasukan BKR R. Gelar Rachman ditugaskan di daerah Ciamis. Pada saat itu, R. Gelar Rachman berhasil menembak jatuh pesawat pengintai Belanda sejenis capung sehingga Pilot dan co pilotnya tewas. Selanjutnya, R. Gelar Rachman berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda dan mendapat siksaan yang sangat berat. Hukuman tembak mati dijatuhkan Belanda. R. Gelar Rachman berhasil lolos dari maut karena melarikan diri ke Sukamandi berkat bantuan seorang anggota KNIL yang berjiwa nasionalis.

Karir militer R. Gelar Rachman terus meningkat dan aktif dalam penumpasan gerakan separatis di Jawa Barat. Pada tahun 1950, R. Gelar Rachman diangkat menjadi Staf Komando Militer (KMK) Kota Subang Dan Kompi II Teritorial Subang PST III Purwakarta yang aktif dalam penumpasan gerakan separatis APRA pimpinan Westerling. Pada tahun 1953, R. Gelar Rachman menjadi Kepala Peralatan Kompi II Batalyon 326 Siliwangi dan sebagai Kepala Intendans/Komandan Peleton Pemeliharaan/Perwira Seksi IV Batalyon 326 Siliwangi. Pada saat itu, R. Gelar Rachman aktif dalam penumpasan gerakan DI/TII Kartosuwiryo di wilayah Garut dan Tasikmalaya. Selanjutnya, R. Gelar Rachman menjadi Komandan Peleton Pemeliharaan Kodim 0618 Bandung, lalu dialih tugaskan ke Kodim 0605 Subang/Purwakarta sebagai Pa Lur/Pa Sie. Pada tahun 1965 ikut aktif dalam penumpasan G30S/PKI di wilayah Subang/Purwakarta.

R. Gelar Rachman pensiun dari militer (TNI AD) pada bulan Juni 1981. Karir R. Gelar Rachman diteruskan di lingkungan sipil,

yaitu di Pemda Kabupaten Purwakarta/ Subang. Antara tahun 1966-1985, R. Gelar Rachman bertugas di Badan Pemerintahan Harian Sie I dan Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Subang.

Sejak tahun 1945 sampai sekarang, R. Gelar Rachman telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi nusa dan bangsa dan terutama bagi pembangunan Kabupaten Subang. Andil besarnya R. Gelar Rachman diakui oleh teman-teman seperjuangannya seperti Moh. Kurdi, Sutapraja, R. Edeng Afandi, Mayor Purn. E. Kosasih, Adri Suyatna, Muchtar, Ilyas, Hasbulah, Danu Mihardja, Ateng Suparman, Sumarna, Rudi, R. Wardjita, Kapten Purn. Iskandar, Letnan Purn. Waslim dan lain-lain.

Masa pensiun bagi R. Gelar Rachman bukan berarti berhenti mengabdikan bagi bangsa. Setelah pensiun pun R. Gelar Rachman tetap menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi pembangunan Subang dengan aktif di beberapa organisasi, seperti Ketua II Angkatan 1945 Kabupaten Subang, Ketua Yayasan Angkatan 1945 Kabupaten Subang, dan anggota Dewan Paripurna Angkatan 1945 Propinsi Jawa Barat.

7. Muchtar

Muchtar dilahirkan pada tanggal 25 Juni 1925 di Purwadadi Subang dari 6 bersaudara. Orang tua Muchtar tergolong berstatus sosial ekonomi yang cukup baik. Oleh karena itu, berkat dukungan orang tua maka Muchtar berhasil menamatkan pendidikan HIS. Pendidikan ini dilakukan dengan perjuangan yang gigih karena harus ditempuh dari Purwadadi ke Subang.

Perjalanan karir Muchtar banyak berada di lingkungan pemerintahan sebagai pamong praja. Muchtar pertama kali bekerja sebagai Mantri Polisi di Pabuaran selama 4 tahun dan di Subang selama 4 tahun. Pada tahun 1959 Muchtar ditugaskan menjadi Mantri Polisi di Sagalaherang. Pada saat inilah, Muchtar mendapat pengalaman yang berkesan dengan ikut serta dalam penumpasan DI/TII, yaitu menjadi “pagar betis” dalam pengepungan di Gunung Kujang. Selanjutnya, Muchtar diangkat pada tahun 1962 menjadi Camat Sagalaherang dan dalam tahun yang sama dipindahkan ke Subang.

Muchtar tidak lama memegang jabatan camat. Pada tahun 1962 tersebut, Muchtar mendapat suara terbanyak dalam pemilihan BPH (Badan Pemerintahan Harian) dan juga terpilih menjadi Sekwilda Purwakarta di Subang. Muchtar memilih jabatan sebagai Sekwilda dan memegang jabatan ini selama 12 tahun.

Dewasa ini, Muchtar telah memasuki masa pensiun dan hidup bahagia bersama istri, Unah binti Rd. Wijaya asal Kosambi Karawang yang dinikahinya pada tanggal 25 September 1945. Muchtar dikaruniai 5 orang anak, yaitu 2 orang putra dan 3 orang putri.

8. Roeswana

Roeswana merupakan anak tunggal kelahiran Subang tanggal 27 Desember 1925. Pendidikan Roeswana adalah diploma Sekolah Rakyat (SR) yang pada waktu itu hanya sampai kelas tiga. Dengan bekal diploma Sekolah Rakyat ini, Roeswana aktif dalam dunia politik, yaitu sebagai Ketua IP-KI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) cabang Subang. Dia diberi hak mewakili IPKI untuk duduk sebagai anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH) Pemerintah Tk. II Subang.

Keikutsertaan Roeswana dalam perjuangan kemerdekaan dimulai sejak awal Indonesia merdeka dengan bergabung dalam Laskar Pesindo. Dia terlibat dalam berbagai pertempuran dan bahkan ikut hijrah ke Yogyakarta pada tahun 1947. Padahal, pada saat itu Roeswana baru menikah dengan seorang gadis yang masih familinya, tetapi terpaksa harus ditinggalkan. Pada saat kembali dari Yogyakarta tahun 1949, ternyata istrinya telah menikah dengan orang lain.

Dalam perkembangan selanjutnya, Roeswana lebih banyak bergerak dalam dunia politik. Peranan Roeswana ini tampak pada tahun 1960-an terutama dalam menentang gerakan komunis yang dimotori oleh PKI dan organisasi-organisasi onderbouwnya, seperti Lekra dan Gerwani. Untuk menguasai massa pelajar, PKI berusaha mendirikan pendidikan UNRA (Universitas Rakyat), tetapi Roeswana dan para pejuang lain segera mengimbangi dengan mendirikan Universitas Kutawaringin (UNKUWA), yang sekarang berkembang menjadi STIA dan STKIP Kutawaringin.

Pada tahun 1965 setelah terjadinya peristiwa G30S/ PKI, Roeswana dengan didukung oleh Dandim 0605 Purwakarta/Subang menjadi ketua Kesatuan Aksi Massa dalam menumpas PKI. Partai IPKI yang dipimpin Roeswana berhasil menggugah masyarakat Subang untuk memproklamkan Subang menjadi kabupaten Benteng Pancasila. Hal ini berhasil berkat upaya yang dilakukan melalui gerakan Operasi Mental Pancasila (Opmen Pancasila).

Massa IPKI pada Pemilu tahun 1971 sekitar 80 persen diambil alih oleh Golongan Karya, sedangkan IPKI sendiri berfusi ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sejak saat itu, Roeswana berhenti dari dunia politik dan hidup sebagai pensiunan dari Angkatan Darat, meskipun tidak pernah berpakaian seragam TNI. “Saya termasuk TNI non NRP, karena itu pensiun saya sangat kecil tetapi saya tidak pernah menyesal telah bergabung dengan Laskar Pesindo jadi tidak pernah memikirkan pensiun”, kata Roeswana.

9. H. Karna Hudaya

H. Karna Hudaya adalah anak bungsu dari 4 bersaudara yang dilahirkan pada tanggal 17 September 1930 di Kampung Melong Desa Jambelaer Kecamatan Kalijati Subang. Orang tua H. Karna Hudaya termasuk keluarga yang berstatus sosial ekonomi cukup baik atau orang berada. Sedangkan, masyarakat Subang umumnya dalam kondisi kurang hanya cukup makan saja.

Sejak kecil, H. Karna Hudaya telah bercita-cita untuk menjadi pemimpin. Untuk mencapai cita-cita tersebut, H. Karna Hudaya dengan dukungan orang tuanya berhasil menamatkan pendidikan di sekolah Vervolgschool (setingkat Sekolah Dasar) dan melanjutkan ke sekolah Landbouw Class (Sekolah Pertanian). Oleh karena situasi tahun 1945 tidak menentu karena baru terjadi Proklamasi Ke-merdekaan Indonesia sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan, maka H. Karna Hudaya bergabung dengan badan perjuangan menjadi prajurit dengan memakai pangkat Jepang. Pada saat itu, masuk tentara tidak ada syarat apa-apa pokoknya ada minat langsung diterima.

Perjalanan karir militer H. Karna Hudaya terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga berbagai jabatan militer pernah dipegangnya, seperti Komandan kelompok, Komandan regu, Komandan Peleton,

Wadanki, Komandan Kompi, Seksi Operasi, Kepala Biro pengamanan di Kodam, Kepala Biro di Skogar, dan Korem. Pada tahun 1965 selepas peristiwa G30S/PKI, H. Karna Hudya mendapat tugas untuk ikut dalam memberantas PKI di Jakarta. Selama tahun 1966-1968, H. Karna Hudaya bergabung dengan Yon 317 dan selanjutnya di-pindahkan ke Yon 312, dan kemudian ditugaskan ke Karawang dan Cirebon. Pada tahun 1979-1984 H. Karna Hudaya memegang jabatan sebagai Dandim Karawang. Pada pertengahan tahun 1984, Gubernur dan Pangdam menempatkan H. Karna Hudaya di Subang memegang jabatan Ketua DPD Golongan Karya Kab. Subang. Pada saat dipimpin oleh H. Karna Hudaya, Golkar meraih suara 92,7 persen pada Pemilu tahun 1987.

Menurut H. Karna Hudaya dalam bekerja yang penting adalah ketekunan, disiplin, dan akhlak, maka akan berhasil dalam karir apapun. Pangkat militer H. Karna Hudaya mentok di Letnan Kolonel, karena pada tahun 1973 gagal masuk Sesko karena kelebihan usia 2 bulan. Teman-teman sekolahnya dulu telah banyak yang berpangkat tinggi, seperti Wismoyo dan Nuriana. Padahal waktu di Secapa, H. Karna Hudaya termasuk siswa terbaik (rangking ke-20 dari 400 siswa). Meskipun demikian, H. Karana Hudaya tetap berbangga hati sebagai salah satu prajurit pejuang apalagi karena anak keduanya mengikuti jejaknya di TNI dan kini telah berpangkat Mayor. Dewasa ini, H. Karna Hudaya hidup bahagia bersama istrinya Hj. Arun Redikah yang dinikahinya pada tanggal 16 Agustus 1954, yang telah memberinya 9 orang anak.

10. Idit Supardi Madiana

Idit Supardi Madiana adalah sosok seniman Subang yang banyak bergelut dalam pelestarian dan pemanfaatan kesenian daerah Subang. Dia adalah putra asli Subang yang dilahirkan pada tanggal 23 Maret 1940. Pengalaman seni Idit Supardi Madiana telah dimulai sejak kecil, terutama sejak sekolah di SGA Purwakarta tahun 1960. Pada saat itu, Idit Supardi Madiana menjadi redaktur Majalah Dinding dan pemain sandiwara SGA Purwakarta. Selain itu, Idit Supardi Madiana pun pernah menjadi anggota Drama Bumi Siliwangi IKIP Bandung.

Pada tahun 1960-an, Idit Supardi Madiana dengan dukungan Letkol Otje Djundjungan Dandim 0605/Purwakarta Subang dan Kajari

Ismail, maka dibentuklah ‘Bale Kesenian Kutawaringin’. Organisasi ini dimaksudkan untuk membendung berkembangnya Lekra/PKI. Setelah terjadi peristiwa G30S/PKI, Bale Kesenian Kutawaringin berubah menjadi Team Kesenian Operasi Mental Pancasila (OPMEN) dengan motto: “Subang hudang-Subang tandang-Subang berjuang-Subang meunang”. Dengan kerja keras ini akhirnya Subang berhasil meraih Piala Unggul Pancasila yang menjadi dasar sebutan Benteng Pancasila.

Pada tahun 1967, Idit Supardi Madiana bersama dengan Armin Asdi dan Ir. Aang Anwar Wijaya mendirikan majalah berbahasa Sunda yang bernama Majalah Kutawaringin. Rasa cinta Idit Supardi Madiana terhadap kesenian tradisional telah mendorongnya untuk menata kesenian Sisingaan sebagai kesenian helaran menjadi kesenian arena. Perubahan bentuk pentas Sisingaan ini dilakukan oleh Idit Supardi Madiana bulan Juli 1968 untuk menyambut kedatangan Presiden Soeharto pada acara panen perdana PB-5 Hari Krida Pertanian se-Jawa Barat di Desa Muara Kecamatan Ciasem Subang. Selanjutnya, penyempurnaan kesenian Sisingaan menjadi kesenian panggung seperti sekarang dilakukan Idit Supardi Madiana bekerja sama dengan R. Ading Affandi (RAF), Syarif Hidayat, dan Danu Thea. Pada tahun 1975, Idit Supardi Madiana bersama RAF dan RN. Sutarmas (Kasie Kebudayaan Depdikbud Kab. Subang) mendirikan Studi Teater Pakusarakan (Stupa).

Prestasi Idit Supardi Madiana dalam seni sangat banyak. Pada tahun 1975, Idit Supardi Madiana terpilih sebagai sutradara terbaik dalam Festival Teater se-Jawa Barat. Pada tahun 1976, Idit Supardi Madiana bekerja sama dengan Achlan W. (Ketua Pepadi Subang) membina pedalangan Subang hingga meraih Bokor Kancana Astagina pada Binojakrama Wayang Golek se-Jawa Barat selama tiga kali berturut-turut.

11. AHS. Armin Asdi

AHS. Armin Asdi yang dilahirkan pada tahun 1933, adalah tokoh seniman yang aktif dalam politik. Dalam dunia seni, AHS. Armin Asdi bersama dengan Idit Supardi Madiana banyak bergelut dalam penggarapan kesenian daerah Subang, terutama kesenian

Sisingaan. Sedangkan dalam dunia politik, AHS. Armin Asdi aktif dalam pembentukan Sekber Golkar dan pengurus DPD Golkar Subang.

Pada awalnya, AHS. Armin Asdi adalah seorang guru di sebuah Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) di Jakarta. Pada tahun 1966 atau hanya beberapa bulan setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI, AHS. Armin Asdi kembli ke daerah Subang dan diminta bantuann oleh Dandim 0605 Purwakarta/Subang waktu itu Otje Djundjunan untuk ikut menyukseskan Operasi Mental Pancasila (OPMEN Pancasila). Operasi ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pengaruh dan bahayanya ajaran komunis.

Peranan AHS. Armin Asdi dalam OPMEN Pancasila sangat terasa dalam masyarakat Subang. Dalam upaya memantapkan OPMEN Pancasila maka pada tahun 1967, AHS. Armin Asdi bersama dengan rekan seperjuangannya membuat Majalah Kutawaringi dan ikut terlibat dalam pendirian Yayasan Kutawaringin yang bergerak dalam pendidikan tinggi, dan ikut dalam pembentukan Bale Kesenian Kutawaringin.

Ayah dari 14 anak yang dikenal sekarang sebagai pengusaha ini aktif pula dalam kegiatan politik di daerah Subang. AHS. Armin Asdi ikut andil dalam pembentukan Sekber Golkar Subang dan menjadi pengurus DPD Golkar Subang. AHS. Armin Asdi pernah menjadi anggota DPRD II Subang selama 3 periode, yaitu dari tahun 1968 sampai 1987. Selain itu, pada tahun 1977 AHS. Armin Asdi dipercaya oleh Bupati Subang RH. Atju Syamsudin menjadi Ketua Panitia Khusus Penyelesaian Penyusunan Buku Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dan berhasil merangkum sejarah Subang dari hasil penelitian para sarjana IKIP Bandung serta ditetapkan hari jadi Kabupaten Subang tanggal 5 April 1948. Susunan Panitia Khusus Penyelesaian Penyusunan Buku Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dengan Ketua adalah AHS. Armin Asdi, Wakil Ketua adalah Idit Supadi Madiana, Sekretaris adalah Hitnes Surawijaya, BA. dan R. Moch. Nasir, serta dibantu beberapa anggota yaitu Engkos Endang Rukmana, E. Rasnadi BA., Sedri Suyaman, Engkus Kusnendar, dan Aling Haditresna. ♦

BAB IV

PENUTUP

PADA abad ke14–16 Masehi nama Subang sebagai nama daerah belum muncul dalam catatan sejarah, yang muncul adalah nama-nama sungai besar yang bermuara ke Laut Jawa, seperti Sungai Ciasem, Cipamanukan, dan Cijengkol. Nama Subang sebagai nama daerah baru muncul dalam catatan sejarah pada abad ke 17 dan 18 Masehi, nama Subang meliputi nama desa, tempat, dan gunung.

Pada masa Kerajaan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati sedang gencar-gencarnya melaksanakan Islamisasi di Jawa Barat, Subang di bawah kekuasaan Aria Wangsa Goparana memegang peranan yang penting sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa Barat bagian Barat. Dari Subang, Islam menyebar ke daerah Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, dan Limbangan. Kemudian Subang pernah di bawah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang di bawah kekuasaan Mataram. Selanjutnya Subang menjadi milik VOC Belanda, setelah itu beralih ketangan Pemerintahan Inggris. Kekuasaan Inggris tidaklah lama, Subang kemudian jatuh kembali dalam kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda.

Subang khususnya Kalijati menjadi tempat yang sangat penting bagi sejarah Indonesia, sebab Kalijati menjadi saksi berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda dan yang menyerah kepada Jepang. Setelah kekuasaan Jepang berakhir (1945), Subang merupakan daerah kewedanaan yang berada di wilayah Kabupaten Karawang

yang berkedudukan di Purwakarta, dan termasuk Keresidenan Jakarta. Pada awal tahun 1946, Kota Subang dijadikan tempat kedudukan Residen Jakarta. Setelah Agresi Militer Belanda, pada tanggal 5 April 1948 dibentuk Kabupaten Karawang Timur, dengan wilayahnya meliputi Subang dan sebagian besar Purwakarta. Tanggal inilah yang ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Subang. ♦

DAFTAR PUSTAKA

- BAPEDA dan BPS. Jawa Barat, 2003, *Analisis Komposisi Tenaga Kerja Per Kecamatan di Jawa Barat, tahun 2000*
- BAPEDA dan BPS. Kabupaten Subang, Desember 2001, *PDRB, Per Kecamatan di Kabupaten Subang, tahun 1997 – 2000.*
- BAPEDA dan BPS. Jawa Barat, *Sakerda tahun 1992 – 2000* (berbagai penerbitan)
- BPS, 1984, *Laporan Perekonomian Indonesia*, Jakarta
- BPS, Penduduk Jawa Barat – *Hasil Sensus Penduduk tahun 1990 dan 2000* (berbagai penerbit). BPS., Agustus 2001
- BPS, 2002, *Statistik Indonesia 2001*, Jakarta
- BPS Jawa Barat, 2002, *Karakteristik Penduduk Kabupaten Subang – Hasil SP tahun 2000* (katalog BPS ; 2116.3215)
- E. Sastraatmadja, 1994, Kantor Menko KESRA, 1992, *Buku Panduan Penyusunan IKKA*, Jakarta
- Koyoshi W., 1987, *Principle and Application of value added Productivity Analysis*
- Aries, *Sejarah Kabupaten Purwakarta*, Skripsi ♦

Sejarah Kabupaten Kuningan

Ketua

Dra. Euis Thresnawati

Anggota

Drs. Heru Erwantoro

Dra. Ani Rostiati

Drs. T. Dibyo Harsono

Drs. Agus Heryana

Drs. Sindu Galba

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PENULISAN sejarah lokal atau sejarah daerah sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memenuhi keinginan atau hasrat untuk mengetahui dan memahami masa lampau atau sejarah daerah tempat tinggal dan daerah asal kita. Selain itu, juga untuk mengetahui asal usul budaya, dan untuk mengerti serta memahami pengetahuan tentang perkembangan suatu daerah. Pengetahuan ini tentu sangat diperlukan agar tidak terjebak dalam pengulangan kesalahan yang telah dilakukan pada masa lampau serta dapat menumbuhkan keadaan akan identitas kita. Sejarah juga dapat berfungsi sebagai media untuk memupuk rasa cinta terhadap tanah tumpah darah, meningkatkan rasa bangga dan rasa harga diri seseorang, serta menumbuhkan rasa solidaritas sosial.

Pada periode pembangunan dewasa ini sangat diperlukan pemahaman mengenai sejarah daerah yang lengkap, terutama bagi para penentu kebijakan. Pemahaman mengenai sejarah masa lalu ini dapat dipergunakan sebagai alternatif dalam mencari pemecahan berbagai persoalan pembangunan dewasa ini maupun masa yang akan datang.

Kuningan adalah sebuah kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Barat bagian Timur. Kabupaten ini memiliki rentang sejarah yang cukup panjang dan erat kaitannya dengan proses penyebaran

agama Islam yang di lakukan dari Cirebon. Oleh karena itu, perjalanan sejarah Kuningan dan bahkan awal mula munculnya nama “Kuningan” sangat erat kaitannya dengan Cirebon. Meskipun demikian, jauh sebelum masuknya pengaruh Islam di daerah ini telah terdapat komunitas masyarakat dalam bentuk pemerintahan. Setelah masuknya Islam daerah ini menggunakan nama Kuningan sebagai identitas daerah.

Tentang asal-usul Kuningan dapat ditemukan dalam historiografi tradisional yang ditulis dalam bentuk naskah pada abad Ke -18 dan ke -19. Dalam ilmu sejarah, naskah-naskah ini kebanyakan dianggap sebagai sumber sekunder, karena tidak ditulis pada zamannya atau ditulis lama setelah berlangsungnya peristiwa. Meskipun demikian, dalam ilmu sejarah ada prinsip, bahwa dalam ketiadaan sumber primer atau sumber sejaman, maka sumber sekunder dapat dipergunakan, minimal untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat tentang sejarah sendiri. Selain itu juga, naskah-naskah itu dapat dijadikan pegangan sementara hingga sumber primer ditemukan.

Perjalanan sejarah Kuningan telah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Peristiwa demi peristiwa telah banyak terjadi di daerah ini sejak masa Hindu sampai sekarang. Oleh karena itu, dirasakan perlu adanya upaya untuk melakukan rekontruksi sejarah yang telah terjadi di daerah Kuningan. Pada saat ini, akan dilakukan penelitian sejarah berdirinya Kabupaten Kuningan dengan bahasan dari zaman Pra sejarah hingga berdirinya Kabupaten

Kuningan dengan judul Penelitian **“Sejarah Kabupaten Kuningan”**.

B. Perumusan Masalah

Penelitian tentang Sejarah Berdirinya Kabupaten Kuningan akan berusaha mengungkap secara garis besar perkembangan Kuningan dari masa ke masa serta proses terbentuknya kabupaten. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi dasar kajian yaitu :

1. Bagaimana perkembangan Kuningan dari masa ke masa
2. Bagaimana proses terbentuknya Kabupaten Kuningan
3. Bagaimana perkembangan Kuningan setelah menjadi kabupaten

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum adalah untuk menangkal dan mencegah hilangnya berbagai peristiwa sejarah daerah sebagai bagian dari sejarah nasional. Sedangkan tujuan Khusus adalah untuk mengungkap perjalanan sejarah sampai sekarang, dengan fokus terutama pada proses berdirinya Kabupaten Kuningan.

D. Ruang Lingkup

Penelitian Sejarah Berdirinya kabupaten Kuningan ini secara Geografis dan tematis termasuk kategori sejarah lokal. Maksudnya, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas yaitu Kabupaten Kuningan dengan fokus utama pada sejarah yang bersangkutan dengan asal mula berdirinya Kabupaten Kuningan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk lebih jelasnya keempat tahapan itu akan diuraikan di bawah ini :

1. Heuristik atau proses pencarian dan pengumpulan sumber, pada tahap heuristik ini digunakan tehnik-tehnik sebagai berikut :
 - a. Studi kepustakaan, dilakukan di berbagai perpustakaan baik di Bandung maupun Kuningan.

- b. Kerja lapangan, yaitu langsung ke tempat tujuan
 - c. Melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang berperan atau mengetahui mengenai Sejarah Kuningan
2. Kritik sumber untuk memperoleh kebenaran dan kejernihan data, baik kritik ekstern (tentang wujud sumber) ataupun kritik intern (tentang isi sumber) maupun melakukan perbandingan data yang berasal dari berbagai sumber.
3. Pada tahap interpretasi, data mengalami proses pemberian makna dan penafsiran secara jelas dan lengkap.
4. Historiografi adalah proses terakhir dalam penulisan sejarah yang berupa proses merangkai fakta-fakta yang berhasil dihimpun dalam sebuah kisah sejarah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di susun sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II Profil Kabupaten Kuningan

Pada bab II ini akan diuraikan mengenai Profil Kabupaten Kuningan yang mencakup Geografi, Kependudukan, potensi pariwisata, dan potensi ekonomi sosial.

- BAB III Budaya. Terbentuknya Kabupaten Kuningan,

Pada bab ini menguraikan tentang Kuningan dari masa ke masa, proses terbentuknya Kabupaten Kuningan serta perkembangan Kuningan setelah menjadi kabupaten.

- Penutup

Untuk kesempurnaan laporan penelitian akan dilengkapi dengan daftar pustaka, narasumber, dan lampiran. ♦

BAB II

PROFIL KABUPATEN KUNINGAN

A. Gambaran Umum

KABUPATEN Kuningan adalah salah satu daerah di Propinsi Jawa Barat bagian timur dengan luas 1.178,57 Km² atau 117.857,55 ha yang terdiri atas pegunungan dan dataran tinggi. Secara administratif sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Cilacap, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Brebes, Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan batas alamnya berupa Gunung Ciremai di sebelah barat, Sungai Cijolang di sebelah selatan, Situ Marahayu di sebelah timur, serta Sungai Cisanggarung dan sebagian jalan Caracas-Sindanglaut di sebelah utara.

Daerah administrasi pemerintahan Kabupaten Kuningan terbagi menjadi 29 kecamatan, 12 kelurahan, dan 375 desa. Ke-29 Kecamatan tersebut adalah : Kuningan, Darma, Kadu Gede, Salajambe, Subang, Ciniru, Garawangi, Lebakwangi, Kramatmulya, Luragung, Ciwaru, Cibingbin, Cidahu, Ciawi-gebang, Cilimus, Jalaksana, Mandirancan, Cigugur, Nusaherang, Pancalang, Hantara, Cipicung, Cimahi, Kalimanggis, Cibeureum, Karangancana, Cilebak, Japara, dan Pasawahan. Kecamatan berpenduduk terpadat adalah Kecamatan Kuningan yaitu 259.297 jiwa setiap Km², sedangkan yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan Subang, yaitu 33.959 jiwa setiap Km².

Kabupaten Kuningan yang terletak di antara $108^{\circ} 20'$ - 108° Bujur Timur dan $6^{\circ} 45'$ - $7^{\circ} 13'$ Lintang Selatan terdiri atas permukaan tanah yang relatif datar dengan variasi berbukit-bukit terutama Kuningan bagian barat dan selatan dengan ketinggian berkisar 700 m di atas permukaan laut. Bagian timur dan utara memiliki tanah yang semakin rata dengan ketinggian antara 120 meter sampai 222 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya daerah ini beriklim tropis dengan temperatur bulanan berkisar antara 18° - 32° serta curah hujan menunjukkan angka rata-rata 2000 mm sampai dengan 4000 mm per tahun. Antara bulan September-April terjadi musim hujan sedangkan pada bulan Mei-Agustus terjadi musim kemarau. Ibu kota kabupaten adalah kota Kuningan.

Daerah Kuningan memiliki banyak sumber air, tetapi kekayaan alam itu lebih banyak dinikmati oleh penduduk luar Kuningan, khususnya penduduk Kota dan Kabupaten Cirebon. Empat sumber air di Kabupaten Kuningan yang dimanfaatkan secara komersial oleh berbagai perusahaan di Kota dan Kabupaten Cirebon antara lain :

1. Sumber air tanah di Desa Cipaniis, Kecamatan Mandirancan, yang berdebit 860 liter/detik digunakan Perusahaan Air Minum Kota Cirebon.
2. Waduk Darma di Kecamatan Darma berdebit 100 liter/detik, dimanfaatkan Pabrik Gula Tersana di Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon.
3. Untuk memenuhi air kolam renang Ciperna milik Pertamina, diambil air dari sumber air tanah Cibulan, Kecamatan Jalaksana.
4. Sumber mata air dari Talaga Remis, Kecamatan Mandi-rancan, khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pabrik semen Palimanan Kabupaten Cirebon, debit airnya 30 liter/detik.

Aliran air tanah di Kabupaten Kuningan pada umumnya mengalir dari barat ke timur. Semakin ke timur dan selatan, air tanah semakin berkurang. Di musim kemarau, kebutuhan air untuk minum dan pertanian di bagian tengah dan timur kabupaten ini dapat diatasi dengan membuat sumur galian, tetapi tidak demikian untuk daerah bagian selatan.

Secara geologis Kabupaten Kuningan terbagi menjadi beberapa kelompok. Daerah sebelah utara, sebagian besar wilayahnya

merupakan daerah *undifferentiated Volcanic* yang sangat subur sebagai pengaruh vulkan Gunung Ciremai, sedangkan sebagian kecilnya termasuk daerah *Pliocene Sedimentary Facies*, yaitu sedimen yang dibentuk pada jaman pliosen, merupakan facies yang kurang subur. Sebelah selatan, merupakan daerah *Miocene Sedimentary Facies*, dan *Gabbro* yang tanahnya kurang subur. Daerah ini umumnya mengandung barang tambang terdiri atas pasir dan lempung. Ketiga jenis tanah ini terdapat di bagian selatan Kuningan. Secara umum, tanah di Kabupaten Kuningan terdiri atas tujuh golongan, yaitu andosol, aluvial, podsolik, grumosol, meditenan, lato-sol, dan regosol. Sekitar 33% wilayah Kabupaten Kuningan digunakan untuk daerah pertanian kering, 29% persawahan, 24% masih berupa hutan, lainnya untuk penggembalaan, perkebunan, pemukiman, dan lain-lain (Badan Pusat Statistik Kuningan, 2000).

Apabila akan melakukan perjalanan ke Kabupaten Kuningan, dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu dari Bandung melalui Kabupaten Majalengka dengan jarak 130 Km, sedangkan dari Kota Bandung melalui Kabupaten Cirebon menempuh jarak 170 Km.

Sedangkan jumlah sungai besar dan kecil termasuk anak sungainya di Kabupaten Kuningan ada 43 buah yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan perikanan, irigasi dan pengairan sawah, walaupun belum seluruhnya optimal karena masih diperlukan peningkatan teknik pengairannya. Sedangkan status jalan raya di Kabupaten Kuningan menurut kondisinya yaitu jalan propinsi sepanjang 61,3 Km dalam kondisi baik, jalan kabupaten sepanjang 396,41 Km kondisinya baik, jalan desa sepanjang 200,55 Km kondisinya baik, dan sepanjang 1,951 km dalam keadaan rusak (Badan Pusat Statistik Kuningan, 2000).

Berdasarkan penelitian sumber alam yang tersedia cukup potensial ialah jenis bahan galian seperti pasir, dan batu kapur di Kecamatan Luragung, pasir dan batu di Kecamatan Jalaksana, Cidahu, dan Cilimus.

B. Kependudukan

Berdasarkan data hasil registrasi penduduk tahun 2000 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kuningan adalah 958.753 dengan tingkat kepadatan jiwa terdiri dari 437.350 orang

laki-laki dan 446.976 orang perempuan. Delapan tahun berikutnya menurut hasil registrasi penduduk tahun 1998 jumlah tersebut telah berubah menjadi 949.452 orang terdiri dari 470.690 orang laki-laki dan 478.762 perempuan. Pertumbuhan penduduk rata-rata 1,13 % per tahun (Badan Pusat Statistik, Kuningan, 2000).

Distribusi dan kepadatan penduduk masing-masing kecamatan dapat kita perhatikan terdapat ketidakseimbangan antara distribusi penduduk dengan luas yang ditempatinya. Hal ini tercermin dari kepadatan penduduknya. Dengan sendirinya kepadatan penduduk yang semakin tinggi akan menyebabkan luas tanah garapan menjadi sempit atau habis sama sekali. Menumpuknya sebagian besar penduduk di beberapa kecamatan tertentu apabila tidak dilakukan pengaturan yang baik, cepat atau lambat akan menimbulkan masalah kependudukan dan masalah sosial lainnya. Menurut data registrasi penduduk tahun 1990, angka kepadatan penduduk di Kabupaten Kuningan adalah sebesar 791, 69 orang/ km², sedangkan tahun 1990 mengalami kenaikan menjadi 850 orang/km² (Kantor Kecamatan Ciniru, 2000).

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan yang harus dibina dan di daya gunakan dengan baik, supaya efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun bagi negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia jumlah penduduk yang besar pada umumnya dapat menjadi masalah, antara lain karena daya dukung ekonomi yang terbatas, tingkat pendidikan dan produktivitas yang rendah, serta penyebaran penduduk dan angkatan kerja yang tidak merata baik secara regional maupun secara sektoral. Penduduk Kabupaten Kuningan bertambah cukup padat dengan laju pertumbuhan sebesar 1,97% setahun dalam periode 10 tahun (1971-1980) dan menurun menjadi sebesar 1,27% pada periode 1980-1990 dan periode 1990-2000 diperkirakan menjadi 0,50% setahun. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian petani. Lainnya bekerja sebagian pedagang, buruh, dan pegawai negeri.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan agama semakin meningkat. Kebanyakan penduduk Kuningan beragama Islam yaitu 942.346 orang, Katolik 2.046 orang, Protestan 7.798 orang, Hindu 22 orang, Budha 452 orang, dan lainnya 468 orang. Pada tahun 2000 jumlah fasilitas peribadatan antara lain mesjid 690 buah, langgar 3.704 buah, mushola 1.166 buah, gereja Protestan 4 buah, gereja Katolik 6 buah, dan klenteng atau pura 1 buah.

Sarana pendidikan Agama Islam yaitu Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 78 buah, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 30 buah, Madrasah Aliyah sebanyak 9 buah, Perguruan Tinggi Islam sebanyak 1 buah, Pondok Pesantren sebanyak 76 buah, dan Madrasah Diniyah sebanyak 97 buah. Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat menunjukkan keadaan yang makin membaik yaitu Sekolah Dasar (SD) sebanyak 721 buah, SMTP sebanyak 57 buah, SMTA sebanyak 39 buah, dan Perguruan Tinggi sebanyak 2 buah (Badan Pusat Statistik Kuningan, 2000).

Masyarakat Kuningan pada umumnya memakai bahasa Sunda tetapi ada sebagian kecil yang menggunakan bahasa Jawa. Tampaknya dalam hal ini mendapat pengaruh dari Cirebon, Indramayu, dan Jawa Tengah (Brebes). Dalam hal adat istiadat tidak ada yang menonjol apabila dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Jawa Barat, kecuali di bidang seni tradisional karena memiliki keunikan. Seni tradisional yang dimilikinya antara lain Saptonan, Drama Wek-wek, Goong Rendong, Kuda Lumping, Tari Buyung, Keprongan, dan Cing Cowong. Seni budaya tradisional ini tetap terbina, terpelihara, dan dikembangkan melalui kegiatan pembinaan dan pertunjukan-pergelaran, yang bermanfaat untuk mencegah pengaruh kebudayaan asing yang negatif disamping melakukan upaya pemeliharaan benda-benda purbakala dan tempat-tempat bersejarah.

C. Arti dan Lambang daerah Kabupaten Kuningan

1. Makna Keseluruhan

Dengan modal semangat dinamis, konstruktif, sportif semangat menegakkan keadilan, melenyapkan kebatilan, sanggup berjuang, membangun dan bertaqwa kepada Allah SWT untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam NKRI.

2. Arti Unsur-unsur

Dasar

Perisai berbentuk lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlekuk/bertangga dua di tepi atas, berarti tenang,

penegak keamanan dan pancasila dan UUD 45 dan sebagai lambang keadaan yang selalu aman tentram dan sejahtera.

Kuda Jantan

Kuda Jantan melambangkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang mempunyai sifat-sifat dinamis, konstruktif kreatif sportif, semangat untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kebatilan dalam sejarah perjuangan leluhur Kuningan dan masa gerilya dalam Kabupaten Kuningan, kuda digunakan sebagai alat sarana angkutan dan juga digunakan sebagai alat perjuangan, dalam bahasa Sunda dikenal dengan istilah “Leutik-leutik Kuda Kuningan”

Gunung Ciremai

Menunjukkan letak Kabupaten Kuningan yang berada di lereng Gunung Ciremai, dengan tanahnya yang subur, udaranya nyaman dan sebagai daerah Pariwisata. Gunung Ciremai yang dikenal terbesar di Jawa Barat akan menumbuhkan rasa Nasional yang kuat.

Air Sungai

Lima gelombang air sungai melambangkan kesuburan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki 5 (lima) buah sungai besar yaitu Sungai Cisanggarung, Sungai Cijolang, Sungai Cisadane, Sungai Cijangkelok, dan Sungai Citaal.

Bokor Kuning

Bokor Kuning melambangkan sejarah lahirnya Sang Adipati Kuningan anaknya Ki Gedeng Luragung yang dipungut oleh Sunan Gunung Jati dan kelak di kemudian hari dinobatkan menjadi kepala Pemerintahan Kuningan yang pertama sesudah masuknya agama Islam di Kuningan pada tanggal 1 April 1498 masehi, Bokor Kuningan di artikan juga sebagai lambang lahirnya Pemerintah Kabupaten Kuningan pada tanggal 1 September 1948 Masehi.

Padi

Padi melambangkan kesuburan di bidang pangan.

Kapas

Kapas melambangkan kesuburan di bidang sandang.

3. *Jumlah Kesatuan Unsur*

Perisai	: 1 buah	Kuda	: 1 buah
Gunung	: 1 buah	Air Sungai	: 5 buah
Bokor	: 1 buah	Kapur	: 8 buah
Padi	: 17 buah		

Jumlah satu melambangkan kesatuan dan persatuan. Jumlah 5, melambangkan Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Kedaulatan RI, sebagai dasar dan filsafat yang hidup dalam jiwa dan perbuatan. Jumlah 17 butir Padi dan Kapas 8 buah, melambangkan tanggal dan bulan hari keramat bagi bangsa Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.

4. *Warna yang Dipakai*

1. Hijau berarti kemakmuran, kesejukan, ketenangan dan harapan.
2. Putih berarti kesucian, kebersihan, kejujuran, keadilan, dan kewibawaan.
3. Hitam berarti tegak, kuat, kebenaran, ampuh, dan teguh.
4. Biru berarti kesetiaan, ketaatan, kepatuhan, kebesaran jiwa, berpandangan luas, perasaan halus, rendah hati dan berjiwa besar.
5. Kuning emas berarti kesejahteraan, keagamaan, keagungan, keluhuran dan keluhungan.

D. **Potensi Pariwisata**

Kabupaten Kuningan adalah sebuah Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Propinsi Jawa Barat. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kuningan cukup banyak dan beragam, yang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu wisata alam pegunungan, dan wisata budaya. Wisata alam pegunungan adalah objek wisata yang mengandalkan keunikan dan keindahan alam serta pegunungan yang berudara sejuk, seperti Objek Wisata Waduk Darma, Talaga Remis, Sitonjul, dan Sangkanurip. Waduk Darma dan Sangkanurip merupakan primadona objek wisata alam di Kuningan. Sedangkan wisata budaya adalah objek

wisata yang mengandalkan keanekaragaman budaya, baik seni budaya, tradisi, maupun peninggalan sejarah. Objek wisata yang berupa peninggalan sejarah dan purbakala sering disebut sebagai wisata sejarah.

Kabupaten Kuningan memiliki andil besar dalam dunia kepariwisataan. Potensi wisatanya memiliki prospek cerah di masa depan. Kabupaten yang memiliki luas 1091 Km² ini dipengaruhi iklim tropis dengan temperatur yang bervariasi antara 15^o C - 26^o C.

Sebagai daerah wisata yang cukup kaya Kabupaten Kuningan memiliki berbagai kesenian tradisonal, upacara adat yang bermutu yang dapat memberikan sumbangan bagi kehidupan kebudayaan masyarakat Kuningan sendiri, bagi kehidupan kebudayaan suku Sunda di Jawa Barat dan pada umumnya diseluruh pelosok tanah air.

Dalam upaya meningkatkan peranan pariwisata terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pihak pemerintah daerah telah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Penyusunan RIPPDA ini bertujuan untuk memberikan gambaran pariwisata Kabupaten Kuningan yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki dan dihadapi. Disamping memberikan kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai bidang pembangunan pariwisata, termasuk langkah-langkah kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu sebagai pedoman umum dalam membangun kepariwisataan.

Rencana pembangunan objek wisata Tahap Pembangunan yaitu : Objek wisata Talaga Remis di Desa Kaduela Pasawahan, Gedung Perundingan Linggarjati Cilimus, Linggarjati Indah di Desa Linggarjati, Mandala Wisata Bandorasa Wetan - Cilimus, Kawasan Wisata Sangkanhurip, Kolam Ikan/Pemandian Cibulan Manis Kidul - Jalaksana, Taman Purbakala Cipari Cigugur, Kolam Ikan "*Kancra Bodas*" Cigugur, Bumi Perkemahan Palutungan Cisantana - Cigugur, Waduk Darma dan Kolam Darma Loka. Sedangkan pengembangan objek wisata Tahap Eksplorasi antara lain : Pasawahan, Objek Wisata Tirta dengan Panorama hutan, Hutan pinus yang dapat dijadikan perkemahan, Balong Dalem di Jalaksana, Curug Ciputri Palutungan - Cigugur, Curug Bangkong Kertawirama dan Tanjungkerta Ciwaru,

Air Panas Ciwaru. Sedangkan objek wisata Tahap Eksplorasi Khusus yaitu : Air Panas di Desa Subang, Gua Walet Ciniru, Panenjoan di Kawah Manuk Darma dan Kolam Renang Sanggar Riang Kuningan. Beberapa objek wisata yang sangat menarik di antaranya adalah sebagai berikut.

1. *Taman Purbakala Cipari*

Taman Purbakala Cipari Terletak di Kampung Cipari, Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur di kaki Gunung Ciremai. Jaraknya sekitar 4,5 km dari pusat kota Kuningan. Luas arealnya adalah 2,250 M3. Situs Purbakala Cipari ditemukan pada tahun 1972, berupa sebuah kubur batu. Penelitian secara sistematis dipimpin oleh Teguh Asmar M.A. dari Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) yang dilaksanakan pada tahu 1975. Penelitian tersebut menghasilkan temuan-temuan berupa perkakas batu, grabah, perunggu, dan bekas-bekas pondasi bangunan masa prasejarah.

2. *Linggarjati Indah*

Lokasi Linggarjati terdapat di Lereng Gunung Ciremai tepatnya di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, memiliki udara sejuk dan ditumbuhi banyak pepohonan yang berusia ratusan tahun, daerah ini sangat tepat untuk dijadikan sebagai objek wisata

Obyek Wisata Linggarjati memiliki berbagai fasilitas, antara lain kolam renang air alami, perkampungan peristirahatan modern dengan 56 villa berbentuk bangunan tradisional, kolam renang buatan bertaraf internasional, lapangan tenis, bilyar, sarana bermain anak, kolam pemancingan, danau mini, panggung terbuka perkemahan dan sarana parkir yang luas.

Objek wisata yang diresmikan Gubernur Jawa Barat Yogi. S. Memet pada tanggal 11 November 1988 ini menyerap tenaga kerja sebanyak 150 orang warga setempat. Perubahan pun terus dibenahi, kalau dulu pengunjung yang menikmati area di sini hanya bisa jalan kaki tetapi kini mereka dapat menikmatinya dengan menggunakan kendaraan.

3. *Talaga Remis*

Talaga Remis adalah sebuah danau alam yang terletak di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan, jarak dari Kota Kuningan sekitar 37 km. Nama Talaga Remis mempunyai arti tersendiri, diambil dari binatang sejenis kerang berwarna kuning yang banyak hidup di sekitar talaga dikenal dengan nama *Remis*.

Talaga Remis merupakan perpaduan antara pesona alam pegunungan hutan serta air talaga yang jernih, dan bening dengan udara pegunungan yang sejuk. Fasilitas yang tersedia adalah perahu motor, sepeda air, dan jalan setapak untuk menyusuri hutan lindung sambil menikmati jajanan yang tersedia.

4. *Gedung Perundingan Linggarjati*

Bangunan ini terletak di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus di kaki Gunung Ciremai bagian tenggara. Jarak dari Kota Kuningan kurang lebih 14 km daerah utara atau kurang lebih 26 km dari Kota Cirebon ke arah selatan.

Pada tanggal 11-15 Nopember 1946, dipergunakan sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda yang diwakili oleh PM., Sutan Syahrir dengan anggota A.K. Gani Susanto Tirtidiprojo, dan Mr. Mohamad Roem sebagai penengah adalah dari Kerajaan Inggris yang diwakili oleh Lord Killearn. Dari perundingan tersebut menghasilkan naskah Perjanjian Linggarjati yang terdiri dari 17 pasal, selanjutnya di tanda tangani di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1945.

5. *Sangkanurip Alami*

Terletak di Desa Sangkanurip Kecamatan Cilimus dengan jarak kurang lebih 12 km dari Kota Kuningan ke arah utara atau kurang lebih 23 km dari Kota Cirebon ke arah selatan. Sangkanurip alami merupakan sebuah tempat rekreasi dengan pemandian air panas alami beryodium dalam kamar tertutup dan sebuah kolam air panas terbuka serta kolam air dingin.

Di sekitar Sangkanurip alami tersedia Hotel Melati maupun berbintang dengan spanya serta restoran yang terkenal dengan ikan bakarnya.

6. *Wisata Pedesaan Sitonjul Sangkanurip*

Wisata pedesaan Sitonjul Sangkanurip terletak di Pedesaan Sangkanurip Kecamatan Cilimus yang meliputi Dusun Simenyan, Tonjong, dan Munjul. Jarak dari Kota Kuningan sekitar 13 km ke arah utara atau kurang lebih 24 km dari arah Kota Cirebon ke arah selatan.

Wisata Pedesaan Sitonjul Sangkanurip adalah wisata yang dilakukan dengan berjalan kaki sepanjang kurang lebih 4 km menyusuri alam pedesaan dengan disuguhi pesona:

- Suasana kehidupan pedesaan bebas kehidupan
- Keragaman hayati
- Rona alam yang indah
- Suasana air yang mendesir
- Putihnya air terjun bendung katiga
- Udara Sejuk segar bebas polusi
- Kegiatan petani sehari-hari
- Menyebrang sungai atau mandi, dll.

7. *Cibulan*

Kolam Cibulan terletak di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana di tepi jalan raya Kuningan-Cirebon. Jarak dari Kota Kuningan kurang lebih 7 km ke arah utara atau dari Kota Cirebon kurang lebih 28 km ke arah selatan. Kolam Cibulan merupakan sumber air yang cukup besar dihuni oleh ikan kancra bodas, sebagian masyarakat menyebutnya ikan kramat atau ikan dewa.

Disekitar kolam itu tumbuh pohon-pohon tropis yang rindang dan menyejukkan. Di tempat ini banyak terdapat *patilasan-patilasan* yang konon kabarnya merupakan patilasan “Prabu Siliwangi”. Patilasan tersebut antara lain Sumur Tujuh, merupakan 7 buah sumur kecil (mata air) yang diberi nama Sumur Kajayaan, Sumur

Kamulyaan, Sumur Pangabulan, Sumur Cirancana, Sumur Cisadane, Sumur Kamudahan, dan Sumur Keselamatan. Kolam ini dibangun tahun 1960, sejak itulah ikan *Dewa* itu menjadi penghuni kolam renang dan menjadi teman berenang.

8. *Waduk Darma*

Terletak di sebelah barat daya dari Kota Kuningan, tepatnya di Kecamatan Darma pada lintasan jalan raya Cirebon-Kuningan-Ciamis. Luas arealnya adalah 425 ha dengan kapasitas genangan air maksimal 39.000.000 meter kubik. Jarak dari Kota Kuningan kurang lebih 12 km dan dari Kota Cirebon kurang lebih 37 km.

Waduk Darma disamping berfungsi sebagai bendungan juga sebagai tempat rekreasi yang mempesona. Fasilitas yang tersedia adalah areal kemping, kolam renang anak-anak, perahu motor, cottage, dll

9. *Balong Keramat Darmaloka*

Terletak di Desa Darma, Kecamatan Darma, berada di tepi lintasan jalan Cirebon-Kuningan-Ciamis. Dari Kota Kuningan jaraknya kurang lebih 13,5 km ke arah selatan atau kurang lebih 48 km dari Kota Cirebon juga ke arah selatan. Konon Balong Keramat Darmaloka merupakan bekas peninggalan jaman Walisongo dalam rangka penyebaran agama Islam ratusan tahun yang lalu.

Balong keramat Darmaloka terdiri atas beberapa bagian yaitu: Balong Ageung, Balong Bangsal, Balong Beunteur, Balong Kambang, dan Sumber Air Cibuang. Balong Keramat Darmaloka juga dihuni oleh ikan kancra bodas atau ikan dewa. Disekeliling kolam banyak ditumbuhi pepohonan tropis yang berusia tua.

10. *Gua Walet Ciniru*

Gua Walet di Desa Ciniru Kecamatan Ciniru merupakan salah satu potensi wisata di Kabupaten Kuningan yang masih terpendam. Lokasinya hanya 100 m dari tepi jalan raya Ciniru. Sedang jarak dari Desa Ciniru sekitar 500 m dan jarak dari Kota Kuningan ke arah timur-selatan sekitar 16 km. Meski jauh dari kebisingan kota, Gua Walet yang dikelilingi hutan seluas 4 hektar itu memiliki daya tarik tersendiri, serta didukung potensi alam yang masih alami ini sering

dikunjungi wisatawan lokal, terutama kalangan anak muda yang melakukan olah raga panjat tebing.

Pada masa gerombolan DI/TII Gua Walet sering dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian. Bahkan menurut tradisi lisan yang beredar di masyarakat bahwa pada jaman dulu gua tersebut merupakan tempat persembunyian Pangeran Sapiring yaitu seekor ular raksasa siluman. Penduduk setempat terkadang secara kebetulan pada waktu-waktu tertentu melihat langsung ular tersebut, namun ular tersebut tidak pernah mengganggu.

Gua yang juga dikenal dengan nama Gua Panitis ini memiliki ciri tersendiri. Selain memiliki lubang yang besar dan kecil juga terdapat stalangit dan stalagtit. Melihat bentuknya yang artistik, Gua Walet merupakan situs Purbakala yang kini terdaftar di Kantor Depdiknas Kabupaten Kuningan. Potensi yang masih terpendam itu merupakan aset pemerintah daerah yang memiliki prospek bagi kepariwisataan Kabupaten Kuningan.

E. Potensi Ekonomi, Sosial dan Budaya

Laju pertumbuhan ekonomi daerah selama Pelita V berdasarkan harga konstan rata-rata 3,33% (1997), sedangkan pada tahun 1998 menurun menjadi -5,66%. Struktur perekonomian daerah didominasi oleh sektor pertanian 38,50%, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran 27,05%, angkutan dan komunikasi 5,11%, bangunan dan konstruksi 5,39% serta industri pengolahan 2,37%. Menyusul pendapatan perkapita menurut data terakhir sebesar Rp.1.618.125 (1998) berdasarkan harga berlaku.

Kabupaten Kuningan masih mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan perkapita di masa mendatang mengingat masih terdapat potensi yang belum di dayagunakan secara optimal, seperti sektor pariwisata, industri, perdagangan, angkutan, dan pertambangan. Perusahaan industri terdiri dari industri rumah tangga, industri kecil dan kerajinan yang secara relatif telah mengalami peningkatan peran dalam mendukung perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat, namun masih memerlukan pembinaan khusus dalam perbaikan kemasan. Sektor perdagangan yang di dalamnya termasuk hotel dan restoran merupakan

sektor yang memberikan kontribusi kedua setelah pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang masih memerlukan penanganan dan peningkatan, khususnya di dalam daya saing mutu dan profesionalisme pengelolaan.

Kondisi prasarana perhubungan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antara ibu kota kecamatan dan sebagian desa-desa yang berpotensi sosial ekonomi cukup tinggi telah mengalami perbaikan. Pemanfaatan bahan tambang masih terbatas pada bahan galian golongan C seperti pasir, tanah urug, dan kapur yang masih dikelola secara tradisional. Sedangkan bahan tambang lainnya masih belum dieksploitasi.

Lembaga perekonomian, khususnya koperasi, sebagian telah berperan dalam perekonomian daerah dan sebagian lagi masih memerlukan pembinaan, terutama dalam hal organisasi dan manajemen serta bidang usaha koperasi.

Pemanfaatan air permukaan sebagian besar untuk keperluan pertanian sedangkan untuk keperluan industri masih terbatas. Dengan demikian pemanfaatan air yang berdaya guna dan berhasil guna untuk keperluan, baik pertanian, maupun non pertanian, di masa yang akan datang diharapkan akan dapat memberikan andil terhadap usaha peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat. Menurut data akhir tahun 1994 terdapat desa tertinggal sebanyak 56 desa dengan jumlah penduduk miskin 95.575 jiwa atau sekitar 10,6% dari jumlah penduduk.

Sebelum krisis, kondisi perekonomian Kabupaten Kuningan cukup stabil dan pertumbuhannya senantiasa positif. Laju pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun terakhir tercatat :

- 1995 sebesar 3,37%
- 1996 sebesar 7,01%
- 1997 sebesar 3,33%

Sedangkan pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi sebesar - 5,66%. Struktur perekonomian Kabupaten Kuningan masih bertumpu pada sektor pertanian. Hal ini dapat dipahami karena Kabupaten Kuningan merupakan daerah agraris.

Dampak krisis terasa pula pada sektor industri kecil/home industri. Pada tahun 1996 masih terdapat 32 jenis dengan jumlah 7.301 unit usaha yang menyerap tenaga kerja seluruhnya 13.137 orang, pada tahun 1997 menurun menjadi 6.747 unit usaha, namun ada penambahan penyerapan tenaga kerja pada unit usaha yang masih bertahan. Jumlah tenaga kerja yang terserap menurut catatan tahun 1997 mencapai 13.234 orang.

Sementara itu, pada tahun 1998/1999 sektor industri kecil/home industri seperti makanan, minuman, pengolahan tembakau, industri kayu, bambu, rotan, industri percetakan termasuk industri mesin kimia dan aneka, mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Dari jumlah unit usaha secara keseluruhan tercatat 8.547 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja 21.053 orang. Sedangkan nilai investasinya mencapai sebesar Rp. 6.7 milyar lebih.

Kondisi kehidupan sosial ekonomi rakyat di beberapa tempat ada yang memprihatinkan. Harga bahan kebutuhan pokok dan obat-obatan hampir tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Taraf hidup rakyat menurun, kualitas hasil didik kurang memberikan harapan dan ada penurunan jumlah yang tidak melanjutkan sekolah dari tingkat SD ke SLTP. Walaupun demikian, penurunan perekonomian di Kabupaten Kuningan tidak terlalu drastis karena tertolong oleh berbagai program jaring pengaman sosial yang diluncurkan oleh pemerintah.

Komoditi unggulan

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Kuningan dititik beratkan pada pembangunan ekonomi, yang diarahkan dan dikembangkan melalui intensifikan dan diversifikan produksi, untuk mewujudkan struktur ekonomi pertanian yang menunjang Agro Industri dan Agro bisnis. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan rasional dan pembangunan Jawa Barat. Sementara ini, pola "*one Village one product*" yang dipadukan dengan pola "tanam petik olah jual" telah menghasilkan 62 komoditi unggulan, yang diantaranya telah menambah pasar ekspor seperti bola sepak.

Komoditi 62 unggulan itu, menurut nilai skor dan ranking komoditi unggulan yaitu : bawang goreng, bunga kenanga, rambutan walaha,

tape ketan, gemblong, emping melinjo, sayuran, kacang banten, ubi jalar, jeruk nipis, bola sepak, ranginang, tapioka, nata De Coco, keripik gadung, kopi, kentang, wortel, ikan kripi (pisang singkong dan ubi), kerupuk, salak, jagung, tanaman obat keluarga, kecap/saos, minyak daun nilam, kacang tanah, tepung ubi jalar (boled), wajit ketan, pisang, leupeut/koecang/kupit, jamur, konveksi, teknologi tepat guna, industri tahu tempe, gula merah/Aren, opak ketan, ubi kayu, mangga, mebelair, peternakan, bata merah, dage, batu cincin, cuwing, sate kulit, pabrik kayu, sale pisang, kue, pandai besi, kompor, durian dan telur. Sedang komoditi unggulan lainnya yakni : nangka, manggis, tegel, industri tikar, anyaman bambu, kerajinan tangan, baso, eternit serta pembuatan kapur.

Pemerintah Kuningan pada tahun 1998 berhasil menetapkan perwilayahan sentra-sentra komoditi unggulan. Penerapan perwilayahan sentra-sentra komoditi pertanian tersebut berdasarkan pada analisa potensial kesediaan lahan dan analisis lokalisasi serta spesialisasi wilayah, secara makro sentra perwilayah unggulan tanaman dapat diidentifikasi penyebarannya pada berbagai wilayah administratif dengan lebih spesifik.

Berdasarkan perkembangan kondisi yang telah ada serta dikaitkan dengan potensi daerah berdasarkan hasil identifikasi, maka sentra-sentra produksi komoditi unggulan serta industri pengolahan lahan wisata argo yang memungkinkan dapat dikembangkan dan di Kabupaten Kuningan antara lain :

1. Pengembangan Sentra Komoditi Padi
2. Pengembangan Sentra Komoditi Jagung
3. Pengembangan Sentra Komoditi Kedele
4. Pengembangan Sentra Komoditi Ubijalar
5. Pengembangan Sentra Komoditi Bawang Merah
6. Pengembangan Sentra Komoditi Bawang Daun
7. Pengembangan Sentra Komoditi Jahe
8. Pengembangan Sentra Komoditi Kumis Kucing
9. Pengembangan Sentra Komoditi Jeruk Nipis
10. Pengembangan Sentra Komoditi Mangga
11. Pengembangan Sentra Komoditi Sapi Peras
12. Pengembangan Sentra Komoditi Sapi Potong
13. Pengembangan Sentra Komoditi Ikan Mas dan Nila Gift
14. Pengembangan Sentra Komoditi Melinjo dan lain-lain ♦

BAB III

TERBENTUKNYA KABUPATEN KUNINGAN

A. Kuningan dari Masa Kemasa

PADA tanggal 2 Februari 1908 *Reeglement op het beheer van Cheribonsche Landen* (peraturan tentang pemerintahan di wilayah Cirebon) yang menetapkan bahwa secara politik para Sultan di Cirebon (Kasepuhan, Kanoman dan Kacirebonan) tidak memiliki kekuasaan lagi, karena kedudukan mereka diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam pada itu, wilayah Cirebon dibagi menjadi 2 bagian yang masing-masing disebut *prefectuur*. Bagian sebelah utara disebut wilayah Kesultanan Cirebon yang meliputi daerah-daerah Kuningan, Cirebon, Indramayu dan Gebang. Bagian sebelah selatan yang disebut tanah-tanah priangan Cirebon (*Cheribonsche Preanger Landen*) yang meliputi Kabupaten Limbangan, Kabupaten Sukapura, dan Kabupaten Galuh. Kedua prefect tersebut masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Prefect (Edy S Ekdjati, 1991: 231)

Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 1909, ditetapkanlah wilayah prefect Kesultanan Cirebon yang dibagi atas tiga daerah yang masing-masing dikepalai oleh salah seorang sultan sepuh, ketiga daerah tersebut adalah :

1. Daerah Cirebon dan Kuningan, yang dikepalai oleh Sultan Sepuh ke 7 Pangeran Tajal Arifin Johanuddin yang memerintah selama 25 tahun.

2. Daerah Majalengka, yang dikepalai oleh Sultan Anom ke 6 Pangeran Raja Mohammad Komarudin I yang memerintah selama 27 tahun.
3. Daerah Indramayu yang dikepalai oleh Sultan Kacirebonan yang memerintah selama 6 tahun selanjutnya wilayah prefectuur Kasultanan Cirebon itu dibagi ke dalam 12 distrik yaitu, Losari, Gebang, Panjalu, Talaga, Kuningan, Cikaso, Matang Aji, Rajagaluh, Sindangkasih, Bengawan Wetan, Bengawan Kulon, dan Paparean.

Apabila menengok ke belakang, Kabupaten Kuningan sekarang, semula berada di bawah pemerintahan Seuweukarma atau Raja Sang Kuku. Raja Sang Kuku pernah membuat iri raja Galuh Timur yaitu Sanjaya, dan Sanjaya pun berusaha untuk menguasai Kerajaan Kuningan. Ternyata keinginan Sanjaya terkabul sehingga Sanjayapun berhasil memerintah Kerajaan Kuningan selama 9 tahun. Setelah Sanjaya meninggal pemerintahan diteruskan oleh putranya yaitu Rahiang Tamperan. Tapi sayang saat Kuningan di bawah pemerintahan Tamperan ini terjadi keributan karena kakak beradik putra raja berebut ingin jadi raja. Setelah wilayah Kuningan dianggap agak luas, Rahiang Tamperan membagi wilayahnya menjadi dua, sebelah timur dipegang Sang Manarah, sedangkan Rahiang Banga diberikan wilayah asal Kerajaan Kuningan. (Pikiran Rakyat, 3 September 1995 : 8)

Hari jadi Kabupaten Kuningan sendiri ditetapkan pada tanggal 1 September yang diambil dari kelahiran Adipati Kuningan. Sang Adipati adalah anak angkat Sunan Gunung Jati bersama istrinya Ong Tien (puteri China). Adipati Kuningan inilah yang mengembalikan nama pemerintah dari Kajene ke nama asal "Kuningan". Daerah Kabupaten Kuningan yang sekarang sudah mengalami pengembangan, meliputi 5 wilayah pembangunan yaitu :

1. Wilayah pembangunan Kuningan yang terdiri dari Kecamatan Kuningan, Garawangi, Ciniru, Jalaksana, dan Kramatmulya.

2. Wilayah pembangunan Kadugede, yang terdiri dari Kecamatan Kadugede, Darma, Selajambe, dan Subang.
3. Wilayah pembangunan Cilimus, yang terdiri dari Kecamatan Cilimus, dan Mandirancan.
5. Wilayah pembangunan Luragung, yang terdiri dari Kecamatan Luragung, Lebakwangi, dan Ciawigebang.
6. Wilayah pembangunan Cibingbin yang terdiri dari Kecamatan Cibingbin, dan Ciwaru (Sekwilda II Kuningan, 1989 : 138).

1. Peninggalan Jaman Prasejarah

Sejak beberapa abad yang lalu daerah Kuningan telah menjadi daerah pemukiman manusia. Hal ini terbukti dengan ditemukannya peninggalan benda-benda arkeologis yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan. Peninggalan-peninggalan arkeologi itu terdiri dari alat-alat dan benda-benda yang dibuat dari batu, seperti kapak-kapak persegi, belincong, menhir, peti mayat, punden berundak-undak, arca, lumpang dan benda-benda yang merupakan kereweng-kereweng, gelang dan lain-lain. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa daerah Kuningan telah didiami oleh manusia sejak masa neolitik. Pada masa itu berkembang suatu kebudayaan yang dikenal dengan kebudayaan megalitik (batu besar) yang merupakan akar kebudayaan Indonesia pada jaman berikutnya (Ali Emran, 1978 : 13)

Unsur-unsur kebudayaan megalitik adalah :

- Menhir

Tiang atau tugu dari batu besar yang merupakan tanda peringatan dan melambangkan nenek moyang yang telah meninggal.

- Dolmen

Meja dari batu yang besar yang berkakikan menhir .

- **Sarcophagus**

Peti mayat dibuat dari sebuah batu tunggal yang mempunyai tutup yang dibuat dari batu tunggal pula.

- **Peti mayat**

Peti mayat yang dibuat dari batu besar yang terlebih dahulu dibuat menyerupai papan-papan.

- **Punden Berundak**

Bangunan yang disusun bertingkat-tingkat yang makin keatas makin kecil, sehingga merupakan piramida.

- **Tahta Batu**

Sebuah batu besar yang pipih dan diletakkan horizontal di atas batu-batu vertikal, digunakan sebagai tempat duduk untuk orang-orang terkemuka dan juga untuk arwah orang-orang yang telah meninggal.

- **Arca-arca**

Sebuah benda yang terbuat dari batu, yang dipahat menyerupai manusia atau binatang.

Beberapa penemuan yang didapat di wilayah Kabupaten Kuningan diantaranya berupa peti-peti mayat dari batu yang ditemukan di Cipari dan Panawar Beas, di wilayah Kecamatan Kuningan. Di Desa Cibuntu dan Desa Saurip yang termasuk wilayah Kecamatan Mandirancan, terdapat punden berundak-undak. Penggalian di Cipari yang dikerjakan oleh Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) pada tahun 1972 menghasilkan penemuan benda-benda lain, berupa gelang batu setengah bulat dan kapak persegi. Benda-benda tersebut, semuanya ditemukan di luar peti mayat. Pada kedalaman tanah 30 cm dari permukaan tanah dengan jarak 5 meter ditemukan kumpulan berbagai bentuk barang-barang tembikar antara lain: periuk, kendi, dan mangkok sayuran. Pada kedalaman tanah 1 meter hampir sejajar dengan ketinggian peti mayat, ditemukan sebuah periuk utuh yang tidak berhias dan didekatnya terletak sebuah kapak perunggu kecil yang telah rapuh. Kapak perunggu dari Cipari inilah yang merupakan satu-satunya unsur logam yang ditemukan di Kuningan.

Pada peti-peti mayat yang diangkat oleh Pangeran Jati Kusumah dari sawah di Desa Panawar Beas pada akhir tahun 1974 ditemukan kapak persegi, serpihan keramik, dan gelang-gelang dari batu. Di sini unsur logam sama sekali tidak ditemukan. Kapak-kapak persegi ditemukan pula pada peti-peti mayat yang ditemukan di Cibuntu, yang digali oleh Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional pada tahun 1967.

Peninggalan-peninggalan kebudayaan neolitik dan megalitik pada umumnya berlokasi di kaki dan di lereng timur Gunung Ciremai. Hal itu menunjukkan bahwa bagian barat daerah Kuningan merupakan daerah pemukiman manusia yang tidak berisi tulang berulang manusia. Hal ini sangat mengherankan tetapi bagaimanapun peti-peti dari batu ini berhubungan dengan orang-orang yang telah meninggal karena peti-peti batu ini disertai dengan bekal-bekal kubur seperti kendil, mangkok sayur, dan lain-lain.

2. Masuknya Pengaruh Kepercayaan dan Agama Hindu

Di wilayah Kabupaten Kuningan ditemukan peninggalan prasejarah yang menunjukkan adanya pengaruh kebudayaan Hindu di sini. Peninggalan prasejarah tersebut, misalnya batu lingga, yoni, dan reruntuhan candi di bukit Sangiang di Sagarahiang dalam keadaan yang tidak utuh lagi. Dalam kepercayaan Hindu, benda lingga dipandang sebagai perwujudan dari Dewa Syiwa, yang melambangkan kelamin laki-laki, sedangkan Yoni adalah perwujudan sakti Dewa Syiwa yang melambangkan kelamin perempuan. Keduanya merupakan lambang terciptanya alam semesta dan kesuburan. Konsep kultus lingga yang dilakukan di dalam candi dan didirikan di puncak bukit atau gunung tersebut, telah biasa dilakukan oleh raja-raja Tarumanagara, yaitu Raja Jayawarman II pada pertengahan abad ke IX masehi. Hal ini berarti bahwa kultus lingga dalam candi di atas bukit telah lazim dilakukan di Jawa, sebagaimana dibuktikan dengan adanya prasasti Canggal di Jawa Tengah tahun 723 Masehi (Marwati Joened P., 1992 : 89).

Prasasti Canggal ditemukan di halaman reruntuhan percandian di atas Gunung Wukir. Dalam prasasti ini disebutkan, bahwa pada

tahun 732 Masehi Raja Sanjaya telah mendirikan sebuah lingga di atas bukit Shirangga di Kunjarakunja. Tidak diragukan lagi, bahwa prasasti itu erat hubungannya dengan reruntuhan candi tersebut. Adanya pendirian lingga itu tentu berhubungan dengan berdirinya sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Mataram. Pendirian lingga juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kegiatan upacara keagamaan dalam Agama Hindu.

Demikian pula dengan lingga di Sagarahiang yang terletak di puncak sebuah bukit. Apabila dikaitkan dengan konsep lingga di atas dapat kita duga, bahwa peninggalan arkeologi di Sagarahiang adalah bekas sebuah candi. Walaupun dugaan ini benar, sudah tentu candi tersebut merupakan candi tertua yang berukuran kecil dan dibuat dari bahan-bahan yang mudah rusak seperti kayu, bambu dan sebagainya.

Peninggalan-peninggalan sejarah berupa artefak seperti yoni, lingga, arca dan sebagainya di atas dapat dijadikan sebagai sumber dalam mengungkap sejarah masa silam daerah Kuningan yang tidak tertulis. Sedangkan sumber tertulis mengenai sejarah Kuningan dapat dicari dari naskah-naskah lama, antara lain naskah “Carita Parahiyangan” yang diperkirakan berasal dari abad ke-16 Masehi.

3. *Kuningan Menurut Naskah Carita Parahiyangan*

Pada tanggal 23 Maret 612, Wretikandayun mendirikan Kerajaan Galuh, sebagai bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Tetapi pada tahun 670 Wretikandayun melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Tarumanagara menjadi kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Sejak saat itu Kerajaan Tarumanagara pecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Galuh yang diperintah oleh Raja Wretikandayun dan Kerajaan Sunda yang diperintah oleh Raja Tarusbawa, sebagai penerus Tarumanagara. Dengan berdirinya dua kerajaan tersebut maka hapuslah nama Kerajaan Tarumanagara (P. Jatikusumah, tth: 4)

Wretikandayun yang bergelar Rahiangta Menir mempunyai tiga orang putra. Putera sulung bernama Rahiang Sempakwaja, karena giginya yang ompong sejak lahir maka tidak dicalonkan menjadi raja.

Ia menjadi Resiguru dan diberi daerah di kaki Gunung Galunggung. Putra yang kedua bernama Jantaka bergelar Rahiangta Kidul yang menderita hernia, oleh sebab itulah iapun tidak dicalonkan menjadi raja. Ia diberi daerah kekuasaan di daerah selatan Galuh yang berpusat di Denuh. Putra bungsu bernama Rahiangta Mandiminyak yang tidak mengalami kelainan secara fisik. Dia dinobatkan sebagai Rajaputera yang mempersiapkan untuk menjadi Raja Galuh menggantikan ayahhandanya Raja Wretikandayun (Khasan Efendi, 1994: 17).

Sempakwaja menikah dengan Pwah Rababu yang berputera dua orang, yaitu Purbasora dan Demunawan. Purbasora menikah dengan Citra Kirana puteri Raja Resi Padma Hariwangsa, Raja Kerajaan Indraprahasta di Kuningan. Demunawan menikah dengan Pwah Sangkari, puteri Raja Pandawa dari Kerajaan Kuningan. Pada tanggal 11 April 732 Masehi mertuanya Raja Pandawa melepaskan tahta Kerajaan Kuningan dan digantikan oleh Demunawan sebagai Raja Kuningan, dengan gelar Seuweukarma atau disebut pula Rahiangta Kuku (Sang Kuku). Pada masa Seuweukarma Kerajaan Kuningan lebih dikenal dengan nama Arile atau Saunggalah karena Raja bersemayam di tempat itu (Pangeran Jatikusumah, tth: 4).

Adanya kekuasaan Seuweukarma di Kuningan itu atas perintah ayahnya Dangiang Guru, yang sebelumnya Seuweukarma sebagai Raja Galuh. Seuweukarma adalah penganut agama Sanghiang (Agama Hindu) dan memilikiajian Dangiang Kuning. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Seuweukarma berpedoman kepada ajaran Dangiang Kuning, yaitu ajaran kebenaran tertinggi di bidang kerohanian mengenai kasih sayang kepada manusia. Selainajian Dangiang kuning, Seuweukarma berpegang teguh kepada ajaran “Sanghiyang Siksa” dan “Sanghiyang Darma.” Ketiga ajaran ini berisi pedoman hidup yaitu :

1. Tidak membunuh mahluk hidup
2. Tidak mencuri
3. Tidak berjinah
4. Tidak berdusta
5. Tidak mabuk

6. Tidak makan bukan pada waktunya
7. Tidak menonton, menari, menyanyi, dan bermain musik
8. Tidak mewah dalam berpakaian
9. Tidak tidur di tempat yang empuk
10. Tidak menerima emas dan perak (Ali Emran, 1978: 28)

Seuweukarma bertahta cukup lama. Dalam pemerintahannya Seuweukarma timbul persaingan dengan Sanjaya yang memegang kekuasaan di Kerajaan Galuh. Sanjaya hanya memerintah Galuh selama 9 tahun dan digantikan oleh puteranya Rahiang Tamperan. Rahiang Tamperan berputera dua orang, yaitu Sang Manarah dan Rahiang Banga. Setelah dewasa, keduanya berselisih paham untuk memperebutkan kekuasaan orang tuanya, sehingga Kerajaan Galuh dibagi dua. Sang Manarah menjadi raja di sebelah timur, sedangkan Rahiang Banga menguasai Kuningan yang dahulu di bawah kekuasaan Rahiangtang Kuku.

Setelah berakhirnya kekuasaan Rahiang Banga, tepatnya sejak tanggal 22 Juli 175 Masehi Kuningan dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Rakean Darma Siksa, putera kedua belas Rahiang Banga. Pada tahun ke-12 masa kekuasaannya maka pusat pemerintahan di Saunggalah dipindahkan oleh Rakean Darma Siksa ke Pakuan Pajajaran. Dia bertahta selama 110 tahun.

Pada masa selanjutnya, Kuningan menjadi bagian Kerajaan Pajajaran dan namanya diganti menjadi Kajene di bawah kekuasaan Aria Kamuning. Kajene artinya kuning atau emas. Oleh karena itu, daerah ini dikenal dengan nama Kuningan. Pemakaian nama Kuningan ini terjadi sejak tanggal 11 April 732 Masehi pada masa pemerintahan Aria Kamuning dan terus digunakan hingga sekarang (Ali Emran, 1978: 29).

4. *Kuningan Setelah Masuknya Agama Islam*

Pada masa sebelum kedatangan Agama Islam, daerah Kuningan termasuk bagian Kerajaan Sunda, masyarakatnya menganut Agama Hindu. Kerajaan Sunda yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran, daerah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat,

termasuk Cirebon Larang (Caruban Larang). Daerah Cirebon Larang meliputi daerah Cirebon Pasisir dan Cirebon Girang. Pusat Cirebon Pasisir adalah Pasambangan dengan pelabuhannya yang disebut Muara Jati yang terletak di sebelah timur Gunung Jati, sedangkan Cirebon Girang berpusat di Wanagiri, sekarang disebut Wanasaba (P.S. Sulendraningrat, tth: 18)

Pelabuhan Kerajaan Pajajaran pada waktu itu, yaitu Cirebon, Indramayu, Karawang, Sunda Kelapa, dan Banten. Cirebon di bawah kepemimpinan Ki Gedeng Jumajanjati maka pelabuhan Muhara Jati berkembang menjadi pelabuhan yang ramai. Ki Gedeng Jumajanjati adalah putra Ki Gedeng Kasmaya, dari Cirebon Girang.

Pada masa Ki Gedeng Jumajanjati datang rombongan pelaut Cina dibawah pimpinan Te Ho ke Muhara Jati. Kedatangan mereka disambut Ki Gedeng Jumajanjati yang memandang Te Ho sebagai utusan dari kerajaan di seberang lautan. Ki Gedeng Jumajanjati mengharapkan adanya hubungan dengan kerajaan Cina berjalan dengan baik, sehingga akan menarik pedagang-pedagang Cina untuk berdagang di pelabuhan Muhara Jati.

Laksamana Te Ho memerintahkan anak buahnya untuk membuat mercusuar (menara) di atas bukit Amparan Jati. Mercusuar ini dapat dilihat dengan jelas dari laut sehingga memudahkan kapal-kapal dagang asing yang akan berlabuh ke Muhara Jati. Tanda terima kasih Ki Gedeng Jumajanjati pada mereka maka dia memberikan perbekalan selengkapnya kepada pelaut Cina itu.

Pasambangan dengan pelabuhan Muhara Jati, tidak hanya menarik perhatian para pedagang saja, tetapi juga penyebar Agama Islam. Salah seorang ulama Islam, yaitu Syekh Idhofi (Syekh Datuk Kahfi) yang kemudian dikenal dengan sebutan Nurul Jati, datang ke tanah Cirebon dan menetap di Pasambangan. Beliau kemudian mendirikan pesantren di kaki bukit Sembung. Salah seorang murid Syekh Datuk Kahfi, yaitu Pa ngeran Walang Sungsang Cakrabuana putera Prabu Siliwangi. Setelah menunaikan ibadah haji dia mendapat julukan Haji Dul Iman, yang kemudian memimpin Pemerintahan Cirebon sebagai salah satu pendiri Kota Caruban (Cirebon).

Karawang sebagai salah satu pelabuhan Pajajaran tidak terhindar dari penyebaran Islam. Di pelabuhan Karawang datang seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanudin atau Syekh Quro yang mendirikan pesantren Quro. Ke pesantren Syekh Quro ini datang seorang ulama Islam yang bernama Syekh Maulana Akbar, yang sedang dalam perjalanan ke Pasambangan (M. Utara Abdusomad, tth : 18).

Dalam usaha mengembangkan Agama Islam Syekh Maulana Akbar, pernah singgah sebentar di tempat yang di sebut Buni Haji di daerah Luragung, dan meneruskan perjalanan sampai di daerah sekitar Kota Kuningan sekarang. Pada saat itu, Kuningan dikenal dengan nama Kajene (Kuningan) dengan penduduknya masih memeluk Agama Hindu (Agama Sanghiang).

Pusat Pemerintahan Kajene terletak di suatu daerah, oleh Syekh Maulana Akbar dinamakan Sidapurna (Sempurna). Syekh Maulana Akbar memutuskan untuk menetap dan menyebarkan Agama Islam kepada penduduk setempat. Ia berhasil memelihara hubungan baik dengan pemerintah Kajene dan dapat menarik penduduk untuk memeluk Agama Islam. Pesantren Sidapurna banyak didatangi orang untuk menuntut ilmu agama Islam. Syekh Maulana Akbar menikah dengan putri keraton Kajene dan berputera Syekh Maulana Arifin atau Syekh Arif.

Syekh Arif meneruskan pesantren Sidapurna, juga memajukan peternakan terutama peternakan kuda khas Kajene. Untuk keperluan pemukiman para santri yang sedang belajar di pesantren Sidapurna maka dibuat pemukiman yang dinamakan Purwawinangun, artinya yang pertama dibangun. Syekh Maulana Arifin menikah dengan Ratu Salawati, putri penguasa Kajene. Setelah meninggal Syekh Maulana Akbar dimakamkan di Astana Gede, Kuningan.

Syarif Hidayatullah putera Syarif Abdullah (Raja Mesir) dan Rara Santang atau Syarifah Modaim, putri Prabu Siliwangi, pada tahun 1479 Masehi menjadi kepala pemerintahan Cirebon dengan gelar Sultan Gunung Jati. Di Cirebon Syarif Hidayatullah menikah dengan Pakungwati, putri Haji Abdul Iman Cakrabuana, pendiri kota Caruban (Cirebon) yang merupakan kakak ibundanya.

Dalam usaha menyebarkan Agama Islam Syarif Hidayatullah pada tahun 1481 datang ke Luragung. Pemerintahan Luragung saat itu dipegang oleh Ki Gedeng Luragung, yang akhirnya masuk Agama Islam.

Bersama istrinya Ong Tien (putri China) maka Syarif Hidayatullah bersepakat untuk mengambil anak putra Ki Gedeng Luragung yang masih bayi. Anak tersebut diberi nama Sang Adipati dan dititipkan kepada Pangeran Aria Kamuning, seorang penguasa Kuningan, yang setelah masuk Islam ditunjuk oleh Syarif Hidayatullah sebagai kepala pemerintah Perwalian di Kajene. Pada saat Sang Adipati berusia 17 tahun maka tanggal 1 September 1498 M dinobatkan menjadi kepala Pemerintahan Kuningan, dengan gelar Sang Adipati Kuningan. Sejak saat itu nama daerah Kajene diganti dan dikembalikan pada nama aslinya, yaitu Kuningan. Penobatan Adipati Kuningan ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kuningan. Sang Adipati Kuningan menikah dengan putri Syekh Maulana Arifin dan mempunyai seorang putra bernama Geusan Ulun.

Pada saat mendengar Pangeran Aria Kamuning masuk Agama Islam, konon menurut ceritera rakyat sahabatnya yang bernama Pangeran Plumbon atau Ki Gedeng Paluambe atau Ki Gedeng Plumbon, merasa terhina dan sangat marah.

Untuk melampiaskan kemarahan, Ki Gedeng Plumbon menantang perang dengan mengirimkan Patih Aria Kiban. Pangeran Aria Kamuning menerima tantangan itu dan mengutus Dipati Ewangga. Kedua panglima perang bersama pasukannya bertemu di medan laga. Namun kedua panglima sepakat untuk tidak mengikutsertakan pasukan masing-masing, tetapi cukup dengan perang tanding antara Aria Kiban dengan Dipati Ewangga. Dipati Ewangga bersenjata keris dengan menunggang kuda bernama si “Windu”, sedangkan lawannya Aria Kiban bersenjata gada dengan menunggang gajah. Kedua senjata panglima itu merupakan senjata pusaka yang ampuh, sehingga setiap yang terkena sabetan senjata itu akan menemui ajalnya. Melihat kelincahan dan ketangkasan si Windu dalam menghindari serangan gajah tunggangan Aria Kiban, dia sempat bergumam, “Tak salah kecil-kecil kuda Kuningan.”

Perkataan itu, hingga sekarang dikenal sebagai pribahasa yang berarti, walaupun dengan modal kecil namun dengan semangat tinggi maka segala usaha akan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Dipati Ewangga menaklukkan Aria Kiban dalam pertempuran di Tegal Kacang. Hingga sekarang kuda Si Windu dijadikan sebagai lambang pemerintahan Kabupaten Kuningan.

5. *Asal-usul Nama Kuningan*

Mengenai asal-usul nama Kuningan terdapat beberapa versi berdasarkan tradisi lisan legenda Kuningan. Beberapa di antaranya adalah: Pertama adalah bahwa nama Kuningan merupakan salah satu nama wuku. Dalam kebudayaan Hindu dikenal 30 wuku, Kuningan adalah nama wuku ke-12. Wuku tersebut bersama-sama dengan wuku Galungan sampai sekarang selalu dirayakan sebagai hari raya oleh para pemeluk agama Hindu.

Menurut berita dari naskah “Carita Parahiyangan”, sejak abad ke delapan Masehi ada suatu pusat kekuatan politik di Kuningan. Pada saat itu agama Hindu sudah berpengaruh di daerah Kuningan, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa peninggalan Hindu berupa pecahan batu-batu bekas lingga dan nandi yang terdapat di beberapa wilayah di Kuningan. Penguasa yang memeluk agama Hindu, dan masyarakat pemeluk agama Hindu dapat dipastikan merayakan hari-hari penting, seperti “Hari Kuningan” itu. Kemungkinan nama wuku ini dijadikan nama daerah dengan maksud mengambil arti penting atau berkah keramat dari hari raya yang diagungkan.

Tradisi lisan kedua adalah, bahwa di daerah Ciamis dan Kuningan sendiri terdapat cerita legeda yang bertalian dengan bokor, yaitu tempat menyimpan sesuatu di dalam rumah dan sekaligus sebagai barang perhiasan yang terbuat dari logam Kuningan. Kedua cerita legenda dimaksud menuturkan tentang sebuah bokor kuningan yang dijadikan alat untuk menguji tingkat keilmuan seorang tokoh agama. Di Ciamis, dalam cerita Ciung Wanara, bokor itu digunakan untuk menguji seorang pendeta Galuh (masa Islam) bernama Ajar Sukaresi yang bertapa di Gunung Padang. Pendeta ini diminta oleh raja Galuh yang ibukota kerajaannya berkedudukan di Bojong Galuh

(desa Karangkamulyan sekarang yang terletak sekitar 12 km sebelah timur Kota Ciamis) untuk menaksir perut istrinya yang buncit, apakah sedang hamil atau tidak. Kesalahan menaksir akan berakibat pendeta itu kehilangan nyawanya. Sesungguhnya buncitnya perut putri itu dipasang bokor kuningan yang kemudian ditutupi kain sehingga tampak seperti sedang hamil. Perbuatan tersebut dilakukan semata-mata dengan tujuan untuk mengelabui dan mencelakakan pendeta saja. Dalam menaksir perut putri itu pendeta Ajar Sukaresi mengatakan bahwa putri itu sedang hamil. Raja gembira mendengar taksiran pendeta tersebut, karena dianggap salah. Segera sang raja mengeluarkan perintah agar pendeta itu dihukum mati. Ternyata tak berapa lama kemudian diketahui bahwa putri itu betul-betul hamil. Raja marah dan spontan menendang bokor kuningan, kuali, dan penjara besi yang berada di sekitar istananya. Bokor, kuali, dan penjara besi itu jatuh di tempat yang berbeda. Bokor jatuh jauh di sebelah utara. Kuali jatuh di sebelah utara pula, tetapi lebih dekat jaraknya. Penjara besi jatuh di sebelah barat. Daerah tempat jatuhnya bokor Kuningan, kemudian diberi nama Kuningan yang terus berlaku hingga sekarang.

Daerah tempat jatuhnya kuali (bahasa Sunda *kawali*) dinamakan Kawali (sekarang kota kecamatan yang termasuk ke dalam daerah Kabupaten Ciamis dan terletak antara Kuningan dan Ciamis, sekitar 65 km sebelah selatan Kota Kuningan), dan daerah tempat jatuhnya penjara besi dinamakan Kandangwesi (*kandangwesi* merupakan kosakata bahasa Sunda yang maknanya penjara besi) sebagai nama tempat di daerah Garut Selatan.

Dalam Babad Cirebon dan tradisi lisan Legenda Kuningan bokor kuningan itu digunakan untuk menguji tokoh ulama Islam (wali) bernama Sunan Gunung Jati. Jalan ceritanya kurang lebih sama dengan cerita Ciung Wanara, hanya di dalamnya terdapat beberapa hal yang berbeda. Perbedaan-perbedaan dimaksud terletak pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa, tujuan dan akibat pengujian itu, dan tidak ada peristiwa penendangan bokor. Jika cerita Ciung Wanara menuturkan gambaran zaman Kerajaan Galuh yang sepenuhnya bersifat kehinduan atau masa pra-Islam, maka Babad

Cirebon dan tradisi lisan Legenda Kuningan mengisahkan tuturan pada zaman peralihan dari masa kehinduan menuju masa keislaman atau masa proses Islamisasi. Dengan demikian, isi cerita Ciung Wanara lebih tua daripada isi Babad Cirebon atau tradisi lisan Legenda Kuningan. Cerita Ciung Wanara mengungkapkan tempat peristiwanya di Bojong Galuh, sedangkan Babad Cirebon dan tradisi lisan Legenda Kuningan mengemukakan bahwa peristiwanya terjadi di Luragung, sekarang kota kecamatan yang terletak sekitar 19 km sebelah timur kota Kuningan.

Tidak seperti dalam cerita Ciung Wanara yang penaksiran kehamilan putri itu dilatarbelakangi oleh tujuan mencelakakan pendeta Ajar Sukaresi dan berakibat pendeta itu dihukum mati, dalam Babad Cirebon dan tradisi lisan Legenda Kuningan penaksiran kehamilan itu dimaksudkan untuk menguji keluhuran ilmu Sunan Gunung Jati semata-mata dan berdampak mempertinggi kedudukan keulamaan wali tersebut. Anak yang dilahirkannya adalah seorang bayi laki-laki yang kemudian dipelihara dan dibesarkan oleh Ki Gedeng Luragung, penguasa daerah Luragung. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati menjadi Sultan di Cirebon.

Setelah dewasa bayi itu diangkat oleh Sunan Gunung Jati menjadi pemimpin atau kepala daerah Kuningan dengan nama Sang Adipati Kuningan. Jadi, dari nama jenis logam bahan pembuatan bokor itulah daerah ini dikenal dengan nama daerah Kuningan. Itulah sebabnya, bokor kuningan dijadikan sebagai salah satu lambang daerah Kabupaten Kuningan. Lambang lain daerah ini ialah kuda yang berasal dari kuda sembrani milik Dipati Ewangga, seorang panglima perang Kuningan.

Menurut tradisi lisan Legenda Kuningan yang lain, sebelum bernama Kuningan nama daerah ini adalah Kajene. Kajene, mengandung arti warna kuning (*jene* dalam bahasa Jawa berarti warna kuning). Secara umum warna kuning melambangkan keagungan dalam masyarakat Nusantara. Berdasarkan bahan bokor kuningan dan warna kuning itulah, kemudian (masa awal Islamisasi) daerah ini dinamai Kuningan. Namun keotentikan Kajene sebagai nama pertama daerah ini patut diragukan, karena menurut naskah

Carita Parahiyangan, sumber tertulis yang disusun di daerah Ciamis pada akhir abad ke-16 Masehi, Kuningan sebagai nama daerah (kerajaan) telah dikenal sejak zaman awal Kerajaan Galuh, yakni sejak akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Sementara itu, wilayah Kerajaan Kuningan terletak di daerah Kabupaten Kuningan sekarang.

Menurut cerita mitologi setempat, nama daerah Kuningan itu diambil dari ungkapan *dangiang kuning*, yaitu nama ilmu kegaiban (ajian) yang bertalian dengan kebenaran hakiki. Ilmu ini dimiliki oleh Demunawan, salah seorang yang pernah menjadi penguasa (raja) di daerah ini pada masa awal Kerajaan Galuh.

B. Proses Terbentuknya Kabupaten Kuningan

Setelah Kerajaan Tarumanagara runtuh pada akhir abad ke-7 masehi, di Tanah Sunda nuncul beberapa kerajaan kecil, antara lain Sunda, Kendan, Galuh, Galunggung, Kuningan, dan Indraprahasta. Wilayah Kerajaan Sunda terletak di bagian barat Tanah Sunda dengan ibu kota di Pakuan Pajajaran sekitar kota Bogor sekarang. Kerajaan Kendan terletak di sekitar Nagreg, bagian Timur Kabupaten Bandung. Wilayah Galuh berada di bagian timur tatar Sunda dengan pusatnya di Bojonggaluh. Galunggung terletak disekitar lereng Gunung Galunggung, Tasikmalaya sekarang. Indraprahasta berada di bagian pedalaman Cirebon di Timur Laut kaki Gunung Ciremai. Kuningan berada di daerah Kabupaten Kuningan sekarang antara wilayah Galuh dan Indraprahasta.

Sebagai kerajaan kecil tentu saja struktur pemerintahan Kerajaan Kuningan sederhana, tidak kompleks atau lengkap sebagaimana dalam sebuah kerajaan besar. Tampak sekali bahwa bentuk pemerintahan yang digunakan oleh kerajaan besar di Tanah Sunda yaitu Tarumanagara, Galuh, dan Sunda adalah federasi kerajaan besar berkedudukan sebagai penguasa pusat yang membawahi sejumlah kerajaan-kerajaan kecil di daerah-daerah Kerajaan Kuningan pernah berada di bawah pemerintahan pusat di kerajaan-kerajaan Tarumanagara, Galuh, dan Sunda. Kerajaan kecil ini menyatakan

tunduk dan setia kepada pemerintah pusat yaitu dengan cara pada waktu-waktu tertentu mengirim upeti kepada penguasa pusat, serta jika ada musuh mengancam negara wajib ikut mempertahankannya. Antara raja dan keluarganya yang berkedudukan di pemerintah pusat umumnya mempunyai hubungan kerabat dengan raja dan keluarganya di daerah-daerah (kerajaan kecil), baik hubungan darah maupun melalui hubungan pernikahan.

Untuk pergantian pemegang pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip warisan secara turun temurun. Anak terutama anak lelaki tertua mewarisi tahta ayahnya. Jika anak tertua bukan laki-laki maka turun ke anak lelaki kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jika tidak ada anak laki-laki bisa juga diturunkan kepada anak wanita.

Jika keturunannya langsung tidak ada, dapat digantikan oleh keturunan tidak langsung berdasarkan tingkat kedekatan dengan raja yang digantikannya, seperti paman, adik, keponakan atau bisa juga digantikan oleh menantu atau kerabat dekat raja berdasarkan pernikahan.

Sekitar abad ke-15 masehi di daerah Kuningan dikenal dua lokasi yang mempunyai kegiatan pemerintahan, yaitu Luragung dan Kuningan sebagai nama daerah Luragung masih dipakai hingga sekarang, yaitu sebagai nama sebuah desa, kota kecamatan dan kota Kawedanan yang terletak sekitar 19 Km sebelah timur kota Kuningan. Letak lokasi Luragung sekarang tidak banyak berubah dari letaknya dulu.

Pada saat itu Luragung dan Kuningan bukan merupakan kerajaan, melainkan suatu daerah administrasi pemerintahan. Secara formal kedua daerah tersebut masih masuk kedalam wilayah Kerajaan Sunda. Pada masa itu masyarakat kedua daerah itu yang berada di pedalaman masih dipengaruhi agama Hindu dan kepercayaan lama (animisme) yang dalam tradisi setempat disebut agama Sanghiyang.

Pada masa keadipatian dimulai dengan tampilnya tokoh Arya Kamuning, Ki Gedeng Luragung, dan kemudian Sang Adipati Kuningan. Arya Kamuning dan Ki Gedeng Luragung menjadi pe-

mimpin daerah Luragung sedangkan Adipati Kuningan menjadi pemimpin daerah Kuningan. Pada awalnya mereka berada di bawah kekuasaan Raja Sunda tetapi ketika pengaruh agama Islam mulai menyebar kekuasaan pun beralih menjadi di bawah kekuasaan Susuhunan Jati atau Sunan Gunung jati. Masa itu merupakan masa peralihan dari pengaruh agama dan kebudayaan Hindu/Budha kepada pengaruh agama dan kebudayaan Islam. Pada waktu itu Luragung dan Kuningan digabungkan menjadi satu daerah administrasi Pemerintahan Keadipatian dengan nama Kuningan. Dengan demikian Luragung menjadi bagian daerah Kuningan.

Pada waktu itu terjadi penggantian periode sejarah karena terjadinya perubahan beberapa faktor dalam kehidupan masyarakat setempat. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Agama, dari Hindu/Budha atau Sanghiyang ke Islam
2. Garis hak waris pemegang pemerintahan dari Arya Kamuning kepada Sang Adipati Kuningan.
3. Lokasi Pusat pemerintahan dari Saung Galah melalui Luragung ke Kuningan
4. Tingkat kepemimpinan dari raja menjadi bupati
5. Orientasi pengabdian dari Galuh/Sunda ke Cirebon.

Dalam tradisi lisan cerita Legenda Kuningan yang lain, maka hidup Sang Adipati Kuningan sezaman dengan dua tokoh terkenal lainnya, yaitu Arya Kemuning dan Dipati Ewangga. Ketiga tokoh tersebut merupakan tokoh yang mempunyai peranan penting dalam sejarah Kuningan masa peralihan pengaruh agama Hindu ke pengaruh Islam. Sumber dari Cirebon pun mengemukakan ketiga tokoh tersebut hidup sezaman. Bahwa Bratawijaya, Ratu Selawati dan Jayaraksa adalah bersaudara mereka bertiga putra Ranggamantri cucu Prabu Siliwangi (Prabu Niskala Wastu Kencana). Bratawijaya memerintah di Kuningan dengan gelar Arya Kemuning dan Jayaraksa memerintah di Luragung. Sedangkan Sang Adipati Kuningan, sesungguhnya bernama Suranggajaya adalah putri Ki Gedeng Luragung yang diangkat anak oleh Sunan Gunung Jati dn istrinya yang berasal dari Cina, Ong Tin Nio. Namun demikian pemeliharaan

dan pendidikannya dititipkan kepada Arya Kemuning dan masyarakat setempat, maka Suranggajaya diangkat menjadi kepala daerah di Kuningan menggantikan ayah asuhnya. Selain itu, Suranggajaya pun memiliki hak waris dari ayahnya, Ki Gedeng Luragung, untuk menguasai daerah Luragung sehingga wilayah administrasi pemerintahannya meliputi Kuningan dan Luragung yang selanjutnya disebut Kuningan, sementara itu Suranggajaya mendapat gelar Sang Adipati Kuningan atau Dipati Kuningan.

Dipati Ewangga adalah Panglima Pasukan Kuningan. Ia mempunyai seekor kuda tunggangan bernama Si Windu yang tubuhnya kecil tetapi tenaganya kuat dan larinya gesit, karena tempat menetapnya di Cangkuang 2 Km sebelah tenggara kota Kuningan, maka ia dijuluki Dipati Cangkuang. Ketika pasukan Cirebon dan Demak menyerang Banten (1526) dan Kalapa (1527), pasukan Kuningan diikutsertakan di bawah pimpinan Dipati Ewangga/ Cangkuang. Dipati Cangkuang beserta sejumlah pasukannya, juga sebagian pasukan dari Cirebon dan Demak ada yang terus menetap di Kalapa. Kota ini kemudian berganti nama menjadi Jayakarta, lalu Jakarta hingga sekarang. Mereka yang merupakan penduduk muslim pertama di kota pelabuhan tersebut memilih daerah agak pedalaman untuk tempat tinggal mereka, yaitu di lokasi yang sekarang disebut daerah Kuningan. Di lokasi tersebut terdapat kuburan yang dikeramatkan oleh penduduk setempat. Kemungkinan kuburan tersebut adalah makam Adipati Ewangga.

Sang Adipati Kuningan merupakan kepala daerah pertama yang pengangkatan dan pengesahannya dilakukan oleh Susuhunan Jati yang saat itu telah menjadi Sultan Cirebon (1479 - 1568). Dengan demikian Kuningan telah memindahkan pengakuan atasannya dari Galuh (Sunda) ke Cirebon. Hal ini berarti wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda semakin mengecil, sedangkan wilayah kekuasaan Cirebon semakin luas. Pelantikan Suranggajaya menjadi Adipati Kuningan diselenggarakan pada tanggal 4 Syura (Muharam). Penanggalan tersebut bertepatan dengan tanggal 1 September 1498 Masehi. Sejak tahun 1978 hari pelantikan Suranggajaya menjadi Adipati Kuningan itu ditetapkan sebagai hari jadi Kuningan. Penetapan tersebut berdasarkan pada pandangan bahwa :

1. Peristiwa itu merupakan satu titik yang sampai sekarang ini masih dirasakan kelanjutan dan pengaruhnya oleh masyarakat Kuningan yang memberi dukungan aspirasi bagi kemajuan daerah ini.
2. Menggambarkan terbentuknya satuan masyarakat yang teratur yang telah memiliki pemerintahan sendiri.
3. Peristiwa itu mengandung nilai edukatif tinggi yang dapat mendorong semangat generasi berikutnya untuk membangun daerah Kuningan dalam lingkup pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan sehingga hari jadi tersebut senantiasa dapat digunakan bagi membaharui semangat dan tekad rakyat Kuningan bagi kemajuan tanah tumpah darah mereka.

Dulu kegiatan pemerintahan di daerah Kuningan dipusatkan di sekitar alun-alun kota Kuningan sekarang. Hal ini sesuai dengan konsep tata kota lokasi pusat pemerintahan menurut tradisi Cirebon, bahwa pusat kota atau kegiatan pemerintah diatur sedemikian rupa sehingga bangunan tempat kegiatan pemerintahan (keraton, pendopo, kabupaten) terletak di sebelah selatan alun-alun, mesjid sebagai tempat ibadah di sebelah barat alun-alun, pasar sebagai tempat kegiatan perdagangan, di sebelah utara alun-alun, penjara sebagai tempat tahanan penjahat disebelah timur alun-alun, selanjutnya tata kota pusat pemerintahan demikian dijadikan pedoman oleh daerah-daerah di tingkat lebih bawah dalam lingkungan Kesultanan Cirebon, bahkan sampai tingkat lembaga pemerintahan paling bawah, yaitu tingkat desa. Pola tata kota pusat pemerintahan kabupaten-kabupaten di wilayah Priangan pun mengikuti tradisi Cirebon, kecuali ibukota kabupaten di Kuningan mengalami perubahan pada masa Kolonial Belanda. Pendopo kabupaten dipindahkan ke bekas kantor dan rumah dinas Asisten Residen Kuningan yang terletak di bagian utara Kota Kuningan. Asisten Residen adalah Pejabat Kolonial di tingkat kabupaten dalam struktur pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Pada saat ini bekas pendopo kabupaten lama telah dijadikan pusat pertokoan dan perkantoran yang sebelumnya berfungsi sebagai terminal bus dan lapangan sepak bola. Sampai sekarang Pendopo

Kabupaten Kuningan menempati bekas kompleks bangunan kantor dan rumah dinas Asisten Residen.

Status administrasi Pemerintahan Keadipatian mengalami perubahan ketika Dalem Mangkubumi meninggal. Hal ini terjadi karena daerah ini menjadi rebutan tiga pusat kekuasaan besar, yaitu Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram, dan Kompeni Belanda (VOC) yang berkedudukan di Batavia (Jakarta).

Pada tahun 1678, Kesultanan Cirebon pecah menjadi Kasepuhan dan Kanoman, hal ini tentu menimbulkan dampak pada pembagian daerah kekuasaan. Pada tahun 1681 Cirebon menyatakan terbuka bagi kedatangan dan kedudukan kompeni melalui perjanjian yang ditandatangani bersama. Pada awal abad ke-19 Cirebon telah sepenuhnya berada di bawah masa pemerintah Kolonial Hindia Belanda, sedangkan sultan-sultan di Cirebon hanya berstatus simbol kekuasaan terhadap rakyatnya dan dapat dikatakan menjadi pegawai atau alat pemerintah Kolonial. Situasi seperti itu membuat pemerintahan di daerah-daerah Cirebon, termasuk Kuningan menjadi terbelengkalai.

Secara garis besar daerah Kabupaten Kuningan terbagi menjadi dua wilayah administrasi pemerintahan. Bagian Barat daerah Kuningan masuk ke dalam wilayah Kesultanan Cirebon (kasepuhan) dan bagian timurnya masuk ke dalam wilayah Gebang yang sudah berdiri sendiri, terlepas dari Cirebon. Kedua wilayah administrasi pemerintahan tersebut dibatasi oleh sungai Japura dan Sungai Cisande.

Sistem pemerintahan di wilayah Cirebon tampak jelas setelah keluarnya pemerintahan yang terbit tanggal 2 Februari 1809 atas prakarsa Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels (1808 - 1811) yang disebut *Reglement op het Beheer Van de Cheribon Sech Landen* (Peraturan pemerintahan di Tanah Cirebon).

Menurut peraturan ini wilayah Keresidenan Cirebon yang dibentuk tahun 1705, dibagi menjadi dua prefektur (wilayah administratif setingkat keresidenan), yaitu Prefektur Cirebon dan Prefektur Priangan - Cirebon. Prefektur Cirebon meliputi tanah milik para Sultan Cirebon dan Pangeran Gebang. Prefektur Priangan - Cirebon meliputi

Kabupaten-kabupaten : Limbangan, Sukapura, dan Galuh. Pemerintahan dibedakan atas pemerintah Kolonial dan Pemerintahan Pribumi. Dalam lingkup pemerintahan pribumi di Cirebon di bentuk tiga Kabupaten yang dipimpin oleh tiga orang Sultan di Cirebon dengan jabatan Bupati - Wedana (Bupati Kepala). Setiap kabupaten terdiri atas empat distrik dan tiap distrik di kepalai oleh seorang berpangkat Tumenggung. Tumenggung berkedudukan di sebuah desa yang lokasinya terletak di tengah-tengah daerah distrik yang bersangkutan dan tempat kedudukan Tumenggung menjadi ibu kota (dayeuh) distrik tersebut. Kepada setiap distrik diperbantukan, orang bupati luar (wakil bupati), 1 (satu) orang Bupati dalam, 2 (dua) orang Demang, 6 (enam) orang mantri, 10 (sepuluh) orang Jaksa, 10 (sepuluh orang) Penghulu Kepala, dan 1 (satu) orang Khatib. Jaksa dibantu oleh 8 orang Jogobela, 1 orang sipir kepala, 1 orang wakil sipir, dan 4 orang upas. Khatib dibantu oleh 2 orang pembantu.

Dari 12 distrik di Prefektur Cirebon ada 2 distrik yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kuningan sekarang, yaitu distrik Cikaso dan distrik Kuningan. Kedua distrik tersebut berada di bawah pemerintahan Sultan Sepuh (kasepuhan). Distrik Cikaso memiliki 547 jung sawah dan 9.488 cacah penduduk. Sesungguhnya 300 jung sawah di dalam distrik Gebang bagian selatan (tanah pegunungan) termasuk daerah Kuningan sekarang. Selanjutnya pada tanggal 18 Nopember 1809 Daendels mengekarkan penetapan mengenai penanaman kopi di Cirebon Penduduk Cikaso dan Kuningan diwajibkan untuk setiap keluarga memelihara 1000 batang pohon kopi yang berbuah.

Pada tahun 1813 dan 1815, Raffles sebagai pelaksana pemerintahan Inggris mengeluarkan keputusan bahwa fungsi para Sultan diganti oleh Bupati-bupati yang diangkat sebagai pegawai negeri. Dalam keputusannya 5 Januari 1819 No. 23 ditetapkan pembagian Keresidenan Cirebon dan batas-batas administratif wilayah kabupaten-kabupatennya, yaitu Cirebon Bengawan Wetan, masa Kuningan, dan Galuh Kabupaten Kuningan batasnya di tetapkan sebagai berikut : Di sebelah utara batasnya di mulai dari muara sungai Cisande dan Sungai Cilosari ke udik Sungai Cisande sampai desa

Susunan kemudian ke hulu sungai Cilengkrang (Sungai Cisande) ke barat sampai Puncak Gunung Ciremai sebagai batas di sebelah utara, dari Puncak Gunung Ciremai ke arah selatan sampai Sungai Cijolang sebagai batas di sebelah barat, aliran Sungai Cijolang sampai kedaerah Kabupaten Cilacap sebagai batas disebelah selatan, serta dari titik hilir Sungai Cijolang tersebut ditarik ke utara sampai kepertemuan Sungai Cisanggarung (Sungai Cilosari) dengan sungai Cisande sebagai batas sebelah timur. Sejak itulah sesungguhnya bentuk administrasi pemerintahan kabupaten di daerah Kuningan mulai berlaku, langsung ada di bawah pemerintahan Hindia - Belanda.

C. Kuningan Setelah Menjadi Kabupaten

Di wilayah Kuningan sampai tahun sembilan puluhan abad ke-19 belum memiliki sekolah untuk pribumi. Keberadaa Pesantren mempunyai peranan penting dalam pendidikan untuk rakyat. Sekolah yang pertama didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk bangsa Indonesia di Kuningan ialah Sekolah Kelas Satu (*Eerste Klasse Inlandsche School*) pada akhir abad ke-19. Sebagai cikalbalknya adalah sebuah kursus di Kota Kuningan yang di peruntukan bagi anak bupati dan para menak, sebagai persiapan bagi anak bupati untuk menjadi bupati, dan bagi para ningrat untuk menjadi calon pegawai pemerintahan.

Untuk anak-anak dari kalangan menak dan terletak di kota-kota distrik atau Kawedanaan disediakan Sekolah Kelas Dua (*Tweede Klasse Inlandsche School*). Sekolah Kelas dua ini sering disebut Sekolah Distrik, sedangkan murid-muridnya masih dari kalangan terbatas, yaitu anak-anak dari kalangan terpandang di Kawedanaan dan Kecamatan, orang-orang desa yang dianggap berhasil, dan para Pamong Desa. Sekolah Kelas Dua di Kuningan yang pertama berdiri ialah di Kota Kuningan sekitar tahun 1905. Setahun kemudian di Kadugede Cilimus, Ciawigebang, Luragung, dan Mandirancan.

Pemerintah Hindia-Belanda kemudian mendirikan "*Volk Scholen*" sekolah yang didirikan untuk anak-anak desa. Sekolah Desa

bertujuan membuat anak desa agar bisa menulis, membaca dan berhitung. Di Kuningan Sekolah Desa baru di mulai pada tahun 1912.

Pada tahun 1914 Sekolah Kelas Satu dirubah menjadi HIS (Hollands Inlandsche School) dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dari kelas satu sampai kelas tujuh. Bagaimanapun sederhananya, pendidikan sangat penting untuk anak Indonesia.

Seharusnya, setelah melewati revolusi fisik dan berhasil merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mulai melakukan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Tetapi ternyata berbagai masalah baik politik, ekonomi, dan keamanan di daerah-daerah mulai bermunculan sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan. Demikian halnya dengan Kuningan. Berbagai peristiwa terjadi diwilayahnya, seperti Agresi Militer Belanda ke 2, Perjanjian Linggarjati, peristiwa DI/TII, ataupun peristiwa G 30 S/PKI.

Bahkan di wilayah Kabupaten Kuningan pernah terjadi adanya 2 pemerintahan yaitu pemerintahan Negara Boneka yaitu Negara Pasundan yang lahir setelah melalui 3 kali konfrensi :

1. Konfrensi Jawa Barat I yang berlangsung pada 16 Oktober 1949 di Bandung, dihadiri oleh 50 orang.
2. Konfrensi Jawa Barat II yang berlangsung di Bandung pada tanggal 16 - 20 Desember 1947, di hadiri oleh 170 orang
3. Konfrensi Jawa Barat III juga di Bandung pada tanggal 23 Pebruari 5 Maret 1948.

Yang menjadi Bupati pertama untuk Negara Pasundan di Kuningan adalah Aom Holland, kemudian di ganti oleh Asikin Yudadibrata dan Riva'i. Sebenarnya Pemerintahan Negara Pasundan tidak mendapat dukungan dari rakyat Kabupaten Kuningan, oleh karena itu 150.000,- rakyat Kabupaten. Kuningan pada tanggal 7 Agustus 1949 menyelenggarakan rapat akbar untuk menentang Pemerintahan Pasundan, bertempat di alun-alun Kuningan. Rapat raksasa yang diprakarsai para pemuda pejuang Kuningan ini melahirkan sebuah resolusi yang intinya berisi tuntutan agar Kabupaten Kuningan sesegera mungkin dikembalikan dari Negara Pasundan kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekarang setelah memasuki era reformasi walaupun masih dijumpai banyak permasalahan dan kendala, namun keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta potensi yang ada telah menciptakan faktor pendorong sebagai kondisi dinamis untuk pemecahan masalah pokok dan memberikan peluang untuk kelangsungan pembangunan berikutnya.

Faktor penunjang dan peluang dimaksud yaitu :

- Tekad seluruh aparatur dan masyarakat untuk melaksanakan otonomi secara nyata dan bertanggung jawab cukup besar.
- Secara kuantitatif, jumlah aparatur cukup memadai, demikian pula tenaga kerja yang tersedia.
- Stabilitas sosial politik dan keamanan masyarakat Kabupaten Kuningan yang relatif mantap, merupakan modal dasar dan prasyarat untuk berlangsungnya pembangunan.
- Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menunjang program pemerintah cenderung terus meningkat.
- Peranan usaha swasta dan koperasi menunjukkan potensi yang mampu meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja.
- Kondisi dan kualitas prasarana perhubungan menunjukkan kemampuan untuk mendukung perkembangan perekonomian.
- Letak geografis Kabupaten Kuningan pada lintasan jalur Cirebon-Tasikmalaya dan jalur Bandung - Majalengka - Jawa tengah melalui Ciledug atau Cibingbin sangat strategis untuk mendukung kebijaksanaan pembangunan Jawa Barat dan mempunyai peluang berkembang lebih padat karena sekaligus sebagai hinterland dari pertumbuhan Cirebon.
- Sektor industri, perdagangan, angkutan dan pariwisata menunjukkan potensi yang akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Iklim yang sejuk di sekitar Gunung Ciremai sumber air yang berlimpah, serta pemandangan alam yang indah merupakan daya tarik tersendiri untuk pengembangan pariwisata.

Laju pembangunan di Kabupaten Kuningan terus bergulir, partisipasi dan tradisi gotong royong masyarakat di pedesaan masih tetap menguat, sehingga merupakan penunjang keberhasilan yang memiliki nilai tinggi bagi kemajuan daerah secara keseluruhan, memasuki era milenium ketiga, Kabupaten Kuningan mampu memacu diri di berbagai bidang pembangunan, sehingga tidak tertinggal oleh daerah lain, khususnya di Jawa Barat.

D. Nama Kepala Pemerintahan Kuningan

1. Zaman Hindu

1. Seuweukarma
2. Sanjaya
3. Rahiyang Tamperan
4. Rahiyang Banga
5. Rakean Darmasiksa
6. Ki Gedeng Kuningan.

2. Zaman Islam

7. Pangeran Dipati Ewangga
8. Pangeran Dipati Arya Adipati Kuningan
9. Pangeran Arya Kamuning

3. Zaman Penjajahan Belanda

1. R. Brata Adiningrat
2. Doejeh Bratamidjaja
3. R. Dali Soerjangatmadja
4. R. Moch. Achmad
5. R. Umar Said.

4. *Zaman Jepang*

1. R. Umar Said.

5. *Zaman Kemerdekaan RI 1945*

1. R. Asikin Nitaatmadja

6. *Zaman Kedudukan NICA (Recomba)*

1. R. Asikin Joedadibrata
2. R. Hollan Soemadiningrat
3. R. Abdul Rivai

7. *Zaman RI 1950 s.d. Sekarang*

1. R. Noer Armadibrata
2. R. Moch hafil
3. R. Tikok Moch. Ichlas
4. R. Soemitra
5. TB. Amin Abdullah
6. Saleh Alibasuah
7. Usman Djatikusumah
8. Rd. Komar Surjanaatmadja
9. S. Soemintaatmadja
10. Aruman Wirananggapati
11. Karli Akbar
12. R.H. Unang Sunardjo, S.H
13. Drs. H. Moch Djufri Priyadi
14. Drs. H. Subandi
15. H. Yeng D.S. Partawinata SH
16. Drs. H. Arifin Setiamihardja. MM ♦

BAB IV

PENUTUP

DARI uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan antara lain :

- .. Secara historis Kabupaten Kuningan memiliki arti yang penting. Arti penting itu *Pertama*, Kabupaten Kuningan memiliki peninggalan Prasejarah yang lengkap berupa “Taman Purbakala Cipari”. *Kedua*, Kabupaten Kuningan pernah menjadi Ibukota Kerajaan Sunda. Hal itu membuktikan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki peranan yang besar dalam sejarah Jawa Barat. *Ketiga*, Kabupaten Kuningan pernah memiliki peran yang cukup besar dalam perjuangan bangsa Indonesia dengan diselenggarakannya Perundingan Linggarjati di Kabupaten Kuningan.
- .. Secara budaya, masyarakat kabupaten Kuningan telah sejak lama menerapkan “Pendekatan Multikultural” . Di Kabupaten Kuningan masyarakatnya sudah terbiasa hidup dalam perbedaan. Dalam sebuah keluarga ada yang beragama Islam, ada yang memeluk agama Kristen, dan ada pula yang menganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanpa sedikitpun menimbulkan konflik. Tingkat toleransi yang tinggi menimbulkan sikap saling menghargai.
- .. Telah disepakati bahwa hari jadi Kabupaten Kuningan adalah 1 September 1948 M. Hal ini berdasarkan hari

pelantikan Pangeran Kuningan menjadi Kepala Pemerintahan di Kuningan dengan gelar Pangeran Arya Adipati Kuningan. Sejak pemerintahan Kuningan berdiri dan tanggal hari jadinya ditetapkan tanggal 1 September 1948 M, hingga sekarang memasuki abad ke-21. Kuningan sudah berusia 5 abad lebih.

- .. Batas-batas administrasi Kadipatian Kuningan adalah ; Sebelah Utara dengan Keadipatian Cirebon, yairu batas Kali Cilengkrang yang terletak di sebelah desa Kelapa Gunung, Sebelah timur berbatasan Keadipatian Gebang yaitu, daerah Ciawigebang, Luragung dan Ciwaru. Sementara perbatasan sebelah selatan sampai daerah Subang dan Panjalu (Ciamis).
- .. Pada era tahun 1950-an kehidupan masyarakat kabupaten Kuningan menghadapi berbagai masalah politik, ekonomi, dan sosial termasuk gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII, kemudian G 30 S/PKI 1965. ♦

DAFTAR PUSTAKA

- Atja, 1968, Tjarita Parahiyangan, Bandung: *Jajasan Kebudayaan Nusalarang*.
- Atja, 1975, *Sejarah Jawa Barat : dari Prasejarah hingga Penyebaran Agama Islam*. Bandung proyek penguang kebudayaan nasional Pemerintah Jawa Barat.
- Ekadjati, Edi S. 2003. *Sejarah Kuningan*. Bandung: kiblata
- Emran, Ali dkk. 1978. *Sejarah dan Hari Jadi Kota Kuningan*, pemda kabupaten Kuningan.
- Ekadjati, Edi S, 1975. *Penyebaran Agama Islam di Jawa Barat*, dalam sejarah Jawa Barat dan masa prasejarah hingga masa penyebaran agama Islam, proyek penunjang peninggalan kebudayaan Nasional Propinsi Jawa Barat.
- Pemda Kuningan, 2000, *Kuningan menembus waktu*, Kuningan: Humas Pemda.
- Saleh Danasasmita dkk, 1983/1984. *Rintisan penelusuran masa silam: Sejarah Jawa Barat*. Bandung: proyek penerbitan Sejarah Jawa Barat pemerintah propinsi Jawa Barat.
- Sofari, M. Utara Abdusomad, *Catatan sementara perkebangan sejarah penyiaran agama Islam di kabupaten Kuningan*, berupa catatan tangan, tanpa tahun.
- Sulendraningrat. P. S, *Sejarah Cirebon*, lembaga kebudayaan 3 Cirebon, keprabonan 47 lemah wungkuk, Cirebon.

Sulendraningrat, *Purwaka Cirebon Nagari lembaga kebudayaan 3 Cirebon*, tanpa tahun.

Sulendraningrat, *Sejarah Cirebon dan Silsilah Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah*, Lembaga Kebudayaan Wilayah 3 Cirebon, tanpa tahun.

Thresnawaty dkk, Euis. 1995/1996. *Peninggalan Sejarah sebagai Objek Wisata di Kabupaten Kuningan*. Bandung: Depdikbud, Balai kajian Jawa Barat.

Thresnawaty., Euis. *Wisata Sejarah di Kuningan*, studi tentang perkembangan wisata di kabupaten Kuningan.

Werdaya. A. Tisna. 1975. *Sejarah Kuningan*, majalah mangle no 495 tahun XVIII, September.

Pemda Kuningan, 2000, *Kunngan Melintas Batas*, Kuningan : Pemda Kuningan ♦

KOTA ^{DAN} KABUPATEN DALAM LINTASAN

BANTEN
LEBAK
SUBANG
KUNINGAN



- ☒ Sejarah Kota Banten Lama
- ☒ Sejarah Kabupaten Lebak
- ☒ Sejarah Kabupaten Subang
- ☒ Sejarah Kabupaten Kuningan

ISBN 979-1142-00-9



9 789791 142007 >

Desain © AlqaPrint Jatinangor

KOTA DAN KABUPATEN
DALAM LINTASAN SEJARAH



DEPARTEMEN KEH
BALAI KAJIAN S
DAN NILAI TRAD

Perpustakaan D
Jenderal Kebu

306.0824
KOT

SATA
G